

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
12	No. 12 Tahun 1993 10 Februari 1993	Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Kawasan Industri Makassar Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1050 - 1052	
13	No. 13 Tahun 1993 12 Februari 1993	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. (LN No.11)	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1053 - 1087	
14	No. 14 Tahun 1993 15 Februari 1993	Tabungan Perumahan PNS.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1088 - 1091	Diubah dg Keppres No.46 Th.1994
15	No. 15 Tahun 1993 16 Februari 1993	Pembentukan Pengadilan Negeri di Maliana.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1092 - 1094	
16	No. 16 Tahun 1993 16 Februari 1993	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon dan Jayapura.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1095 - 1098	
17	No. 17 Tahun 1993 19 Februari 1993	Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1099 - 1100	
18	No. 18 Tahun 1993 23 Februari 1993	Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke - 10.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1101 - 1104	Diubah dg Keppres No. 89 Th.1993 Dicabut dg Keppres 110 Th.1993
19	No. 19 Tahun 1993 24 Februari 1993	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan. (LN No.16)	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1105 - 1217	
20	No.20 Tahun 1993 27 Februari 1993	Penunjukan & Penetapan sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang utk diberikan Status sbg Kawasan Berikat (Bonded Zone).	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1218 - 1220	
21	No.21 Tahun 1993 27 Februari 1993	Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1221 - 1226	Dicabut dg Keppres No.75 Th.1996
22	No.22 Tahun 1993 27 Februari 1993	Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1227 - 1230	
23	No.23 Tahun 1993 27 Februari 1993	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak -Tandes sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tol.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1231 - 1234	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
24	No. 24 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1235 - 1238	
25	No.25 Tahun 1993 27 Pebruari 1993	Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1239 - 1241	
26	No.26 Tahun 1993 8 Maret 1993	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 51 Th 1992 ke Dalam PP No.15 Th.1993.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1242 - 1247	
27	No.27 Tahun 1993 10 Maret 1993	Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1248 - 1250	Diubah dg Keppres No.126 Th.2000
28	No.28 Tahun 1993 8 Juli 1993	Tempat Kediaman Jabatan Bagi Wakil Presiden.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1251 - 1252	
29	No.29 Tahun 1993 18 Maret 1993	Pemberian Fasilitas Kredit Kpd Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1253 - 1254	Dicabut dg Keppres No.58 Th.1999
30	No.30 Tahun 1993 31 Maret 1993	Penunjuakan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT.Cibinong Center Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sbg Kawasan Berikat (Bounded Zone).	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1255 - 1257	
31	No.31 Tahun 1993 22 April 1993	Tunjangan Penilai Pajak Bumi & Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1258 - 1267	Dicabut dg Keppres No.84 Th.2003, No.25 Th.2004, & No.35 Th.2005
32	No.32 Tahun 1993 3 Mei 1993	Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1268 - 1269	Diubah dg Keppres No.49 Th.1993, No.27 Th.1996, No.66 Th.1998
33	No.33 Tahun 1993 3 Mei 1993	Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1270 - 1271	
34	No.34 Tahun 1993 5 Mei 1993	Pembentukan Kejaksaan Negeri di Cibinong.	HPPRI (I) 1993 Hal. : 1272 - 1273	
35	No.35 Tahun 1993 7 Juli 1993	Pengesahan Internasional Convention On The Harmonited Commodity Description and Coding System Berserta Protokolnya. (LN No.36)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 1275 - 1907	
36	No.36 Tahun 1993 15 Mei 1993	Pengesahan Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and The Government of Australia Concerning The Promotion and Protection of Investment. (LN No.37)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 1908 - 1927	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
37	No.37 Tahun 1993 15 Mei 1993	Pengesahan Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Cooperation in Fisheries. (LN No.38)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 1928 - 1936	
38	No.38 Tahun 1993 15 Mei 1993	Pengesahan Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and The Government of Australia Concerning The Protection and Enforcement of Copyright. (LN No.39)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 1937 - 1944	
39	No.39 Tahun 1993 17 Mei 1993	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Rep. Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab utk Dinas2 Penerbangan antara dan melampaui wilayah berdaulat masing2. (LN No.43)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 1945 - 2036	
40	No.40 Tahun 1993 18 Mei 1993	Perubahan Keppres No.29 Th.1990 ttg Dana Reboisasi Sebagaimana telah diubah dg Keppres No.28 Th.1991. (LN No.44)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2037 - 2040	Diubah dg Keppres No.24 Th.1997 Dicabut tarif & jenis dana dg PP 92/ ' 99
41	No.41 Tahun 1993 18 Mei 1993	Perubahan Keppres No.30 Th.1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.29 Th.1991. (LN No.45)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2041 - 2043	Diubah dg Keppres No.67 Th.1998
42	No.42 Tahun 1993 19 Mei 1993	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2044 - 2051	Dicabut dg Keppres No.59 Th.1998
43	No.43 Tahun 1993 19 Mei 1993	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2052 - 2058	Diubah dg Keppres No.26 Th.1996 & No.59 Th.1998
44	No.44 Tahun 1993 19 Mei 1993	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2059 - 2068	Dicabut dg Keppres No.60 Th.1998
45	No.45 Tahun 1993 22 Mei 1993	Peningkatan Konsulat-Konsulat RI di Toronto Canada, Karachi, Pakistan dan Noumea New Caledonia Menjadi Konsulat Jenderal RI.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2069 - 2071	
46	No.46 Tahun 1993 22 Mei 1993	Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2072 - 2073	Diubah dg Keppres No.5 Th.1994
47	No.47 Tahun 1993 22 Mei 1993	Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993/1994.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2074 - 2075	
48	No.48 Tahun 1993 26 Mei 1993	Pengesahan International Convention Against Apartheid in Sports. (LN No.48)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2076 - 2098	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
49	No.49 Tahun 1993 2 Juni 1993	Perubahan Atas Keppres No.32 Th.1993 ttg Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2099 - 2100	Diubah dg Keppres No.49 Th.1993
50	No.50 Tahun 1993 7 Juni 1993	Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2101 - 2104	Dicabut dg Keppres No.48 Th.2001
51	No.51 Tahun 1993 8 Juni 1993	Perubahan Keppres No.30 Th.1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2105 - 2106	Dicabut dg Keppres No.98 Th.2003
52	No.52 Tahun 1993 1 Juli 1993	Pemeriksaan Atas Barang Impor yg dimasukan ke Kaw. Berikat (Bounded Zone). (LN No.52)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2107 - 2108	Diubah dg Keppres No. 94 Th.1993
53	No.53 Tahun 1993 15 Juli 1993	Fasilitas & Kemudahan Pabean, Perpajakan, dan Tata Niaga Impor bagi Entreport Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE). (LN No.53)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2109 - 2112	Dicabut dg PP No.3 Th.1996
54	No.54 Tahun 1993 15 Juli 1993	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2113 - 2121	Dicabut dg Keppres No.31 Th.1995
55	No.55 Tahun 1993 18 Juli 1993	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2122 - 2130	Dicabut dg Keppres No.36 Th.2005
56	No.56 Tahun 1993 19 Juli 1993	Pengesahan Persetujuan Umum Tentang Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kanada Tahun 1991. (LN No.58)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2131 - 2173	
57	No.57 Tahun 1993 19 Juli 1993	Perubahan Keppres No.30 Th.1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk & Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan utk Dipergunakan dlm Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taxi Sebagaimana telah Diubah Dengan Keppres No.28/1993.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2174 - 2175	Diubah dg Keppres No. 65 Th.1994 Dicabut dg Keppres No.74 Th.1995
58	No.58 Tahun 1993 1 Juli 1993	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali diubah Terakhir dg Keppres No.67 Th.' 92.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2176 - 2190	Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
59	No.59 Tahun 1993 7 Juli 1993	Pengesahan International Convention On Mutual Administrative Assistance for The Prevention, Investigation And Repression of Customs Offences. (LN No.61)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2191 - 2224	
60	No.60 Tahun 1993 10 Juli 1993	Perubahan Keppres No.34 Th.1991 ttg Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata RI.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2225 - 2228	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
61	No.61 Tahun 1993 12 Juli 1993	Pengesahan Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal. (LN. No.62)	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2229 - 2286	
62	No.62 Tahun 1993 13 Juli 1993	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dg Keppres No.51 Th.1992.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2287 - 2289	Diubah dg Keppres No.69 Th.1993, No.1, 30 & 35 Th.1994, No.38 Th.1995 & No.17 Th.1996 Th.2000 Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
63	No.63 Tahun 1993 17 Juli 1993	Penghargaan Kepada Mantan Anggota Badan Keamanan Rakyat.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2290 - 2292	
64	No.64 Tahun 1993 5 Agustus 1993	Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Vancouver Canada Menjadi Konsulat Jend. RI.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2293 - 2294	
65	No.65 Tahun 1993 9 Agustus 1993	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Athena Yunani.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2295 - 2296	
66	No.66 Tahun 1993 27 September 1993	Pembentukan Dana Bantuan Presiden Eks. Dana Reboisasi.	HPPRI (II) 1993 Hal. : 2297 - 2298	
67	No.67 Tahun 1993 26 Juli 1993	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Argentina mengenai kerjasama Ekonomi dan Perdagangan. (LN. No.65)	HPPRI (II) 1993 Hal.:2299 - 2314	
68	No.68 Tahun 1993 31 Juli 1993	Perubahan atas Keppres No.8 Th.1985 tentang Badan Kebijakananaan Perumahan Nasional.	HPPRI (II) 1993 Hal.:2315 - 2316	Dicabut dg Keppres No.37 Th.1994
69	No.69 Tahun 1993 2 Agustus 1993	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah delapan Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.62 Th.1993.	HPPRI (II) 1993 Hal.:2317 - 2318	Diubah dg Keppres No.1, 30 & 35 Th.1994, No.38 Th.1995 & No.17 Th.1996 Th.2000 Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
70	No.70 Tahun 1993 2 Agustus 1993	Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wil. Usaha Kawasan Industri PT. Besland Pertiwi Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	HPPRI (II) 1993 Hal.:2319 - 2321	
71	No.71 Tahun 1993 4 Agustus 1993	Agreement Between Government of The Rep. of Indonesia and The Center for International Forestry Research Regarding the Headquarters Seat of The Center. (LN. No.71)	HPPRI (II) 1993 Hal.:2322 - 2342	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
72	No.72 Tahun 1993 4 Agustus 1993	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan. (LN. No.72)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2343 - 2452	
73	No.73 Tahun 1993 16 September 1993	Perubahan Keppres No.35 Th.1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No.7 Th.1988.	HPPRI (II) 1993 Hal.:2453 - 2454	Dicabut dg Keppres No.138 Th.1999
74	No.74 Tahun 1993 11 Agustus 1993	Perubahan Keppres No.32 Th.1986 ttg Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres No.10 Th.1988.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2455 - 2456	
75	No.75 Tahun 1993 11 Agustus 1993	Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2457 - 2460	Dicabut dg Keppres No.62 Th.2000
76	No.76 Tahun 1993 18 Agustus 1993	Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2461 - 2482	Dicabut dg Keppres No.28 Th.2002.
77	No.77 Tahun 1993 18 Agustus 1993	Tunjangan Jabatan bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2483 - 2484	
78	No.78 Tahun 1993 20 Agustus 1993	Penambahan Ramp Jalan Tol Sentul Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2485 - 2487	
79	No.79 Tahun 1993 27 Agustus 1993	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1994.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2488 - 2489	Dicabut dg Keppres No.62 Th.1994
80	No.80 Tahun 1993 8 Nopember 1993	Pengesahan An Amandement of Article VI of The Statute of The International Atomic Energy Agency. (LN. No.75)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2490 - 2493	
81	No.81 Tahun 1993 1 September 1993	Pengesahan Convention on Early Natification of a Nuclear Accident. (LN. No.76)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2494 - 2502	
82	No.82 Tahun 1993 1 September 1993	Pengesahan Convention on Assistance inThe Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. (LN. No.77)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2503 - 2515	
83	No. 83 Tahun 1993 14 September 1993	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Sembilan Belas Kali Diubah Terakhir dg Keppres No.58 Th.1993.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2516 - 2520	Diubah dg Keppres No.104 Th.1993 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
84	No.84 Tahun 1993 14 September 1993	Perubahan Atas Keppres No.5 Th.1990 Ttg Badan Pengendali Bimas.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2521 - 2523	Dicabut dg Keppres No.40 Th.1997
85	No.85 Tahun 1993 14 September 1993	Perubahan Atas Keppres No.28 Th.1982 Ttg Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.10 Th. 1989.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2524 - 2525	Dicabut dg Keppres No.109 Th.2000
86	No.86 Tahun 1993 16 September 1993	Pengesahan Agreement on The Organization for Indian Ocean Marine Affairs Cooperations (IOMAC) (LN No.78)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2526 - 2536	
87	No.87 Tahun 1993 20 September 1993	Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2537 - 2541	Dicabut dg Keppres No.62 Th.1996
88	No.88 Tahun 1993 20 September 1993	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Kiev - Ukraina dan di Taskent-Republik Uzbekistan.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2542 - 2544	
89	No.89 Tahun 1993 1 Oktober 1993	Perubahan Keppres No.18 Th.1993 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja utk Membantu Presiden dlm melaks. Keputusan <sup>2</sup> Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke 10.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2545 - 2546	Dicabut dg Keppres No.110 Th.1993
90	No.90 Tahun 1993 21 Oktober 1993	Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri. (LN No.81)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2547 - 2550	Dicabut dg PP No.46 Th.1994
91	No.91 Tahun 1993 18 Oktober 1993	Pengesahan Agreement Between The Governments oh The Member Countries of The Asociation og Southeast Asian Nations and The Gov. of Canada on Economic Cooperation. (LN No.82)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2551 - 2573	
92	No.92 Tahun 1993 11 Oktober 1993	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2574 - 2580	Diubah dg Keppres No.166, No.173 & 42 Th.2001
93	No. 93 Tahun 1993 22 Nopember 1993	Pengaktipan Kembali Kegiatan Kedutaan Besar RI di Phnom Penh.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2581 - 2582	
94	No. 94 Tahun 1993 23 Oktober 1993	Perubahan Keppres No.52 Th.1993 ttg Peme- riksaan atas barang Impor yg dimasukkan ke Kawasan Berikat (Bonded Zone). (LN No.85)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2583 - 2584	
95	No.95 Tahun 1993 23 Oktober 1993	Perubahan Keppres No.53 Th.1993 ttg Fasilitas & Kemudahan Pabean, Perpajakan & Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE). (LN No.86)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2585 - 2587	Dicabut dg PP No.3 Th.1996

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
96	No.96 Tahun 1993 23 Oktober 1993	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak Ke, Dari dan Antar Kawasan Berikat dan Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (ESPE). (LN No.87)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2588 - 2590	
97	No.97 Tahun 1993 4 Nopember 1993	Tata Cara Penanaman Modal.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2591 - 2599	Diubah dg Keppres No.115 Th.1998 dan No.117 Th.1999 <b>Dicabut dg Perpres No.27 Th.2009</b>
98	No.98 Tahun 1993 4 Nopember 1993	Perubahan Keppres No.53 Th. 1989 Tentang Kawasan Industri.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2600 - 2603	
99	No.99 Tahun 1993 26 Oktober 1993	Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2604 - 2607	Diubah dg Keppres No.132 Th.1998 <b>Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014</b>
100	No.100 Tahun 1993 1 Nopember 1993	Izin Penelitian Bagi Orang Asing.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2608 - 2613	<b>Dicabut dg PP No.41 Th.2006</b>
101	No.101 Tahun 1993 15 Nopember 1993	Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2614 - 2616	
102	No.102 Tahun 1993 18 Nopember 1993	Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2617 - 2619	
103	No.103 Tahun 1993 4 Nopember 1993	Badan Urusan Logistik.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2620 - 2629	Dicabut dg Keppres No.50 Th.1995
104	No.104 Tahun 1993 22 Nopember 1993	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 ttg Susunan Organisasi Departemen Sebagai-mana Telah Dua Puluh Kali Diubah Terakhir Dgn Keppres No.83 Th.1993.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2630 - 2633	Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
105	No.105 Tahun 1993 6 Nopember 1993	Persetujuan Angkutan Udara Antara Pem. RI Dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Berkenaan dg Angkutan Udara Berjadwal. (LN No.88)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2634 - 2691	
106	No.106 Tahun 1993 6 Nopember 1993	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pem. RI dan Pem. Kerajaan Yordania Berkenaan dg Angkutan Udara Berjadwal. (LN No.89)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2692 - 2745	
107	No.107 Tahun 1993 6 Nopember 1993	Pengesahan Air Transport Agreement between The Gov. of The Rep. of Indonesia.& The Gov. of The Kingdom Of The Netherlands. (LN No.90)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2746 - 2760	
108	No.108 Tahun 1993 16 Desember 1993	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Papua New Guinea Relating The Schedule Air Services. (LN No.91)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2761 - 2787	





NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
109	No.109 Tahun 1993 9 Nopember 1993	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2788 - 2800	Dicabut dg Keppres No.20 Th.2000
110	No.110 Tahun 1993 11 Nopember 1993	Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang dan Pembangunan Negara-Negara Berkembang.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2801 - 2803	
111	No.111 Tahun 1993 13 Nopember 1993	Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staadblad 1898 No.90, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg Undang-Undang No.2 Prp. (LN No.93)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2804 - 2805	
112	No.112 Tahun 1993 2 Desember 1993	Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2806 - 2807	Dicabut dg Keppres No.59 Th.1999
113	No.113 Tahun 1993 3 Desember 1993	Persetujuan Angkutan Udara Antara Pem. RI & Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. (LN No.97)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2808 - 2879	
114	No.114 Tahun 1993 3 Desember 1993	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Pelayaran Niaga. (LN No.98)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2880 - 2900	
115	No.115 Tahun 1993 3 Desember 1993	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.99)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2901 - 2932	
116	No.116 Tahun 1993 3 Desember 1993	Pengesahan Agreement Between The Government of The Rep. of Indonesia and The Government of The Peoples of Republic of China Relating to Scheduled Air Transport. (LN No.100)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2933 - 2949	
117	No.117 Tahun 1993 7 Desember 1993	Perubahan Keppres No.55 Th.1989 Tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2950 - 2951	
118	No.118 Tahun 1993 8 Desember 1993	Pengesahan Agreement Between The Gov. Of The Republic of Indonesia & The Gov. of The United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland for Avoidance of Double Taxation Of Taxation & The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income & Capital Gains. (LN No.101)	HPPRI (II) 1993 Hal.: 2952 - 2999	
119	No.119 Tahun 1993 14 Desember 1993	Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 3000 - 3002	Dicabut dg Keppres No.137 Th.1998.

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
120	No.120 Tahun 1993 24 Desember 1993	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 3003 - 3008	Diubah dg Keppres No.27 Th.1994 Dicabut dg Keppres No.13 Th.2000
	<b>INPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1993 3 Mei 1993	Keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 di Taejon Republik Korea.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 3009 - 3010	
2	No. 2 Tahun 1993 3 Mei 1993	Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun ke 50 Perserikatan Bangsa-bangsa.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 3011 - 3012	
3	No. 3 Tahun 1993 27 September 1993	Pameran Terapung Indonesia.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 3013 - 3015	
4	No. 4 Tahun 1993 13 Oktober 1993	Penetapan Harga Dasar Gabah.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 3016 - 3018	
5	No. 5 Tahun 1993 27 Desember 1993	Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 3019 - 3026	
6	No. 6 Tahun 1993 28 Desember 1993	Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata.	HPPRI (II) 1993 Hal.: 3027 - 3029	
	<b>Tahun 1994</b>			
	<b>KEPPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1994 13 Januari 1994	Perubahan Atas Keppres No. 9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sembilan Kali Diubah, Terakhir dgn Keppres No.69 Th. ' 93.	HPPRI 1994 Hal.:1493-1496	Diubah dg Keppres No.30 & 35/1994, No.38 Th.1995 & No.17 Th.1996 Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
2	No. 2 Tahun 1994 17 Januari 1994	Pembukaan Konsulat Jenderal RI Di Johannesburg Afrika Selatan.	HPPRI 1994 Hal.:1493-1496	Dicabut dg Keppres No.53 Th.1994
3	No. 3 Tahun 1994 27 Januari 1994	Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Utk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI 1994 Hal.:1499-1500	
4	No. 4 Tahun 1994 1 Pebruari 1994	Lembaga Ketahanan Nasional	HPPRI 1994 Hal.:1501-1508	Dicabut dg Keppres No.42 Th.2000
5	No. 5 Tahun 1994 15 Pebruari 1994	Perubahan Atas Keppres No.46 Th.1993, ttg Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Dep.Pertahanan Keamanan.	HPPRI 1994 Hal.:1509-1510	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
6	No. 6 Tahun 1994 17 Pebruari 1994	Pengesahan Persetujuan Sosialis Demokrasi Sri Lanka Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan. (LN No.2)	HPPRI 1994 Hal.:1511-1615	
7	No. 7 Tahun 1994 17 Pebruari 1994	Pengesahan Persetujuan Antara RI dan Pemerintahan Kekaryapatihan Luxemburg ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Atas Modal. (LN No.3)	HPPRI 1994 Hal.:1616-1702	
8	No. 8 Tahun 1994 17 Pebruari 1994	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Korea Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.4)	HPPRI 1994 Hal.:1703-1737	
9	No. 9 Tahun 1994 22 Pebruari 1994	Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik	HPPRI 1994 Hal.:1738-1740	
10	No.10 Tahun 1994 23 Pebruari 1994	Peningkatan Konsulat RI di Penang Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal RI.	HPPRI 1994 Hal.:1741-1742	
11	No.11 Tahun 1994 24 Pebruari 1994	Pengesahan Protokol Perubahan atas Perse- tujuan Antara RI & Kerajaan Belanda menge- nai Penghindaran Pajak Berganda dan Pence- gahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan & atas Kekayaan dg Protokol ttg Ditandatangani di Kualalumpur pada tgl. 22 Juli 1991. (LN No.5)	HPPRI 1994 Hal.:1743-1809	
12	No.12 Tahun 1994 26 Pebruari 1994	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional.	HPPRI 1994 Hal.:1810-1812	
13	No.13 Tahun 1994 28 Pebruari 1994	Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI	HPPRI 1994 Hal.:1813-1818	Dicabut dg Perpres No.23 Th.2005
14	No.14 Tahun 1994 2 Maret 1994	Perubahan Atas Keppres No. 15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Dua Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.104 Th.1993.	HPPRI 1994 Hal.:1819-1823	Diubah dg Keppres No.18 Th.1994 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
15	No.15 Tahun 1994 3 Maret 1994	Pemeriksaan Pabean atas Barang yg diimpor dlm rangka Proyek Pemerintah yg dibiayai dg Bantuan Luar Negeri. (LN No10)	HPPRI 1994 Hal.:1824-1825	
16	No.16 Tahun 1994 22 Maret 1994	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.	HPPRI 1994 Hal.:1826-1999	Diubah dg Keppres No.24/ ' 95 & 6/ ' 99 Dicabut dg Keppres No.17 Th.2000

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
17	No.17 Tahun 1994 22 Maret 1994	Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/1995 - 1998/1999	HPPRI 1994 Hal.:2000-2001	
18	No.18 Tahun 1994 26 Maret 1994	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sebagai - mana telah Dua Puluh Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No.14 Th.1994.	HPPRI 1994 Hal.:2002-2005	Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
19	No.19 Tahun 1994 29 Maret 1994	Perubahan Honorarium bagi ketua, anggota & Sekretaris Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Tim P-7).	HPPRI 1994 Hal.:2006-2007	Dicabut dg Keppres No.137 Th.1998
20	No.20 Tahun 1994 29 Maret 1994	Pemberian Honorarium Bagi Konsultan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaks. Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila Pusat (Konsultan BP-7 Pusat).	HPPRI 1994 Hal.:2008-2009	Dicabut dg Keppres No.137 Th.1998
21	No.21 Tahun 1994 4 April 1994	Peningkatan Konsulat RI di San Fransisco Amerika Serikat & Konsulat RI di Marseilles Perancis Menjadi Konsulat Jenderal RI.	HPPRI 1994 Hal.:2010-2011	
22	No.22 Tahun 1994 4 April 1994	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda & Denpasar.	HPPRI 1994 Hal.:2012-2015	
23	No.23 Tahun 1994 7 April 1994	Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.	HPPRI 1994 Hal.:2016-2020	Diubah dg Keppres No.77 Th.2000
24	No.24 Tahun 1994 15 April 1994	Perubahan Atas Keppres No.33 Th. 1988 Ttg Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional.	HPPRI 1994 Hal.:2021-2025	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
25	No.25 Tahun 1994 18 April 1994	Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan.	HPPRI 1994 Hal.:2026-2030	
26	No.26 Tahun 1994 21 April 1994	Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand.	HPPRI 1994 Hal.:2031-2033	Dicabut dg Keppres No.72 Th.1996
27	No.27 Tahun 1994 30 April 1994	Perubahan Keppres No.120 Th.1993 Tentang Dewan Pengembangan Kaw. Timur Indonesia.	HPPRI 1994 Hal.:2034-2035	Diubah dg Keppres No.54 Th.1995 Dicabut dg Keppres No.13 Th.2000
28	No.28 Tahun 1994 28 April 1994	Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina.	HPPRI 1994 Hal.:2036-2038	Diubah dg Keppres No.29 Th.1996 Dicabut dg Keppres No.73 Th.1996
29	No.29 Tahun 1994 30 April 1994	Perubahan Keppres No.18 Th.1984 ttg Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No.9 Th.1988.	HPPN 1994 Hal.:2039-2040	
30	No.30 Tahun 1994 9 Mei 1994	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sepuluh Kali Diubah, Terakhir Dgn Keppres No.1 Th.1994.	HPPN 1994 Hal.:2041-2043	Diubah dg Keppres No.30 & No.35/1994, No.38/95 & No.17/96 dicabut dg Keppres No.99 Th.2000

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
31	No.31 Tahun 1994 10 Mei 1994	Pengesahan Statute of the Centre for Science and Technology of the Movement of the Non Aligned Countries and Other Developing Countries. (LN No.27)	HPPN 1994 Hal.:2044 - 2055	
32	No.32 Tahun 1994 16 Mei 1994	Perluasan Kawasan Industri Yang Diberikan Status Kawasan Berikat ( Bonded Zone) PT. Megapolis Manunggal Industrial Development.	HPPN 1994 Hal.: 2056 - 2058	
33	No.33 Tahun 1994 24 Mei 1994	Penunjukan & Penetapan Sebagian Wil. Usaha Kawasan Industri PT. Indotaisei Indah Development Utk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	HPPN 1994 Hal.: 2059 - 2061	
34	No. 34 Tahun 1994 26 Mei 1994	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI Pemerintah Malaysia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta protokolnya. (LN No.29)	HPPN 1994 Hal.: 2062 - 2107	
35	No. 35 Tahun 1994 27 Mei 1994	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat & Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dg Keppres No.30 Th.1994.	HPPN 1994 Hal.: 2108 - 2110	Diubah dg Keppres No.38 Th.1995 & No.17 Th.1996 Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
36	No. 36 Tahun 1994 30 Mei 1994	Komisi Penanggulangan AIDS	HPPN 1994 Hal.: 2110 - 2113	Dicabut dg Perpres No.75 Th.2006
37	No.37 Tahun 1994 30 Mei 1994	Badan Kebijaksanaan & Pengendalian Pembangunan Perumahan & Permukiman Nasional.	HPPN 1994 Hal.: 2114 - 2118	Dicabut dg Keppres No.63 Th.2000
38	No.38 Tahun 1994 31 Mei 1994	Pengelolaan Masjid Istiqlal.	HPPN 1994 Hal.: 2119 - 2121	
39	No.39 Tahun 1994 31 Mei 1994	Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi dan Penyuluh Perindustrian.	HPPN 1994 Hal.: 2122 - 2127	Dicabut dg Keppres No.84 Th.2003 & No.19 Th.2004
40	No.40 Tahun 1994 1 Juni 1994	Pengesahan Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan & Teknik antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jamaica. (LN No.31)	HPPN 1994 Hal.: 2128 - 2143	
41	No.41 Tahun 1994 2 Juni 1994	Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1986 Ttg Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang atas Impor & Penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung oleh Pemerintah sbgmana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dg Keppres No.59/1988.	HPPN 1994 Hal.: 2144 - 2147	Diubah dg Keppres No.8 Th.1995

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
42	No.42 Tahun 1994 2 Juni 1994	Bantuan Pinjaman kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara.	HPPN 1994 Hal.: 2148 - 2149	
43	No.43 Tahun 1994 17 Juni 1994	Pembubaran Tim Pembinaan Penatar & Bahan bahan Penataran Untuk Keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia.	HPPN 1994 Hal.: 2150 - 2151	
44	No.44 Tahun 1994 23 Juni 1994	Badan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wil.Perbatasan di Kalimantan.	HPPN 1994 Hal.: 2152 - 2155	Dicabut dg Keppres No.63 Th.1999
45	No.45 Tahun 1994 25 Juni 1994	Utusan Indonesia Pada Forum Bisnis Pasifik (Pasific Business Forum)	HPPN 1994 Hal.: 2156 - 2157	
46	No.46 Tahun 1994 4 Juli 1994	Perubahan Atas Keppres No.14 Th.1993 Ttg Tabungan Perumahan PNS.	HPPN 1994 Hal.: 2158 - 2159	
47	No.47 Tahun 1994 6 Juli 1994	Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional	HPPN 1994 Hal.: 2160 - 2163	Diubah dg Keppres No.51 Th.1998
48	No.48 Tahun 1994 7 Juli 1994	Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei	HPPN 1994 Hal.: 2164 - 2165	
49	No.49 Tahun 1994 13 Juli 1994	Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM - PTHM".	HPPN 1994 Hal.: 2166 - 2168	
50	No.50 Tahun 1994 16 Juli 1994	Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik.	HPPN 1994 Hal.: 2169 - 2171	
51	No.51 Tahun 1994 18 Juli 1994	Perincian Anggaran Belanja Rutin TA. 1994/1995.	HPPN 1994 Hal.: 2172 - 2173	
52	No.52 Tahun 1994 18 Juli 1994	Perincian Anggaran Belanja Pembangunan TA.1994/95.	HPPN 1994 Hal.: 2174 - 2175	
53	No.53 Tahun 1994 18 Juli 1994	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Pretoria, Afrika Selatan Dan Konsulat Jenderal RI di Cape Town Afrika Selatan.	HPPN 1994 Hal.: 2176 - 2178	
54	No.54 Tahun 1994 18 Juli 1994	Lembaga Sandi Negara.	HPPN 1994 Hal.: 2179 - 2186	Dicabut dg Keppres No.77 Th.1999
55	No.55 Tahun 1994 22 Juli 1994	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.37)	HPPN 1994 Hal.: 2187-2219	
56	No.56 Tahun 1994 28 Juli 1994	Pengesahan Agreement Between The Govern - ment of The Rep. of Indonesia and The Gov. of The United Kingdom of Great Britain And The Northern Island on Copyright Protection. (LN No.39)	HPPN 1994 Hal.: 2220 - 2224	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
57	No.57 Tahun 1994 28 Juli 1994	Pengesahan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Republic of Suriname. (LN No.40)	HPPN 1994 Hal.: 2225 - 2231	
58	No.58 Tahun 1994 2 Agustus 1994	Pengesahan Agreement Between The Govern-ment of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of The Netherlands on Promotion and Protection of Investment, beserta Protocol. (LN No.43)	HPPN 1994 Hal.: 2232 - 2244	
59	No.59 Tahun 1994 2 Agustus 1994	Constitutions of The Asia Pasific Telecommunity. (LN No.44)	HPPN 1994 Hal.: 2245 - 2277	
60	No.60 Tahun 1994 2 Agustus 1994	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Rep. Italia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal (LN No.45)	HPPN 1994 Hal.: 2278 - 2317	
61	No.61 Tahun 1994 5 Agustus 1994	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.46).	HPPN 1994 Hal.: 2318-2345	
62	No.62 Tahun 1994 23 Agustus 1994	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1995	HPPN 1994 Hal.: 2346-2347	
63	No.63 Tahun 1994 26 Agustus 1994	Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	HPPN 1994 Hal.: 2348-2359	Dicabut dg Keppres No.26 Th.2000
64	No.64 Tahun 1994 14 September 1994	Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Lamhotma Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	HPPN 1994 Hal.: 2360-2362	
65	No.65 Tahun 1994 19 September 1994	Perubahan Keppres No.30 Th.1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Penge-emudi Taksi Sbgmana Tlh Bbrapa Kali Diubah Terakhir dg Keppres	HPPN 1994 Hal.: 2363-2364	Dicabut dg Keppres No.74 Th.1995
66	No.66 Tahun 1994 20 September 1994	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal (LN No.50)	HPPN 1994 Hal.: 2365-2392	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
67	No.67 Tahun 1994 8 Oktober 1994	Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik yg Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.	HPPN 1994 Hal.: 2393-2396	
68	No.68 Tahun 1994 8 Oktober 1994	Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga Listrikan	HPPN 1994 Hal.: 2397-2405	
69	No.69 Tahun 1994 13 Oktober 1994	Pengadaan Garam Beriodium	HPPN 1994 Hal.: 2406-2408	
70	No.70 Tahun 1994 18 Oktober 1994	Penunjukan & Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Dharmala Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)	HPPN 1994 Hal.: 2409-2411	
71	No.71 Tahun 1994 18 Oktober 1994	Perubahan Luas Kawasan Berikat (Bonded Zone) PT. Cibinong Center Industrial Estate	HPPN 1994 Hal.: 2412 - 2415	
72	No.72 Tahun 1994 21 Oktober 1994	Peningkatan Konsulat RI Di Bombay-India Menjadi Konsulat Jenderal RI	HPPN 1994 Hal.: 2415 - 2416	
73	No.73 Tahun 1994 3 Nopember 1994	Tim Pengadaan Alat Utama Pertahanan Keamanan Angkatan Bersenjata RI	HPPN 1994 Hal.: 2174 - 2175	
74	No.74 Tahun 1994 7 Nopember 1994	Penetapan Hari Libur Selama Penyelenggaraan Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasific di Wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya	HPPN 1994 Hal.: 2174 - 2175	
75	No.75 Tahun 1994 16 Nopember 1994	Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Esso Explo - ration And Production Natuna Inc.yang Melaku -kan Pengeboran & Pengolahan Gas Bumi dlm Rangka Kontrak Bagi Hasil Di Kep.Natuna dan Laut Sekitarnya.	HPPN 1994 Hal.: 2423-2425	
76	No.76 Tahun 1994 16 Nopember 1994	Pembentukan Panitia Pemindahan Bandar Udara Polonia Medan.	HPPN 1994 Hal.: 2426-2429	
77	No.77 Tahun 1994 22 Nopember 1994	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	HPPN 1994 Hal.: 2430-2440	Dicabut dg Keppres No.196 Th.1998
78	No.78 Tahun 1994 24 Nopember 1994	Hari Guru Nasional	HPPN 1994 Hal.: 2441-2442	
79	No.79 Tahun 1994 5 Desember 1994	Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapura	HPPN 1994 Hal.: 2443-2444	Diubah dg Keppres No. 30 Th.1996
80	No.80 Tahun 1994 5 Desember 1994	Tim Tarif Dan Fiskal	HPPN 1994 Hal.: 2445-2446	Diubah dg Keppres No.32 Th.1996
81	No.81 Tahun 1994 9 Desember 1994	Penambahan Gerbang Tol Serang Timur Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPN 1994 Hal.: 2447-2450	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
82	No.82 Tahun 1994 9 Desember 1994	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes - Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPN 1994 Hal.: 2451-2453	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
83	No.83 Tahun 1994 9 Desember 1994	Penambahan Gerbang Tol Kalihurip & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPN 1994 Hal.: 2454-2457	
84	No.84 Tahun 1994 9 Desember 1994	Penambahan Gerbang Tol Meruya & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPN 1994 Hal.: 2458-2460	
85	No.85 Tahun 1994 12 Desember 1994	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Bratislava Slovakia.	HPPN 1994 Hal.: 2461-2462	
86	No.86 Tahun 1994 23 Desember 1994	Perubahan Atas Keppres RI No.5 Th.1988 Ttg Pengadaan Bahan Peledak.	HPPN 1994 Hal.: 2463-2464	Dicabut dg Keppres No.125 Th.1999
87	No.87 Tahun 1994 28 Desember 1994	Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/ Manggala.	HPPN 1994 Hal.: 2465-2468	
	INPRES			
1.	No. 1 Tahun 1994 15 April 1994	Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar	HPPN 1994 Hal.: 2469 - 2473	
2.	No. 2 Tahun 1994 4 Mei 1994	Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	HPPN 1994 Hal.: 2474 - 2476	
3.	No. 3 Tahun 1994 27 Juli 1994	Pameran Kebaharian Indonesia 1996	HPPN 1994 Hal.: 2477 - 2478	
4.	No. 4 Tahun 1994 23 Agustus 1994	Sensus Ekonomi 1996.	HPPN 1994 Hal.: 2479 - 2481	
5.	No. 5 Tahun1994 13 September 1994	Pameran Produksi Indonesia 1995.	HPPN 1994 Hal.: 2482 - 2484	
6.	No. 6 Tahun1994 6 Oktober 1994	Penetapan Harga Dasar Gabah .	HPPN 1994 Hal.: 2485 - 2488	
	TAHUN 1995			
	KEPPRES			
1	No. 1 Tahun 1995 13 Januari 1995	Pengesahan Agreement To Establish The South Centre (Persetujuan Pembentukan Pusat Selatan). (LN No.2)	HPPN 1995 Hal.:1279-1310	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No. 2 Tahun 1995 16 Januari 1995	Perubahan Atas Keppres No. 15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen Sebagai- mana Telah 23 Kali Diubah, Terakhir dng Keppres No.18 Th.1994.	HPPN 1995 Hal.:1311-1319	Diubah dg Keppres No.61 Th.1995 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
3	No. 3 Tahun 1995 17 Januari 1995	Pengesahal International Coffee Agreement, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional, 1994). (LN No.3)	HPPN 1995 Hal.:1320-1416	
4	No. 4 Tahun 1995 23 Januari 1995	International Tropical Timber Agreement,1994 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional,1994). (LN No.4)	HPPN 1995 Hal.:1417-1499	Dicabut dg Perpres No.78Th.2008
5	No. 5 Tahun 1995 27 Januari 1995	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta Protokol. (LN No.5)	HPPN 1995 Hal.:1500-1532	
6	No. 6 Tahun 1995 2 Pebruari 1995	Tim Evaluasi Pengadaan.	HPPN 1995 Hal.:1533-1536	Dicabut dg Keppres No.73 Th.1998
7	No. 7 Tahun 1995 3 Pebruari 1995	Pembentukan Panitia Nasional Penyelengga- ra an Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Ke 50 RI Th.1995.	HPPN 1995 Hal.:1537-1539	
8	No. 8 Tahun 1995 6 Pebruari 1995	Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1986 Ttg Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak tertentu yg Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg Keppres No.41 Th.1994. (LN No.6)	HPPN 1995 Hal.:1540-1542	Diubah dg Keppres No. 37 Th.1998 & No.42 Th.1995
9	No. 9 Tahun 1995 9 Pebruari 1995	Tim Dokter Ahli Presiden Dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden.	HPPN 1995 Hal.:1543-1546	Dicabut dg Keppres No.106 Th.1998
10	No.10 Tahun 1995 27 Pebruari 1995	Tunjangan Hakim.	HPPN 1995 Hal.:1547-1554	Dicabut dg Keppres No.19 Th.2000
11	No.11 Tahun 1995 27 Pebruari 1995	Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP No.15 Th.1993 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP No.33 Th.1994.	HPPN 1995 Hal.:1555-1569	
12	No.12 Tahun 1995 27 Pebruari 1995	Tunjangan Panitera.	HPPN 1995 Hal.:1570-1574	Diubah dg Keppres No.74 Th.1999
13	No.13 Tahun 1995 27 Pebruari 1995	Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan dlm Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yg Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri. (LN No.10)	HPPN 1995 Hal.:1575-1578	Dicabut dg PP No.42 Th.1995

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No.14 Tahun 1995 1 Maret 1995	Pengembangan Proyek Natuna.	HPPN 1995 Hal.:1579-1584	Diubah dg Keppres No. 39 Th.1995 No.35 & 54 /1998
15	No.15 Tahun 1995 16 Maret 1995	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.14)	HPPN 1995 Hal.:1585-1610	
16	No.16 Tahun 1995 16 Maret 1995	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia and The Gov. of The State of Bahrain. (LN No.15)	HPPN 1995 Hal.:1611-1628	
17	No.17 Tahun 1995 28 Maret 1995	Peningkatan Konsulat RI di Melbourne, Victoria -Australia Menjadi Konsulat Jend. RI.	HPPN 1995 Hal.:1629-1630	
18	No.18 Tahun 1995 28 Maret 1995	Peningkatan Konsulat RI di Johor Bahru, Malaysia.	HPPN 1995 Hal.:1631-1634	
19	No.19 Tahun 1995 30 Maret 1995	Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek.	HPPN 1995 Hal.:1635-1636	Dicabut dg Keppres No.85 Th.2003
20	No.20 Tahun 1995 21 April 1995	Pembentukan Pengadilan Tinggi Manatuto.	HPPN 1995 Hal.:1637-1639	dicabut
21	No.21 Tahun 1995 24 April 1995	Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.	HPPN 1995 Hal.:1640-1645	
22	No.22 Tahun 1995 24 April 1995	Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu.	HPPN 1995 Hal.:1646-1651	Berlaku s/d tgl.31 Maret 1998
23	No.23 Tahun 1995 24 April 1995	Tunjangan Tenaga Kependidikan.	HPPN 1995 Hal.:1652-1658	Diubah dg Keppres No. 9 Th.1997 dan No.101 Th.2000
24	No.24 Tahun 1995 28 April 1995	Perubahan Atas Keppres No.16 Th.1994 Ttg Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.	HPPN 1995 Hal.:1659-1676	Diubah dg Keppres No. 8 Th.1997 Dicabut dg Keppres No.17 Th.2000
25	No.25 Tahun 1995 2 Mei 1995	Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	HPPN 1995 Hal.:1677-1684	
26	No.26 Tahun 1995 2 Mei 1995	Perubahan Atas Keppres No.34 Th.1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.3 Th.1989.	HPPN 1995 Hal.:1685-1687	Dicabut dg Keppres No.189 Th.1998
27	No.27 Tahun 1995 4 Mei 1995	Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura.	HPPN 1995 Hal.:1688-1690	Diubah dg Keppres No. 31 / 1996 Dicabut dg Keppres No.74 Th.1996

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No.28 Tahun 1995 19 Mei 1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak.	HPPN 1995 Hal.:1691-1692	
29	No.29 Tahun 1995 15 Juni 1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi & Bangunan.	HPPN 1995 Hal.:1693-1694	
30	No.30 Tahun 1995 19 Mei 1995	Perpanjangan batas usia pensiun bagiPNS yg menduduki Jabatan Pemeriksa Bea & Cukai.	HPPN 1995 Hal.:1695-1696	
31	No.31 Tahun 1995 23 Mei 1995	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.	HPPN 1995 Hal.:1697-1706	Dicabut dg Keppres No.96 Th.1998
32	No.32 Tahun 1995 23 Mei 1995	Pemeriksaan Pabean Atas Barang yg Diimpor Dengan Menggunakan Pesawat Udara. (LN No.26)	HPPN 1995 Hal.:1707-1708	
33	No.33 Tahun 1995 5 Juni 1995	Pembentukan Panitia Gerakan Disiplin Nasional.	HPPN 1995 Hal.:1709-1712	
34	No.34 Tahun 1995 23 Mei 1995	Tunjangan Arsiparis.	HPPN 1995 Hal.:1713-1715	Dicabut dg Keppres No.2 Th.2003
35	No.35 Tahun 1995 8 Juni 1995	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Khortoum Sudan.	HPPN 1995 Hal.:1716-1717	
36	No.36 Tahun 1995 5 Juni 1995	Pembukaan Konsulat RI di Songkhla, Thailand Selatan.	HPPN 1995 Hal.:1718-1719	
37	No.37 Tahun 1995 15 Juni 1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Sandiwan.	HPPN 1995 Hal.:1720-1721	Dicabut dg Perpres No.16 Th.2009
38	No.38 Tahun 1995 15 Juni 1995	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana telah 12 kali diubah, terakhir dengan Keppres No.35 Th.1994.	HPPN 1995 Hal.:1722-1723	Diubah dg Keppres No.17 Th.1996 Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
39	No.39 Tahun 1995 15 Juni 1995	Perubahan Atas Keppres No.14 Th. 1995 Ttg Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Pengembangan Proyek Natuna.	HPPN 1995 Hal.:1724-1725	Diubah dg Keppres No.35 Th.1998
40	No.40 Tahun 1995 19 Juni 1995	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep.of Indonesia & The Government of The State of Kuwait. (LN No.29)	HPPN 1995 Hal.:1726-1753	
41	No.41 Tahun 1995 19 Juni 1995	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia & The Gov. of The Republic Of Madagascar. (LN No.30)	HPPN 1995 Hal.:1754-1789	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
42	No.42 Tahun 1995 19 Juni 1995	Perubahan atas Keppres No.18/ 86 ttg Pajak pertambahan Nilai yg terutang atas Impor & Penyerahan barang kena Pajak & Jasa kena Pajak tertentu yg ditanggung oleh Pemerintah sbgmana tth beberapa kali diubah. (LN No.31)	HPPN 1995 Hal.:1790-1794	Diubah dg Keppres No.4 Th.1996
43	No.43 Tahun 1995 26 Juni 1995	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Havana, Cuba.	HPPN 1995 Hal.:1795-1796	
44	No.44 Tahun 1995 27 Juni 1995	Perincian Pengeluaran Pembangunan TA.1995/1996.	HPPN 1995 Hal.:1797-1798	
45	No.45 Tahun 1995 27 Juni 1995	Perincian Pengeluaran Rutin TA.1995 / 1996	HPPN 1995 Hal.:1799-1800	
46	No.46 Tahun 1995 3 Juli 1995	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia and The Gov. of The Rep. Of Singapore. (LN No.38)	HPPN 1995 Hal.:1801-1816	
47	No.47 Tahun 1995 3 Juli 1995	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pem. RI & Pemerintah Rep. Bulgaria Berkenaan dg Angkutan Udara Berjadwal. (LN No.39)	HPPN 1995 Hal.:1817-1860	
48	No.48 Tahun 1995 12 Juli 1995	Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi.	HPPN 1995 Hal.:1861-1864	
49	No.49 Tahun 1995 12 Juli 1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Pamong Praja.	HPPN 1995 Hal.:1865-1866	
50	No.50 Tahun 1995 12 Juli 1995	Badan Urusan Logistik	HPPN 1995 Hal.:1867-1877	Diubah dg Keppres No. 45 Th.1997 & No.19 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.29 Th.2000
51	No.51 Tahun 1995 12 Juli 1995	Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi PNS.	HPPN 1995 Hal.:1878-1880	
52	No.52 Tahun 1995 13 Juli 1995	Reklamasi Pantai Utara Jakarta	HPPN 1995 Hal.:1881-1887	Mengenai Tata Ruang Dicabut dg Perpres No.54/2008
53	No.53 Tahun 1995 13 Juli 1995	Pengesahan Persetujuan antara RI dg kerajaan Spanyol mengenai Peningkatan dan Perlindungan secara Resipokal atas Penanaman Modal. (LN No.41)	HPPN 1995 Hal.:1888-1919	
54	No.54 Tahun 1995 1 Agustus 1995	Perubahan Keppres No.120/1993 ttg Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sbgmana tth diubah dg Keppres No.27/1994.	HPPN 1995 Hal.:1920-1922	Diubah dg Keppres No.75 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.13 Th.2000

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
55	No. 55 Tahun 1995 10 Agustus 1995	Penghibahan Kapal Penangkap Ikan Kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.	HPPN 1995 Hal.:1923-1924	
56	No. 56 Tahun 1995 10 Agustus 1995	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.	HPPN 1995 Hal.:1925-1931	
57	No. 56 Tahun 1995 14 Agustus 1995	Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI.	HPPN 1995 Hal.:1932-1936	
58	No. 58 Tahun 1995 23 Agustus 1995	Pengesahan Agreement on The Creation of Association of Coffee Producing Countries (Pesetujuan Pembentukan Asosiasi Negara2 Produsen Kopi. (LN No.51)	HPPN 1995 Hal.:1937-1966	
59	No. 59 Tahun 1995 29 Agustus 1995	Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung.	HPPN 1995 Hal.:1967-1969	
60	No. 60 Tahun 1995 29 Agustus 1995	Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran dan Adikara Siaran.	HPPN 1995 Hal.:1970-1974	Dicabut dg Perpres No.62 Th.2006
61	No. 61 Tahun 1995 29 Agustus 1995	Perubahan atas Keppres No.15/1984 ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana tlh 24 Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.2 Th.1995.	HPPN 1995 Hal.:1975-1978	Diubah dg Keppres No. 2 / 1996 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
62	No. 62 Tahun 1995 31 Agustus 1995	Penyelenggaraan Urusan Haji	HPPN 1995 Hal.:1979-1985	Diubah dg Keppres No. 81 Th.1995, No.119 Th.1998
63	No. 63 Tahun 1995 31 Agustus 1995	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1996	HPPN 1995 Hal.:1986-1987	
64	No. 64 Tahun 1995 1 September 1995	Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, Dan Simpang Susun Cikupa & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPN 1995 Hal.:1988-1991	Dicabut dg Keppres No.36 Th.2003
65	No. 65 Tahun 1995 1 September 1995	Penambahan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi 8 Pondok Pinang-Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPN 1995 Hal.:1992-1995	
66	No. 66 Tahun 1995 22 September 1995	Pengesahan Protocol Relating to an Amend- ment to Article 50 (a) of The Convention on International Civil Aviation (Protokol tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) (LN No.60)	HPPN 1995 Hal.:1996-2001	
67	No. 67 Tahun 1995 22 September 1995	Pengesahan Protocol Relating to Amendment to Article 56 of the Convention on International Civil Aviation (Protokol ttg Perubahan Psl 56 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) (LN No.61)	HPPN 1995 Hal.:2002-2007	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
68	No. 68 Tahun 1995 27 September 1995	Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah.	HPPN 1995 Hal.:2008-2010	
69	No. 69 Tahun 1995 28 September 1995	Susunan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia.	HPPN 1995 Hal.:2011-2021	Dicabut dg Keppres No.16 Th.1999
70	No. 70 Tahun 1995 2 Oktober 1995	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Beirut, Libanon	HPPN 1995 Hal.:2022-2023	
71	No. 71 Tahun 1995 6 Oktober 1995	Hari Kebangkitan Teknologi Nasional	HPPN 1995 Hal.:2024-2025	
72	No. 72 Tahun 1995 14 Oktober 1995	Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Ber - motor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang, Tanjung Priok-Ancol Timur.	HPPN 1995 Hal.:2026-2028	
73	No. 73 Tahun 1995 16 Oktober 1995	Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang.	HPPN 1995 Hal.:2029-2035	Mengenai Tata Ruang Dicabut dg Perpres No.54/2008
74	No. 74 Tahun 1995 16 Oktober 1995	Perlakuan Pabean & Perpajakan Atas Impor atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian.	HPPN 1995 Hal.:2036-2038	Dicabut dg Keppres No.39 Th.1998
75	No. 75 Tahun 1995 9 Nopember 1995	Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.	HPPN 1995 Hal.:2039-2044	
76	No. 76 Tahun 1995 10 Nopember 1995	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dgn Pemerintah Rep. Demokrasi Rakyat Laos mengenai kerjasama Ekonomi & Teknik. (LN No.65)	HPPN 1995 Hal.:2045-2060	
77	No. 77 Tahun 1995 10 Nopember 1995	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Rep.of Hungary.	HPPN 1995 Hal.:2061-2082	
78	No. 78 Tahun 1995 22 Nopember 1995	Penyenggaraan Bandar Udara Hang Nadim Batam.	HPPN 1995 Hal.:2083-2085	
79	No. 79 Tahun 1995 6 Desember 1995	Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Republic of Indonesia and The Gov. of The Czech Republic for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Avation With Respect to Taxes on Income.	HPPN 1995 Hal.:2086-2116	
80	No. 80 Tahun 1995 6 Desember 1995	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPN 1995 Hal.:2117-2144	
81	No. 81 Tahun 1995 15 Desember 1995	Perubahan Keppres No.62 Th.1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.	HPPN 1995 Hal.:2145-2146	Diubah dg Kepprs No.119 Th.1998



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
82	No. 82 Tahun 1995 26 Desember 1995	Pengembangan Lahan Gambut utk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah	HPPN 1995 Hal.:2147-2151	Diubah dg Keppres No. 74 & 133/1998 Dicabut dg Keppres No.80 Th.1999
83	No. 83 Tahun 1995 26 Desember 1995	Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.	HPPN 1995 Hal.:2152-2153	
84	No. 84 Tahun 1995 30 Desember 1995	Pengesahan Protocol to Amend The Framework Agreement on Enhancing Asean Economic Cooperation	HPPN 1995 Hal.:2154-2158	
85	No. 85 Tahun 1995 30 Desember 1995	Pengesahan Protocol to Amend The Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for The	HPPN 1995 Hal.:2159-2162	
86	No. 86 Tahun 1995 30 Desember 1995	Pengesahan Protocol to Amend The Agreement on Asean Preferential Trading Arrangements (PTA).	HPPN 1995 Hal.:2163-2176	
87	No. 87 Tahun 1995 30 Desember 1995	Pengesahan Protocol to Amending The Agreement on Asean Energy Cooperation.	HPPN 1995 Hal.:2177-2182	
88	No. 88 Tahun 1995 30 Desember 1995	Pengesahan Asean Framework Agreement on Services President Republic of Indonesia.	HPPN 1995 Hal.:2183-2192	
89	No. 89 Tahun 1995 30 Desember 1995	Pengesahan Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation.	HPPN 1995 Hal.:2193-2201	
90	No. 90 Tahun 1995 26 Desember 1995	Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.	HPPN 1995 Hal.:2202-2206	Diubah dg Keppres No. 92 Th.1996 Dicabut dg Keppres No. 98 Th.1998
<b>INPRES</b>				
1	No. 1 Tahun 1995 6 Maret 1995	Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat	HPPN 1995 Hal.:2207-2208	
2	No. 2 Tahun 1995 23 Mei 1995	Kemudahan Atas Impor Mesin dan Peralatan Beserta Bahan Baku/Penolong Dalam Rangka Restrukturisasi Usaha	HPPN 1995 Hal.:2209	
3	No. 3 Tahun 1995 30 Mei 1995	Penyelenggaraan Pameran Bersama Indonesia -Singapura 1995	HPPN 1995 Hal.:2210-2211	
4	No. 4 Tahun 1995 30 Juni 1995	Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan	HPPN 1995 Hal.:2212-2218	
5	No. 5 Tahun 1995 10 Agustus 1995	Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah.	HPPN 1995 Hal.:2219-2221	
6	No. 6 Tahun 1995 10 Nopember 1995	Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI	HPPN 1995 Hal.:2222-2223	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>TAHUN 1996</b>			
	<b>KEPPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1996 2 Januari 1996	Perubahan Keppres RI No.55 Th.1989 ttg Badan Pertimbangan Telekomunikasi sbg - mana tll diubah dg Keppres RI No.117/1993.	HPPRI 1996 Hal.:615 - 617	
2	No. 2 Tahun 1996 2 Januari 1996	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No.61 Th.1995.	HPPRI 1996 Hal.:618 - 623	Diubah dg Keppres No.6 Th.1996 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
3	No. 3 Tahun 1996 22 Pebruari 1996	Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.	HPPRI 1996 Hal.:624 - 625	
4	No.4 Tahun 1996 25 Januari 1996	Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1986 Ttg Pajak Pertambahan Nilai yg terutang Atas Impor & Penyerahan Barang Kena Pajak & jasa kena pajak tertentu yg ditanggung oleh Pemerintah sbgmana telah beberapa kali Diubah Terakhir dg Keppres No.42 Th.1995.	HPPRI 1996 Hal.:626 - 630	Diubah dg Keppres No.18 Th.1996
5	No. 5 Tahun 1996 31 Januari 1996	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS.	HPPRI 1996 Hal.:631 - 636	
6	No. 6 Tahun 1996 2 Pebruari 1996	Pengesahan Agreement Between The Gov.of The Republic of Indonesia & The Gov. of The Republic of Singapore on The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region & The Jakarta Flight Information Region.	HPPRI 1996 Hal.:637 - 638	Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
7	No. 7 Tahun 1996 2 Pebruari 1996	Pengesahan Agreement Between The Gov.of The Republic of Indonesia and The Gov.of The Republic of Singapore on The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region & The Jakarta Flight Information Region.	HPPRI 1996 Hal.:639 - 648	
8	No. 8 Tahun 1996 2 Pebruari 1996	Pengesahan Agreement between the Gov. the Rep. Of Indonesia and the Gov. of the Rep. Singapore on Military Training in Areas 1 & 2. (LN No.8)	HPPRI 1996 Hal.:649 - 655	
9	No. 9 Tahun 1996 2 Pebruari 1996	Pengesahan Agreement On C A B International.	HPPRI 1996 Hal.:656 - 666	Dicabut dg Keppres No.76 Th.2001
10	No. 10 Tahun 1996 7 Pebruari 1996	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Agen.	HPPRI 1996 Hal.:667 - 668	
11	No. 11 Tahun 1996 7 Pebruari 1996	Hari Otonomi Daerah.	HPPRI 1996 Hal.:669	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
12	No. 12 Tahun 1996 9 Pebruari 1996	Penunjukan dan Penetapan Kawasan Industri PT. Bintan Inti Industrial Estate utk Diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)	HPPRI 1996 Hal.:670 - 672	
13	No. 13 Tahun 1996 14 Pebruari 1996	Pengesahan Persetujuan Perdagangan. Antara Pemerintah RI dan Pem. Rep.Sosialis Vietnam (LN No.11)	HPPRI 1996 Hal.:673 - 688	
14	No. 14 Tahun 1996 16 Pebruari 1996	Pengesahana Amandements to The Convention on The International Maritime Organization (Institutionalization of The Fazicilitation Com -munittee, 1991(Amandemen Konvensi Organi -sasi Maritim Internasional / Pelembagaan Komisi Fasilitas), 1991 Dan Amandements to The Convention on The International Maritime Organization, 1993 (Amandements Konvensi (LN No.26)	HPPRI 1996 Hal.:689 - 707	
15	No. 15 Tahun 1996 16 Pebruari 1996	Pengesahan Amandemen Agreement Relating to The International Telecom-munications Satellite Organization "Intelsat", Denmark-1995 (Perjanjian Berkenaan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat", Denmark - 1995). (LN No.27)	HPPRI 1996 Hal.:708 - 762	
16	No. 16 Tahun 1996 16 Pebruari 1996	Uang Paket Bagi Pimpinan dan DPR dan DPA	HPPRI 1996 Hal.:763 - 764	Diubah dg Keppres No.43 Th.1996
17	No. 17 Tahun 1996 22 Pebruari 1996	Perubahan atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah tiga belas kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.38 Th.1995.	HPPRI 1996 Hal.:765 - 766	Diubah dg Keppres No.38 Th.1996 Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
18	No. 18 Tahun 1996 22 Pebruari 1996	Pengesahan Constitution and convention of the International communication union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992) beserta instrumen Amandemennya, Kyoto,1994 (LN No.29)	HPPRI 1996 Hal.:767 - 986	Diubah dg Keppres No. 22 Th.1997
19	No. 19 Tahun 1996 27 Pebruari 1996	Tim Penelitian Proyek-Proyek Pemerintah Dan Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI 1996 Hal.:987 - 989	
20	No. 20 Tahun 1996 27 Pebruari 1996	Pengesahan Convention on International Liability for Damage By Space Objects 1972 (Konvensi Ttg Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Benda-benda Antariksa, 1972). (LN No.30)	HPPRI 1996 Hal.:990 - 1021	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
21	No. 21 Tahun 1996 27 Pebruari 1996	Penyediaan Dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.	HPPRI 1996 Hal.:1022 - 1023	
22	No. 22 Tahun 1996 13 Maret 1996	Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Republic of Indonesia And The Gov.of The Republic of Suriname Concerning The Promotion And Protection of Investments. (LN No.31)	HPPRI 1996 Hal.:1024 - 1033	
23	No. 23 Tahun 1996 15 Maret 1996	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Mikronesia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik. (LN No.32)	HPPRI 1996 Hal.:1034 - 1045	
24	No. 24 Tahun 1996 14 April 1996	Perubahan atas Keppres No.33 Th.1988 Ttg Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.	HPPRI 1996 Hal.:1046 - 1048	*
25	No. 25 Tahun 1996 19 Maret 1996	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Rep.of Polland Relating to Schedule Air Transport.	HPPRI 1996 Hal.:1049 - 1061	
26	No. 26 Tahun 1996 18 April 1996	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, & Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Produksi Dan Distribusi.	HPPRI 1996 Hal.:1062 - 1068	Dicabut dg Keppres No.59 Th.1998
27	No. 27 Tahun 1996 18 April 1996	Perubahan Atas Keppres No.32 Th.1993 Ttg Koordinasi Pembangunan Prop.Riau sebagai mana tlh Diubah dg Keppres No.49 Th ' 93.	HPPRI 1996 Hal.:1069 - 1070	Diubah dg Keppres No. 66 Th.1998
28	No. 28 Tahun 1996 18 April 1996	Perubahan Atas Keppres No.26 Th.1994 Ttg Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand.	HPPRI 1996 Hal.:1071 - 1073	Dicabut dg Keppres No.72 Th.1996
29	No. 29 Tahun 1996 18 April 1996	Perubahan Atas Keppres No.28 Th.1994 Ttg Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam - Malaysia - Philipina.	HPPRI 1996 Hal.:1074 - 1076	Dicabut dg Keppres No.73 Th.1996
30	No. 30 Tahun 1996 18 April 1996	Perubahan Atas Keppres No.79 Th.1994 Ttg Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapura.	HPPRI 1996 Hal.:1077 - 1078	
31	No. 31 Tahun 1996 18 April 1996	Perubahan Atas Keppres No.27 Th.1995 Ttg Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura.	HPPRI 1996 Hal.:1079 - 1081	Dicabut dg Keppres No.74 Th.1996
32	No. 32 Tahun 1996 18 April 1996	Perubahan atas Keppres No.80 Th.1994 Ttg Tim Tarif dan Fiskal.	HPPRI 1996 Hal.:1082 - 1083	
33	No. 33 Tahun 1996 3 Mei 1996	Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.	HPPRI 1996 Hal.:1084 - 1086	Diubah dg Keppres No.106 Th.2000 Dicabut dg Perpres No.21 Th.2006
34	No. 34 Tahun 1996 8 Mei 1996	Tunjangan Pengabdian bagi Peg. Negeri yg bekerja & bertempat Tinggal di Wil. Terpencil.	HPPRI 1996 Hal.:1087 - 1090	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
34	No. 34 Tahun 1996 8 Mei 1996	Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wil.Terpencil.	HPPRI 1996 Hal.:1087 - 1090	
35	No. 35 Tahun 1996 15 Mei 1996	Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.	HPPRI 1996 Hal.:1091 - 1093	Diubah dg Keppres No. 52 Th.1996 Dicabut dg Keppres No.22 Th.2001
36	No. 36 Tahun 1996 23 Mei 1996	Perincian Pengeluaran Rutin TA.1996/1997	HPPRI 1996 Hal.:1094 - 1095	
37	No. 37 Tahun 1996 23 Mei 1996	Perincian Pengeluaran Pembangunan TA.1996/1997	HPPRI 1996 Hal.:1096 - 1097	
38	No. 38 Tahun 1996 24 Mei 1996	Perubahan atas Keppres No.9 Th.1985 Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali diubah, Terakhir Keppres No.17	HPPRI 1996 Hal.:1098 - 1100	Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
39	No. 39 Tahun 1996 24 Mei 1996	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Perekayasa	HPPRI 1996 Hal.:1101 - 1102	
40	No. 40 Tahun 1996 27 Mei 1996	Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata RI Dan Utusan Golongan2 Serta Calon Anggota DPR dari Golongan Karya ABRI	HPPRI 1996 Hal.:1103 - 1112	
41	No. 41 Tahun 1996 4 Juni 1996	Kawasan Industri	HPPRI 1996 Hal.:1113 - 1121	
42	No. 42 Tahun 1996 4 Juni 1996	Pembuatan Mobil Nasional	HPPRI 1996 Hal.:1122 - 1123	Dicabut dg Keppres No.20 Th.1998
43	No. 43 Tahun 1996 11 Juni 1996	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No.16 Th.1996.	HPPRI 1996 Hal.:1124 - 1130	Diubah dg Keppres No.76 Th.1996 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
44	No. 44 Tahun 1996 11 Juni 1996	Pengesahan Fifth Additional Protocol to The Constitution of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Kelima Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia).	HPPRI 1996 Hal.:1131 - 1142	
45	No. 45 Tahun 1996 18 Juni 1996	Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol.	HPPRI 1996 Hal.:1143 - 1145	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
46	No. 46 Tahun 1996 18 Juni 1996	Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo & Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor & Besarnya Tarif Tol.	HPPRI 1996 Hal.:1146 - 1150	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
47	No. 47 Tahun 1996 19 Juni 1996	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sbg jalan tol, penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan penyesuaian besarnya tarif tol jalan bebas hambatan lingkak dalam kota Jakarta.	HPPRI 1996 Hal.:1151 - 1153	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
48	No. 48 Tahun 1996 19 Juni 1996	Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang di - Impor Oleh PT. Freeport Indonesia.	HPPRI 1996 Hal.:1154 - 1155	
49	No. 49 Tahun 1996 20 Juni 1996	Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir.Sedijatmo, Penetapan Jenis Kend. Bermotor & Besarnya Tarif Tol.	HPPRI 1996 Hal.:1156 - 1158	
50	No. 50 Tahun 1996 24 Juni 1996	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Australia Ttg Pemeliharaan Keamanan.	HPPRI 1996 Hal.:1159 - 1164	Dicabut dg Keppres No.128 Th.1999
51	No. 51 Tahun 1996 4 Juli 1996	Pengesahan Basic Agreement on the Asean Industrial Cooperation Scheme.	HPPRI (2) 1996 Hal.:573 - 584	
52	No. 52 Tahun 1996 4 Juli 1996	Perubahan Keppres No.35/1996 ttg Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.	HPPRI (2) 1996 Hal.:585 - 588	Dicabut dg Keppres No.22 Th.2001
53	No. 53 Tahun 1996 4 Juli 1996	Penambahan Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI (2) 1996 Hal.:589	
54	No. 54 Tahun 1996 8 Juli 1996	Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.	HPPRI (2) 1996 Hal.:590 - 591	Diubah dg Keppres No. 61 Th.1996
55	No. 55 Tahun 1996 8 Juli 1996	Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	HPPRI (2) 1996 Hal.:592 - 594	Dicabut dg Keppres No.72 Th.1998
56	No. 56 Tahun 1996 9 Juli 1996	Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	HPPRI (2) 1996 Hal.:595 - 596	
57	No. 57 Tahun 1996 15 Juli 1996	Penyelenggaraan Perjalanan Umroh	HPPRI (2) 1996 Hal.:597 - 600	
58	No. 58 Tahun 1996 19 Juli 1996	Pengesahan Second Protocol to The General Agreement on Trade in Services Beserta Lampirannya	HPPRI (2) 1996 Hal.:601 - 610	
59	No. 59 Tahun 1996 19 Juli 1996	Pengesahan Agreement Between Thee Gov.of The Rep. of Indonesia & The Gov.of Australia for Cooperation in Scientific Research & The Technological Development.	HPPRI (2) 1996 Hal.:611 - 659	
60	No. 60 Tahun 1996 26 Juli 1996	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1997	HPPRI (2) 1996 Hal.:660 - 661	Dicabut dg Keppres No.36 Th.1997.
61	No. 61 Tahun 1996 12 Agustus 1996	Perubahan atas Keppres No.54/1996 ttg Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.	HPPRI (2) 1996 Hal.:662 - 663	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
62	No. 62 Tahun 1996 15 Agustus 1996	Pembentukan Delegasi RI utk Konferensi Tk. Menteri Organisasi Perdagangan Dunia.	HPPRI (2) 1996 Hal.:664 - 667	
63	No. 63 Tahun 1996 16 Agustus 1996	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Islam Pakistan Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1996 Hal.:668 - 686	
64	No. 64 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Ukraina.	HPPRI (2) 1996 Hal.:687 - 703	
65	No. 65 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Ukraina Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (2) 1996 Hal.:704 - 714	
66	No. 66 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Ukraina Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1996 Hal.:715 - 747	
67	No. 67 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Kyrgyzstan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (2) 1996 Hal.:748 - 764	
68	No. 68 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Tunjangan Teknik Penelitian & Perekayasaan	HPPRI (2) 1996 Hal.:765 - 767	Dicabut dg Keppres No.40 Th.2003
69	No. 69 Tahun 1996 21 Agustus 1996	Tunjangan Perekayasa	HPPRI (2) 1996 Hal.:768 - 770	Dicabut dg Keppres No.40 Th.2003
70	No. 70 Tahun 1996 22 Agustus 1996	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Kazakhstan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (2) 1996 Hal.:771 - 787	
71	No. 71 Tahun 1996 16 September 1996	Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kaw. Pengembangan Ekonomi Terpadu.	HPPRI (2) 1996 Hal.:788 - 792	Diubah dg Keppres No. 17 Th. 1999 Dicabut dg PP No.20 Th.2000
72	No. 72 Tahun 1996 3 Oktober 1996	Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia - Thailand.	HPPRI (2) 1996 Hal.:793 - 796	
73	No. 73 Tahun 1996 18 September 1996	Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia -Philipina.	HPPRI (2) 1996 Hal.:797 - 801	
74	No. 74 Tahun 1996 18 September 1996	Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura.	HPPRI (2) 1996 Hal.:802 - 806	
75	No. 75 Tahun 1996 25 September 1996	Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.	HPPRI (2) 1996 Hal.:807 - 813	
76	No. 76 Tahun 1996 25 September 1996	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Duapuluh Delapan Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No.43 Th.1996.	HPPRI (2) 1996 Hal.:814 - 817	Diubah dg Keppres No. 23 Th.1997 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
77	No. 77 Tahun 1996 30 September 1996	Dewan Kelautan Nasional	HPPRI (2) 1996 Hal.:818 - 823	Dicabut dg Keppres No.161 Th.1999
78	No. 78 Tahun 1996 1 Oktober 1996	Penetapan jln lingkaran luar Jakarta seksi ruas Lenteng Agung Kampung Melayu-Kampung Rambutan sebagai jalan tol, penetapan ramp dari jalan tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) menuju jalan tol lingkaran luar Jakarta seksi s dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol.	HPPRI (2) 1996 Hal.:824 - 828	
79	No. 79 Tahun 1996 9 Oktober 1996	Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna.	HPPRI (2) 1996 Hal.:829 - 831	
80	No. 80 Tahun 1996 11 Oktober 1996	Pembangunan Kelompok Hutan Sisnemi - Sanam Sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes.	HPPRI (2) 1996 Hal.:832 - 834	
81	No. 81 Tahun 1996 11 Oktober 1996	Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI (2) 1996 Hal.:835 - 838	
82	No. 82 Tahun 1996 25 Oktober 1996	Pengesahan Agreement Between The Gov. Of The Republic of Indonesia and The Gov. Of The Republic of Finland for The Promotion And Protections of Investments. (LN No.95)	HPPRI (2) 1996 Hal.:839 - 860	
83	No. 83 Tahun 1996 25 Oktober 1996	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. (LN No.96)	HPPRI (2) 1996 Hal.:861 - 887  Hal.:839 - 860	
84	No. 84 Tahun 1996 31 Oktober 1996	Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan Asean.	HPPRI (2) 1996 Hal.:888 - 889	
85	No. 85 Tahun 1996 1 Nopember 1996	Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibirong, Tigaraksa dan Pandan.	HPPRI (2) 1996 Hal.:890 - 894	
86	No. 86 Tahun 1996 1 Nopember 1996	Hari dan tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I, & DPRD Tingkat II Th.1997.	HPPRI (2) 1996 Hal.:895 - 896	
87	No. 87 Tahun 1996 11 Nopember 1996	Perubahan Atas Keppres No.8 Th.1978 ttg Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana telah Empat Kali Diubah, terakhir dg Keppres No.16 Th. 1991.	HPPRI (2) 1996 Hal.:897 - 898	Dicabut dg Keppres No.62 Th.1998



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
88	No. 88 Tahun 1996 20 Nopember 1996	Perubahan Atas Keppres No.8/1978 Penge - sahan Protocol Amending The Convention Between The Gov. of The Rep. Of Indonesia and The Gov. of The United States of America for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income, with a Related Protocol and Exchange of Notes Signed at Jakarta on The 11 <sup>th</sup> Day of Juli, 1988.	HPPRI (2) 1996 Hal.:899 - 904	
89	No. 89 Tahun 1996 3 Desember 1996	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	HPPRI (2) 1996 Hal.:905 - 909	Diubah dg Keppres No. 9 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.150 Th.2000 Dicabut dg PP No.20 Th.2000
90	No. 90 Tahun 1996 3 Desember 1996	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.	HPPRI (2) 1996 Hal.:910 - 912	Diubah dg Keppres No. 10 Th.1998 Dicabut dg PP No.20 Th.2000
91	No. 91 Tahun 1996 3 Desember 1996	Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Peme- rintah RI dan Pemerintah Rep. Rakyat Sosialis Arab Libya Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik. (LN No.105)	HPPRI (2) 1996 Hal.:913 - 928	
92	No. 92 Tahun 1996 3 Desember 1996	Perubahan Keppres No.90 Th.1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I.	HPPRI (2) 1996 Hal.:929 - 930	Dicabut dg Keppres No. 98 Th.1998
93	No. 93 Tahun 1996 10 Desember 1996	Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas.	HPPRI (2) 1996 Hal.:931 - 933	Dicabut dg Keppres No.187 Th.1998
94	No. 94 Tahun 1996 16 Desember 1996	Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995). (LN No.109)	HPPRI (2) 1996 Hal.:934 - 1084	
95	No. 95 Tahun 1996 18 Desember 1996	Penambahan Gerbang Tol Merak dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI (2) 1996 Hal.:1085 - 1087	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
96	No. 96 Tahun 1996 18 Desember 1996	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas - Manyar sbg Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI (2) 1996 Hal.:1088 - 1090	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
97	No. 97 Tahun 1996	Persetujuan Perubahan Anggran Dasar Kamar Dagang dan Industri.	HPPRI (2) 1996 Hal.:1091 - 1141	Dicabut dg Keppres No.61 Th.2000

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
98	No. 98 Tahun 1996 20 Desember 1996	Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai Negeri beserta janda/dudanya yg menetap & bertempat tinggal di Prov. Dati I Irian Jaya & Timtim.	HPPRI (2) 1996 Hal.:1142 - 1145	
99	No. 99 Tahun 1996 24 Desember 1996	Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.	HPPRI (2) 1996 Hal.:1146 - 1161	Dicabut dg PP No.33 Th.1999
	<b>INPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1996 7 Pebruari 1996	Penetapan Harga Dasar Gabah	HPPRI 1996 Hal.:1167 - 1169	
2	No. 2 Tahun 1996 19 Pebruari 1996	Pembangunan Industri Mobil Nasional	HPPRI 1996 Hal.:1170 - 1171	Dicabut dg Keppres No.20 Th.1998
3	No. 3 Tahun 1996 11 Maret 1996	Pembangunan Keluarga Sejahtrea Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.	HPPRI 1996 Hal.:1172 - 1175	
4	No. 4 Tahun 1996 8 April 1996	Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh.	HPPRI 1996 Hal.:1176 - 1178	
5	No. 5 Tahun 1996 11 Juni 1996	Penyelenggaraan Sea Gamess XIX, 1997 di Jakarta	HPPRI 1996 Hal.:1179 - 1180	
	<b>TAHUN 1997</b>			
	<b>KEPPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1997 15 Januari 1997	Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.	HPPRI 1997 Hal.: 837 - 845	
2	No. 2 Tahun 1997 29 Januari 1997	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Deli.	HPPRI 1997 Hal.: 846 - 851	
3	No. 3 Tahun 1997 31 Januari 1997	Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.	HPPRI 1997 Hal.: 852 - 856	Dicabut dg Perpres No.74 Th.2013
4	No. 4 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pem. Rep. Indonesia & Pem. Rep.Irak Mengenai Kerjasama Ekonomi Ilmu Pengetahuan dan Teknik. (LN No.11)	HPPRI 1997 Hal.: 857 - 874	
5	No. 5 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pengesahan Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1977 (Konvensi Tentang Registrasi Benda-benda yg Diluncurkan ke Antariksa, 1975) (LN No.12)	HPPRI 1997 Hal.: 875 - 887	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
6	No. 6 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Sosialis Demokratik Sri Lanka Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.13)	HPPRI 1997 Hal.: 888 - 916	
7	No. 7 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Kyrgyzstan. (LN No.14)	HPPRI 1997 Hal.: 917 - 978	
8	No. 8 Tahun 1997 14 Maret 1997	Perubahan Atas Keppres No.16 Th.1994 Ttg Pelaksanaan APBN Sebagaimana tih Diubah dg Keppres Np.24 Th.1995.	HPPRI 1997 Hal.: 979 - 982	Diubah dg Keppres No. 6 Th. 1999 Dicabut dg Keppres No.17 Th.2000
9	No. 9 Tahun 1997 17 Maret 1997	Perubahan Atas Keppres No.23 Th.1995 Ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan.	HPPRI 1997 Hal.: 983 - 987	Diubah dg Keppres No.101 Th.2000
10	No.10 Tahun 1997 18 Mei 1997	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Mengenai Pelayaran. (LN No.15).	HPPRI 1997 Hal.: 988 - 1014	
11	No.11 Tahun 1997 21 Maret 1997	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.	HPPRI 1997 Hal.: 1015 - 1019	Dicabut dg Perpres No.48/2009; No.1/2011 <b>No.143,181/2014</b>
12	No.12 Tahun 1997 25 Maret 1997	Penetapan Propinsi Dati I Lampung dan NTT Sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi.	HPPRI 1997 Hal.: 1020 - 1021	
13	No.13 Tahun 1997 26 Maret 1997	Badan Standardisasi Nasional.	HPPRI 1997 Hal.: 1022 - 1032	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
14	No.14 Tahun 1997 12 Maret 1997	Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pem. RI & Pem. Rep.Irak Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik.	HPPRI 1997 Hal.: 1033 - 1034	
15	No.15 Tahun 1997 7 Mei 1997	Perubahan Keppres No.24 Th.1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protecting Of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.	HPPRI 1997 Hal.: 1035 - 1080	
16	No.16 Tahun 1997 7 Mei 1997	Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under The PCT.	HPPRI 1997 Hal.: 1081 - 1247	
17	No.17 Tahun 1997 7 Mei 1997	Pengesahan Trademark Law Treaty.	HPPRI 1997 Hal.: 1248 - 1314	
18	No.18 Tahun 1997 7 Mei 1997	Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literacy and Artistic Works.	HPPRI 1997 Hal.: 1315 - 1374	
19	No.19 Tahun 1997 7 Mei 1997	Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.	HPPRI 1997 Hal.: 1375 - 1415	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
20	No.20 Tahun 1997 3 Juni 1997	Pengesahan Convention Relating to International Exhibitions Beserta Protocol (Konvensi Mengenai Pameran Internasional beserta Protokol) (LN No.47)	HPPRI 1997 Hal.: 1416 - 1439	
21	No.21 Tahun 1997 3 Juni 1997	Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.	HPPRI 1997 Hal.: 1440 - 1451	Dicabut dg Keppres No.24 Th.1999
22	No.22 Tahun 1997 13 Juni 1997	Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1996 Ttg Pajak Pertambahan Nilai yg Terutang Atas Impor & Penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak tertentu yg ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana tih beberapa kali Diubah Terakhir dg Keppres No.4 Th.1996. (LN No.48)	HPPRI 1997 Hal.: 1452 - 1456	
23	No.23 Tahun 1997 13 Juni 1997	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No.76 Th.1996.	HPPRI 1997 Hal.: 1457 - 1463	Diubah dg Keppres No.32 Th.1997 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
24	No.24 Tahun 1997 20 Juni 1997	Perubahan atas Keppres No.29/1990 ttg Dana Reboisasi sebagaimana tih beberapa kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.40 Th.1993.	HPPRI 1997 Hal.: 1464 - 1467	Diubah dg Keppres No. 53
25	No.25 Tahun 1997 30 Juni 1997	Bumi perkemahan Pramuka & pengembangan Sumberdaya Pemuda Tien Suharto.	HPPRI 1997 Hal.: 1468 - 1469	
26	No.26 Tahun 1997 30 Juni 1997	Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Republic of Indonesia and The Gov. of Hongkong Concerning Air Services. (LN No.52)	HPPRI 1997 Hal.: 1470 - 1490	
27	No.27 Tahun 1997 7 Juli 1997	Perincian Pengeluaran Rutin TA 1997/1998	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1071 - 1072	
28	No.28 Tahun 1997 7 Juli 1997	Perincian Pengeluaran Pembangunan TA.1997/1998.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1073 - 1074	
29	No.29 Tahun 1997 16 Juli 1997	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik. (LN No.62)	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1075 - 1085	
30	No.30 Tahun 1997 31 Juli 1997	Tim Koordinasi Telematika Indonesia.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1086 - 1088	
31	No.31 Tahun 1997 31 Juli 1997	Pembangunan & Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Swasta.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1089 - 1092	
32	No.32 Tahun 1997 2 Agustus 1997	Perubahan atas Keppres No.15/1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Tiga Puluh Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.23 Th.1997.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1093 - 1097	Diubah dg Keppres No.48 Th.1997 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
33	No.33 Tahun 1997 12 Agustus 1997	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1098 - 1099	
34	No.34 Tahun 1997 21 Agustus 1997	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Lima, Lima.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1100 - 1101	
35	No.35 Tahun 1997 7 Oktober 1997	Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1102 - 1103	Diubah dg Keppres No.72 Th.1999
36	No.36 Tahun 1997 25 Agustus 1997	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1998.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1104 - 1105	Dicabut dg Keppres No.122 Th.1998
37	No.37 Tahun 1997 28 Agustus 1997	Pengesahan Protocol on Dispute Settlement Mechanism (Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa).	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1106 - 1118	
38	No.38 Tahun 1997 1 September 1997	Pemberian Fasilitas Perpajakan Kepada Usaha Industri Tertentu.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1119 - 1121	
39	No.39 Tahun 1997 20 September 1997	Penangguhan / Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1122 - 1139	Dicabut dg Keppres No.15 Th.2002
40	No.40 Tahun 1997 20 September 1997	Badan Pengendalian Bimbingan Masal	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1140 - 1153	
41	No.41 Tahun 1997 7 Oktober 1997	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1154 - 1156	
42	No.42 Tahun 1997 14 Oktober 1997	Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1157 - 1160	Diubah dg Keppres No.66 Th.2000 Dicabut dg Keppres No.87 Th.2003
43	No.43 Tahun 1997 17 Oktober 1997	Bantuan Dana Untuk Rehabilitasi Perkebunan Pala Di Kepulauan Banda Naira.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1161 - 1163	
44	No.44 Tahun 1997 23 Oktober 1997	Jaringan Angkutan Masal Metropolitan	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1164 - 1170	
45	No.45 Tahun 1997 1 Nopember 1997	Perubahan Keppres No.50 Th.1995 tentang Badan Urusan Logistik.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1171 - 1172	Diubah dg Keppres No.19 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.29 Th.2000
46	No.46 Tahun 1997 1 Nopember 1997	Karantina Bahan Baku Kulit	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1173 - 1176	
47	No.47 Tahun 1997 1 Nopember 1997	Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, BUMN, dan Swasta Yg Berkaitan Dengan Pemerintah / BUMN Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1177 - 1179	Dicabut dg Keppres No.5 Th.1998

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
48	No.48 Tahun 1997 11 Nopember 1997	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Tiga Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No.32 Th.1997.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1180 - 1183	Diubah dg Keppres No.3 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
49	No.49 Tahun 1997 29 Desember 1997	Pengesahan Special Agreement For Sub Mission to The International Court of Justice of The Dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan. (LN No.94)	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1184 - 1193	
50	No.50 Tahun 1997 29 Desember 1997	Perpustakaan Nasional RI.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1194 - 1201	Dicabut dg Keppres No.67 Th.2000
51	No.51 Tahun 1997 29 Desember 1997	Penetapan Pelabuhan Laut Kabil Pulau Batam Sebagai Pelabuhan Alih Kapal.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1202 - 1203	
52	No.52 Tahun 1997 31 Desember 1997	Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1204 - 1208	Dicabut dg Keppres No.83 Th.2003
53	No.53 Tahun 1997 31 Desember 1997	Perubahan Atas Keppres No.29 Th.1990 Ttg Dana Reboisasi Sebagaimana tih Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.24/1997. (LN No.99)	HPPRI 1997 (2) Hal.: 1209 - 1213	Diubah dg Keppres No.32 Th.1998
107	No.107/M Th.1997 2 Mei 1997	Pengangkatan 10 Hakim Agung		
352	No.352/M Th.1997 20 Desember 1997	Pemberhentian Dari Jabatannya 4 Direktur Bank Indonesia.		
	<b>INPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1997 15 Januari 1997	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah	HPPRI 1997 Hal.:1493-1502	
2	No. 2 Tahun 1997 12 Pebruari 1997	Penetapan Harga Gabah Dasar Gabah	HPPRI 1997 Hal.:1503-1505	
3	No. 3 Tahun 1997 12 Pebruari 1997	Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak	HPPRI 1997 Hal.:1506-1509	
4	No. 4 Tahun 1997 15 April 1997	Penelitian Kekayaan Yang Semestinya Bisa Dimanfaatkan Oleh Negara	HPPRI 1997 Hal.:1510-	
5	No. 5 Tahun 1997 29 Desember 1997	Program Pengembangan Tebu Rakyat	HPPRI 1997 (2) Hal.:1215 -1221	Dicabut dg Inpres No.5 Th.1998
	<b>TAHUN 1998</b>			
	<b>KEPPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1998 7 Januari 1998	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pem. RI & Pem. Kerajaan Maroko.	HPPRI 1998 Hal.: 681 - 715	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No. 2 Tahun 1998 7 Januari 1998	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia & The Gov. of People's Rep.of Bangladesh.	HPPRI 1998 Hal.: 716 - 733	
3	No. 3 Tahun 1998 9 Januari 1998	Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1985 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah 32 Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.48 Th.1997.	HPPRI 1998 Hal.: 734 - 739	Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998
4	No. 4 Tahun 1998 9 Januari 1998	Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia.	HPPRI 1998 Hal.: 740 - 741	
5	No. 5 Tahun 1998 10 Januari 1998	Pencabutan Keppres No.47 Th.1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah BUMN dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/BUMN Yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.	HPPRI 1998 Hal.: 742 - 744	
6	No. 6 Tahun 1998 10 Januari 1998	Pengesahan Agreement Between The Gov. Of The Republic of Indonesia and The Gov. Of The Republic of Mauritius for The Avoidance Of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income.	HPPRI 1998 Hal.: 745 - 767	
7	No. 7 Tahun 1998 12 Januari 1998	Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan & Atau Pengelolaan Infrastruktur.	HPPRI 1998 Hal.: 768 - 789	Dicabut dg Perpres No.67 Th.2005
8	No. 8 Tahun 1998 12 Januari 1998	Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong.	HPPRI 1998 Hal.: 790 - 792	
9	No. 9 Tahun 1998 19 Januari 1998	Perubahan Atas Keppres No.89 Th.1996 Ttg Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.	HPPRI 1998 Hal.: 793 - 797	Dicabut dg Keppres No.150 Th.2000 Dicabut dg PP No.20 Th.2000
10	No. 10 Tahun 1998 19 Januari 1998	Perubahan Atas Keppres No.90 Th.1996 Ttg Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.	HPPRI 1998 Hal.: 798 - 801	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
11	No. 11 Tahun 1998 19 Januari 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batu Licin.	HPPRI 1998 Hal.: 802 - 806	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
12	No. 12 Tahun 1998 19 Januari 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sango-sango, Muara Jawa dan Balikpapan.	HPPRI 1998 Hal.: 807 - 811	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
13	No. 13 Tahun 1998 19 Januari 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau.	HPPRI 1998 Hal.: 812 - 816	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
14	No. 14 Tahun 1998 19 Januari 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado - Bitung.	HPPRI 1998 Hal.: 817 - 821	Dicabut dg PP No.20 Th.2000



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No. 15 Tahun 1998 19 Januari 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay.	HPPRI 1998 Hal.: 822 - 826	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
16	No. 16 Tahun 1998 20 Januari 1998	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli - Kaligawe sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Srandol Jatingaleh.	HPPRI 1998 Hal.: 827 - 830	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
17	No. 17 Tahun 1998 21 Januari 1998	Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.	HPPRI 1998 Hal.: 831 - 833	Diubah dg Keppres No. 47 Th. 1998 Dicabut dg Keppres No.144 Th.1999
18	No. 18 Tahun 1998 21 Januari 1998	Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.	HPPRI 1998 Hal.: 834 - 835	Diubah dg Keppres No. 28 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.144 Th.1999
19	No. 19 Tahun 1998 21 Januari 1998	Perubahan Atas Keppres No.50 Th.1995 Ttg Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No.45 Th.1997.	HPPRI 1998 Hal.: 836 - 837	Dicabut dg Keppres No.29 Th.2000
20	No. 20 Tahun 1998 21 Januari 1998	Pencabutan Keppres No.42 Th.1996 Tentang Pembuatan Mobil Nasional.	HPPRI 1998 Hal.: 838	
21	No. 21 Tahun 1998 21 Januari 1998	Perdagangan Cengkeh.	HPPRI 1998 Hal.: 839 - 840	
22	No. 22 Tahun 1998 21 Januari 1998	Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru.	HPPRI 1998 Hal.: 841 - 842	
23	No. 23 Tahun 1998 21 Januari 1998	Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter.	HPPRI 1998 Hal.: 843 - 844	
24	No. 24 Tahun 1998 23 Januari 1998	Penerbitan Jaminan Bank Indonesia Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Yang Telah diizinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing.	HPPRI 1998 Hal.: 845 - 848	
25	No. 25 Tahun 1998 24 Januari 1998	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon - Kanci Sebagai Jalan Tol & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI 1998 Hal.: 849 - 851	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
26	No. 26 Tahun 1998 26 Januari 1998	Jaminan Terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum.	HPPRI 1998 Hal.: 852 - 854	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000 Diubah dg Keppres No.17 Th.2004 & No.95 Th.2004
27	No. 27 Tahun 1998 26 Januari 1998	Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	HPPRI 1998 Hal.: 855 - 856	Dicabut dg Keppres No.15 Th.2004

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No. 28 Tahun 1998 29 Januari 1998	Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1998 Ttg Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.	HPPRI 1998 Hal.: 857 - 858	Diubah dg Keppres No.29 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.144 Th.1999
29	No. 29 Tahun 1998 10 Pebruari 1998	Perubahan Atas Keppres No.8 Th.1988 Ttg Tim Ahli pd Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres No.28 Th.1998.	HPPRI 1998 Hal.: 859 - 860	Diubah dg Keppres No. 128 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.144 Th.1999
30	No. 30 Tahun 1998 14 Pebruari 1998	Pengangkatan Penasehat Ahli pd Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi & Keuangan.	HPPRI 1998 Hal.: 861	
31	No. 31 Tahun 1998 23 Pebruari 1998	Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.	HPPRI 1998 Hal.: 862 - 864	
32	No. 32 Tahun 1998 25 Pebruari 1998	Perubahan Atas Keppres No.29 Th.1990 Ttg Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dg Keppres No.53 / 1997.	HPPRI 1998 Hal.: 865 - 869	
33	No. 33 Tahun 1998 28 Pebruari 1998	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.	HPPRI 1998 Hal.: 870 - 876	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
34	No. 34 Tahun 1998 5 Maret 1998	Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	HPPRI 1998 Hal.: 877 - 881	
35	No. 35 Tahun 1998 6 Maret 1998	Perubahan Atas Keppres No.14 Th.1995 Ttg Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Diubah Dgn Keppres No.39 Th.1995.	HPPRI 1998 Hal.: 882 - 883	Diubah dg Keppres No. 35 Th.1998
36	No. 36 Tahun 1998 7 Maret 1998	Pemberian Fasilitas Kredit kpd Anggota DPR RI utk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI 1998 Hal.: 884 - 885	Dicabut dg Keppres No.87 Th.2000
37	No. 37 Tahun 1998 9 Maret 1998	Perubahan Atas Keppres No. 8 Th.1985 Ttg Pajak Pertambahan Nilai Yg Terutang Atas Impor Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana .....	HPPRI 1998 Hal : 886 - 889	Diubah dg Keppres No. 204 Th.1998
38	No. 38 Tahun 1998 9 Maret 1998	Perubahan Atas Keppres No.37 Th.1992 Ttg Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta	HPPRI 1998 Hal : 890 - 892	
39	No. 39 Tahun 1998 9 Maret 1998	Pencabutan Atas Keppres No.74 Th.1995 Ttg Perlakuan Pabean dan Perpajakan Atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian.	HPPRI 1998 Hal : 893 - 895	
40	No. 40 Tahun 1998 9 Maret 1998	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI & Pemerintahan Kamboja.	HPPRI 1998 Hal : 896 - 909	
41	No. 41 Tahun 1998 9 Maret 1998	Pengesahan International Convention on The Establishment of an International Fund for Compensation For Oil Pollution Damage,1971.	HPPRI 1998 Hal : 910 - 912	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
42	No. 42 Tahun 1998 10 Maret 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Mozambik Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI 1998 Hal : 913 - 929	
43	No. 43 Tahun 1998 10 Maret 1998	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. Of Indonesia And The Gov. of The Rep. Of Croatia.	HPPRI 1998 Hal : 930 - 952	
44	No. 44 Tahun 1998 10 Maret 1998	Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. Of Indonesia And The Gov. of The Rep. Of South Africa.	HPPRI 1998 Hal : 953 - 981	
45	No. 45 Tahun 1998 10 Maret 1998	Pengesahan air transport agreement between The Gov. of The Rep. Of Indonesia & The Gov. Of The Laos People's Democratic	HPPRI 1998 Hal : 982 - 1003	
46	No. 46 Tahun 1998 10 Maret 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	HPPRI 1998 Hal : 1004 - 1018	
47	No. 47 Tahun 1998 19 Maret 1998	Perubahan Atas Keppres No.17 Th.1998 Ttg Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan.	HPPRI 1998 Hal : 1019 - 1021	Diubah dg Keppres No. 81 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.144 Th.1999
48	No. 48 Tahun 1998	BATAL	-	
49	No. 49 Tahun 1998 21 Maret 1998	Pengesahan Additional Protocol to The Constitution of The Asian Pasific Postal Union (Protokol Tambahan pd Kostitusi Perhimpunan Pos Asia Pasifik).	HPPRI 1998 Hal : 1022 - 1043	
50	No. 50 Tahun 1998 23 Maret 1998	Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	HPPRI 1998 Hal : 1044 - 1047	
51	No. 51 Tahun 1998 24 Maret 1998	Perubahan Atas Keppres No.47 Th.1994 Ttg Badan Pertimbangan Jabatan Tkt. Nasional.	HPPRI 1998 Hal : 1048 - 1049	
52	No. 52 Tahun 1998 31 Maret 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Djibouti Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI 1998 Hal : 1050 - 1066	
53	No. 53 Tahun 1998 31 Maret 1998	Pengesahan Protocol to Implement The Initial Package of Commitments Under The Asean Forage of Commitments.	HPPRI 1998 Hal : 1067 - 1099	
54	No. 54 Tahun 1998 31 Maret 1998	Perubahan Atas Keppres No.14 Th.1995 Ttg Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No.35 Th.1998.	HPPRI 1998 Hal : 1100 - 1101	
55	No. 55 Tahun 1998 6 April 1998	Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang.	HPPRI 1998 Hal : 1102 - 1103	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
56	No. 56 Tahun 1998 8 April 1998	Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta.	HPPRI 1998 Hal : 1104 - 1106	Dicabut dg Keppres No.137 Th.2000
57	No. 57 Tahun 1998 13 April 1998	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI 1998 Hal : 1107 - 1110	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
58	No. 58 Tahun 1998 13 April 1998	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.	HPPRI 1998 Hal : 1111 - 1112	Diubah dg Keppres No. 30 Th. 1999 Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
59	No. 59 Tahun 1998 13 April 1998	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	HPPRI 1998 Hal : 1113 - 1125	
60	No. 60 Tahun 1998 13 April 1998	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI 1998 Hal : 1126 - 1136	Diubah dg Keppres No.77 Th.1998
61	No. 61 Tahun 1998 13 April 1998	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.	HPPRI 1998 Hal : 1137 - 1193	Diubah dg Keppres No.102 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.136 Th.1999
62	No. 62 Tahun 1998 13 April 1998	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Negara.	HPPRI 1998 Hal : 1194 - 1202	
63	No. 63 Tahun 1998 13 April 1998	Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden RI.	HPPRI 1998 Hal : 1203 - 1206	Dicabut dg Keppres No.56 Th.2000
64	No. 64 Tahun 1998 13 April 1998	Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI 1998 Hal : 1207 - 1214	
65	No. 65 Tahun 1998 13 April 1998	Pengesahan Amandement to Article 43 Paragraph 2 of The Convention on The Right of The Child (Perubahan Thd Pasal 43 ayat (2) Konvensi Tentang Hak-hak Anak).	HPPRI 1998 Hal : 1215 - 1216	
66	No. 66 Tahun 1998 15 April 1998	Perubahan Atas Keppres No.32 Th.1993 Ttg Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No.27 Th.1996.	HPPRI 1998 Hal : 1217 - 1218	
67	No. 67 Tahun 1998 20 April 1998	Perubahan Atas Keppres No.30 Th.1990 Ttg Pengenaan Pemungutan & Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah.	HPPRI 1998 Hal : 1219 - 1222	
68	No. 68 Tahun 1998	KOSONG		
69	No. 69 Tahun 1998 4 Mei 1998	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI 1998 Hal : 1223 - 1224	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
70	No. 70 Tahun 1998 4 Mei 1998	Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.	HPPRI 1998 Hal : 1225 - 1232	Diubah dg Keppres No. 79 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.48 Th.2000
71	No. 71 Tahun 1998 4 Mei 1998	Perubahan atas Keppres No.67 Th.1980 Ttg Badan Pertimbangan Kepegawaian	HPPRI 1998 Hal : 1233 - 1235	
72	No. 72 Tahun 1998 6 Mei 1998	Tim Evaluasi Privatisasi BUMN.	HPPRI 1998 Hal : 1236 - 1239	
73	No. 73 Tahun 1998 6 Mei 1998	Tim Evaluasi Dlm Rangka Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah serta Proyek & Kegiatan Kerjasama Pemerintah & Swasta di Bidang Infrastruktur.	HPPRI 1998 Hal : 1240 - 1246	
74	No. 74 Tahun 1998 1 Juni 1998	Perubahan Atas Keppres No.82 Th.1995 Ttg Pengembangan Lahan Gambut Utk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.	HPPRI 1998 Hal : 1247 - 1249	Diubah dg Keppres No. 133 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.80 Th.1999
75	No. 75 Tahun 1998 4 Juni 1998	Perubahan atas Keppres No.120 Th.1993 ttg Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana tih beberapa kali diubah Terakhir dg Keppres No.54 Th.1995.	HPPRI 1998 Hal : 1250 - 1254	Diubah dg Keppres No. 173 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.13 Th.2000
76	No. 76 Tahun 1998 8 Juni 1998	Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	HPPRI 1998 Hal : 1255 - 1259	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
77	No. 77 Tahun 1998 11 Juni 1998	Perubahan Atas Keppres No.60 Th.1998 Ttg Kedudukan,Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI 1998 Hal : 1260 - 1261	
78	No. 78 Tahun 1998 15 Mei 1998	Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Balar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI 1998 Hal : 1262 - 1263	Diubah dg Keppres No. 180 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.10 Th.1999
79	No. 79 Tahun 1998 15 Mei 1998	Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.	HPPRI 1998 Hal : 1264 - 1265	Dicabut dg Keppres No.48 Th.2000
80	No. 80 Tahun 1998 25 Mei 1998	Memberikan Amnesti Dan Atau Abolisi.	HPPRI 1998 Hal : 1266 - 1267	
81	No. 81 Tahun 1998 18 Juni 1998	Perubahan Atas Keppres No.17 Th.1998 Ttg Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi & Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dng Keppres No.47 Th.1998.	HPPRI 1998 Hal : 1268 - 1270	Diubah dg Keppres No. 121 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.144 Th.1999
82	No. 82 Tahun 1998 28 Mei 1998	Memberikan Amnesti	HPPRI 1998 Hal : 1271 - 1272	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
83	No. 83 Tahun 1998 22 Juni 1998	Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association dan Protection Of The Right to Organize (Konvensi No. 87 ttg Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi).	HPPRI 1998 Hal : 1273 - 1282	
84	No. 84 Tahun 1998 9 Juli 1998	Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok.	HPPRI 1998 Hal : 1283 - 1285	
85	No. 85 Tahun 1998 9 Juni 1998	Memberikan Amnesti	HPPRI 1998 Hal : 1286 - 1287	
86	No. 86 Tahun 1998 6 Juli 1998	Badan Pusat Statistik	HPPRI 1998 Hal : 1288 - 1297	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
87	No. 87 Tahun 1998 2 Juli 1998	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.	HPPRI 1998 Hal : 1298 - 1303	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
88	No. 88 Tahun 1998 23 Juni 1998	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Afrika Selatan.	HPPRI 1998 Hal : 1304 - 1321	
89	No. 89 Tahun 1998 23 Juli 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Kroasia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik.	HPPRI 1998 Hal : 1322 - 1334	
90	No. 90 Tahun 1998 23 Juni 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1998 Hal : 527 - 558	
91	No. 91 Tahun 1998 23 Juni 1998	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara RI dan Pemerintah Republik Yaman.	HPPRI 1998 Hal : 1335 - 1352	
92	No. 92 Tahun 1998 23 Juni 1998	Pengesahan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen 1992 (Protokol Montreal ttg Zat-zat yg Merusak Lapisan Ozon Copenhagen,' 92).	HPPRI 1998 Hal : 1353 - 1422	
93	No. 93 Tahun 1998 25 Juni 1998	Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.	HPPRI (2) 1998 Hal : 559 - 560	Dicabut dg Keppres No.163 Th.1999
94	No. 94 Tahun 1998 29 Juni 1998	Perubahan Atas Keppres No.41 Th.1973 Ttg Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dng Keppres No.58 Th.1989.	HPPRI 1998 Hal : 1423 - 1430	
95	No. 95 Tahun 1998 2 Juli 1998	Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency).	HPPRI 1998 Hal : 1423 - 1430	Dicabut dg Keppres No.31 Th.1999
96	No. 96 Tahun 1998 2 Juli 1998	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanam Modal.	HPPRI (2) 1998 Hal : 563 - 567	
97	No.97 Tahun 1998 23 Juli 1998	Pencabutan Keppres No.34 Th.1988 Tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum.	HPPRI (2) 1998 Hal : 568 - 569	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
98	No.98 Tahun 1998 7 Juli 1998	Pencabutan Keppres No.90 Th.1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera & Keluarga Sejahtera I Sebagai mana Tlh Diubah Dng Keppres No.92 Th.' 96.	HPPRI (2) 1998 Hal : 570 - 571	
99	No.99 Tahun 1998 3 Agustus 1998	Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Utk Usaha Kecil & Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Utk Usaha Menengah/Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.	HPPRI (2) 1998 Hal : 572 - 585	Dicabut dg Keppres No.127 Th.2001
100	No.100 Tahun 1998 6 Agustus 1998	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (2) 1998 Hal : 586 - 598	Diubah dg Keppres No. 134 Th.1998 Dicabut dg Keppres No.135 Th.1999
101	No.101 Tahun 1998 6 Agustus 1998	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI (2) 1998 Hal : 599 - 611	Dicabut dg Keppres No.134 Th.1999
102	No.102 Tahun 1998 10 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No.61 Th.1998 Ttg Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi & dan Tata Kerja Departemen.	HPPRI (2) 1998 Hal : 612 - 614	Diubah dg Keppres No.138 Th.1998
103	No.103 Tahun 1998 10 Agustus 1998	Tim Evaluasi Privatisasi BUMN.	HPPRI (2) 1998 Hal : 615 - 622	
104	No.104 Tahun 1998 10 Agustus 1998	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara.	HPPRI (2) 1998 Hal : 623 - 631	Diubah dg Keppres No.82 Th.1999 Dicabut dg Keppres No.58 Th.2000
105	No.105 Tahun 1998 23 Juli 1998	Memberikan Amnesti kepada Para Terpidana	HPPRI (2) 1998 Hal : 632 - 636	
106	No.106 Tahun 1998 23 Juli 1998	Tim Dokter Ahli Presiden dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden	HPPRI (2) 1998 Hal : 637 - 643	
107	No.107 Tahun 1998 27 Juli 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pem. RI dan Pemerintah Rep.Turki mengenai peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1998 Hal : 644 - 677	
108	No.108 Tahun 1998 27 Juli 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Mongolia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.119)	HPPRI (2) 1998 Hal.:678 - 703	
109	No.109 Tahun 1998 16 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Yaman Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1998 Hal.:704 - 731	
110	No.110 Tahun 1998 27 Juli 1998	Pengesahan Agreement Between The Gov. Of The Rep.Of Indonesia and The Gov. of The Rep. Of Mauristius On The Promotion and Protection Of Investments (LN No.121)	HPPRI (2) 1998 Hal: 732 - 743	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
111	No.111 Tahun 1998 27 Juli 1998	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah (LN No.122)	HPPRI (2) 1998 Hal.: 744 - 786	
112	No.112 Tahun 1998 27 Juli 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Uzbekistan	HPPRI (2) 1998 Hal: 787 - 838	
113	No.113 Tahun 1998 13 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No.33 Th.1981 Ttg Badan Koordinasi Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1998 Hal: 839 - 841	Diubah dg Keppres No.120 Th.1999 Dicabut dg Perpres No.27 Th.2009
114	No.114 Tahun 1998 28 Juli 1998	Perubahan Atas Keppres No.25 Th.1991 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1998 Hal: 842 - 846	
115	No.115 Tahun 1998 17 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No.97 Th.1993 Ttg Tata Cara Penanaman Modal	HPPRI (2) 1998 Hal: 847 - 851	Diubah dg Keppres No. 117 Th.1999 Dicabut dg Perpres No.27 Th.2009
116	No.116 Tahun 1998 28 Juli 1998	Perubahan Atas Keppres No.26 Th.1980 Ttg Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.	HPPRI (2) 1998 Hal: 852 - 855	Diubah dg Keppres No.122 Th.1999
117	No.117 Tahun 1998 4 Agustus 1998	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.	HPPRI (2) 1998 Hal: 856 - 865	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
118	No.118 Tahun 1998 11 Agustus 1998	Tim Pemantau Ketahanan Pangan	HPPRI (2) 1998 Hal: 866 - 868	
119	No.119 Tahun 1998 11 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No.62 Th.1992 Ttg Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah dgn Keppres No.81 Th.1995.	HPPRI (2) 1998 Hal: 869 - 870	
120	No.120 Tahun 1998 12 Agustus 1998	Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero & Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.	HPPRI (2) 1998 Hal: 871 - 874	
121	No.121 Tahun 1998 14 Agustus 1998	Perubahan atas Keppres No.17 Th.1998 ttg Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dng Keppres No.81 Th.1998.	HPPRI (2) 1998 Hal: 875 - 876	Dicabut dg Keppres No.144 Th.1999
122	No.122 Tahun 1998 14 Agustus 1998	Biaya Perjalanan Haji Tahun 1999.	HPPRI (2) 1998 Hal: 877 - 878	
123	No.123 Tahun 1998 15 Agustus 1998	Pemberian Amnesti, Abolisi	HPPRI (2) 1998 Hal: 879 - 882	
124	No.124 Tahun 1998 15 Agustus 1998	Rehabilitasi Atas Hartono Rekso Dharsono	HPPRI (2) 1998 Hal: 883 - 884	
125	No.125 Tahun 1998 15 Agustus 1998	Pemberian Amnesti Kepada Abdul Qadir Djaelani	HPPRI (2) 1998 Hal: 885 - 886	



126	No.126 Tahun 1998 15 Agustus 1998	Pemberian Amnesti Kepada Ir.H.M. Sanusi	HPPRI (2) 1998 Hal: 887 - 888	
-----	--------------------------------------	---	----------------------------------	--

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
127	No.127 Tahun 1998 15 Agustus 1998	Pemberian Amnesti Kepada Drs. H. Andi Mappetahang Fatwa.	HPPRI (2) 1998 Hal: 889 - 890	
128	No.128 Tahun 1998 15 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1998 Ttg Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.29 Th.1998.	HPPRI (2) 1998 Hal: 891 - 892	Dicabut dg Keppres No.144 Th.1999
129	No.129 Tahun 1998 15 Agustus 1998	Rencana Aksi Nasional Hak - Hak Asasi Manusia Indonesia.	HPPRI (2) 1998 Hal: 893 - 916	Dicabut dg Keppres No.40 Th.2004
130	No.130 Tahun 1998 18 Agustus 1998	Pengesahan Asean Agreement on Customs (Persetujuan Asean di Bidang Kepabeanan).	HPPRI (2) 1998 Hal: 917 - 935	Dicabut dg Perpres No.137 Th.2014
131	No.131 Tahun 1998 20 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No. 23 Th.1975 Ttg Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Sebagaimana telah Diubah Dengan Keppres No.250 Th.1983.	HPPRI (2) 1998 Hal: 936 - 937	Dicabut dg Keppres No.49 Th.2000
132	No.132 Tahun 1998 20 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No. 99 Th.1993 Ttg Dewan Penerbangan & Antariksa Nasional RI.	HPPRI (2) 1998 Hal: 938 - 939	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014
133	No.133 Tahun 1998 20 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No. 82 Th.1995 Ttg Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah Sebagaimana telah Diubah dengan Keppres No.74 Th.1998.	HPPRI (2) 1998 Hal: 940 - 943	Dicabut dg Keppres No.80 Th.1999
134	No.134 Tahun 1998 27 Agustus 1998	Perubahan Atas Keppres No.100 Th.1998 Ttg Kedudukan,Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (2) 1998 Hal: 944 - 945	Dicabut dg Keppres No.135 Th.1999
135	No.135 Tahun 1998 28 Agustus 1998	Pengesahan The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, partienlarly in Africa (Konvensi PBB Untuk Memerangi ....	HPPRI (2) 1998 Hal: 946 - 1082	
136	No.136 Tahun 1998 31 Agustus 1998	Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1083 - 1091	Diubah dg Keppres No.82 Th.2000 Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
137	No.137 Tahun 1998 2 September 1998	Pencabutan Keppres No.119 Th.1993 Tentang Pembentukan Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1092 - 1093	
138	No.138 Tahun 1998 9 September 1998	Perubahan Atas Keppres No.61 Th.1998 Ttg Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No.102 Th.1998.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1094 - 1095	Diubah dg Keppres No.142 Th.1998

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
139	No.139 Tahun 1998 11 September 1998	Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT.(Persero) Perusahaan Listrik Negara.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1096 - 1100	Dicabut dg Keppres No.166 Th.1999
140	No.140 Tahun 1998 11 September 1998	Perincian Pengeluaran Rutin TA. 1998/1999	HPPRI (2) 1998 Hal: 1101 - 1102	
141	No.141 Tahun 1998 11 September 1998	Perincian Pengeluaran Pembangunan TA.1998/1999	HPPRI (2) 1998 Hal: 1103 - 1104	
142	No.142 Tahun 1998 14 September 1998	Perubahan Atas Keppres No.61 Th.1998 Ttg Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.138 Th.1998.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1105 - 1107	Diubah dg Keppres No.144 Th.1998
143	No.143 Tahun 1998 14 September 1998	Badan Administrasi Kepegawaian Negara.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1108 - 1115	Dicabut dg Keppres No.95 Th.1999
144	No.144 Tahun 1998 15 September 1998	Perubahan Atas Keppres No.61 Th.1998 Ttg Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.142 Th.1998.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1116 - 1117	Diubah dg Keppres No.192 Th.1998
145	No.145 Tahun 1998 16 September 1998	Pembentukan Pengadilan Agama, Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus,Cikarang,Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Santani, Mimika, dan Paniai.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1118 - 1124	
146	No.146 Tahun 1998 16 September 1998	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Sudan.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1125 - 1143	
147	No.147 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rumania Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1144 - 1225	
148	No.148 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Rep. Of Indonesia and The Gov. of ..... For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1226 - 1250	
149	No.149 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Agreement Between The Gov.of The Rep. of Indonesia and The Kingdom of Belgium for The Avoidance of Double Taxation And The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income.	HPPRI (2) 1998 Hal: 1251 - 1282	
150	No.150 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sudan Tentang Penghindaran Pajak Berganda yg Berhubungan Dengan Pajak Atas	HPPRI (3) 1998 Hal: 19 - 89	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
151	No.151 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan antara Pem. RI & Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan JPajak Atas Penghasilan.	HPPRI (3) 1998 Hal: 90 - 152	
152	No.152 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Negara Kuwait Ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Modal.	HPPRI (3) 1998 Hal: 153 - 225	
153	No.153 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Arab Mesir ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.	HPPRI (3) 1998 Hal: 226 - 303	
154	No.154 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Protocol on The Extension of The Cooperation Agreement Between The European Community & The Member Countries of Asean to The Socialist Republic of Vietnam.	HPPRI (3) 1998 Hal: 304 - 314	Dicabut dg Keppres No.95 Th.2000
155	No.155 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Ukraina Ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol.	HPPRI (3) 1998 Hal: 315 - 383	
156	No.156 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Uni Emirat Arab Mesir ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol.	HPPRI (3) 1998 Hal: 384 - 471	
157	No.157 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Mongolia Ttg Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.	HPPRI (3) 1998 Hal: 472 - 540	
158	No.158 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Venezuela ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol.	HPPRI (3) 1998 Hal: 541 - 613	
159	No.159 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Arab Suriah Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (3) 1998 Hal: 614 - 639	
160	No.160 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki Tentang Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol.	HPPRI (3) 1998 Hal: 640 - 693	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
161	No.161 Tahun 1998 18 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Uzbekistan Ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.	HPPRI (3) 1998 Hal: 694 - 743	
162	No.162 Tahun 1998 18 September 1998	Penunjukan Pengacara & Penasehat Hukum Indonesia Utk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan & Pulau Sipadan dan di Mahkamah Internasional.	HPPRI (3) 1998 Hal: 744 - 747	
163	No.163 Tahun 1998 18 September 1998	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	HPPRI (3) 1998 Hal: 748 - 750	
164	No.164 Tahun 1998 22 September 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare.	HPPRI (3) 1998 Hal: 751 - 755	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
165	No.165 Tahun 1998 22 September 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram.	HPPRI (3) 1998 Hal: 756 - 760	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
166	No.166 Tahun 1998 22 September 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima.	HPPRI (3) 1998 Hal: 761 - 765	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
167	No.167 Tahun 1998 22 September 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui.	HPPRI (3) 1998 Hal: 766 - 770	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
168	No.168 Tahun 1998 22 September 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari.	HPPRI (3) 1998 Hal: 771 - 775	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
169	No.169 Tahun 1998 22 September 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora dan Viqueque.	HPPRI (3) 1998 Hal: 776 - 780	Tdk Berlaku Lagi
170	No.170 Tahun 1998 22 September 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Kahayan, Kapuas dan Barito.	HPPRI (3) 1998 Hal: 781 - 785	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
171	No.171 Tahun 1998 22 September 1998	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.	HPPRI (3) 1998 Hal: 786 - 791	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
172	No.172 Tahun 1998 24 September 1998	Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia.	HPPRI (3) 1998 Hal: 792 - 794	Dicabut dg Keppres No.30 Th.2000
173	No.173 Tahun 1998 24 September 1998	Perubahan Atas Keppres No.120 Th. 1993 Ttg Dewan Pengembangan Kaw. Timur Indonesia Sebagaimana Tlh Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.75 Th.1998.	HPPRI (3) 1998 Hal: 795 - 797	Dicabut dg Keppres No.13 Th.2000
174	No.174 Tahun 1998 28 September 1998	Pemanfaatan Kapal Ikan Asing Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara.	HPPRI (3) 1998 Hal: 798 - 799	Dicabut dg Keppres No.14 Th.2000
175	No.175 Tahun 1998 29 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan.	HPPRI (3) 1998 Hal: 800 - 812	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
176	No.176 Tahun 1998 29 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Arab Suriah tentang Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.	HPPRI (3) 1998 Hal: 813 - 886	
177	No.177 Tahun 1998 29 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Sosialis Vietnam ttg Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol.	HPPRI (3) 1998 Hal: 887 - 969	
178	No.178 Tahun 1998 29 September 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Mali Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (3) 1998 Hal: 970 - 986	
179	No.179 Tahun 1998 1 Oktober 1998	Pemberlakuan PP No.21 Th.1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	HPPRI (3) 1998 Hal: 987 - 989	Dicabut dg PP No.65 Th.2001
180	No.180 Tahun 1998 1 Oktober 1998	Perubahan Atas Keppres No.78 Th.1998 Ttg Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI (3) 1998 Hal: 990 - 992	Dicabut dg Keppres No.10 Th.1999
181	No.181 Tahun 1998 9 Oktober 1998	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	HPPRI (3) 1998 Hal: 993 - 997	
182	No.182 Tahun 1998 13 Oktober 1998	Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI (3) 1998 Hal: 998 - 1006	
183	No.183 Tahun 1998 14 Oktober 1998	Badan Koordinasi Penanaman Modal.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1007 - 1016	Diubah dg Keppres No.121 Th. 1999 Dicabut dg Keppres No.171 Th. 1999
184	No.184 Tahun 1998 20 Oktober 1998	Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional	HPPRI (3) 1998 Hal: 1017 - 1030	
185	No.185 Tahun 1998 20 Oktober 1998	Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1031 - 1033	
186	No.186 Tahun 1998 20 Oktober 1998	Tim Koordinasi Telematika Indonesia.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1034 - 1037	Dicabut dg Keppres No.50 Th.2000
187	No.187 Tahun 1998 22 Oktober 1998	Pencabutan Keppres No.93 Th.1996 Tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1038 - 1039	
188	No.188 Tahun 1998 29 Oktober 1998	Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1040 - 1051	Dicabut dg Perpres No.68 Th.2005
189	No.189 Tahun 1998 29 Oktober 1998	Pencabutan Keppres No.34 Th.1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.26 Th.1995.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1052 - 1053	
190	No.190 Tahun 1998 3 Nopember 1998	Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaringan Pengaman Sosial.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1054 - 1056	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
191	No.191 Tahun 1998 9 Nopember 1998	Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistim Hukum.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1057 - 1060	Dicabut dg Keppres No.21 Th.2000
192	No.192 Tahun 1998 10 Nopember 1998	Perubahan Atas Keppres No.61/1998 Ttg Kedudukan, Tugas, SOTK Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.144 Th.1998.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1061 - 1062	Diubah dg Keppres No.115 Th.1999
193	No.193 Tahun 1998 13 Nopember 1998	Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1063 - 1065	Dicabut dg Perpres No.43 Th.2005
194	No.194 Tahun 1998 13 Nopember 1998	Pengesahan Persetujuan Antara Pem. RI dan Pem. Rep. Slovenia Mengenai Kerja sama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1066 - 1078	
195	No.195 Tahun 1998 24 Nopember 1998	Koordinasi Pelaks. Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong dan Trikora.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1079 - 1080	
196	No.196 Tahun 1998 26 Nopember 1998	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	HPPRI (3) 1998 Hal: 1081 - 1092	Dicabut dg Keppres No.10 Th.2000
197	No.197 Tahun 1998 7 Desember 1998	Badan Tenaga Nuklir Nasional	HPPRI (3) 1998 Hal: 1093 - 1100	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
198	No.198 Tahun 1998 7 Desember 1998	Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1101 - 1108	Diubah dg Keppres No.18,41 & 102 /1999 Dicabut dg Keppres No.22 Th.2000
199	No.199 Tahun 1998 9 Desember 1998	Tunjangan Dosen.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1109 - 1114	Diubah dg Keppres No.102 Th.2000
200	No.200 Tahun 1998 28 Desember 1998	Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Republic Of Indonesia & The Gov. of The People's Republic of Bangladesh Concerning The Promotion and Protection of Investment.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1115 - 1123	
201	No.201 Tahun 1998 29 Desember 1998	Pengesahan Protokol Persetujuan antara Pemerintah RI & Pemerintah Kanada untuk Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.	HPPRI (3) 1998 Hal: 1124 - 1150	
202	No.202 Tahun 1998 31 Desember 1998	Memberikan Amnesti dan Abolisi. (LN No.194)	HPPRI (3) 1998 Hal.:1151-1154	
203	No.203 Tahun 1998 31 Desember 1998	Memberikan Rehabilitasi . (LN No.195)	HPPRI (3) 1998 Hal.:1155-1157	
204	No.204 Tahun 1998 31 Desember 1998	Perubahan atas Keppres No.18/ 86 ttg Pajak Pertambahan Nilai yg terhutang atas Impor & Penyerahan barang, Kena pajak & Jasa kena Pajak tertentu yg Ditanggung oleh Pemerintah sbgmana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.37/1998.	HPPRI (3) 1998 Hal.:1158-1164	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>INPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1998 21 Januari 1998	Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang-barang Ekspor.	HPPRI 1998 Hal.: 1431-1432	
2	No. 2 Tahun 1998 21 Januari 1998	Perdagangan Antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II / Pulau.	HPPRI 1998 Hal.: 1433-1434	
3	No. 3 Tahun 1998 21 Januari 1998	Penghentian Bantuan Keuangan Kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) .	HPPRI 1998 Hal.: 1435	
4	No. 4 Tahun 1998 21 Januari 1998	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional.	HPPRI 1998 Hal.: 1436 - 1437	
5	No. 5 Tahun 1998 21 Januari 1998	Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden No.5 Th.1997 ttg Program Pengembangan Tebu Rakyat.	HPPRI 1998 Hal.: 1438 - 1439	
6	No. 6 Tahun 1998 21 Januari 1998	Penanaman Modal Asing Di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.	HPPRI 1998 Hal.: 1440 - 1441	
7	No. 7 Tahun 1998 29 Januari 1998	Penetapan Harga Dasar Gabah.	HPPRI 1998 Hal.: 1442 - 1444	Dicabut dg Inpres No.12 Th.1998
8	No. 8 Tahun 1998 27 Maret 1998	Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.	HPPRI 1998 Hal.:1445-1446	Disempurnakan dg Inpres No.13/1998
9	No. 9 Tahun 1998 31 Maret 1998	Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.	HPPRI 1998 Hal.:1447-1448	
10	No.10 Tahun 1998 31 Maret 1998	Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	HPPRI 1998 Hal.:1449-1451	
11	No.11 Tahun 1998 1 April 1998	Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan	HPPRI 1998 Hal.: 1452	
12	No.12 Tahun 1998 13 April 1998	Penetapan Harga Dasar Gabah	HPPRI 1998 Hal.: 1453-1455	
13	No.13 Tahun 1998 13 April 1998	Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.	HPPRI 1998 Hal.: 1456-1457	
14	No.14 Tahun 1998 22 April 1998	Penyusunan Rancangan UU ttg Bank Sentral & Rancangan Undang-undang ttg Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perbankan	HPPRI 1998 Hal.: 1458-1459	Dicabut dg UU No.23 Th.1999
15	No.15 Tahun 1998 6 Mei 1998	Pengalihan Pembinaan thdp Perusahaan Perseroan terbatas yg sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI kpd Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI 1998 Hal.: 1460-1468	Dicabut dg PP No.96 Th.1999
16	No.16 Tahun 1998	Kosong		
17	No.17 Tahun 1998 5 Juni 1998	Mempercepat Terlaksananya Reformasi di Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi	HPPRI 1998 Hal.: 1469-1470	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
18	No.18 Tahun 1998 7 Juli 1998	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1165-1167	
19	No.19 Tahun 1998 10 Juli 1998	Penetapan Harga Dasar Gabah.	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1168-1170	
20	No.20 Tahun 1998 16 Juli 1998	Penerbitan Sumber-sumber Dana Yayasan .	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1171-1172	
21	No.21 Tahun 1998 23 Juli 1998	Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1173-1176	
22	No.22 Tahun 1998 28 Juli 1998	Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomen- dasi Instansi Teknis Dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal.	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1177-1178	
23	No.23 Tahun 1998 28 Juli 1998	Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dlm Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah.	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1179-1180	
24	No.24 Tahun 1998 1 Agustus 1998	Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam dan sekitarnya.	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1181-1182	
25	No.25 Tahun 1998 31 Agustus 1998	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1183-1185	
26	No.26 Tahun 1998 16 September 1998	Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1186-1187	
27	No.27 Tahun 1998 14 Oktober 1998	Perubahan Atas Instruksi pres No.25 Th.1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1188-1190	
28	No.28 Tahun 1998 20 Oktober 1998	Pelaksanaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden .	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1191-1192	
29	No.29 Tahun 1998 2 Desember 1998	Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan2 MPR-RI Hasil Sidang Istimewa MPR-RI Th.1998.	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1193-1197	
30	No.30 Tahun 1998 2 Desember 1998	Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1198-1199	
31	No.31 Tahun 1998	B a t a l		
32	No.32 Tahun 1998 31 Desember 1998	Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1200-1204	
33	No.33 Tahun 1998 31 Desember 1998	Industri-industri yang Tergolong Strategis	HPPRI (3) 1998 Hal.: 1205-1206	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>TAHUN 1999</b>			
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 1999 7 Januari 1999	Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN	HPPRI (2) 1999 Hal.: 625 - 628	Dicabut dg Keppres No.48 Th.2000
2	No.2 Tahun 1999 7 Januari 1999	Perubahan Atas Keppres No.46 Th.1980 ttg Badan Koordinasi Energi Nasional sebagai- mana telah dua kali diubah, terakhir dg Keppres No.75 Th.1984	HPPRI (2) 1999 Hal.: 629 - 632	
3	No. 3 Tahun 1999 8 Januari 1999	Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota RI Pada Dana Moneter Internasional.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 633 - 635	
4	No. 4 Tahun 1999 8 Januari 1999	Pengesahan Agreement on The Rescue of Astronauts, The Return of Astronauts And The Return of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Austronot dan Pengembalian Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antariksa).	HPPRI (2) 1999 Hal.: 636 - 647	
5	No. 5 Tahun 1999 8 Januari 1999	Pengesahan Agreement Between The Govern- ment of the Rep.of Indonesia and The Gov.of the Hashemite Kingdom of Jordan Concerning The Promotion & Protection of Investment.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 648 - 657	
6	No. 6 Tahun 1999 11 Januari 1999	Perubahan Atas Keppres No.16 Th.1994 Ttg Pelaksanaan APBN Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No. 8 Th.1997.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 658 - 663	Diubah dg Keppres No.01 Th. 2000 Dicabut dg Keppres No.17 Th.2000
7	No. 7 Tahun 1999 14 Januari 1999	Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri tertentu.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 664 - 672	
8	No. 8 Tahun 1999 14 Januari 1999	Lembaga Administrasi Negara.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 673 - 682	Diubah dg Keppres No.40 Th.2000 Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
9	No. 9 Tahun 1999 14 Januari 1999	Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Penda- yagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 683 - 687	
10	No. 10 Tahun 1999 26 Januari 1999	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 688 - 690	Dicabut dg Keppres No.135 Th.2000
11	No. 11 Tahun 1999 27 Januari 1999	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong - Pondok Aren Barat sbg jln tol dan penetapan jenis kend. bermotor serta besarnya tarif Tol.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 691 - 693	Dicabut dg Keppres No.75 Th.2003
12	No. 12 Tahun 1999 27 Januari 1999	Komoditi Yang dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 694 - 695	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
13	No. 13 Tahun 1999 27 Januari 1999	Pengesahan Fifth Protocol To General Agreement on Trade Services Beserta Lampirannya.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 696 - 716	
14	No. 14 Tahun 1999 29 Januari 1999	Pengesahan Amended Convention on The International Mobile Satellite Organization '(Konvensi Ttg Organisasi Satelit Bergerak Internasional Yang Telah Diubah).	HPPRI (2) 1999 Hal.: 717 - 749	
15	No. 15 Tahun 1999 4 Pebruairil 1999	Penempatan Lembaga Pemasyarakatan Khusus	HPPRI (2) 1999 Hal.: 750 - 751	
16	No. 16 Tahun 1999 19 Pebruari 1999	Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 752 - 759	Diubah dg Keppres No.67 Th.2002 Dicabut dg Keppres No.81 Th.2000
17	No. 17 Tahun 1999 23 Pebruari 1999	Perubahan Atas Keppres No.71 Th.1996 Ttg Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kaw. Pengembangan Ekonomi Terpadu.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 760 - 762	Dicabut dg PP No.20 Th.2000
18	No. 18 Tahun 1999 24 Pebruari 1999	Perubahan Atas Keppres No.198 Th.1998 Ttg Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 763 - 768	Diubah dg Keppres No.41 Th.1999
19	No. 19 Tahun 1999 3 Maret 1999	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 769 - 771	
20	No. 20 Tahun 1999 3 Maret 1999	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 772 - 773	
21	No. 21 Tahun 1999 17 Maret 1999	Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR-RI No.X/MPR/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsifungsi Judikatif Dari Eksekutif.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 774 - 777	Diubah dg Keppres No. 42 Th.1999
22	No. 22 Tahun 1999 17 Maret 1999	Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) RI Di Lisabon, Portugal.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 778 - 780	
23	No. 23 Tahun 1999	KOSONG		
24	No. 24 Tahun 1999 24 Maret 1999	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 781- 796	
25	No. 25 Tahun 1999 29 Maret 1999	Hari Film Nasional.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 797- 797	
26	No. 26 Tahun 1999 29 Maret 1999	Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 798- 800	
27	No. 27 Tahun 1999 31 Maret 1999	Pencabutan Keppres No.10 Th.1979 Ttg Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 801- 803	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No. 28 Tahun 1999 6 April 1999	Pengesahan Framework Agreement on The Asean Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi Asean).	HPPRI (2) 1999 Hal.: 804 - 838	Dicabut dg Perpres No.49 Th.2011
29	No. 29 Tahun 1999 14 April 1999	Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 839 - 842	Diubah dg Keppres No.46 Th.2000
30	No. 30 Tahun 1999 14 April 1999	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dg Keppres No.58 Th.1998.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 843 - 847	Dicabut dg Keppres No.99 Th.2000
31	No. 31 Tahun 1999 16 April 1999	Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency).	HPPRI (2) 1999 Hal.: 848 - 850	
32	No.32 Tahun 1999 30 April 1999	Rincian Pengeluaran Rutin TA.1999/2000.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 851 - 852	
33	No. 33 Tahun 1999 30 April 1999	Rincian Pengeluaran Pembangunan TA.1999/2000.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 853 - 854	
34	No. 34 Tahun 1999 3 Mei 1999	Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 855 - 872	Dicabut dg Keppres No.104 Th.2004
35	No. 35 Tahun 1999 7 Mei 1999	Pengesahan Agreement on The Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Issued by Asean Member Country.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 873 - 879	
36	No. 36 Tahun 1999 7 Mei 1999	Pengesahan Persetujuan Antara RI dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dng Pajak-pajak atas Penghasilan & atas Modal beserta Protokol.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 880 - 911	
37	No. 37 Tahun 1999 17 Mei 1999	Perubahan Atas Keppres No.183 Th.1998 Ttg Badan Koordinasi Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 912 - 914	Diubah dg Keppres No.121 / 1999
38	No. 38 Tahun 1999 17 Mei 1999	Jenis dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu yg dapat dikecualikan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 915 - 917	
39	No. 39 Tahun 1999 17 Mei 1999	Pengecualian thdp Perus. Perseroan tertentu yg dapat dikecualikan Kedudukan, Tugas dan kewenangan Menkeu selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kpd Meneg Pendayagunaan BUMN.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 918 - 920	
40	No. 40 Tahun 1999 17 Mei 1999	Dewan Pembina Industri Strategis.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 921 - 923	Dicabut dg Keppres No.45 Th.2000

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
41	No. 41 Tahun 1999 17 Mei 1999	Perubahan Atas Keppres No.198/1998 ttg Pembentukan Tim Nasional reformasi menuju Masyarakat Madani sebagaimana telah diubah dg Keppres No.18 Th.1999.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 924 - 929	Diubah dg Keppres No.102 Th.1999
42	No. 42 Tahun 1999 18 Mei 1999	Perubahan Atas Keppres No.21/1999 Ttg Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaks. TAP MPR-RI No.X/MPR/' 98 berkaitan dg Pemisahan yg Tegas antar Fungsi2 Yudikatif dari Eksekutif.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 930 - 932	
43	No. 43 Tahun 1999 18 Mei 1999	Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan antara RI dan Rep. Portugal mengenai Masalah Timor Timur.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 933 - 935	
44	No. 44 Tahun 1999 18 Mei 1999	Teknik Penyusunan Peraturan Per-UU-an dan Bentuk Ranc.UU, Ranc.PP & Ranc. Keppres.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 936 - 1004	Dicabut dg UU No.10 Th.2004
45	No. 45 Tahun 1999 19 Mei 1999	Pengesahan persetujuan antara RI Pemerintah Rep. Zimbabwe mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. (LN No.76)	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1005 - 1029	
46	No. 46 Tahun 1999 19 Mei 1999	Pengesahan Persetujuan Antara RI dan Pemerintah Kuba Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.77).	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1030 - 1050	
47	No. 47 Tahun 1999 20 Mei 1999	Pemberian Uang Penghargaan atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI Periode 1997 - 1999.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1051 - 1052	Dicabut dg Keppres No. 99 Th.1999
48	No. 48 Tahun 1999 27 Mei 1999	Tim Pengkajian Kebijaksanaan & Peraturan Per-UU-an Dlm Rangka Pelaks. Landreform.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1053 - 1055	
49	No. 49 Tahun 1999 27 Mei 1999	Organisasi Sekretariat Jenderal MPR-RI.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1056 - 1059	
50	No. 50 Tahun 1999 28 Mei 1999	Pengesahan Persetujuan antara Pem. RI & Pemerintah Rep.Ceko Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1060 - 1093	
51	No. 51 Tahun 1999 28 Mei 1999	Pengesahan Persetujuan Antara Pem. RI & Pem. Rep.Suriname Mengenai Pembangunan & Kerjasama yg Lebih Erat & Pembentukan Konsultasi Bilateral. (LN No.98).	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1094 - 1101	
52	No. 52 Tahun 1999 28 Mei 1999	Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,1969 (Protokol 1992 ttg Perubahan thd Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata utk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969). (LN No.99).	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1102 - 1132	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
53	No. 53 Tahun 1999 3 Juni 1999	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Th.1999 Sebagai Hari Libur Nasional.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1133 - 1134	
54	No. 54 Tahun 1999 4 Juni 1999	Pengesahan General Agreement on Develop- ment Coperation Between The Gov. of The Rep. of Indonesia and The Gov. of Australia. (LN No.104)	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1135 - 1153	
55	No. 55 Tahun 1999 11 Juni 1999	Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Federal Jerman di Bidang Pelayaran. (LN No.107).	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1154 - 1188	
56	No. 56 Tahun 1999 15 Juni 1999	Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1189 - 1191	Dicabut dg Perpres No.60 Th.2009
57	No. 57 Tahun 1999 15 Juni 1999	Honorarium Bagi Ketua, Pengganti Ketua, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1192 - 1193	
58	No. 58 Tahun 1999 15 Juni 1999	Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1194 - 1195	
59	No. 59 Tahun 1999 15 Juni 1999	Pemberian Fasilitas Kredit kpd Anggota DPA RI Utk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1196 - 1197	
60	No. 60 Tahun 1999 22 Juni 1999	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. (LN No.110)	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1198 - 1234	
61	No. 61 Tahun 1999 24 Juni 1999	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Pem. Rumania Mengenai Peningkatan Perlindungan atas Penanaman Modal. (LN No.114)	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1235 - 1270	
62	No. 62 Tahun 1999 24 Juni 1999	Inspektur Jenderal Pembangunan.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1271 - 1273	Dicabut dg Keppres No.60 Th.2000
63	No. 63 Tahun 1999 24 Juni 1999	Pencabutan Keppres No.44 Th.1994 Ttg Badan Pengendali Pelaksanaan Pembang unan Wilayah Perbatasan di Kalimantan.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1274 - 1275	
64	No. 64 Tahun 1999 24 Juni 1999	Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi <sup>2</sup> Internasional	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1276 - 1280	
65	No. 65 Tahun 1999 25 Juni 1999	Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional.	HPPRI (2) 1999 Hal.: 1281 - 1286	
66	No. 66 Tahun 1999 2 Juli 1999	Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Di Lingk. Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	HPPRI (4) 1999 Hal.: 1205 - 1209	Dicabut dg Perpres No.48 Th.2005

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
67	No. 67 Tahun 1999 2 Juli 1999	Tim Koordinasi tindak lanjut pelaksanaan UU No.22 Th.1999 ttg Pemerintah Daerah & UU No.25 Th.1999 Ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Daerah.	HPPRI (4) 1999 Hal.: 1205 - 1209	
68	No. 68 Tahun 1999 2 Juli 1999	Pemberian Amnesti kepada Dita Indah Sari. (LN No.119)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1214 - 1215	
69	No. 69 Tahun 1999 5 Juli 1999	Pengurangan Masa Pidana (Remisi)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1216 - 1220	Dicabut dg Keppres No.174 Th.1999
70	No. 70 Tahun 1999 5 Juli 1999	Pengesahan Agreement for the Establishment of the Centre for space science & technology Education in Asia and The Pacific - Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik-Berafialiasi pd Perserikatan Bangsa-Bangsa). (LN No.120).	HPPRI (4) 1999 Hal.:1221 - 1242	
71	No. 71 Tahun 1999 5 Juli 1999	Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Mimika. (LN No.121)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1243 - 1245	
72	No. 72 Tahun 1999 5 Juli 1999	Perubahan Atas Keppres No. 4 Th.1984 Ttg Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.35 Th.1997.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1246 - 1249	
73	No. 73 Tahun 1999 5 Juli 1999	Perubahan atas Keppres No. 53 Th.1985 ttg Badan Pengelola Komplek Kemayoran sbg- mana telah Beberapa kali diubah, terakhir dg Keppres No.3 Th.1991.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1250 - 1253	Dicabut dg Keppres No.143 Th.2008
74	No. 74 Tahun 1999 5 Juli 1999	Perubahan Atas Keppres No.12 Th.1995 Ttg Tunjangan Panitera.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1254 - 1256	
75	No. 75 Tahun 1999 8 Juli 1999	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	HPPRI (4) 1999 Hal.:1257 - 1261	Diubah dg Perpres No.80 Th.2008
76	No. 76 Tahun 1999 9 Juli 1999	Tatacara pencalonan anggota DPR,DPRD Tk.I (Propinsi) & DPRD Tk.II (Kab./Kota) dari Angkatan Bersenjata RI.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1262 - 1282	
77	No. 77 Tahun 1999 9 Juli 1999	Lembaga Sandi Negara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1283 - 1289	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
78	No. 78 Tahun 1999 9 Juli 1999	Pengesahan Agreement on The Establish- ment of The Asean Centre for Energy. (LN No.124).	HPPRI (4) 1999 Hal.:1290 - 1298	
79	No. 79 Tahun 1999 9 Juli 1999	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1299 - 1312	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
80	No. 80 Tahun 1999 13 Juli 1999	Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1313 - 1316	
81	No. 81 Tahun 1999 14 Juli 1999	Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. (LN No.130).	HPPRI (4) 1999 Hal.:1317 - 1322	
82	No. 82 Tahun 1999 19 Juli 1999	Perubahan Atas Keppres No.104 Th.1998 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Negara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1323 - 1324	Dicabut dg Keppres No.58 Th.2000
83	No. 83 Tahun 1999 19 Juli 1999	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1325 - 1329	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014
84	No. 84 Tahun 1999 19 Juli 1999	Pemanfaatan Seni dan Budaya.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1330 - 1333	
85	No. 85 Tahun 1999 19 Juli 1999	Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1334 - 1340	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
86	No. 86 Tahun 1999 30 Juli 1999	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1341 - 1357	Dicabut dg Perpres No.38 Th.2010
87	No. 87 Tahun 1999 30 Juli 1999	Rumpun Jabatan Fungsional PNS.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1358 - 1374	Diubah dg Perpres No.116 Th.2014
88	No. 88 Tahun 1999 30 Juli 1999	Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1375 - 1381	
89	No. 89 Tahun 1999 30 Juli 1999	Komite Kebijakan Sektor Keuangan.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1382 - 1384	
90	No. 90 Tahun 1999 30 Juli 1999	Komite Penilaian Independen.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1385 - 1387	Dicabut dg Keppres No.15 Th.2004
91	No. 91 Tahun 1999 30 Juli 1999	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1388 - 1391	Dicabut dg Perpres No.33 Th.2012
92	No. 92 Tahun 1999 4 Agustus 1999	Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Th.1999 Untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II secara Nasional.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1392 - 1394	
93	No. 93 Tahun 1999 4 Agustus 1999	Perubahan Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1395 - 1397	
94	No. 94 Tahun 1999 10 Agustus 1999	Dewan Riset Nasional.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1398 - 1406	Dicabut dg Perpres No.16 Th.2005
95	No. 95 Tahun 1999 11 Agustus 1999	Badan Kepegawaian Negara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1407 - 1416	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
96	No. 96 Tahun 1999 11 Agustus 1999	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Th.2000.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1417 - 1418	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
97	No. 97 Tahun 1999 18 Agustus 1999	Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. (LN.No.142)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1419 - 1422	
98	No. 98 Tahun 1999 19 Agustus 1999	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1423 - 1444	
99	No. 99 Tahun 1999 24 Agustus 1999	Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI Periode 1997/1999.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1445 - 1446	
100	No. 100 Th. 1999 31 Agustus 1999	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara	HPPRI (4) 1999 Hal.:1447 - 1449	
101	No.101 Th. 1999 31 Agustus 1999	Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	HPPRI (4) 1999 Hal.:1450 - 1469	
102	No.102 Tahun 1999 31 Agustus 1999	Perubahan Atas Keppres No.198 Th.1998 Ttg Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Tlh Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.41 Th.1999.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1470 - 1475	Dicabut dg Keppres No.22 / 2000
103	No.103 Tahun 1999 1 September 1999	Pengesahan Second Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia (LN No.149)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1476 - 1483	
104	No.104 Tahun 1999 1 September 1999	Pembentukan Tim Nasional Utk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization. (LN No.150)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1484 - 1488	Diubah dg Keppres No. 18 Th. 2001 Dicabut dg Keppres No.28 Th.2005
105	No.105 Tahun 1999 1 September 1999	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	HPPRI (4) 1999 Hal.:1489 - 1492	Dicabut dg Perpres No.2 Th.2012
106	No.106 Tahun 1999 2 September 1999	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana	HPPRI (4) 1999 Hal.:1493 - 1500	
107	No.107 Tahun 1999 6 September 1999	Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1501 - 1502	Dicabut dg Keppres No.112 / 1999
108	No.108 Tahun 1999 7 September 1999	Memberikan Amnesti Kpd Jose Alexandre Gusmao alias Kay Rala Xanana Gusmao alias Xanana	HPPRI (4) 1999 Hal.:1503 - 1504	
109	No.109 Tahun 1999 8 September 1999	Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1505 - 1508	
110	No.110 Tahun 1999 13 September 1999	Dewan Buku Nasional	HPPRI (4) 1999 Hal.:1509 - 1513	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
111	No.111 Tahun 1999 13 September 1999	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1514 - 1518	Dicabut dg Perpres No.186 Th.2014
112	No.112 Tahun 1999 23 September 1999	Pencabutan Keppres No.107 Th.1999 Ttg Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1519 - 1520	
113	No.113 Tahun 1999 23 September 1999	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federal Rusia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1521 - 1534	
114	No.114 Tahun 1999 24 September 1999	Penataan Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1535 - 1582	Dicabut dg Perpres No.54 Th.2008
115	No.115 Tahun 1999 27 September 1999	Perubahan atas Keppres No.61/1998 ttg Kedudukan, Tugas, Susunan Org. dan Tata Kerja Departemen sbgmana telah beberapa kali diubah, terakhir dg Keppres No.192/1998.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1583 - 1584	Dicabut dg Keppres No.136 Th.1999
116	No.116 Tahun 1999 29 September 1999	Badan Koordinasi Narkotika Nasional	HPPRI (4) 1999 Hal.:1585 - 1589	Dicabut dg Keppres No.17 Th.2002
117	No.117 Tahun 1999 30 September 1999	Perubahan Kedua Atas Keppres No.97 Th.1993 ttg Tata Cara Penanaman Modal.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1590 - 1596	Dicabut dg Perpres No.27 Th.2009
118	No.118 Tahun 1999 5 Oktober 1999	Penentuan & Perolehan Kursi Hasil Pemilu 1999 Utk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kab. Pidie & Aceh Utara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1597 - 1600	Diubah dg Keppres No.144 / 1999
119	No.119 Tahun 1999 6 Oktober 1999	Badan Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Organisasi Konferensi Islam (OKI)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1601 - 1603	Dicabut dg Keppres No.24 / 2000
120	No.120 Tahun 1999 6 Oktober 1999	Perubahan atas Keppres No.33 Th.1981 ttg Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai mana Tlh Diubah dg Keppres No.113/98.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1604 - 1608	Dicabut dg Perpres No.27 Th.2009
121	No.121 Tahun 1999 6 Oktober 1999	Perubahan Atas Keppres No.183 Th.' 98 Ttg Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai mana Tlh Diubah dg Keppres No.37/99.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1609 - 1612	Dicabut dg Keppres No.171 Th.1999
122	No.122 Tahun 1999 6 Oktober 1999	Perubahan Atas Keppres No.26 Th.1980 Ttg Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah dg Keppres No.116 Th.1998.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1613 - 1616	
123	No.123 Tahun 1999 6 Oktober 1999	Perubahan atas Keppres No.51/1976 ttg Pokok-pokok Org. Perwakilan RI di Luar Negeri.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1617 - 1619	Diubah dg Keppres No.74 Th.2000
124	No.124 Tahun 1999 7 Oktober 1999	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1620 - 1621	
125	No.125 Tahun 1999 11 Oktober 1999	Bahan Peledak	HPPRI (4) 1999 Hal.:1622 - 1625	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
126	No.126 Tahun 1999 13 Oktober 1999	Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1626 - 1630	
127	No.127 Tahun 1999 13 Oktober 1999	Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara & Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. (LN No.192)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1631 - 1644	
128	No.128 Tahun 1999 13 Oktober 1999	Pencabutan Keppres No.50 Th.1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pem. RI dan Pem. Australia ttg Pemeliharaan Keamanan.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1645 - 1647	
129	No.129 Tahun 1999 13 Oktober 1999	Pengesahan Protocol to Implement The Second Package of Commitments Under The Asean Framework Agreements on Service.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1648 - 1700	
130	No.130 Tahun 1999 13 Oktober 1999	Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1701 - 1702	
131	No.131 Tahun 1999 13 Oktober 1999	Pemberian Rehabilitasi kepada Sdr. Drs.Hasbi Abdullah. (LN No.204)	HPPRI (4) 1999 Hal.: -	Rehabilitasi
132	No.132 Tahun 1999 20 Nopember 1999	Penugaan Wakil Prsiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1703 - 1703	
133	No.133 Tahun 1999 10 Nopember 1999	Penugaan Wakil Prsiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1704 - 1705	
134	No.134 Tahun 1999 10 Nopember 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1706 - 1718	Dicabut dg Keppres No.163 Th.2000
135	No.135 Tahun 1999 10 Nopember 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, & Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1719 - 1730	Diubah dg Keppres No.146 Th.1999 Dicabut dg Keppres No.162 Th.2000
136	No.136 Tahun 1999 10 Nopember 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1731 - 1747	Diubah dg Keppres No.147 Th.1999 Dicabut dg Keppres No.165 Th.2000
137	No.137 Tahun 1999 18 Nopember 1999	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rusia.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1748 - 1761	
138	No.138 Tahun 1999 18 Nopember 1999	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1762 - 1766	Diubah dg Keppres No.83 Th.2000 Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
139	No.139 Tahun 1999 20 Nopember 1999	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1767 - 1768	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
140	No.140 Tahun 1999 20 Nopember 1999	Tunjangan Khusus Bagi Veteran RI Penerima Tunjangan Veteran yang Menetap dan Bertempat Tinggal di Daerah Prop.Irian Jaya.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1769 - 1771	
141	No.141 Tahun 1999 22 Nopember 1999	Sekretariat Presiden.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1772 - 1777	Dicabut dg Keppres No.149 Th.1999
142	No.142 Tahun 1999 26 Nopember 1999	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1778 - 1778	
143	No.143 Tahun 1999 30 Nopember 1999	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1779 - 1779	
144	No.144 Tahun 1999 10 Oktober 1999	Perubahan Atas Keppres No.118 Th.1999 Ttg Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 1999 Untuk DPRD I Prop. DI.Aceh, DPRD II Kab. Pidie dan Aceh Utara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1780 - 1782	
145	No.145 Tahun 1999 1 Desember 1999	Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut & Perikanan.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1783 - 1783	
146	No.146 Tahun 1999 1 Desember 1999	Perubahan Atas Keppres No.135 Th.1999 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Org. dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1784 - 1786	Dicabut dg Keppres No.162 Th.1999
147	No.147 Tahun 1999 1 Desember 1999	Perubahan atas Keppres No.136 Th.1999 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organi - sasi, dan Tata Kerja Departemen.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1787 - 1789	Dicabut dg Keppres No.165 Th.1999
148	No.148 Tahun 1999 1 Desember 1999	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia ttg Peng- hindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1790 - 1849	
149	No.149 Tahun 1999 4 Desember 1999	Sekretariat Presiden.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1850 - 1855	Dicabut dg Keppres No.68 Th.2000
150	No.150 Tahun 1999 4 Desember 1999	Penasehat Wakil Presiden.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1856 - 1857	
151	No.151 Tahun 1999 4 Desember 1999	Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, dan Tim Kerja Riau	HPPRI (4) 1999 Hal.:1858 - 1860	
152	No.152 Tahun 1999 7 Desember 1999	Badan Kesejahteraan Nasional.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1861 - 1868	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
153	No.153 Tahun 1999 7 Desember 1999	Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1869 - 1876	Diubah dg Keppres No.7 Th.2000 Dicabut dg Keppres No,166 Th.2000
154	No.154 Tahun 1999 7 Desember 1999	Perubahan Atas Keppres No.26 Th.1998 ttg Badan Pertanahan Nasional.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1877 - 1878	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
155	No.155 Tahun 1999 8 Desember 1999	Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1879 - 1881	Dicabut dg Keppres No.44 Th.2000

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
156	No.156 Tahun 1999 9 Desember 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Militer.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1882 - 1887	Dicabut dg Perpres No.31 Th.2005
157	No.157 Tahun 1999 10 Desember 1999	Pemberian Amnesti Kepada Sdr.Marsudi,dkk (LN No.212)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1888 - 1889	
158	No.158 Tahun 1999 10 Desember 1999	Pemberian Amnesti Kepada Sdr.Francisco Soares dkk (LN No.213)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1890 - 1894	
159	No.159 Tahun 1999 10 Desember 1999	Pemberian Amnesti Kepada Sdr.Budiman Sujatmiko dkk (LN No.214)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1895 - 1896	
160	No.160 Tahun 1999 10 Desember 1999	Pemberian Amnesti Kepada Sdr.Petrus Hari Haryanto . (LN No.215)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1897 - 1898	
161	No.161 Tahun 1999 13 Desember 1999	Dewan Maritim Indonesia.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1899 - 1904	Dicabut dg Keppres No.21 Th.2007
162	No.162 Tahun 1999 13 Desember 1999	Pembentukan Tim Penilai, Akhir Pengangkatan, Pemindahan & Pemberhentian Dim dan dari Jabatan Struktural Eselon I	HPPRI (4) 1999 Hal.:1905 - 1907	Diubah dg Keppres No.104 Th.2001 Dicabut dg Perpres No.5 Th.2004
163	No.163 Tahun 1999 14 Desember 1999	Hari Juang Tentara Nasional Angkatan Darat.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1908 - 1909	
164	No.164 Tahun 1999 16 Desember 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Dokter	HPPRI (4) 1999 Hal.:1910 - 1914	
165	No.165 Tahun 1999 16 Desember 1999	Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1915 - 1918	Dicabut dg Keppres No.123 Th.2000
166	No.166 Tahun 1999 20 Desember 1999	Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT. (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1919 - 1922	Diubah dg Keppres No.133 / 2000
167	No.167 Tahun 1999 20 Desember 1999	Pengesahan Protocol to Amend The Agreement Amend The Gov. of Brunei Darus- salam, The Rep. of The Philippines, The Rep.of Singapore, & The Kingdom of The Thailand for The Promotion & Protection of Investment (Protokol perubahan thd perjanjian antara Pem.Brunei Darussalam, RI, Malaysia, Rep.Philipina, Rep. Singapura, & Kerj. Thai- land utk Peningkt. & Perlindungan Investasi). (LN No.216)	HPPRI (4) 1999 Hal.:1923 - 1935	Dicabut dg Perpres No.49 Th.2011
168	No.168 Tahun 1999 13 Desember 1999	Pengesahan Agreement Between The Gov. Of The Republic of Indonesia and The Gov. Of The Republic Of Seychelles For Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1936 - 1953	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
169	No.169 Tahun 1999 20 Desember 1999	Pengesahan Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1954 - 1984	
170	No.170 Tahun 1999 13 Desember 1999	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan Pelindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (4) 1999 Hal.:1985 - 2015	
171	No.171 Tahun 1999 13 Desember 1999	Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI (4) 1999 Hal.:2016 - 2034	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
172	No.172 Tahun 1999 22 Desember 1999	Penataan kembali Tugas dan Fungsi Dep. Pertanian dan Dep. Kehutanan dan Perkebunan.	HPPRI (4) 1999 Hal.:2035 - 2036	Dicabut dg Keppres No.175 / 1999
173	No.173 Tahun 1999 13 Desember 1999	Pemberian Amnesti Kpd Sdr.Marten Rumbiak dkk. & Abolisi kpd Sdr.Adarce Burdan dkk.	HPPRI (4) 1999 Hal.:2037 - 2042	Amnesti
174	No.174 Tahun 1999 13 Desember 1999	<b>Remisi.</b>	HPPRI (4) 1999 Hal.:2043 - 2049	
175	No.175 Tahun 1999 27 Desember 1999	Pencabutan Keppres No.172 Th.1999 ttg Penataan Kembali Tugas & Fungsi Dep. Pertanian & Dep. Kehutanan & Perkebunan.	HPPRI (4) 1999 Hal.:2050 - 2051	
176	No.176 Tahun 1999 28 Desember 1999	Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.	HPPRI (4) 1999 Hal.:2052 - 2054	
177	No.177 Tahun 1999 28 Desember 1999	Komite Kebijakan Sektor Keuangan.	HPPRI (4) 1999 Hal.:2055 - 2057	Diubah dg Keppres No.143 Th.2000 Dicabut dg Keppres No.15 Th.2004
178	No.178 Tahun 1999 30 Desember 1999	Pengesahan Agreement Relating To The Implementation of Part XI of The United Nations Convention On The Law of The Sea of 10 December 1982. (LN No.230).	HPPRI (4) 1999 Hal.:2058 - 2076	
	<b>INPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 1999 31 Maret 1999	Pengiriman Dokume Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Kepada Badan Pemeriksa Keuangan.	HPPRI (2) 1999 Hal.:1287-1302	
2	No. 2 Tahun 1999 1 April 1999	Langkah-langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata RI.	HPPRI (2) 1999 Hal.:1303-1305	
3	No. 3 Tahun 1999 26 April 1999	Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi.	HPPRI (2) 1999 Hal.:1306-1308	
4	No. 4 Tahun 1999 5 Mei 1999	Melaks. Ketentuan Keppres No.56/1996 ttg Bukti Kewarganegaraan Rep. Indonesia.	HPPRI (2) 1999 Hal.:1309-1310	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5	No. 5 Tahun 1999 24 Mei 1999	Langkah-langkah Pemantapan Dalam Rangka Pelaksanaan Persetujuan Antara RI dan Rep. Portugal Mengenai Masalah Timor Timur.	HPPRI (2) 1999 Hal.:1311-1312	
6	No. 6 Tahun 1999	B a t a l		
7	No. 7 Tahun 1999 15 Juni 1999	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	HPPRI (2) 1999 Hal.:1313-1319	Dicabut dg Perpres No.29 Th.2014
8	No. 8 Tahun 1999 10 Juli 1999	Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi	HPPRI (4) 1999 Hal.:2079-2082	
9	No. 9 Tahun 1999 26 Juli 1999	Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (4) 1999 Hal.:2083-2084	
10	No.10 Tahun 1999 11 Agustus 1999	Pemberdayaan Usaha Menengah	HPPRI (4) 1999 Hal.:2085-2089	
11	No.11 Tahun 1999 17 September 1999	Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur	HPPRI (4) 1999 Hal.:2090-2094	
12	No.12 Tahun 1999 23 September 1999	Pemulihan Kehidupan Masyarakat Di Daerah Propinsi Timor Timur	HPPRI (4) 1999 Hal.:2095-2097	
13	No.13 Tahun 1999 23 September 1999	Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur	HPPRI (4) 1999 Hal.:2098-2099	
14	No.14 Tahun 1999 7 Oktober 1999	Pengelolaan Program Aksi Kependudukan di Indonesia	HPPRI (4) 1999 Hal.:2100-2110	
15	No.15 Tahun 1999 2 Nopember 1999	Pengumuman Laporan Audit Bentuk Long Form Old Price Waterhouse Coopers ttg Bank Bali	HPPRI (4) 1999 Hal.:2111	
16	No.16 Tahun 1999 10 Nopember 1999	Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim.	HPPRI (4) 1999 Hal.:2112-2114	
VIII	TAHUN 2000			
	KEPPRES			
1	No. 1 Tahun 2000 3 Januari 2000	Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Mongolia On Economic And Technical Cooperation. (LN No.1)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 903 - 910	Diubah dg Keppres No. 67 Th 2002
2	No.2 Tahun 2000 3 Januari 2000	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Kerajaan Kamboja Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.2)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 911 - 942	

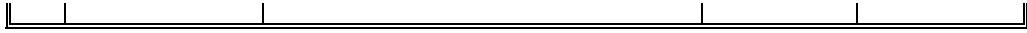
NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
3	No. 3 Tahun 2000 4 Januari 2000	Sekretaris Pengendalian Pemerintahan.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 943 - 944	
4	No. 4 Tahun 2000 4 Januari 2000	Pengangkatan Sekretaris Kabinet Sebagai Kepala Sekretariat Kabinet.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 945 - 946	
5	No. 5 Tahun 2000 11 Pebruari 2000	Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 947 - 954	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
6	No. 6 Tahun 2000 17 Januari 2000	Pencabutan Inpres No.14 Th.1967 tentang Agama, Kepercayaan, & Adat Istiadat Cina.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 955 - 956	
7	No. 7 Tahun 2000 19 Januari 2000	Perubahan Atas Keppres No.153 Th.1999 ttg Badan Informasi & Komunikasi Nasional.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 957 - 958	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
8	No. 8 Tahun 2000 26 Pebruari 2000	Penugasan Wkl. Presiden utk melaksanakan Tugas Presiden dlm Hal Presiden Berada di Luar Negeri.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 959 - 961	
9	No. 9 Tahun 2000 27 Pebruari 2000	Penugasan Wakil Presiden utk melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 962 - 963	
10	No. 10 Tahun 2000 28 Pebruari 2000	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 964 - 972	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
11	No. 11 Tahun 2000 28 Pebruari 2000	Badan Pengembangan Pariwisata & Kesenian.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 973 - 980	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
12	No. 12 Tahun 2000 28 Pebruari 2000	Badan Penetapan & Pengendalian Penyedia- an Prasarana & Sarana Pekerjaan Umum.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 981 - 988	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
13	No. 13 Tahun 2000 28 Januari 2000	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 989 - 993	
14	No. 14 Tahun 2000 28 Januari 2000	Pemanfaatan Kapal Perikanan yg dinyatakan dirampas untuk Negara.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 994 - 995	
15	No. 15 Tahun 2000 18 Pebruari 2000	Komisi Hukum Nasional.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 996 - 1000	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014
16	No. 16 Tahun 2000 21 Pebruari 2000	Tunjangan jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masy., Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, dan Teknisi Kehutanan.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1001 - 1008	Diubah dg Keppres No.24 Th.2004 & Perpres 8 Th.2005
17	No. 17 Tahun 2000 21 Pebruari 2000	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (LN No.14 & TLN No.3930)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1009 - 1058	Dicabut dg Keppres No.42 Th.2002
18	No. 18 Tahun 2000 21 Pebruari 2000	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah. (LN No.15 & TLN 3931)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1059 - 1110	Dicabut dg Keppres No.80 Th.2003
19	No. 19 Tahun 2000 21 Pebruari 2000	Tunjangan Hakim.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1111 - 1115	
20	No. 20 Tahun 2000 21 Maret 2000	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1116 - 1126	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
21	No. 21 Tahun 2000 21 Pebruari 2000	Pencabutan Keppres No.191/1998 ttg Dewan Penegakan Keamanan & Sistim Hukum.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1127 - 1128	
22	No. 22 Tahun 2000 21 Pebruari 2000	Pencabutan Keppres No.198/1998 ttg Pembentukan Tim Nasional Reformasi menuju Masy. Madani sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir dg Keppres No.102/1999.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1129 - 1130	
23	No.23 Tahun 2000 24 Maret 2000	Perubahan atas Keppres No.46/1980 ttg Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana 3 X diubah terakhir dg Keppres No.2/1999.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1131 - 1132	Dicabut dg Perpres No.26/2008
24	No.24 Tahun 2000 23 Pebruari 2000	Pencabutan Keppres No.119/1999 Ttg Badan Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia- Organisasi Konferensi Islam (OKI)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1133 - 1134	
25	No.25 Tahun 2000 23 Pebruari 2000	Pembentukan Tim Penataan PNS, Kekayaan Negara & Peralatan Keuangan, Dokumen & Arsip pd Departemen/Kantor Menteri Negara/ Kantor Menteri Negara Koordinator yg Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1135 - 1139	
26	No.26 Tahun 2000 24 Pebruari 2000	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai RI.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1140 - 1159	Dicabut dg Keppres No.16 Th.2005
27	No.27 Tahun 2000 24 Pebruari 2000	Perpanjangan masa tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1160 - 1161	
28	No.28 Tahun 2000 24 Pebruari 2000	Pembukaan Kantor Urusan Kepentingan RI di Dili, Timor Timur	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1162 - 1164	Dicabut dg Keppres No.60 Th.2004
29	No.29 Tahun 2000 26 Pebruari 2000	Badan Urusan Logistik	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1165 - 1173	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
30	No.30 Tahun 2000 26 Pebruari 2000	Pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1174 - 1175	
31	No.31 Tahun 2000 28 Pebruari 2000	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Rep. Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik. (LN No.28)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1176 - 1199	
32	No.32 Tahun 2000 28 Pebruari 2000	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Kebudayaan. (LN No.29).	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1200 - 1211	
33	No.33 Tahun 2000 2 Maret 2000	Pencabutan Inpres No.1/1980 ttg Larangan Pemasukan & Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1212 - 1213	
34	No.34 Tahun 2000 10 Maret 2000	Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen. (LN No.32).	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1214 - 1216	
35	No. 35 Tahun 2000 10 Maret 2000	Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. (LN No.33).	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1217 - 1219	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
36	No. 36 Tahun 2000 10 Maret 2000	Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak. (LN No.34).	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1220 - 1223	
37	No. 37 Tahun 2000 10 Maret 2000	Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggola dan Kejaksaan Negeri Kota Agung.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1224 - 1227	
38	No. 38 Tahun 2000 10 Maret 2000	Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1228 - 1229	
39	No.39 Tahun 2000 10 Maret 2000	Pencabutan Keppres No.16 Th.1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri RI.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1230 - 1231	
40	No. 40 Tahun 2000 10 Maret 2000	Perubahan Atas Keppres No.8 Th.1999 ttg Lembaga Administrasi Negara.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1232 - 1235	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
41	No. 41 Tahun 2000 10 Maret 2000	Sekolah Tinggi Transportasi Darat.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1236 - 1238	
42	No. 42 Tahun 2000 10 Maret 2000	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1239 - 1241	
43	No. 43 Tahun 2000 10 Maret 2000	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1242 - 1244	
44	No. 44 Tahun 2000 10 Maret 2000	<b>Komisi Ombudsman Nasional.</b>	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1245 - 1251	
45	No. 45 Tahun 2000 10 Maret 2000	Pembubaran Dewan Pembina Industri Strategis.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1252 - 1253	
46	No. 46 Tahun 2000 23 Maret 2000	Perubahan Atas Keppres No.29 Th.1999 ttg Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1254 - 1255	
47	No.47 Tahun 2000 24 Maret 2000	Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia Dgn United Nations Transitional Administration in East Timor. (UNTAET)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1256 - 1259	
48	No.48 Tahun 2000 31 Maret 2000	Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. (LN No.42)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1260 - 1272	
49	No.49 Tahun 2000 7 April 2000	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. (LN No.44)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1273 - 1278	Diubah dg Keppres No.84 & 151Th.2000 Dicabut dg Perpres No.28 Th.2005
50	No.50 Tahun 2000 7 April 2000	Tim Koordinasi Telematika Indonesia.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1279 - 1281	Dicabut dg Keppres No.9 Th.2003

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
51	No.51 Tahun 2000 7 April 2000	Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1282 - 1289	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
52	No.52 Tahun 2000 7 April 2000	Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No.22 Th.1999 Ttg Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Th.1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1290 - 1295	
53	No.53 Tahun 2000 8 April 2000	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1296 - 1297	
54	No.54 Tahun 2000 18 April 2000	Pengesahan Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation Between The Government of The Rep. of Indonesia and The Government of The Republic of Lebanon.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1298 - 1304	
55	No.55 Tahun 2000 18 April 2000	Pengesahan Penjanjian Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Chili Mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal Secara Timbal Balik Beserta Protokol dan Nota Pertukaran Diplomatik.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1305 - 1349	
56	No.56 Tahun 2000 20 April 2000	Sekretariat Wakil Presiden.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1350 - 1360	Dicabut dg Perpres No.31 Th.2005
57	No.57 Tahun 2000 20 April 2000	Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia and The Gov. of Brunai Darussalam For The Avoidance of Double Taxation on The Prevention of Fiscallvation with Respect to Taxes on Income Beserta Protokol.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1361 - 1387	
58	No.58 Tahun 2000 25 April 2000	Sekretariat Negara.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1388 - 1397	Dicabut dg Keppres No.117 Th.2000
59	No.59 Tahun 2000 25 April 2000	Sekretariat Kabinet.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1398 - 1404	Dicabut dg Keppres No.111 Th.2000
60	No.60 Tahun 2000 25 April 2000	Sekretariat Pengendalian Pemerintahan.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1405 - 1413	Dicabut dg Keppres No.111 Th.2000
61	No.61 Tahun 2000 8 Mei 2000	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1414 - 1503	
62	No.62 Tahun 2000 8 Mei 2000	Koordinasi Penataan Ruang Nasional.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1504 - 1508	Diubah dg Keppres No.170 Th. 2000 Dicabut dg Keppres No.4 Th.2009
63	No.63 Tahun 2000 8 Mei 2000	Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1509 - 1514	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
64	No.64 Tahun 2000 8 Mei 2000	Perubahan Status Pelaksanaan beberapa Proyek Pemerintah, BUMN dan Swasta yg Berkaitan dg Pemerintahan / BUMN yg semula ditangguhkan atau Dikaji Kembali.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1515 - 1518	
65	No.65 Tahun 2000 8 Mei 2000	Pengesahan Trade Agreement Between The Gov. of The Rep. Of Indonesia and The Gov.of The Czech Republic.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1519 - 1529	
66	No.66 Tahun 2000 11 Mei 2000	Perubahan Atas Keppres No.42 Th.1997 Ttg Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1530 - 1533	
67	No.67 Tahun 2000 15 Mei 2000	Perpustakaan Nasional RI.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1534 - 1540	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
68	No.68 Tahun 2000 19 Mei 2000	Sekretariat Presiden.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1541 - 1548	Dicabut dg Perpres No.31 Th.2005
69	No.69 Tahun 2000 23 Mei 2000	Pencabutan Keppres No.264 Th.1962 ttg Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrimetselaren Loge (Loge Agung Indonesia / Moral Rearmoment Movement, Anceent Orystical Organization of Rose Crucions (Amorc/ ....	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1549 - 1550	
70	No.70 Tahun 2000 29 Mei 2000	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Cuba Mengenai Kerjasama Kebudayaan. (LN No.60)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1551 - 1564	
71	No.71 Tahun 2000 29 Mei 2000	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Kerjasama Kebudayaan. (LN No.61)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1565 - 1574	
72	No.72 Tahun 2000 29 Mei 2000	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerja sama Kebudayaan. (LN No.62).	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1575 - 1588	
73	No.73 Tahun 2000 30 Mei 2000	Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1589 - 1590	
74	No.74 Tahun 2000 30 Mei 2000	Perubahan Atas Keppres No.51/1976 ttg Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah dg Keppres No.123 Th.1999.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1591 - 1593	
75	No.75 Tahun 2000 31 Mei 2000	Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Aceh.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1594 - 1597	
76	No.76 Tahun 2000 31 Mei 2000	Pengesahan Sumber Daya Panas Bumi Utk Pembangkit Tenaga Listrik.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1598 - 1511	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
77	No.77 Tahun 2000 2 Juni 2000	Perubahan Atas Keppres No.23 Th.1994 Ttg Pangkatan Badan Sbg Pegawai Tidak Tetap.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1612- 1613	
78	No.78 Tahun 2000 6 Juni 2000	Pembentukan Kejaks. Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Mosamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selar dan Kejaksaan Negeri Mimika.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1614 - 1619	
79	No.79 Tahun 2000 7 Juni 2000	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1620 - 1621	
80	No.80 Tahun 2000 7 Juni 2000	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1622 - 1625	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014
81	No.81 Tahun 2000 7 Juni 2000	Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Keppres No.16 Thn. 1999 ttg Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1626 - 1628	
82	No.82 Tahun 2000 30 Mei 2000	Perubahan Atas Keppres No.136 Th.1998 Ttg Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1628 - 1630	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
83	No.83 Tahun 2000 7 Juni 2000	Perubahan Atas Keppres No.138 Th.1999 ttg Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1631 - 1633	Dicabut dg Keppres No.166 Th.2000
84	No.84 Tahun 2000 7 Juni 2000	Perubahan Atas Keppres No.49 Th.2000 Ttg Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. (LN No.70)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1634 - 1638	Diubah dg Keppres No.151 Th.2000 Dicabut dg Perpres No.28 Th.2005
85	No.85 Tahun 2000 23 Juni 2000	Pencabutan Keppres No.22 Th.1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1639 - 1641	
86	No.86 Tahun 2000 23 Juni 2000	Pengesahan Protocol 3 Types And Quantity of Road Vehicles & Protocol 4 Technical Requirements Of Vehicles. (LN No.97)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1642 - 1665	
87	No.87 Tahun 2000 10 Juli 2000	Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota DPR RI Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1666 - 1667	
88	No.88 Tahun 2000 26 Juni 2000	Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara. (LN No.100)	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1668 - 1671	Diubah dg Keppres No.40 Th.2002 Dicabut dg Keppres No.27 & 71 Th.2003
89	No.89 Tahun 2000 1 Juli 2000	Kedudukan Kepolisian Negara RI. (LN No.102)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 3 - 5	
90	No.90 Tahun 2000 10 Juli 2000	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 6 - 8	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
91	No.91 Tahun 2000 11 Juli 2000	Pemberian Amnesti Kpd Sdr. Izak Yapsenang Dkk Dan Abolisi Kpd Sdr. Jauhari Mys Als. Azhari Dkk. (LN No.109)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 9 - 10	Amnesti
92	No.92 Tahun 2000 11 Juli 2000	Pemberian Amnesti Kpd Sdr. Romo I Sandy awan Sumardi SJ. Benny Sumardi. (LN No.110)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 11 - 12	Amnesti
93	No.93 Tahun 2000 11 Juli 2000	Pemberian Abolisi dan Rehabilitasi Kepada Sdr.R.Sawito Kartowibowo. (LN No.111)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 13 - 14	Abolisi
94	No.94 Tahun 2000 11 Juli 2000	Pengesahan Agreement Establishing The Southeast Asian Fisheries Development Center Beserta Protokol (Perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara Beserta Protokol). (LN No.112)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 15 - 34	
95	No.95 Tahun 2000 19 Juli 2000	Badan Pertanahan Nasional.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 35 - 44	
96	No.96 Tahun 2000 20 Juli 2000	Bidang Usaha Yang Tertutup & Bidang Usaha Yang Terbuka dg Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. (LN No.118).	HPPRI (5) 2000 Hal.: 45 - 54	Diubah dg Keppres No.118 Th.2000 <b>Dicabut dg Perpres No.77 Th.2007</b>
97	No.97 Tahun 2000 26 Juli 2000	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Th.2001.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 55 - 57	
98	No.98 Tahun 2000 21 Juli 2000	Pembukaan Kedutaan Besar RI di Lisabon, Portugal.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 58 - 59	
99	No.99 Tahun 2000 26 Juli 2000	Tunjangan Jabatan Struktural.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 60 - 64	Dicabut dg Perpres No.3 Th.2006
100	No.100 Tahun 2000 26 Juli 2000	Tunjangan Tenaga Kesehatan.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 65 - 70	<b>Dicabut dg Perpres No.47 Th.2006</b>
101	No.101 Tahun 2000 26 Juli 2000	Perubahan Atas Keppres No.23 Th.1995 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan sbgmana Telah Diubah dg Keppres No.9 Th.1997.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 71 - 75	Dicabut dg Keppres No.3 Th.2003
102	No.102 Tahun 2000 26 Juli 2000	Perubahan Atas Keppres No.199 Th.1998 Tentang Tunjangan Dosen.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 76 - 80	Dicabut dg Keppres No.9 Th.2001
103	No.103 Tahun 2000 26 Juli 2000	Perubahan Atas Keppres No.22 Th.1985 Ttg Tunjangan Jabatan Peneliti.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 81 - 84	
104	No.104 Tahun 2000 26 Juli 2000	Perubahan Atas Keppres No.27 Th.1985 Ttg Tunjangan Pengamat Gunung Api.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 85 - 88	
105	No.105 Tahun 2000 26 Juli 2000	Perubahan Atas Keppres No.28 Th.1989 Ttg Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 89 - 92	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
106	No.106 Tahun 2000 26 Juli 2000	Perubahan Atas Keppres No.33 Th.1996 Ttg Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 93 - 96	Dicabut dg Perpres No.21 Th.2006
107	No.107 Tahun 2000 26 Juli 2000	Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 97 - 102	
108	No.108 Tahun 2000 26 Juli 2000	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 103 - 104	
109	No.109 Tahun 2000 26 Juli 2000	Dewan Gula Nasional.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 105 - 109	Dicabut dg Keppres No.63 Th.2003
110	No.110 Tahun 2000 26 Juli 2000	Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 110 - 125	
111	No.111 Tahun 2000 1 Agustus 2000	Sekretariat Kabinet.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 126 - 132	Dicabut dg Perpres No.31 Th.2005
112	No.112 Tahun 2000 1 Agustus 2000	Pengesahan Sixth Additional Protocol to The Constitution of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Keenam Pada Kostitusi Perhimpunan Pos Sedunia).	HPPRI (5) 2000 Hal.: 133 - 142	
113	No.113 Tahun 2000 4 Agustus 2000	Perubahan Keempat Atas Keppres No. 41 Th.1973 Ttg Daerah Industri Pulau Batam.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 143 - 146	
114	No.114 Tahun 2000 4 Agustus 2000	Memberikan Perubahan Menjalani Masa Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 147 - 151	
115	No.115 Tahun 2000 7 Agustus 2000	Memberikan Abolisi Kepada Sdr.They H.Elloy dll.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 152 - 153	Abolisi
116	No.116 Tahun 2000 14 Agustus 2000	Rincian Pengeluaran Rutin TA.2000.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 154 - 155	
117	No.117 Tahun 2000 16 Agustus 2000	Sekretariat Negara.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 156 - 162	Diubah dg Keppres No. 52 Th.2001 Dicabut dg Perpres No.31 Th.2005
118	No.118 Tahun 2000 16 Agustus 2000	Perubahan Atas Keppres No.96 Th.2000 Ttg Bidang Usaha yg Tertutup & Bidang Usaha yg Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 163 - 167	Dicabut dg Perpres No.77 Th.2007
119	No.119 Tahun 2000 21 Agustus 2000	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dng Keppres No.30 Th.1999.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 168 - 170	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
120	No.120 Tahun 2000 21 Agustus 2000	Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP No.33 Th.1994 Ttg Peralihan Gaji Hakim ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP No.8 Th.2000 Ttg Peraturan Gaji Hakim Peradilan, PTUN dan Peradilan Agama.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 171 - 182	
121	No.121 Tahun 2000 23 Agustus 2000	Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 183 - 185	Dicabut dg Keppres No.91 / 2001
122	No.122 Tahun 2000 1 September 2000	Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 186 - 187	
123	No.123 Tahun 2000 1 September 2000	Pembubaran Dewan Pengembangan Usaha Nasional.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 188 - 189	
124	No.124 Tahun 2000 2 September 2000	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 190 - 191	
125	No.125 Tahun 2000 4 September 2000	Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 192 - 193	
126	No.126 Tahun 2000 4 September 2000	Perubahan Atas Keppres No.27 Th.1993 Ttg Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 194 - 195	
127	No.127 Tahun 2000 13 September 2000	Perubahan Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Manado Menjadi Universitas Negeri Manado.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 196 - 197	
128	No.128 Tahun 2000 14 September 2000	Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 198 - 200	Dicabut dg Keppres No.13 Th.2003
129	No.129 Tahun 2000 14 September 2000	Penambahan Wil. Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bengawan Solo. (LN No.154)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 201 - 204	
130	No.130 Tahun 2000 19 September 2000	Tim Koordinasi Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 205 - 207	
131	No.131 Tahun 2000 22 September 2000	Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pangoraian, Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung. (LN No.162)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 208 - 212	
132	No.132 Tahun 2000 22 September 2000	Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha. (LN No.163)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 213 - 217	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
133	No.133 Tahun 2000 22 September 2000	Perubahan Atas Keppres No.166 Th.1999 ttg Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 218 - 219	
134	No.134 Tahun 2000 25 September 2000	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 220 - 221	
135	No.135 Tahun 2000 25 September 2000	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. (LN No.166)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 222 - 225	
136	No.136 Tahun 2000 26 September 2000	Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Bagi Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 226 - 227	
137	No.137 Tahun 2000 28 September 2000	Pencabutan Keppres No.56 Th.1998 Tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta. (LN No.169)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 228 - 229	
138	No.138 Tahun 2000 28 September 2000	Tunjangan Panitera.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 230 - 233	Dicabut dg Perpres No.20 Th.2006
139	No.139 Tahun 2000 30 September 2000	Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara RI.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 234 - 236	
140	No.140 Tahun 2000 6 Oktober 2000	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Jordania Mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan. (Ln No.173)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 237 - 250	
141	No.141 Tahun 2000 6 Oktober 2000	Pemberian Amnesti Kpd Amir Syam,SH dkk (LN No.174)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 251 - 252	Amnesti
142	No.142 Tahun 2000 6 Oktober 2000	Pemberian Rehabilitasi Kpd Drs.Nurdin AR. (LN No.175)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 253 - 254	Rehabilitasi
143	No.143 Tahun 2000 10 Oktober 2000	Perubahan Atas Keppres No.177 Th.1999 ttg Komite Kebijakan Sektor Keuangan.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 255 - 256	Dicabut dg Keppres No.15 Th.2004
144	No.144 Tahun 2000 10 Oktober 2000	Perubahan Keppres No.118 Th.1999 Ttg Penentuan & Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Utk DPRD I Propinsi D.I Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 257 - 262	
145	No.145 Tahun 2000 16 Oktober 2000	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 263 - 264	
146	No.146 Tahun 2000 19 Oktober 2000	Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 265 - 270	Dicabut dg Keppres No.86 Tahun 2003
147	No.147 Tahun 2000 19 Oktober 2000	Perubahan Atas Keppres No.64 Th.1992 Ttg Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pustakawan.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 271 - 272	Diubah dg Keppres No.102 Th.2003

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
148	No.148 Tahun 2000 19 Oktober 2000	Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda - Tanda Kehormatan RI serta Honorarium Bagi Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda Tanda Kehormatan RI.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 273 - 276	
149	No.149 Tahun 2000 19 Oktober 2000	Pencabutan Keppres No.7 Th.1990 Ttg Pajak Penghasilan yg Terutang oleh Perusahaan2 Luar Negeri atas Pembayaran Royalti sehub. dg penggunaan jasa teknik, jasa manajemen & Lisensi Oleh PT IPTN,PT PINDAD,PT.PAL. (LN No.184 & TLN 4011)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 277 - 281	
150	No.150 Tahun 2000 19 Oktober 2000	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 282 - 287	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014
151	No.151 Tahun 2000 26 Oktober 2000	Perubahan Atas Keppres No.49 Th.2000 ttg Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sbg- mana tih diubah dg Keppres No.84 Th.2000. (LN No.186).	HPPRI (5) 2000 Hal.: 288 - 292	Dicabut dg Perpres No.28 Th.2005
152	No.152 Tahun 2000 2 Nopember 2000	Pembentukan Tim Pengkajian Pengem- bangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 293 - 295	
153	No.153 Tahun 2000 3 Nopember 2000	Pendirian Universitas Negeri Papua.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 296 - 297	
154	No.154 Tahun 2000 8 Nopember 2000	Pengesahan Protocol on the Special Arrangement For Sensitive And Highly Sensitive Products. (LN No.191).	HPPRI (5) 2000 Hal.: 298 - 326	
155	No.155 Tahun 2000 8 Nopember 2000	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dg Pemerintah Rep. Demokratik Rakyat Aljazair Mengenai Penghindaran Pajak berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan & Atas Kekayaan Beserta Protokol & Nota Pertukaran Diplomatik. (LN No.192).	HPPRI (5) 2000 Hal.: 327 - 491	
156	No.156 Tahun 2000 10 Nopember 2000	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 492 - 493	
157	No.157 Tahun 2000 10 Nopember 2000	Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi UU No.22/1999 ttg Pemerintahan Daerah & UU No.25/1999 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Daerah.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 494 - 499	
158	No.158 Tahun 2000 10 Nopember 2000	Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 500 - 504	Dicabut dg Perpres No.117 Th.2014
159	No.159 Tahun 2000 10 Nopember 2000	Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 505 - 509	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
160	No.160 Tahun 2000 21 Nopember 2000	Pembukaan Konsulat Jenderal RI di Dubai, Uni Emirat Arab.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 510 - 511	
161	No.161 Tahun 2000 23 Nopember 2000	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 512 - 513	
162	No.162 Tahun 2000 23 Nopember 2000	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 514 - 523	Diubah dg Keppres No.170 Th.2000 dan No.35 Th. 2001
163	No.163 Tahun 2000 23 Nopember 2000	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org. dan Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 524 - 536	Diubah dg Keppres No.171 / 2000
164	No.164 Tahun 2000 23 Nopember 2000	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org. dan Tata Kerja Menteri Muda.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 537 - 544	
165	No.165 Tahun 2000 23 Nopember 2000	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org. & Tata Kerja Departemen.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 545 - 588	Diubah dg Keppres No.172 / 2000 dan No.37 Th.2001
166	No.166 Tahun 2000 23 Nopember 2000	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 589 - 629	Diubah dg Keppres No.173 / 2000 dan No.42 & 62 Th.2001
167	No.167 Tahun 2000 1 Desember 2000	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal Beserta Protokol. (LN No.212)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 630 - 672	
168	No.168 Tahun 2000 4 Desember 2000	Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 673 - 676	Diubah dg Keppres No.68 Th. 2001
169	No.169 Tahun 2000 7 Desember 2000	Pokok-pokok Organisasi Pertamina.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 677 - 698	Diubah dng Keppres No.57 Th.2002
170	No.170 Tahun 2000 15 Desember 2000	Perubahan Atas Keppres No.162 Th.2000 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 699 - 700	Diubah dg Keppres No.35 Th. 2001 Dicabut dg Keppres No.100 Th.2001
171	No.171 Tahun 2000 15 Desember 2000	Perubahan Atas Keppres No.163/2000 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Org. & Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 701 - 703	Dicabut dg Keppres No.101 Th.2001
172	No.172 Tahun 2000 15 Desember 2000	Perubahan Atas Keppres No.165 Th.2000 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 704 - 707	Diubah dg Keppres No.37 Th. 2001 Dicabut dg Keppres No.102 Th.2001
173	No.173 Tahun 2000 15 Desember 2000	Perubahan Atas Keppres No.166 Th.2000 Ttg Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 708 - 713	Diubah dg Keppres No.16 Th. 2001 Dicabut dg Keppres No.103 Th.2001

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
174	No.174 Tahun 2000 15 Desember 2000	Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 714 - 719	Diubah dg Keppres No.36 Th. 2001
175	No.175 Tahun 2000 15 Desember 2000	Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 720 - 728	Diubah dg Keppres No.57 Th. 2001
176	No.176 Tahun 2000 15 Desember 2000	Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Muda.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 729 - 733	
177	No.177 Tahun 2000 15 Desember 2000	Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 734 - 765	Diubah dg Keppres No.38, 58 & 82 Th. 2001
178	No.178 Tahun 2000 15 Desember 2000	Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 766 - 793	Diubah dg Keppres No.17,43 & 60 Th.2001
179	No.179 Tahun 2000 22 Desember 2000	Pembentukan Pengadilan Agama (PA) Tarutung, PA Panyabungan, PA Pangkalan Kerinci, PA Sarolangun, PA Muara Sabak,PA Bengkayang, PA Bandar Baru,PA Masamba & PA Lowoleba.	HPPRI (5) 2000 Hal.: 794 - 801	Diubah dg Keppres No.11 Th.2002
180	No.180 Tahun 2000 22 Desember 2000	Pencabutan Keppres No.56/1988 ttg Penun- jukan Badan2 tertentu & Bendaharawan utk memungut dan menyettor Pajak Pertam-bahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (LN No.263)	HPPRI (5) 2000 Hal.: 802 - 803	
181	No.181 Tahun 2000 23 Desember 2000	Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota TA.2001. (LN No.268).	HPPRI (5) 2000 Hal.: 804 - 820	
*	No.234/M Th.2000 23 Agustus 2000	Memutuskan, Menetapkan, Mengangkat Menteri Negara Kabinet Periode Th.' 99-2000 Dengan Bidang Tugas Masing-masing.	L L : 3 hal	
*	No.241/M Th.2000 2 September 2000	Hakim Agung.		
*	No.242/M Th.2000 2 September 2000	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.		
*	No.289/M Th.2000 7 Nopember 2000	Perubahan Struktur Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004.		
	<b>INPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2000 13 Januari 2000	Melakukan Pertemuan dan Dialog di Negeri Belanda dengan Orang-orang Indonesia.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1673 - 1674	
2	No.2 Tahun 2000 24 Januari 2000	Pembangunan Pulau Sabang Menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1675 - 1676	
3	No.3 Tahun 2000 3 April 2000	Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1677 - 1682	
4	No.4 Tahun 2000 11 Mei 2000	Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (2) 2000 Hal.: 1682 - 1683	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
TAHUN 2001				
KEPPRES				
1	No. 1 Tahun 2001 5 Januari 2001	Pencabutan Keppres No.31 Th.1987 ttg pengesahan Agreement for the Establishment of The Intergovernmental Organization For Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in The Asia Pasific Region (Infofish).	HPPRI (2) 2001 Hal.: 3 - 5	
2	No.2 Tahun 2001 5 Januari 2001	Pengesahan Persetujuan Antara Pem. RI & Pemerintah Rep. Slovakia ttg Penghin-daran Pajak Berganda & Pencegahan Penge-lakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol	HPPRI (2) 2001 Hal.: 6 - 81	
3	No. 3 Tahun 2001 9 Januari 2001	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 82 - 89	Diubah dg Keppres No.111 Th.2001
4	No. 4 Tahun 2001 11 Januari 2001	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 90 - 95	Dicabut dg Perpres No.57 Th.2006
5	No. 5 Tahun 2001 12 Januari 2001	Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kab./Kota.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 96 - 97	
6	No. 6 Tahun 2001 12 Januari 2001	Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kab./Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilu 1999.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 98 - 112	
7	No. 7 Tahun 2001 17 Januari 2001	Perubahan Nama Gelanggang Olah Raga Senayan Menjadi Gelanggang Olah Raga Bung Karno.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 113 - 114	
8	No. 8 Tahun 2001 17 Januari 2001	Badan Amal Zakat Nasional.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 115 - 122	Diubah dg Keppres No.103/2004 & No.27 Th.2008
9	No. 9 Tahun 2001 17 Januari 2001	Tunjangan Dosen.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 123 - 128	Diubah dg Keppres No.63 Th.2001 Dicabut dg Perpres No.59 Th.2006
10	No. 10 Tahun 2001 17 Januari 2001	Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 129 - 130	
11	No. 11 Tahun 2001 17 Januari 2001	Peningkatan Konsulat RI di Johor Bahru, Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal RI.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 131 - 133	
12	No. 12 Tahun 2001 17 Januari 2001	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 134 - 141	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014
13	No. 13 Tahun 2001 18 Januari 2001	Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 142 - 147	
14	No. 14 Tahun 2001 18 Januari 2001	Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 148 - 149	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No. 15 Tahun 2001 23 Januari 2001	Penugasan Wakil Presiden untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar & Tanda Kehormatan.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 150 - 151	Dicabut dg Keppres No.92 / 2001
16	No. 16 Tahun 2001 23 Januari 2001	Perubahan Atas Keppres No.166 Th.2000 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, & Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dng Keppres No.173 Th.2000.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 152 - 156	Diubah dg Keppres No.42 Th. 2001
17	No. 17 Tahun 2001 23 Januari 2001	Perubahan atas Keppres No.178/2000 ttg Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 157 - 160	Diubah dg Keppres No.43 Th. 2001
18	No. 18 Tahun 2001 29 Januari 2001	Perubahan Atas Keppres No.104 Th.1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundangan Perdagangan Multilateral Dim Rangka World Trade Organization.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 161 - 165	Diubah dg Keppres No.16 Th. 2002 Dicabut dg Keppres No.28 Th.2005
19	No.19 Tahun 2001 5 Pebruari 2001	Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo & Sekolah Tinggi Keguruan & Ilmu Pendidikan Singaraja Menjadi Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 166 - 168	Diubah dg Perpres No.11 Th.2006 Dicabut dg Perpres No.11 Th.2006
20	No.20 Tahun 2001 5 Pebruari 2001	Pembentukan Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi XI Kelompok 15.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 169 - 173	
21	No.21 Tahun 2001 14 Pebruari 2001	Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 174 - 178	
22	No.22 Tahun 2001 14 Pebruari 2001	Badan Pengelola Dana Abadi Umat.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 179 - 184	Dicabut dg Perpres No.4 Th.2008
23	No.23 Tahun 2001 19 Pebruari 2001	Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Bung Karno.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 185 - 188	Dicabut dg Keppres No.128 Th.2001
24	No.24 Tahun 2001 21 Pebruari 2001	Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 189 - 194	
25	No.25 Tahun 2001 21 Pebruari 2001	Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 195 - 201	Dicabut dg Keppres No.44 Th.2004
26	No.26 Tahun 2001 21 Pebruari 2001	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 202 - 203	
27	No.27 Tahun 2001 21 Pebruari 2001	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang Palangkaraya & Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 204 - 205	
28	No.28 Tahun 2001 22 Pebruari 2001	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 206 - 217	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
29	No.29 Tahun 2001 22 Pebruari 2001	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 218 - 241	
30	No.30 Tahun 2001 9 Maret 2001	Honorarium Bagi Ketua, Wkl Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi & Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 242 - 243	Dicabut dg Keppres No.66 Th.2002
31	No.31 Tahun 2001 12 Maret 2001	Pembentukan Pengadilan Hak Azasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan PN. Makasar.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 244 - 246	
32	No.32 Tahun 2001 19 Maret 2001	Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 247 - 248	
33	No.33 Tahun 2001 19 Maret 2001	Pengesahan Amandements Agreement Establishing The Asia Pasific Institute for Broadcasting Development (Perubahan Atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik)	HPPRI (2) 2001 Hal.: 249 - 276	
34	No.34 Tahun 2001 20 Maret 2001	Honorarium Bagi Ketua, Wkl Ketua, Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri di Lingk.Setjen Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 277 - 279	Dicabut dg Keppres No.65 Th.2002
35	No.35 Tahun 2001 22 Maret 2001	Perubahan Atas Keppres No.62 Th.2000 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No.170 Th.2000.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 280 - 282	
36	No.36 Tahun 2001 22 Maret 2001	Perubahan Atas Keppres No.174 Th.2000 Ttg Susunan Organisasi & Tugas Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 283 - 286	
37	No.37 Tahun 2001 22 Maret 2001	Perubahan Atas Keppres No.165 Th.2000 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah dg Keppres No.172 Th.2000	HPPRI (2) 2001 Hal.: 287 - 296	
38	No.38 Tahun 2001 22 Maret 2001	Perubahan Atas Keppres No.177 Th.2000 Ttg Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 297 - 303	Diubah dg Keppres No. 58 Th.2001
39	No.39 Tahun 2001 22 Maret 2001	Penggunaan Dana Kontijensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan & Dokumen (P3D) Kpd Pemerintah Daerah.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 304 - 310	
40	No.40 Tahun 2001 27 Maret 2001	Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 311 - 315	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
41	No.41 Tahun 2001 27 Maret 2001	Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 316 - 321	
42	No.42 Tahun 2001 27 Maret 2001	Perubahan Atas Keppres No.166/2000 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org. & Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sbgmana tih beberapa kali diubah terakhir dg Keppres No.16/2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 322 - 330	Diubah dg Keppres No.62 Th.2001
43	No.43 Tahun 2001 27 Maret 2001	Perubahan Atas Keppres No.178 Th.2000 Ttg Susunan Organisasi & Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dgn Keppres No.17 Th. 2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 331 - 338	Diubah dg Keppres No.60 / 2001
44	No.44 Tahun 2001 29 Maret 2001	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 339 - 366	
45	No.45 Tahun 2001 29 Maret 2001	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	HPPRI (2) 2001 Hal.: 367 - 375	Dicabut dg Keppres No.73 Th.2001
46	No.46 Tahun 2001 5 April 2001	Mengabulkan Permohonan Ekstradisi Yang Diajukan Pemerintah Philipina Atas Nama Dennis Austin Standeffer ...	HPPRI (2) 2001 Hal.: 376 - 377	
47	No.47 Tahun 2001 6 April 2001	Panitia Penyidik Masalah Konstitusi	HPPRI (2) 2001 Hal.: 378 - 380	
48	No.48 Tahun 2001 6 April 2001	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 381 - 385	
49	No.49 Tahun 2001 10 April 2001	Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 386 - 391	
50	No.50 Tahun 2001 11 April 2001	Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor & Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 392 - 393	
51	No.51 Tahun 2001 17 April 2001	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Papua New Guinea.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 394 - 409	
52	No.52 Tahun 2001 20 April 2001	Perubahan Atas Keppres No.117 Th.2000 Tentang Sekretariat Negara.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 410 - 413	Dicabut dg Perpres No.31 Th.2005
53	No.53 Tahun 2001 23 April 2001	Pembentukan Pengadaan Hak Azasi Manusia AD HOC pd Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 414 - 416	Diubah dg Keppres No.96 Th.2001
54	No.54 Tahun 2001 25 April 2001	Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 417 - 427	Diubah dg Keppres No.77 Th.2001 Dicabut dg Keppres No.70 Th.2002
55	No.55 Tahun 2001 25 April 2001	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 428 - 432	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
56	No.56 Tahun 2001 11 Mei 2001	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Belarus Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 433 - 448	
57	No.57 Tahun 2001 16 Mei 2001	Perubahan Atas Keppres No.175 Th.2000 Ttg Susunan Organisasi & Tugas Menteri Negara.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 449 - 451	
58	No.58 Tahun 2001 16 Mei 2001	Perubahan Atas Keppres No.177 Th.2000 Ttg Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sbgmana tih diubah dg Keppres No.38/2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 452 - 455	Diubah dg Keppres No.82 / 2001
59	No.59 Tahun 2001 16 Mei 2001	Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yg Ditugaskan di Bidang Persandian.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 456 - 463	
60	No.60 Tahun 2001 16 Mei 2001	Perubahan Atas Keppres No.178 Th. 2000 Ttg Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No.43 Th.2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 464 - 467	
61	No.61 Tahun 2001 16 Mei 2001	Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 468 - 470	Dicabut dg Keppres No.129 Th.2001
62	No.62 Tahun 2001 17 Mei 2001	Perubahan Atas Keppres No.166 Th.2000 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No.42 Th.2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 471 - 473	
63	No.63 Tahun 2001 18 Mei 2001	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.2001 ttg Tunjangan Dosen.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 474 - 476	Dicabut dg Perpres No.59 Th.2006
64	No.64 Tahun 2001 18 Mei 2001	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Sipil Menurut PP No.6 Th.1997 ke Dalam PP No.26	HPPRI (2) 2001 Hal.: 477 - 483	Dicabut dg Keppres No.64 Th.2003
65	No.65 Tahun 2001 18 Mei 2001	Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP No.8 Th.2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, PTUN & Peradilan Agama ke dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP No.27 Th.2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 484 - 496	Dicabut dg Keppres No.65 Th.2003
66	No.66 Tahun 2001 18 Mei 2001	Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut PP No.7 Th.' 97 ke dalam PP No.28 Th.2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 497 - 503	Dicabut dg Keppres No.66 Th.2003
67	No.67 Tahun 2001 18 Mei 2001	Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara RI menurut PP No.7 Th.1997 ke Dalam PP No.29 Th.2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 504 - 510	Dicabut dg Keppres No.67 Th.2003
68	No.68 Tahun 2001 18 Mei 2001	Perubahan Atas Keppres No.168 Th.2000 Ttg Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 511 - 514	Dicabut dg PP No.55 Th.2014
69	No.69 Tahun 2001 18 Mei 2001	Komite Nasional Agenda Habitat II.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 515 - 522	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
70	No.70 Tahun 2001 5 Juni 2001	Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 523 - 525	
71	No.71 Tahun 2001 8 Juni 2001	Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 526 - 527	
72	No.72 Tahun 2001 14 Juni 2001	Komite Olah Raga Nasional Indonesia.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 528 - 530	
73	No.73 Tahun 2001 15 Juni 2001	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. (LN No.76)	HPPRI (2) 2001 Hal.: 531 - 539	
74	No.74 Tahun 2001 18 Juni 2001	Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 540 - 551	
75	No.75 Tahun 2001 21 Juni 2001	Pengesahan e- Asian Framework Agreement (Kerangka Persetujuan e - Asian). (LN No.80)	HPPRI (2) 2001 Hal.: 552 - 576	
76	No.76 Tahun 2001 21 Juni 2001	Pencabutan Keppres No. 9 Th.1996 Tentang Pengesahan Agreement on C.A.B (LN No.81).	HPPRI (2) 2001 Hal.: 577 - 578	
77	No.77 Tahun 2001 21 Juni 2001	Perubahan Atas Keppres No.54 Th.2001 Ttg Organisasi & Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 579 - 583	Dicabut dg Keppres No.97 Th.2001
78	No.78 Tahun 2001 21 Juni 2001	Komite Akreditasi Nasional.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 584 - 584	
79	No.79 Tahun 2001 21 Juni 2001	Komite Standar Nasional Utk Satuan Ukuran.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 585 - 591	Dicabut dg Keppres No.79 Th.2002
80	No.80 Tahun 2001 21 Juni 2001	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren - Bintaro Viaduct Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 592 - 594	
81	No.81 Tahun 2001 21 Juni 2001	Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infra Struktur.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 595 - 599	Dicabut dg Perpres No.42 Th.2005.
82	No.82 Tahun 2001 25 Juni 2001	Perubahan Atas Keppres No.177 Th.2000 ttg Susunan Organisasi & Tugas Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dg Keppres No.58 Th.2001.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 600 - 602	
83	No.83 Tahun 2001 30 Juni 2001	Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perusahaan Listrik Negara.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 603 - 618	
84	No.84 Tahun 2001 2 Juli 2001	Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 3 - 27	Diubah dg Keppres No.37 Th.2004 Dicabut dg Perpres No.95 Th.2006
85	No.85 Tahun 2001 5 Juli 2001	Pendirian Universitas Trunojoyo Madura.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 28 - 29	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
86	No.86 Tahun 2001 10 Juli 2001	Persetujuan Antara Pemerintah Rep. Indonesia dan Yayasan Asean Tentang Kedudukan Markas Yayasan Asean. (LN No.99)	HPPRI (4) 2001 Hal.: 30 - 65	
87	No.87 Tahun 2001 11 Juli 2001	Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 66 - 70	Dicabut dg Keppres No.22 Th.2002
88	No.88 Tahun 2001 16 Juli 2001	Memberikan Abolisi Kpd Sdr.Drs.Wimanjaya, K. Liotohe dll.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 71 - 72	Abolisi
89	No.89 Tahun 2001 20 Juli 2001	Tunjangan Hakim.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 73 - 78	
90	No.90 Tahun 2001 21 Juli 2001	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pd Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 79 - 80	
91	No.91 Tahun 2001 26 Juli 2001	Pencabutan Keppres No.121 Th.2000 ttg Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 81 - 82	
92	No.92 Tahun 2001 26 Juli 2001	Pencabutan Keppres No.15 Th.2001 Tentang Penugasan Wakil Presiden utk Menanda- tangani Keppres Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 83 - 84	
93	No.93 Tahun 2001 1 Agustus 2001	Pendanaan Korp Pegawai RI & Perlindungan Bagi PNS yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai RI.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 85 - 87	
94	No.94 Tahun 2001 1 Agustus 2001	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 88 - 92	Dicabut dg Perpres No.61 Th.2006
95	No.95 Tahun 2001 1 Agustus 2001	Pendirian Universitas Malikussaleh.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 93 - 94	
96	No.96 Tahun 2001 1 Agustus 2001	Perubahan Atas Keppres No.53 Th.2001 Ttg Pembentukan Pengadilan Hak Azasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakpus.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 95 - 96	
97	No.97 Tahun 2001 2 Agustus 2001	Pencabutan Atas Keppres No.77/2001 Ttg Perubahan atas Keppres No.54/2001 ttg Org. dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 97 - 98	Dicabut dg Keppres No.70 Th.2002
98	No.98 Tahun 2001 1 Agustus 2001	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 99 - 100	
99	No.99 Tahun 2001 30 Agustus 2001	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Th.2002.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 101 - 104	
100	No.100 Tahun 2001 13 September 2001	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 105 - 116	Diubah dg Keppres No.1 Th.2002 Dicabut dg Perpres No.9 Th.2005

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
101	No.101 Tahun 2001 13 September 2001	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 117 - 134	Diubah dg Keppres No.2 Th.2002, No.47 Th.2003 & No.8 Th.2004 Dicabut dg Perpres No.9 Th.2005
102	No.102 Tahun 2001 13 September 2001	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 135 - 178	Dicabut dg Perpres No.9 Th.2005
103	No.103 Tahun 2001 13 September 2001	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 179 - 217	Diubah dg Keppres No.3 & No.46 Th.2002 No.30/2003, No.9/2004 Perpres No.11 & 64/ '05 Ketentuan ttg BPN dicabut dg Perpres No.10 Th.2006  Ketentuan ttg Bappenas dicabut dg Perpres No.82 Th.2007  Ketentuan ttg BPS dicabut dg Perpres No.86 Th.2007; Ketentuan ttg BKPM dicabut dg Perpres No.90 Th.2007; Ketentuan ttg BIN dicabut dg Perpres No.34 th.2010, Ketentuan ttg BKKBN dicabut dg Perpres No.62 th.2010; diubah dg Perpres No.3-2013.
104	No.104 Tahun 2001 14 September 2001	Perubahan Atas Keppres No.162/1999 Ttg Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengang- katan, Pemindahan & Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon I.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 218 - 219	Dicabut dg Perpres No.5 Th.2004
105	No.105 Tahun 2001 17 September 2001	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 220 - 221	
106	No.106 Tahun 2001 10 Oktober 2001	Pengesahan Convention on Nuclear Safety (Konvensi Ttg Keselamatan Nuklir) (LN No.124)	HPPRI (4) 2001 Hal.: 222 - 252	
107	No.107 Tahun 2001 10 Oktober 2001	Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 253 - 260	Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005
108	No.108 Tahun 2001 10 Oktober 2001	Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 261 - 274	Diubah dg Keppres No.4 Th.2002, No.48 Th.2003, No.10 & 38 Th.2004 Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005

109	No.109 Tahun 2001 10 Oktober 2001	Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 275 - 306	Diubah dg Keppres No.47 Th.2002 No.88 Th.2003 & No.23 & 36 Th.2004 Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005
-----	--------------------------------------	---	-----------------------------------	--

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
110	No.110 Tahun 2001 10 Oktober 2001	Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 307 - 336	Diubah dg Keppres No.32, 62 Th.2003 & No.11/2004, Perpres No.12 & 52 Th.2005  Ketentuan ttg BPN dicabut dg Perpres No.10 Th.2006 Ketentuan ttg BAPPENAS dicabut dg Perpres No.82 Th.2007  Ketentuan ttg BPS dicabut dg Perpres No.86 Th.2007  Ketentuan ttg BKPM dicabut dg Perpres No.90 Th.2007; <b>Ketentuan ttg BIN</b> <b>dicabut dg Perpres No.34</b> <b>Th.2010; Ketentuan ttg</b> <b>BKKBN dicabut dg Perpres</b> <b>No.62 th.2010.</b>
111	No.111 Tahun 2001 12 Oktober 2001	Perubahan Atas Keppres No.3 Th.2001 ttg Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 337 - 338	
112	No.112 Tahun 2001 16 Oktober 2001	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 339 - 340	
113	No.113 Tahun 2001 17 Oktober 2001	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 341 - 344	<b>Dicabut dg Perpres</b> <b>No.43 Th.2006</b>
114	No.114 Tahun 2001 17 Oktober 2001	Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 345 - 348	
115	No.115 Tahun 2001 17 Oktober 2001	Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan Serta Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dibentuk/Dihapus/ Digabung/Diubah Statusnya.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 349 - 353	
116	No.116 Tahun 2001 17 Oktober 2001	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 354 - 355	
117	No.117 Tahun 2001 4 Nopember 2001	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 356 - 357	
118	No.118 Tahun 2001 21 Nopember 2001	Pembentukan Kedutaan Besar RI di Tripoli, Libya dan di Sufa, Fiji & Pembukaan Konsulat Jenderal RI di Guangzhou, Cina.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 358 - 360	
119	No.119 Tahun 2001	Komoditi Yang Dpt Dijadikan Subyek Kontrak	HPPRI (4) 2001	



	26 Nopember 2001	Berjangka.	Hal.: 361 - 362	
120	No.120 Tahun 2001 27 Nopember 2001	Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 363 - 364	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
121	No.121 Tahun 2001 29 Nopember 2001	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus. (LN No.139)	HPPRI (4) 2001 Hal.: 365 - 382	
122	No.122 Tahun 2001 30 Nopember 2001	Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 383 - 388	Diubah dg Keppres No. 7 Th.2002
123	No.123 Tahun 2001 5 Desember 2001	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 389 - 395	Diubah dg Keppres No.83 Th.2002 Dicabut dg Keppres No.06 Th.2009
124	No.124 Tahun 2001 7 Desember 2001	Komite Penanggulangan Kemiskinan.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 396 - 401	Diubah dg Keppres No.8 & 34 Th.2002
125	No.125 Tahun 2001 10 Desember 2001	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pelayaran Niaga. (LN No.148)	HPPRI (4) 2001 Hal.: 402 - 427	
126	No.126 Tahun 2001 11 Desember 2001	Hari Nusantara.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 428 - 429	
127	No.127 Tahun 2001 14 Desember 2001	Bidang/Jenis Usaha Yang Dicapangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 430 - 440	Dicabut dg Perpres No.77 Th.2007
128	No.128 Tahun 2001 18 Desember 2001	Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Bung Karno.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 441 - 444	
129	No.129 Tahun 2001 18 Desember 2001	Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 445 - 448	
130	No.130 Tahun 2001 20 Desember 2001	Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 449 - 452	Dicabut dg Perpres No.22 Th.2006
131	No.131 Tahun 2001 31 Desember 2001	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota TA.2002 (LN No.159)	HPPRI (4) 2001 Hal.: 453 - 466	
132	No.132 Tahun 2001 31 Desember 2001	Dewan Ketahanan Pangan.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 467 - 472	Dicabut dg Perpres No.83 Th.2006
133	No.133 Tahun 2001 31 Desember 2001	Harga Jual Tenaga Listrik yg Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. (LN No.160).	HPPRI (4) 2001 Hal.: 473 - 496	
	<b>INPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2001 21 Pebruari 2001	Pusat Informasi Berbasis Teknologi Informatika Di Komplek Kemayoran.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 619 - 620	
2	No.2 Tahun 2001 21 Pebruari 2001	Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 621 - 622	
3	No.3 Tahun 2001 9 Maret 2001	Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 623 - 632	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No.4 Tahun 2001 11 April 2001	Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 633 - 639	
5	No.5 Tahun 2001 19 April 2001	Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 640 - 644	
6	No.6 Tahun 2001 24 April 2001	Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia.	HPPRI (2) 2001 Hal.: 645 - 655	
7	No.7 Tahun 2001 11Oktober 2001	Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 497 - 503	
8	No.8 Tahun 2001 18 Desember 2001	Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).	HPPRI (4) 2001 Hal.: 504 - 505	
9	No.9 Tahun 2001 31 Desember 2001	Penetapan Kebijakan Perberasan.	HPPRI (4) 2001 Hal.: 506 - 508	
<b>TAHUN 2002</b>				
<b>KEPPRES</b>				
1	No.1 Tahun 2002 7 Januari 2002	Perubahan atas Keppres No.100/2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan SOTK Menteri Negara Koordinator.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 3 - 4	Dicabut dg Keppres No.9 Th.2005
2	No.2 Tahun 2002 7 Januari 2002	Perubahan atas Keppres No.101 Th.2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Org. & Tata Kerja Menteri Negara.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 5 - 8	Dicabut dg Keppres No.33 Th.2002
3	No.3 Tahun 2002 7 Januari 2002	Perubahan atas Keppres No.103 Th.2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 9 - 12	Diubah dg Keppres No.46/2002; 30/2003; No.9/2004 dan No.11/2005
4	No.4 Tahun 2002 7 Januari 2002	Perubahan atas Keppres No.108 Th.2001 Ttg Unit Org. & Tugas Eselon I Menteri Negara.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 13 - 19	
5	No. 5 Tahun 2002 7 Januari 2002	Perubahan atas Keppres No.110 Th.2001 Ttg Unit Organisasi & Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 20 - 25	Diubah dg Keppres No.48 Th.2002, dan No.32, 62 Th.2003; No.11 Th.2004 dan No.12 Th.2005
6	No. 6 Tahun 2002 11 Januari 2002	Honorarium Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 26 - 27	Dicabut dg Perpres No.35 Th.2013
7	No. 7 Tahun 2002 11 Januari 2002	Perubahan atas Keppres No.122 Th.2001 Ttg Tim Kebijakan Privatisasi BUMN.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 28 - 30	
8	No. 8 Tahun 2002 14 Januari 2002	Perubahan atas Keppres No.124 Th.2001 Ttg Komite Penanggulangan Kemiskinan.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 31 - 32	Diubah dg Keppres No.34 Th.2002
9	No. 9 Tahun 2002 16 Januari 2002	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 33 - 42	Diubah dg Keppres No.27 Th.2002

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
10	No. 10 Tahun 2002 5 Pebruari 2002	Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Kasus Theys Hiyo Eluay.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 43 - 44	
11	No. 11 Tahun 2002 8 Maret 2002	Perubahan atas Keppres No.179 Th.2000 Ttg Pembentukan Pengadilan Agama (PA) Tarutung, PA Panyabungan, PA Pangkalan Kerinci, PA Ujung Tanjung, PA Sarolangun, PA Muara Sabak, PA Bengkayang, PA Banjar Baru, PA Masamba, PA Lewoleba.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 45 - 47	
12	No. 12 Tahun 2002 13 Maret 2002	Tim Kerja Dlm Rangka Kerjasama Ekonomi Indonesia - Jepang.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 48 - 49	
13	No. 13 Tahun 2002 14 Maret 2002	Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. (LN No.8)	HPPRI (2) 2002 Hal.: 50 - 53	
14	No. 14 Tahun 2002 22 Maret 2002	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 54 - 55	
15	No. 15 Tahun 2002 22 Maret 2002	Pencabutan Keppres No.39 Th.1997 Tentang Penanguhan / Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 56 - 57	
16	No. 16 Tahun 2002 22 Maret 2002	Perubahan Ke 2 Atas Keppres No.104 Th.'99 ttg Pembentukan Tim Nasional utk Per-UU-an Perdagangan Multilateral Dlm Rangka World Trade Organization Sebagaimana Tlh Diubah dng Keppres No.18 Th.2001.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 58 - 62	Dicabut dg Keppres No.28 Th.2005
17	No. 17 Tahun 2002 22 Maret 2002	Badan Narkotika Nasional.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 63 - 71	Dicabut dg Keppres No.83 Th.2007
18	No. 18 Tahun 2002 22 Maret 2002	Perubahan Atas Keppres No.1 Th.1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 72 - 73	
19	No. 19 Tahun 2002 9 April 2002	Hari Tahun Baru Imlek.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 74	
20	No. 20 Tahun 2002 10 April 2002	Pembentukan Sistim Jaminan Sosial Nasional.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 75 - 77	Diubah dg Keppres No.101 Th.2003
21	No. 21 Tahun 2002 10 April 2002	Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 78 - 80	
22	No. 22 Tahun 2002 17 April 2002	Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 81 - 85	
23	No. 23 Tahun 2002 23 April 2002	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 86 - 89	Dicabut dg Perpres No.60 Th.2006
24	No. 24 Tahun 2002 25 April 2002	Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dan Pem. Rep.Sudan mengenai peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.42)	HPPRI (2) 2002 Hal.: 90 - 122	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
25	No. 25 Tahun 2002 30 April 2002	Instrumen Perubahan Konstitusi & Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Minneapolis, 1998. (LN. No.44)	HPPRI (2) 2002 Hal.: 123 - 757	
26	No. 26 Tahun 2002 30 April 2002	Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional " Intelsat ". (LN No.45)	HPPRI (2) 2002 Hal.:758 - 861	
27	No. 27 Tahun 2002 30 April 2002	Perubahan Atas Keppres No.9 Th.2002 Ttg Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 862 - 864	
28	No. 28 Tahun 2002 6 Mei 2002	Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 865 - 889	
29	No. 29 Tahun 2002 20 Mei 2002	Staf Khusus Wakil Presiden.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 890 - 892	Dicabut dg Perpres No.3 Th.2011
30	No. 30 Tahun 2002 20 Mei 2002	Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Banjar Baru.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 893 - 895	
31	No. 31 Tahun 2002 20 Mei 2002	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 896 - 897	
32	No. 32 Tahun 2002 20 Mei 2002	Pengesahan International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional 2001). (LN No.60)	HPPRI (2) 2002 Hal.: 898 - 999	
33	No. 33 Tahun 2002 23 Mei 2002	Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1000 - 1010	
34	No. 34 Tahun 2002 29 Mei 2002	Perubahan Atas Keppres No.124 Th.2001 Ttg Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagai- mana telah diubah dg Keppres No.8 Th.2002.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1011 - 1013	
35	No. 35 Tahun 2002 29 Mei 2002	Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1014 - 1016	
36	No. 36 Tahun 2002 29 Mei 2002	Pengesahan ILO Convention No.88 Con- cerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO No.88 Mengenai Lem- baga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja). (LN No.63)	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1017 - 1035	
37	No. 37 Tahun 2002 29 Mei 2002	Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme Of Compulsary Motor Vehicle (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean). (LN No.64)	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1036 - 1055	
38	No. 38 Tahun 2002 6 Juni 2002	Pembentukan Tim Penyelidik Independen Untuk Maluku.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1056 - 1058	
39	No. 39 Tahun 2002 6 Juni 2002	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1059 - 1060	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
40	No. 40 Tahun 2002 8 Juni 2002	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.88 Th.2000 ttg Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1061 - 1067	Dicabut dg Keppres No.27 & 71 Th.2003
41	No. 41 Tahun 2002 18 Juni 2002	Tim Delegasi Pemerintah RI ke Negara Timor Lorosae.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1068 - 1071	
42	No. 42 Tahun 2002 28 Juni 2002	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	HPPRI (2) 2002 Hal.: 1072 - 1118	Diubah dg Keppres No.72 Th.2004 & No.53/2010; <b>Dicabut dg PP No.45/2013</b>
43	No. 43 Tahun 2002 1 Juli 2002	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Kolombia Mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 607 - 620	
44	No. 44 Tahun 2002 1 Juli 2002	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 621 - 626	<b>Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014</b>
45	No. 45 Tahun 2002 1 Juli 2002	Perubahan Atas Keppres No.102 Th.2001 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org., dan Tata Kerja Departemen.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 627 - 630	Diubah dg Keppres No.22 Th.2004
46	No. 46 Tahun 2002 1 Juli 2002	Perubahan Atas Keppres No.103 Th.2001 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SOTK Lembaga Pemerintah Non Departemen Sbgmana tll Diubah dg Keppres No.3/2002.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 631 - 635	Diubah dg Keppres No.30/2003; No.9/2004 dan No.11/2005
47	No. 47 Tahun 2002 1 Juli 2002	Perubahan Atas Keppres No.109 Th. 2001 Ttg Unit Organisasi & Tugas Eselon I Departemen.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 636 - 641	Diubah dg Keppres No.88 Th.2003 & No.23 Th.2004 Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005
48	No. 48 Tahun 2002 1 Juli 2002	Perubahan Atas Keppres No.110 Th. 2001 Ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Dep. Sebagaimana Telah Diubah Dng Keppres No.5 Th.2002.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 642 - 645	Diubah dg Keppres No.32, 62 Th.2003; No.11 Th.2004; No.12 Th.2005.
49	No. 49 Tahun 2002 1 Juli 2002	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 646 - 653	Diubah dg Keppres No. 85 Th.2002 <b>Dicabut dg Perpres No.81 Th.2008</b>
50	No. 50 Tahun 2002 1 Juli 2002	Pemberian uang kehormatan bagi eks anggota DPRD Prop.Timtim & Kab. se Prov.Timtim.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 654 - 657	
51	No. 51 Tahun 2002 3 Juli 2002	Pengesahan Convention on Facilitation of International Maritime Traffic,1965 (Konvensi ttg Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional, 1965). (LN No.76).	HPPRI (4) 2002 Hal.: 658 - 767	
52	No. 52 Tahun 2002 10 Juli 2002	Pengesahan Proposed Fourth Amandment Of The Articles of Agreement of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional).	HPPRI (4) 2002 Hal.: 768 - 783	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
53	No. 53 Tahun 2002 11 Juli 2002	Memberikan Amnesti Kpd Sdr. Drs. Jauhar bin Saleh dan Drs.M. Amin Amsar dst.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 784 - 785	Amnesti
54	No. 54 Tahun 2002 23 Juli 2002	Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 786 - 789	Diubah dg Keppres No.24/ '05 & 22/ '07
55	No. 55 Tahun 2002 29 Juli 2002	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Th.2003.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 790 - 793	
56	No. 56 Tahun 2002 29 Juli 2002	Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, Dan Menengah.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 794 - 799	
57	No. 57 Tahun 2002 12 Agustus 2002	Perubahan Atas Keppres No.169 Th.2000 Ttg Pokok-pokok Organisasi Pertamina.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 800 - 803	
58	No. 58 Tahun 2002 12 Agustus 2002	Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 804 - 806	
59	No. 59 Tahun 2002 13 Agustus 2002	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 807 - 825	
60	No. 60 Tahun 2002 13 Agustus 2002	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 826 - 829	Dicabut dg Perpres No.39 Th.2006
61	No. 61 Tahun 2002 27 Agustus 2002	Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 830 - 831	
62	No. 62 Tahun 2002 28 Agustus 2002	Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, P.A. Sengeti, P.A. Gunung Sugih, P.A. Blambangan Umpu, P.A.Depok, P.A.Cilegon, P.A.Bontang, P.A.Sangatta, P.A. Buol, P.A.Bungku, P.A.Banggai dan P.A.Tilamuta.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 832 - 840	
63	No. 63 Tahun 2002 30 Agustus 2002	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 841 - 842	
64	No. 64 Tahun 2002 31 Agustus 2002	Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc	HPPRI (4) 2002 Hal.: 843 - 846	
65	No. 65 Tahun 2002 31 Agustus 2002	Pendapatan Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara & Gaji serta Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekjen Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 847 - 849	
66	No. 66 Tahun 2002 31 Agustus 2002	Honorarium Bagi Ketua, Wkl Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 850 - 851	Honor Tim Asistensi dicabut dg Perpres No.15-2014
67	No. 67 Tahun 2002 31 Agustus 2002	Perubahan Atas Keppres No. 16 Th. 1999 Ttg Pembentukan Komisi Pemilu dan Penetapan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilu Sebagaimana Tlh Diubah dg Keppres No.81 Th.2000.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 852 - 856	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
68	No. 68 Tahun 2002 31 Agustus 2002	Tunjangan Khusus Provinsi Papua.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 857 - 863	
69	No. 69 Tahun 2002 9 Oktober 2002	Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran RI.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 864 - 895	
70	No. 70 Tahun 2002 10 Oktober 2002	Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 869 - 910	Dicabut dg Perpres No.52 Th.2010
71	No. 71 Tahun 2002 15 Oktober 2002	Pemberian Ganti Rugi Kepada Sdr. Eddy Tanumihardja/Tan Eng Hong. (LN No.105).	HPPRI (4) 2002 Hal.: -	
72	No. 72 Tahun 2002 22 Oktober 2002	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 911 - 912	
73	No. 73 Tahun 2002 31 Oktober 2002	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 913 - 914	
74	No. 74 Tahun 2002 1 Nopember 2002	Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, KN Bengkayang, KN Cilegon, KN Sendawar, KN Sangatta dan KN Tua Pejat.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 915 - 919	
75	No. 75 Tahun 2002 5 Nopember 2002	Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation for The Development of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta).	HPPRI (4) 2002 Hal.: 920 - 1024	
76	No. 76 Tahun 2002 14 Nopember 2002	Pengesahan Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures to Implemnet The Asean Framework Agreement on The Facilitation og Goods in Transit (Protokol 8 ketentuan ketentuan di bidang sanitasi dan fitosanitasi sbg pelaksanaan perjanjian ttg Kemudahan bagi barang-barang dalam transit Asean).	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1025 - 1059	
77	No. 77 Tahun 2002 14 Nopember 2002	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Philipina Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal .	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1060 - 1082	
78	No. 78 Tahun 2002 14 Nopember 2002	Pengesahan Protocol to Amend The Frame- work Agreement on The Asean Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan ke rangka Kerja Kawasan Investasi Asean.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1083 - 1095	Dicabut dg Perpres No.49 Th.2011
79	No. 79 Tahun 2002 14 Nopember 2002	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1096 - 1099	
80	No. 80 Tahun 2002 14 Nopember 2002	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah dan Pemerintah Republik Estonia Tentang Kerjasama Kebudayaan.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1100 - 1112	
81	No. 81 Tahun 2002 14 Nopember 2002	Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1113 - 1135	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
82	No. 82 Tahun 2002 29 Nopember 2002	Perjanjian Kerangka Asean Ttg Pengaturan dan Pemerintah Republik Estonia Tentang Saling Pengakuan.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1136 - 1170	
83	No. 83 Tahun 2002 16 Desember 2002	Perubahan Atas Kepres No.123 Th.2001 Ttg Tim Koordinasi. Pengelolaan Sumber Daya Air.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1171 - 1172	Dicabut dg Keppres No.06 Th.2009
84	No. 84 Tahun 2002 16 Desember 2002	Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1173 - 1187	Dicabut dg PP No.34 Th.2011
85	No. 85 Tahun 2002 30 Desember 2002	Perubahan Atas Kepres No.49 Th.2002 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1188 - 1189	Dicabut dg Perpres No.81 Th.2008
86	No. 86 Tahun 2002 30 Desember 2002	Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1190 - 1194	
87	No. 87 Tahun 2002 30 Desember 2002	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1195 - 1232	
88	No. 88 Tahun 2002 30 Desember 2002	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan & Anak.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1233 - 1271	
89	No. 89 Tahun 2002 31 Desember 2002	Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PT) Perusahaan Listrik Negara.	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1272 - 1292	Diubah dg Keppres No.76 Th.2003
90	No. 90 Tahun 2002 31 Desember 2002	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. (LN No.144)	HPPRI (4) 2002 Hal.: 1293 - 1302	Dicabut dg Perpres No.22 Th.2005.
<b>INPRES</b>				
1	No. 1 Tahun 2002 10 Pebruari 2002	Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyesuaian Masalah Aceh.	HPPRI (2) 2002 Hal.:1119-1124	
2	No. 2 Tahun 2002 13 Maret 2002	Pengendalian Penambangan Pasir Laut.	HPPRI (2) 2002 Hal.:1125-1128	
3	No. 3 Tahun 2002 24 September 2002	Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya.	HPPRI (4) 2002 Hal.:1303-1305	
4	No. 4 Tahun 2002 22 Oktober 2002	Kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.	HPPRI (4) 2002 Hal.:1306-1308	
5	No. 5 Tahun 2002 22 Oktober 2002	Kepada Kepala Badan Intelijen Negara.	HPPRI 4) 2002 Hal.:1309-1310	
6	No. 6 Tahun 2002 19 Nopember 2002	Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003.	HPPRI (4) 2002 Hal.:1311-1313	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
7	No. 7 Tahun 2002 27 Nopember 2002	Pelaksanaan Kebijakan dan Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.	HPPRI (4) 2002 Hal.:1314-1355	
8	No. 8 Tahun 2002 27 Nopember 2002	Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kpd Debitur yg telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kpd Debitur yg tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.	HPPRI (4) 2002 Hal.:1356-1360	
9	No. 9 Tahun 2002 31 Desember 2002	Penetapan Kebijakan Perberasan.	HPPRI (4) 2002 Hal.:1361-1364	Dicabut dg Inpres No.2 Th.2005
<b>TAHUN 2003</b>				
<b>KEPPRES</b>				
1	No.1 Tahun 2003 6 Januari 2003	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota T.A. 2003. (LN No.1)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 335 - 351	
2	No. 2 Tahun 2003 17 Januari 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 352 - 355	Dicabut dg Perpres No.40 Th.2006
3	No. 3 Tahun 2003 21 Januari 2003	Tunjangan Tenaga Kependidikan.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 356 - 361	Dicabut dg Perpres No.58 Th.2006
4	No. 4 Tahun 2003 21 Januari 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 362 - 366	Dicabut dg Perpres No.52 Th.2006
5	No. 5 Tahun 2003 21 Januari 2003	Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RI.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 367 - 371	Dicabut dg Perpres No.73 Th.2006
6	No. 6 Tahun 2003 23 Januari 2003	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Rep. Indonesia dan Pemerintah Rep. Korea tentang Kerjasama dlm Bidang-bidang Energi dan Sumber-sumber Mineral. (LN No.9)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 372 - 387	
7	No. 7 Tahun 2003 23 Januari 2003	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep.Slovakia. (LN No.10)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 388 - 403	
8	No. 8 Tahun 2003 27 Januari 2003	Penugasan Khusus Menteri Dalam Negeri Dlm Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Prov. Lampung.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 404 - 405	
9	No. 9 Tahun 2003 27 Januari 2003	Tim Koordinasi Telematika Indonesia	HPPRI (2) 2003 Hal.: 406 - 409	Dicabut dg Keppres No.20 Th.2006
10	No. 10 Tahun 2003 21 Pebruari 2003	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 410 - 411	
11	No. 11 Tahun 2003 3 Maret 2003	Mahkamah Syar'iyah & Mahkamah Syar'iyah Prov.di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 412 - 416	
12	No. 12 Tahun 2003 18 Maret 2003	Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke - 9.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 417 - 420	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
13	No. 13 Tahun 2003 18 Maret 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Agen.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 421 - 424	Dicabut dg Perpres No.41 Th.2006
14	No. 14 Tahun 2003 21 Maret 2003	Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 425 - 427	
15	No. 15 Tahun 2003 31 Maret 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 428 - 431	Dicabut dg Perpres No.26 Th.2006
16	No. 16 Tahun 2003 31 Maret 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Penga- was Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 432 - 440	Dicabut dg Perpres No.26 Th.2006
17	No. 17 Tahun 2003 31 Maret 2003	Perubahan Atas Kepres No.59 Th.1985 Ttg Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 441 - 442	Dicabut dg Perpres No.33 Th.2014
18	No. 18 Tahun 2003 31 Maret 2003	Bebas Visa Kunjungan Singkat.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 443 - 446	Diubah dg Keppres No.103 Th.2003 & No.16/2008
19	No. 19 Tahun 2003 8 April 2003	Ketua & Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke-9.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 447 - 449	
20	No. 20 Tahun 2003 8 April 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	HPPRI (2) 2003 Hal.: 450 - 454	Dicabut dg Perpres No.27 Th.2006
21	No. 21 Tahun 2003 11 April 2003	Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-barang Berbahaya). (LN No.50)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 455 - 470	
22	No. 22 Tahun 2003 17 April 2003	Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 471 - 472	
23	No. 23 Tahun 2003 17 April 2003	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 473 - 474	
24	No. 24 Tahun 2003 29 April 2003	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 475 - 476	
25	No. 25 Tahun 2003 5 Mei 2003	Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 477 - 480	
26	No. 26 Tahun 2003 6 Mei 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 481 - 484	Dicabut dg Perpres No.21 Th.2005.
27	No. 27 Tahun 2003 17 Mei 2003	Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Prov. Maluku Utara. (LN No.53)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 485 - 487	
28	No. 28 Tahun 2003 18 Mei 2003	Pernyataan Keadaan Bahaya dg Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (LN No.54)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 488 - 492	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
29	No. 29 Tahun 2003 26 Mei 2003	Perubahan Atas Keppres No. 101 Th 2001 ttg Kedudukan,Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 2 Tahun 2002.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 493 - 496	Diubah dg Keppres No.47 Th.2003
30	No. 30 Tahun 2003 26 Mei 2003	Perubahan Atas Keppres No. 103 Th 2001 ttg Kedudukan,Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 46 Tahun 2002.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 497 - 500	Diubah dg Keppres No.9 Th.2004 & No.11 Th.2005
31	No.31 Tahun 2003 26 Mei 2003	Perubahan Atas Keppres No.108 Tahun 2001 ttg. Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres No. 4 Tahun 2003.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 501 - 503	Diubah dg Keppres No.48 Th.2003
32	No. 32 Tahun 2003 26 Mei 2003	Perubahan Atas Keppres No.110 Tahun 2001 Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur, Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No.48 Tahun 2002.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 504 - 506	Diubah dg Keppres No.62 Th.2003, No.11 Th.2004 & No.12 Th.2005
33	No. 33 Tahun 2003 26 Mei 2003	Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 507 - 508	
34	No. 34 Tahun 2003 31 Mei 2003	Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. (LN No.60)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 509 - 512	
35	No. 35 Tahun 2003 10 Juni 2003	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sbg jalan tol, Penambahan Simpang susun kaligawe sbg Bag.dari jln tol Semarang Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pd Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp masuk Kembangan Sbg Bagian dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Penetapan Gol. Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 513 - 519	Diubah dg Keppres No.74 Th.2003
36	No. 36 Tahun 2003 10 Juni 2003	Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 520 - 531	
37	No. 37 Tahun 2003 10 Juni 2003	Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerta sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 532 - 534	
38	No. 38 Tahun 2003 10 Juni 2003	Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003. (LN No.63)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 535 - 537	
39	No. 39 Tahun 2003 10 Juni 2003	Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta. (LN No.65)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 538 - 541	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
40	No. 40 Tahun 2003 10 Juni 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 542 - 546	Dicabut dg Perpres No.25 Th.2006
41	No. 41 Tahun 2003 10 Juni 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 547 - 550	Dicabut dg Perpres No.38 Th.2006
42	No. 42 Tahun 2003 10 Juni 2003	Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 551 - 552	Dicabut dg Perpres No.34 Th.2013
43	No. 43 Tahun 2003 16 Juni 2003	Keppres RI selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masy. & Jurnalis di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam. (LN No.68)	HPPRI (2) 2003 Hal.: 553 - 556	
44	No. 44 Tahun 2003 16 Juni 2003	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 557 - 558	
45	No. 45 Tahun 2003 16 Juni 2003	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Th. 2004.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 559 - 564	
46	No. 46 Tahun 2003 8 Juli 2003	Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).	HPPRI (5) 2003 Hal.: 3 - 5	
47	No. 47 Tahun 2003 8 Juli 2003	Perubahan Atas Keppres No.101 Th.2001 Ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SOTK Menteri Negara sbgmana tih beberapa kali diubah Terakhir dg Keppres No.29/2003.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 6 - 8	
48	No. 48 Tahun 2003 8 Juli 2003	Perubahan Atas Keppres No.108 Th.2001 Ttg Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dng Keppres No.31 Th.2003.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 9 - 11	Diubah dg Keppres No.10 & 38 Th.2004 Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005
49	No. 49 Tahun 2003 8 Juli 2003	Pencabutan Keppres No.43 Th.1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 12 - 13	
50	No. 50 Tahun 2003 8 Juli 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian & Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 14 - 20	Dicabut dg Perpres No.53 & 64/2006
51	No. 51 Tahun 2003 8 Juli 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 21 - 24	Dicabut dg Perpres No.31 Th.2006
52	No. 52 Tahun 2003 14 Juli 2003	Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 25 - 27	Dicabut dg Perpres No.92 Th.2006
53	No. 53 Tahun 2003 14 Juli 2003	Perubahan Kedua Atas Keppres No.177/1999 ttg Komite Kebijakan Sektor Keuangan.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 28 - 29	Dicabut dg Keppres No.15 Th.2004
54	No. 54 Tahun 2003 18 Juli 2003	Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 30 - 37	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
55	No. 55 Tahun 2003 21 Juli 2003	Pengesahan Protocol On Notification Procedures (Protokol Prosedur Notifikasi). (LN No.85)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 38 - 50	
56	No. 56 Tahun 2003 21 Juli 2003	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Romania Mengenai Dinas- Dinas Penerbangan Berjadwal. (LN No.86)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 51 - 99	
57	No. 57 Tahun 2003 21 Juli 2003	Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income. (LN No.87)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 100 - 129	
58	No. 58 Tahun 2003 21 Juli 2003	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Rakyat China Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan dg Pajak Atas Penghasilan. (LN No.88)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 130 - 206	
59	No. 59 Tahun 2003 31 Juli 2003	Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 207 - 209	
60	No. 60 Tahun 2003 31 Juli 2003	Uang Paket Bagi Pimpinan & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 210 - 211	
61	No. 61 Tahun 2003 31 Juli 2003	Perubahan Keppres No.129 Th.1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 212 - 236	Dicabut dg Keppres No.40 Th.2004
62	No. 62 Tahun 2003 31 Juli 2003	Perubahan atas Keppres No.110 Th.2001 Ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No.32 Th.2003.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 237 - 240	Diubah dg Keppres No.11 Th.2004 & No.12 Th.2005
63	No. 63 Tahun 2003 11 Agustus 2003	Dewan Gula Indonesia.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 241 - 245	Dicabut dg Perpres No.176 Th.2014
64	No. 64 Tahun 2003 20 Agustus 2003	Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No.26 Th.2001 ke dlm Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No.11/2003.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 246 - 252	Dicabut dg Perpres No.1 Th.2006
65	No. 65 Tahun 2003 20 Agustus 2003	Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No.27 Th.2001 ke Dalam Hakim menurut PP No.12 Th.2003.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 253 - 257	Dicabut dg Perpres No.2 Th.2006
66	No. 66 Tahun 2003 20 Agustus 2003	Penyesuaian Gaji Pokok Anggota tentara Nasional Indonesia menurut PP No.28 Th.2001 ke Dalam PP No.13 Th.2003.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 258 - 264	
67	No. 67 Tahun 2003 20 Agustus 2003	Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut PP No.29 Th.2001 ke Dalam PP No.14 Th.2003.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 265 - 271	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
68	No. 68 Tahun 2003 26 Agustus 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 272 - 279	Dicabut dg Perpres No.30 Th.2006
69	No. 69 Tahun 2003 26 Agustus 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 280 - 285	Dicabut dg Perpres No.26 Th.2006
70	No. 70 Tahun 2003 27 Agustus 2003	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 286 - 287	
71	No. 71 Tahun 2003 27 Agustus 2003	Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 288 - 289	
72	No. 72 Tahun 2003 18 September 2003	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 290 - 291	
73	No. 73 Tahun 2003 21 September 2003	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 292 - 294	
74	No. 74 Tahun 2003 21 September 2003	Perubahan atas Keppres No.35/2003 ttg Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon Sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe Sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pd jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sbg bagian dari jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Penetapan Gol. Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya tarif Tol pd jalan Tol Palimana-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 295 - 298	
75	No. 75 Tahun 2003 21 September 2003	Perubahan atas Keppres No./2003 ttg Penetapan Golongan Jenis Kendaraan bermotor & Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Jalan Tol.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 299 - 302	
76	No. 76 Tahun 2003 30 September 2003	Perubahan atas Keppres No.89/2002 ttg Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yg Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Perusahaan Listrik Negara.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 303 - 310	
77	No. 77 Tahun 2003 14 Oktober 2003	Komisi Perlindungan Anak Indonesia.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 311 - 316	
78	No. 78 Tahun 2003 14 Oktober 2003	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 317 - 318	
79	No. 79 Tahun 2003 27 Oktober 2003	Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 319 - 324	
80	No. 80 Tahun 2003 3 Nopember 2003	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. (LN No.120 & TLN No.4330)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 325 - 569	Diubah dg Kepres No.61/2004, Perpres No.32 & 70/2005, No.8, No.79, No.85 /2006, No.95/2007

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
81	No. 81 Tahun 2003 3 Nopember 2003	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 570 - 573	
82	No. 82 Tahun 2003 3 Nopember 2003	Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 574 - 582	Dicabut dg Perpres No.50 Th.2011
83	No. 83 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Sekretariat Pengadilan Pajak.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 583 - 587	
84	No. 84 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Tunjangan jabatan fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 588 - 594	Dicabut dg Perpres No.46 Th.2006
85	No. 85 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Tunjangan jabatan fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 595 - 599	Dicabut dg Perpres No.35 Th.2006
86	No. 86 Tahun 2003 4 Nopember 2003	Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 600 - 603	Dicabut dg Perpres No.40 Th.2006
87	No. 87 Tahun 2003 11 Nopember 2003	Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 604 - 608	Dicabut dg Keppres No.3 Th.2006
88	No. 88 Tahun 2003 11 Nopember 2003	Perubahan Keppres No.109 Th.2001 tentang Unit Organisasi & Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana telah Diubah dgn Keppres No.47 Th.2002.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 609 - 612	Diubah dg Keppres No.23 Th.2004 Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005
89	No. 89 Tahun 2003 12 Nopember 2003	Pembentukan Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri Baa, Kejaksaan Negeri Parigi dan Kejaksaan Negeri Banjar. (LN No.127)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 613 - 620	
90	No. 90 Tahun 2003 14 Nopember 2003	Pengesahan Prptocol to Implement The Third Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Paket Ketiga Dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean). (LN No.128)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 621 - 679	
91	No. 91 Tahun 2003 14 Nopember 2003	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pem. Rep. Demokratik Rakyat Korea Mengenai Kerjasama Ilmiah dan Teknologi. (LN No.129)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 680 - 704	
92	No. 92 Tahun 2003 14 Nopember 2003	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI & Pemerintah Kerajaan Belanda utk Peng- hindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol. (LN No.130)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 705 - 808	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
93	No. 93 Tahun 2003 14 Nopember 2003	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Rep.India mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal. (LN No.131)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 809 - 861	
94	No. 94 Tahun 2003 14 Nopember 2003	Pengesahan Second Additional Protocol To The Constitution Of The Asian Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Kedua Konstitusi Perhimpunan Pos Asia Pasifik). (LN No.132)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 862 - 882	
95	No. 95 Tahun 2003 14 Nopember 2003	Pengesahan Agreement on The Augmentation Of The Asean Science Fund (Persetujuan Mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan Asean). (LN No.133)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 883 - 906	
96	No. 96 Tahun 2003 14 Nopember 2003	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Rep.Demokratik Rakyat Korea ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan. (LN No.134)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 907 - 969	
97	No. 97 Tahun 2003 18 Nopember 2003	Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (LN No.135)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 970 - 973	
98	No. 98 Tahun 2003 2 Desember 2003	Pencabutan KEPPRES No.30 Th.1989 Tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasioal Sebagaimana Telah Diubah Dengan KEPPRES No.51 Th.1993.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 974 - 975	
99	No. 99 Tahun 2003 2 Desember 2003	Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. (LN No.138)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 976 - 980	
100	No.100 Tahun 2003 8 Desember 2003	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 981 - 982	
101	No.101 Tahun 2003 17 Desember 2003	Perubahan atas Kepres No.20/2002 ttg Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 983 - 985	
102	No.102 Tahun 2003 17 Desember 2003	Perubahan atas Keppres No.64 Th.1992 ttg Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang menduduki Jabatan Pustakawan sbgmana telah Diubah dg Keppres No.147 Th.2000.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 986 - 988	
103	No.103 Tahun 2003 17 Desember 2003	Perubahan atas Keppres No.18 Th.2003 ttg Bebas Visa Kunjungan Singkat.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 989 - 991	
104	No.104 Tahun 2003 31 Desember 2003	Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. (LN No.157)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 992 - 1004	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
105	No.105 Tahun 2003 31 Desember 2003	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan - Sadang dan Ruas Paadalarang - Cikamuning sebagai bagian dari jalan Tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang sebagai jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 1005 - 1010	
106	No.106 Tahun 2003 31 Desember 2003	Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 1011 - 1018	
107	No.107 Tahun 2003 31 Desember 2003	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sebagai Jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 1019 - 1025	
108	No.108 Tahun 2003 31 Desember 2003	Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 1026 - 1039	
109	No.109 Tahun 2003 31 Desember 2003	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota T.A. 2004. (LN No.160)	HPPRI (5) 2003 Hal.: 1040 - 1060	
<b>INPRES Th.2003</b>				
1	No. 1 Tahun 2003 27 Januari 2003	Percepatan Pelaksanaan UU No.45 Th.1999 ttg Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kab. Paniai, Kab. Mimilea, Kab.Puncak Jaya, & Kota Sorong.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 565 - 569	
2	No. 2 Tahun 2003 18 Maret 2003	Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 Th.2003 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Th.2005.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 570 - 572	
3	No. 3 Tahun 2003 9 Juni 2003	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 573 - 596	
4	No. 4 Tahun 2003 10 Juni 2003	Pengkoordinasian Perumusan & Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	HPPRI (2) 2003 Hal.: 597 - 599	
5	No. 5 Tahun 2003 15 September 2003	Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 1061 - 1106	
6	No. 6 Tahun 2003 21 September 2003	Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Prov. Maluku Utara Pascakonflik.	HPPRI (5) 2003 Hal.: 1107 - 1123	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>TAHUN 2004</b>			
	<b>PERPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2004 8 Nopember 2004	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.	HPPRI (3) 2004 Hal.: 713 - 714	
2	No. 2 Tahun 2004 18 Nopember 2004	Pernyataan perpanjangan keadaan bahaya dg tingkatan keadaan Darurat Sipil di Prov. NAD.	HPPRI (3) 2004 Hal.: 715 - 719	Dicabut dg Perpres No.38 Th.2005.
3	No. 3 Tahun 2004 9 Desember 2004	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota TA.2005.	HPPRI (3) 2004 Hal.: 720 - 735	
4	No. 4 Tahun 2004 20 Desember 2004	Pengesahan Protocol to Amend the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa Asean). (LN No.164)	HPPRI (3) 2004 Hal.: 736 - 750	
5	No. 5 Tahun 2004 20 Desember 2004	Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.	HPPRI (3) 2004 Hal.: 751 - 750	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2004 5 Januari 2004	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 671 - 674	
2	No. 2 Tahun 2004 5 Januari 2004	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 675 - 676	
3	No. 3 Tahun 2004 19 Januari 2004	Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 677 - 681	
4	No. 4 Tahun 2004 19 Januari 2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi Republik Indonesia.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 682 - 685	Dicabut dg Perpres No.32 Th.2006
5	No. 5 Tahun 2004 19 Januari 2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter gigi, Apoteker,Pranata laboratorium kesehatan, Epidemiolog kesehatan, Entomolog kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh kesehatan masyarakat, Perawat gigi,Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis RI.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 682 - 685	Dicabut dg Perpres No.47 Th.2006
6	No. 6 Tahun 2004 19 Januari 2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 711 - 715	Dicabut dg Perpres No.33 Th.2006
7	No. 7 Tahun 2004 26 Januari 2004	Pengesahan Persetujuan Antara RI dan Rep. Portugal utk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengeluaran Pajak yg Berkenaan dg Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol. (LN No.12)	HPPRI (1) 2004 Hal.: 716 - 786	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
8	No. 8 Tahun 2004 30 Januari 2004	Perubahan atas Keppres No.101 Th.2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan SOTK Menteri Negara sbgmana tlh beberapa kali diubah terkahir dg Keppres No.47/2003.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 787 - 789	
9	No. 9 Tahun 2004 30 Januari 2004	Perubahan atas Keppres No.103 Th.2001 ttg LPND Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg Keppres No.30 Th.2003.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 790 - 794	Diubah dg Perpres No.11 Th.2005.
10	No.10 Tahun 2004 30 Januari 2004	Perubahan atas Keppres No.108 Th.2001 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dg Keppres No.48 Th.2003.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 795 - 798	Diubah dg Keppres No.38 Th.2004 Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005
11	No.11 Tahun 2004 30 Januari 2004	Perubahan atas Keppres No.110 Th.2001 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.62 Th.2003.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 799 - 803	Diubah dg Perpres No.12 Th.2005.
12	No.12 Tahun 2004 16 Pebruari 2004	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 804 - 805	
13	No.13 Tahun 2004 17 Pebruari 2004	Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 806 - 809	Dicabut dg Perpres No.4 Th.2006
14	No.14 Tahun 2004 18 Pebruari 2004	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 810 - 903	
15	No.15 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 904 - 909	
16	No.16 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 910 - 914	
17	No.17 Tahun 2004 27 Pebruari 2004	Perubahan atas Keppres No.26/ 98 ttg Jaminan Thdp Kewajiban Pembayaran Bank Umum. (LN No.24)	HPPRI (1) 2004 Hal.: 915 - 917	
18	No.18 Tahun 2004 17 Maret 2004	Pendirian Universitas Khairun.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 918 - 919	
19	No.19 Tahun 2004 17 Maret 2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 920 - 924	Dicabut dg Perpres No.34 Th.2006
20	No.20 Tahun 2004 18 Maret 2004	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 utk Pelaks. Pemilihan Umum Th.2004.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 925 - 928	
21	No.21 Tahun 2004 23 Maret 2004	Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 929 - 933	
22	No.22 Tahun 2004 23 Maret 2004	Perubahan atas Keppres No.102 Th.2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org., & Tata Kerja Departemen Sbg mana telah diubah dg Keppres No.45/2002.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 934 - 936	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23	No.23 Tahun 2004 23 Maret 2004	Perubahan atas Keppres No.109 Th.2001 ttg Unit Organisasi & Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dg Keppres No.88 Th.2003.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 937 - 940	Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005
24	No.24 Tahun 2004 24 Maret 2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 941 - 945	Dicabut dg Perpres No.28& 42 Th.2006
25	No.25 Tahun 2004 24 Maret 2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, dan Pengantar Kerja.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 946 - 952	Dicabut dg Perpres No.36, 44, 56 / 2006
26	No.26 Tahun 2004 2 April 2004	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 sebagai Hari yg Diliburkan.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 953 - 955	
27	No.27 Tahun 2004 12 April 2004	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 956 - 958	
28	No.28 Tahun 2004 12 April 2004	Perubahan atas Keputusan Presiden No.33 Th.1981 ttg Badan Koordinasi Penanganan Modal Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No.120 Th.1999.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 959 - 961	Mengubah Keppres No.33/1981&120/1999 Dicabut dg Perpres No.27 Th.2009
29	No.29 Tahun 2004 12 April 2004	Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 962 - 966	Dicabut dg Perpres No.27 Th.2009
30	No.30 Tahun 2004 13 April 2004	Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. (LN. No.40)	HPPRI (1) 2004 Hal.: 967 - 970	
31	No.31 Tahun 2004 26 April 2004	Pengamanan & Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (LN No.42)	HPPRI (1) 2004 Hal.: 971 - 974	
32	No.32 Tahun 2004 27 April 2004	Honorarium Bagi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Hukum Nasional dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 975 - 976	
33	No.33 Tahun 2004 27 April 2004	Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 977 - 981	
34	No.34 Tahun 2004 27 April 2004	Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 982 - 986	
35	No.35 Tahun 2004 10 Mei 2004	Perubahan atas Keppres Nomor 102 Th.2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org., dan Tata Kerja Departemen sbgmana telah beberapa kali Diubah Terakhir dg Keppres No.22 Th.2004.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 987 - 990	Mengubah Keppres No.102 Th.2001; No.22 Th.2004;

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
36	No.36 Tahun 2004 10 Mei 2004	Perubahan atas Keppres Nomor 109 Th.2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana tih beberapa kali Diubah Terakhir dg Keppres No.23 Th.2004.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 991 - 994	Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005
37	No.37 Tahun 2004 10 Mei 2004	Perubahan atas Keppres No.84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.	HPPRI (1) 2004 Hal.: 995-1000	Dicabut dg Perpres No.95 Th.2006
38	No.38 Tahun 2004 10 Mei 2004	Perubahan atas Keppres No.108 Th.2001 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No.10/2004.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1001-1004	Mengubah Keppres No.108/2001&10/2004; Dicabut dg Perpres No.10 Th.2005;
39	No.39 Tahun 2004 10 Mei 2004	Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004. (LN No.43)	HPPRI (1) 2004 Hal.:1005-1007	
40	No.40 Tahun 2004 11 Mei 2004	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 - 2009.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1008-1036	
41	No.41 Tahun 2004 12 Mei 2004	Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yg Berada di Kawasan Hutan.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1037-1040	
42	No.42 Tahun 2004 14 Mei 2004	Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1041-1047	
43	No.43 Tahun 2004 18 Mei 2004	Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (LN No.46)	HPPRI (1) 2004 Hal.:1048-1053	Dicabut dg Perpres No.38 Th.2005.
44	No.44 Tahun 2004 18 Mei 2004	Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1054-1056	
45	No.45 Tahun 2004 27 Mei 2004	Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Setjen Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1057-1059	
46	No.46 Tahun 2004 31 Mei 2004	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Bulgaria. (LN No.48)	HPPRI (1) 2004 Hal.:1060-1083	
47	No.47 Tahun 2004 1 Juni 2004	Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1084-1087	Diubah dg Keppres No.9 Th.2005.



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
48	No.48 Tahun 2004 15 Juni 2004	Pengesahan Framework Agreement on Compre-hensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara & Rep.Rakyat China). (LN No.50)	HPPRI (1) 2004 Hal.:1088-1129	
49	No.49 Tahun 2004 21 Juni 2004	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1130-1133	
50	No.50 Tahun 2004 21 Juni 2004	Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1134-1136	
51	No.51 Tahun 2004 22 Juni 2004	Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1137-1141	
52	No.52 Tahun 2004 22 Juni 2004	Komisi Nasional Lanjut Usia.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1142-1148	
53	No.53 Tahun 2004 23 Juni 2004	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan. (LN No.54)	HPPRI (1) 2004 Hal.:1149-1167	
54	No.54 Tahun 2004 23 Juni 2004	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.	HPPRI (1) 2004 Hal.:1168-1172	
55	No.55 Tahun 2004 1 Juli 2004	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Pertama Th.2004 sbg Hari Yang Diliburkan. (LN No.57)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 3 - 4	
56	No.56 Tahun 2004 9 Juli 2004	Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 5 - 8	
57	No.57 Tahun 2004 26 Juli 2004	Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan. (LN No.69)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 9 - 11	
58	No.58 Tahun 2004 26 Juli 2004	Penanganan Gula yg Diimpor Secara Tidak Sah. (LN No.70)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 12 - 15	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
59	No.59 Tahun 2004 26 Juli 2004	Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (LN No.71)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 16 - 18	
60	No.60 Tahun 2004 26 Juli 2004	Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Republik Demokratik Timor Leste.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 19 - 21	
61	No.61 Tahun 2004 5 Agustus 2004	Perubahan atas Keppres No.80 Th.2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (LN No.77)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 22 - 25	Diubah dg Perpres No.32 Th.2005
62	No.62 Tahun 2004 5 Agustus 2004	Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 26 - 28	
63	No.63 Tahun 2004 5 Agustus 2004	Pengamanan Obyek Vital Nasional. (LN No.79)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 29 - 32	
64	No.64 Tahun 2004 5 Agustus 2004	Kedudukan, Tugas, Fungsi, SOTK Instansi Vertikal di Lingk. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 33 - 38	Dicabut dg Perpres No.83 Th.2012
65	No.65 Tahun 2004 5 Agustus 2004	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 39 - 40	
66	No.66 Tahun 2004 9 Agustus 2004	Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, & Anggota Lembaga Sensor Film.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 41 - 42	Dicabut dg Perpres No.93 Th.2007
67	No.67 Tahun 2004 10 Agustus 2004	Pengesahan Persetujuan antara RI & Peme- rintah Negara Meksiko Serikat utk Penghin- daran Pajak Berganda & Pencegahan Penge- lakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Beserta Protokol. (LN No.82)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 43 - 126	
68	No.68 Tahun 2004 10 Agustus 2004	Pengesahan persetujuan antara RI & Rep.Fed Jerman ttg Peningkt. & Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal beserta Protokol. (LN No.83)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 127 - 182	
69	No.69 Tahun 2004 10 Agustus 2004	Pengesahan Framework Agreement on Com- prehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and the Rep. of India (Persetujuan kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi menye- luruh antara Negara2 Anggota Perhimpunan Bangsa2 Asia Tenggara dan Republik India). (LN No.84)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 183 - 242	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
70	No.70 Tahun 2004 12 Agustus 2004	Perpanjangan Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 243 - 244	Diperpig dg Keppres No.5 Th.2005
71	No.71 Tahun 2004 13 Agustus 2004	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 245 - 247	
72	No.72 Tahun 2004 6 September 2004	Perubahan atas Keppres No.42 Th.2002 ttg Pedoman Pelaksanaan APBN. (LN No.92 & TLN No.4418)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 248 - 253	Dicabut dg PP No.45 Th.2013
73	No.73 Tahun 2004 8 September 2004	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 254 - 255	
74	No.74 Tahun 2004 10 September 2004	Pengesahan WIPO Performances and Phono- grams Treaty, 1996 (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996). (LN No.93)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 256 - 307	
75	No.75 Tahun 2004 17 September 2004	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Kedua Tahun 2004 sebagai Hari yg Diliburkan. (LN No.94)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 308 - 309	
76	No.76 Tahun 2004 27 September 2004	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Rep. Peru Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial. (LN No.97)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 310 - 422	
77	No.77 Tahun 2004 27 September 2004	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Rep. Rakyat Demokratik Korea mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik & Paspor Dinas. (LN No.98)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 323 - 439	
78	No.78 Tahun 2004 27 September 2004	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI & Pem. Rep. Bulgaria Mengenai Peningkat- an & Perlindungan atas Penanaman Modal. (LN No.99)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 340 - 367	
79	No.79 Tahun 2004 27 September 2004	Pengesahan Protokol Perubahan atas Per- setujuan Kerjasama antara Pem. RI dan Pem. Rep. Amerika Serikat Mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai. (LN No.100)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 368 - 373	
80	No.80 Tahun 2004 27 September 2004	Pengesahan Instrument Amending The Consti- tutions dan The Convention of the International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi & Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002). (LN No.101)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 374 - 997	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
81	No.81 Tahun 2004 27 September 2004	Pengadaan Rumah Bagi Mantan dan/atau Mantan Wakil Presiden. (LN No.102)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 998-1000	Diubah dg Perpres No.88 Th.2007 Dicabut dg Perpres No.52 Th.2014
82	No.82 Tahun 2004 4 Oktober 2004	Tim Dokter Kepresidenan.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 1001-1008	Dicabut dg Perpres No.25 Th.2005
83	No.83 Tahun 2004 5 Oktober 2004	Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 1009-1011	Diubah dg Keppres No.6 Th.2007
84	No.84 Tahun 2004 5 Oktober 2004	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.	HPPRI (4) 2004 Hal.: 1012-1016	Diubah dg Keppres No.2/2005; No.3/2009 & No.21/2013
85	No.85 Tahun 2004 5 Oktober 2004	Pengesahan Revised Constitution of Asia- Pacific Telecommunication, New Delhi (Konstitusi Telekomunikasi Asia Pasifik yang diperbaharui, New Delhi 2002). (LN No.109)	HPPRI (4) 2004 Hal.: 1017-1067	
86	No.86 Tahun 2004 5 Oktober 2004	Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Rep. Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1068-1069	
87	No.87 Tahun 2004 6 Oktober 2004	Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri kedlm Institut Ilmu Pemerintahan. (LN No.97)	HPPRI (4) 2004 Hal.:1070-1072	
88	No.88 Tahun 2004 6 Oktober 2004	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. (LN No.98)	HPPRI (4) 2004 Hal.:1073-1079	
89	No.89 Tahun 2004 6 Oktober 2004	Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1080-1083	Dicabut dg Perpres No.48 Th.2006
90	No.90 Tahun 2004 11 Oktober 2004	Pengesahan Amendements to Article 24 nd 25 of the Constitution of the World Health Organization (Amandemen terhadap pasal 24 & 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia). (LN No.120)	HPPRI (4) 2004 Hal.:1084-1087	
91	No.91 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1088-1090	
92	No.92 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1091-1092	
93	No.93 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaiikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1093-1094	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
94	No.94 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1095-1101	Dicabut dg Perpres No.42 Th.2008
95	No.95 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Perubahan Kedua atas Keppres No.26 Th.1998 tentang jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1102-1104	
96	No.96 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksan Negeri Penajam,Kejaksaan Negeri Melonguane,Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaan Negeri Muko-muko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon, dan Kejaksaan Negeri Amurang. (LN No.135)	HPPRI (4) 2004 Hal.:1105-1114	
97	No.97 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala. (LN No.139)	HPPRI (4) 2004 Hal.:1115-1118	
98	No.98 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha. (LN No.140)	HPPRI (4) 2004 Hal.:1119-1122	
99	No.99 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Tujangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1123-1126	Dicabut dg Perpres No.49 Th.2006
100	No.100 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Tujangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1127-1130	Dicabut dg Perpres No.29 Th.2006
101	No.101 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1131-1134	Dicabut dg Perpres No.51 Th.2006
102	No.102 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1135-1136	
103	No.103 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keppres No.8 th.2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1137-1140	Dicabut dg Perpres No.27 Th.2008
104	No.104 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1141-1159	
105	No.105 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pengelolaan Arsip Statis. (LN No.143)	HPPRI (4) 2004 Hal.:1160-1173	
106	No.106 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Tim Koord.Pemulangan Tenaga Kerja Indone- sia Bermasalah & Keluarganya dari Malaysia.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1174-1179	Dicabut dg Perpres No.45 Th.2013

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
107	No.107 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Dewan Pengupahan.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1180-1194	
108	No.108 Tahun 2004 18 Oktober 2004	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pd Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pd Kab.Kupang, Kab.Belitung, Kab.Sukabumi, Kab. Bulungan, Kab. Serang, Kab. Ogan Komering Ulu, dan Kab. Jeneponto.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1195-1196	
109	No.109 Tahun 2004 17 November 2004	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1197-1198	
110	No.110 Tahun 2004 25 November 2004	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1199-1200	
111	No.111 Tahun 2004 23 Desember 2004	Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1201-1203	Diubah dg Keppres No.12 Th.2005
112	No.112 Tahun 2004 27 Desember 2004	Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Prov. Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional & Hari Berkabung	HPPRI (4) 2004 Hal.:1204-1208	
	<b>INPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2004 1 Juni 2004	Pelaksanaan Operasi Terpadu Dalam Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh	HPPRI (1) 2004 Hal.:1173 - 1179	
2	No.2 Tahun 2004 20 Juli 2004	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1209 - 1211	
3	No.3 Tahun 2004 19 Oktober 2004	Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1212 - 1217	
4	No.4 Tahun 2004 2 Desember 2004	Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1218 - 1220	
5	No.5 Tahun 2004 9 Desember 2004	Percepatan Pemberantasan Korupsi.	HPPRI (4) 2004 Hal.:1221 - 1225	
	<b>TAHUN 2005</b>			
	<b>PERPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2005 4 Januari 2005	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 3 - 6	Dicabut dg Perpres No.54 Th.2006

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No. 2 Tahun 2005 4 Januari 2005	Perubahan Institut Agama Islam Negri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 7 - 9	
3	No. 3 Tahun 2005 4 Januari 2005	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pem. Rep. Tajikistan. (LN No.6)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 10 - 23	
4	No. 4 Tahun 2005 17 Januari 2005	Pengesahan Persetujuan Pem. RI dan Pem. Rep. Bolivar Venezuela mengenai Kerjasama Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan & Pendidikan. (LN No.7)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 24 - 39	
5	No. 5 Tahun 2005 17 Januari 2005	Pengesahan Protocol on The Authentic Quinquelingual Text of The Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Kelima dari Konvensi Penerbangan Sipil International, Chicago 1944). (LN No.8)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 40 - 97	
6	No. 6 Tahun 2005 17 Januari 2005	Pengesahan Protocol on The Authentic Six- Linguage Text of The Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Keenam dari Konvensi Penerbangan Sipil International, Chicago 1944). (LN No.9)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 98 - 155	
7	No. 7 Tahun 2005 19 Januari 2005	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009. (LN No.11)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 156 - 718	
8	No. 8 Tahun 2005 27 Januari 2005	Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	HPPRI (2) 2005 Hal.: 719 - 722	Dicabut dg Keppres No.56 Th.2006
9	No. 9 Tahun 2005 31 Januari 2005	Kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 723 - 767	Diubah dg Keppres No.62/2005; 94/2006. Perpres No.20/2008 <b>Dicabut dg Perpres No.47 Th.2009</b>
10	No. 10 Tahun 2005 31 Januari 2005	Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 768 - 809	Diubah dg Perpres No.15 & 63 Th.2005; No.91/2006; 17/ 2007; 21/2008 & 50/2008
11	No.11 Tahun 2005 31 Januari 2005	Perubahan Kelima atas Keppres No.103 Th.2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 810 - 813	
12	No.12 Tahun 2005 31 Januari 2005	Perubahan Keenam atas Keppres No.110 Th.2001 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah non Departemen.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 814 - 817	Diubah dg Perpres No.52 Th.2005

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
13	No.13 Tahun 2005 31 Januari 2005	Sekretariat Mahkamah Agung.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 818 - 828	
14	No.14 Tahun 2005 31 Januari 2005	Kepaniteraan Mahkamah Agung.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 829 - 833	
15	No.15 Tahun 2005 7 Pebruari 2005	Perubahan atas Perpres No.10/2005 ttg Unit Org.& Tugas Eselon I Kementerian Negara RI	HPPRI (2) 2005 Hal.: 834 - 836	
16	No.16 Tahun 2005 7 Pebruari 2005	Dewan Riset Nasional.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 837 - 844	
17	No.17 Tahun 2005 7 Pebruari 2005	Komisi Kepolisian Nasional.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 845 - 849	Dicabut dg Perpres No.17 Th.2011
18	No.18 Tahun 2005 7 Pebruari 2005	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 850 - 859	Dicabut dg Perpres No.18 Th.2011
19	No.19 Tahun 2005 7 Pebruari 2005	Pembiayaan Sekunder Perumahan. (LN No.21 & TLN No.4479)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 860 - 872	
20	No.20 Tahun 2005 23 Pebruari 2005	Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 873 - 880	
21	No.21 Tahun 2005 23 Pebruari 2005	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 881 - 884	Dicabut dg Perpres No.45 Th.2006
22	No.22 Tahun 2005 28 Pebruari 2005	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 885 - 892	Dicabut dg Perpres No.55 Th.2005
23	No.23 Tahun 2005 2 Maret 2005	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 893 - 900	
24	No.24 Tahun 2005 18 Maret 2005	Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di Lingkungan Arsip Nasional Rep. Indonesia.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 901 - 906	
25	No.25 Tahun 2005 18 Maret 2005	Tim Dokter Kepresidenan.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 907 - 914	Dicabut dg Perpres No.44 Th.2009
26	No.26 Tahun 2005 21 Maret 2005	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 915 - 916	
27	No.27 Tahun 2005 28 Maret 2005	Tata Cara Pelaksanaan Seleksi & Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 917 - 919	
28	No.28 Tahun 2005 28 Maret 2005	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 920 - 926	
29	No.29 Tahun 2005 28 Maret 2005	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA.2005.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 927 - 929	Diubah dg Perpres No.74 Th.2006
30	No.30 Tahun 2005 15 April 2005	Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD dan Kep. Nias Prov. Sumatera Utara.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 930 - 935	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
31	No.31 Tahun 2005 19 April 2005	Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 936 - 954	Diubah dg Perpres No.19 Th.2007 <b>Dicabut dg Perpres No.58 Th.2010</b>
32	No.32 Tahun 2005 20 April 2005	Perubahan Kedua atas Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (LN No.36)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 955 - 960	
33	No.33 Tahun 2005 21 April 2005	Pengesahan <i>Beijing Amandment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer</i> (Amandemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang merusak lapisan Ozon). (LN No.37)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 961 - 972	
34	No.34 Tahun 2005 29 April 2005	Susunan Organisasi dan tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD & Kep. Nias Provinsi Sumatera Utara.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 973 - 980	Diubah dg Perpres No.76 Th.2006
35	No.35 Tahun 2005 29 April 2005	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 981 - 984	Dicabut dg Perpres No.23 Th.2006
36	No.36 Tahun 2005 3 Mei 2005	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 985 - 995	Diubah dg Perpres No.65 Th.2006 <b>Dicabut dg Perpres No.71 Th.2012</b>
37	No.37 Tahun 2005 12 Mei 2005	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 996 - 997	
38	No.38 Tahun 2005 18 Mei 2005	Penghapusan Keadaan Bahaya dg Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi NAD. (LN No.42)	HPPRI (2) 2005 Hal.: 998 - 1000	
39	No.39 Tahun 2005 18 Mei 2005	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1001 - 1778	
40	No.40 Tahun 2005 19 Mei 2005	Staf Khusus Presiden.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1779 - 1782	Diubah dg Perpres No.97/2007; No.9 & No.56/2008 <b>Dicabut dg Perpres No.3 Th.2011</b>
41	No.41 Tahun 2005 19 Mei 2005	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1783 - 1788	<b>Dicabut dg Perpres No.15 Th.2006</b>
42	No.42 Tahun 2005 23 Mei 2005	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1789 - 1792	<b>Diubah dg Perpres No.12 Th.2011 Dicabut dg Perpres No.75 Th.2014</b>
43	No.43 Tahun 2005 23 Mei 2005	Pengakhiran Jaminan Pemerintah Thdp Kewa- jiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1793 - 1798	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
44	No.44 Tahun 2005 8 Juli 2005	Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional ttg Piutang Maritim dan Mortgage, 1993). (LN No.58)	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1207 - 1229	
45	No.45 Tahun 2005 10 Juli 2005	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2006.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1230 - 1233	Dicabut dg Perpres No.70 Th.2006
46	No.46 Tahun 2005 10 Juli 2005	Pengesahan <i>Montreal Amandment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer</i> (Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang merusak lapisan Ozon). (LN No.59)	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1234 - 1242	
47	No.47 Tahun 2005 10 Juli 2005	Pengesahan <i>Amandment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal</i> (Amandemen atas Konvensi Basel ttg Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya). (LN No.60)	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1243 - 1253	
48	No.48 Tahun 2005 15 Juli 2005	Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1254 - 1260	
49	No.49 Tahun 2005 27 Juli 2005	Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1261 - 1264	Diubah dg Perpres No.86 Th.2010 Dicabut dg Perpres No.5 Th.2013
50	No.50 Tahun 2005 3 Agustus 2005	Lembaga Produktivitas Nasional.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1265 - 1270	Mencabut Inpres No.15 Th.1968
51	No.51 Tahun 2005 3 Agustus 2005	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1271 - 1275	
52	No.52 Tahun 2005 5 September 2005	Perubahan ketujuh atas Keppres No.110 Th.2001 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1276 - 1279	Ketent ttg BPN dicabut dg Perpres No.10/2006 Ketent. ttg Lemhanas di cabut dg Perpres 67/ 2006, Ketent. ttg BPS dicabut dg Perpres No.86/2007;Ketent. ttg BKPM dicabut dg Perpres No.90/2007
53	No.53 Tahun 2005 10 September 2005	Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1280 - 1283	
54	No.54 Tahun 2005 10 September 2005	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1284 - 1289	Dicabut dg Perpres No.13 Th.2009

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
55	No.55 Tahun 2005 30 September 2005	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1290 - 1297	Diubah dg Perpres No.9 Th.2006 <b>Dicabut dg Perpres No.15 Th.2012</b>
56	No.56 Tahun 2005 10 Oktober 2005	Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai kpd Rumah Tangga Miskin.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1298 - 1301	
57	No.57 Tahun 2005 10 Oktober 2005	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1302 - 1304	
58	No.58 Tahun 2005 10 Oktober 2005	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1305 - 1308	Dicabut dg Perpres No.24 Th.2006
59	No.59 Tahun 2005 12 Oktober 2005	Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Rakyat China mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas. (LN No.97)	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1309 - 1322	
60	No.60 Tahun 2005 12 Oktober 2005	Pengesahan Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia & the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on the Establishment of Basel Convention Region. (LN No.98)	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1323 - 1360	
61	No.61 Tahun 2005 13 Oktober 2005	Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1361 - 1367	<b>Dicabut dg Perpres No.87 Th.2014</b>
62	No.62 Tahun 2005 13 Oktober 2005	Perubahan atas Perpres No.9 Th.2005 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Org., dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1368 - 1379	Dicabut dg Perpres No.47 Th.2009
63	No.63 Tahun 2005 13 Oktober 2005	Perubahan Kedua atas Perpres No.10/2005 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1380 - 1385	
64	No.64 Tahun 2005 13 Oktober 2005	Perubahan Keenam atas Keppres No.103 Th.2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org., dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1386 - 1388	Ketentuan ttg BPN dicabut dg Perpres No.10 Th.2006 Ketent. ttg BAPPENAS dicabut dg Perpres No.82/2007; Ketentuan ttg BPS dicabut dg Perpres No.86/2007; Ketentuan ttg BKPM dicabut dg Perpres No.90/2007
65	No.65 Tahun 2005 18 Oktober 2005	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1389 - 1397	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
66	No.66 Tahun 2005 18 Oktober 2005	Honorarium bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1398 - 1399	
67	No.67 Tahun 2005 9 Nopember 2005	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1400 - 1422	Diubah dg Perpres No.13/2010; No.56/ 2011 & No.66/2013
68	No.68 Tahun 2005 14 Nopember 2005	Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Ranc. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Ranc. Peraturan Pemerintah dan Ranc. Peraturan Presiden.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1423 - 1435	Dicabut dg Perpres No.87 Th.2014
69	No.69 Tahun 2005 14 Nopember 2005	Peranserta Lembaga/Perorangan Asing dalam rangka Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekon- struksi Wilayah dan Kehidupan masyarakat Prov. NAD & Kep.Nias Prov. Sumatera Utara.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1436 - 1441	
70	No.70 Tahun 2005 15 Nopember 2005	Perubahan Ketiga atas Keppres No.80 Th.2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1442 - 1454	
71	No.71 Tahun 2005 16 Nopember 2005	Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1455 - 1459	Diubah dg Perpres No.45 Th.2009
72	No.72 Tahun 2005 16 Nopember 2005	Pengesahan Agreement on The Network of Aquaculture Centres In Asia and The Pacific as Amended by The Governing Council as its 14th Meeting, 28 March - 01 April 2003, Yangon, Myanmar (Persetujuan Mengenai Jaringan Pusat <sup>2</sup> Aquakultur di Asia & Pasifik). (LN No.132)	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1460 - 1492	
73	No.73 Tahun 2005 30 Nopember 2005	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA.2006.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1493 - 1496	
74	No.74 Tahun 2005 11 Desember 2005	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1497 - 1514	
75	No.75 Tahun 2005 29 Desember 2005	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1515 - 1518	Dicabut dg Perpres No.68 Th.2012
76	No.76 Tahun 2005 29 Desember 2005	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1519 - 1520	
77	No.77 Tahun 2005 29 Desember 2005	Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1521 - 1523	Diubah dg Perpres No.15 Th.2011
78	No.78 Tahun 2005 29 Desember 2005	Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1524 - 1539	
79	No.79 Tahun 2005 29 Desember 2005	Pencabutan Keputusan Presiden No.36 Th.1979 tentang Pengadaan Besi Baja.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1540 - 1541	
80	No.80 Tahun 2005 29 Desember 2005	Perubahan Ketiga atas Keppres No.10 Th.2005 ttg Unit Organisasi & Tugas Eselon I Kementerian Negara RI.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1542 - 1545	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
81	No.81 Tahun 2005 29 Desember 2005	Badan Koordinasi Keamanan Laut.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1546 - 1552	Dicabut dg Perpres No.178 Th.2014
82	No.82 Tahun 2005 29 Desember 2005	Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1553 - 1559	Dicabut dg Perpres No.71 Th.2007
83	No.83 Tahun 2005 29 Desember 2005	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1560 - 1569	Diubah dg Perpres No.3 Th.2007, Dicabut dg Perpres No.8 Th.2008
	<b>KEPPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2005 3 Januari 2005	Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara2 Asean, Pemimpin Negara2 Lain, dan Organisasi2 Internasional Mengenai Penanggu-langan Bencana Akibat Gempa Bumi dan Tsunami.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1799 - 1803	
2	No. 2 Tahun 2005 4 Januari 2005	Perubahan atas Keppres No.84 Th.2004 ttg Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1804 - 1807	
3	No. 3 Tahun 2005 17 Januari 2005	Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1808 - 1811	
4	No. 4 Tahun 2005 12 Pebruari 2005	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1812 - 1813	
5	No. 5 Tahun 2005 12 Pebruari 2005	Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1814 - 1815	
6	No. 6 Tahun 2005 22 Maret 2005	Perpanjangan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1816 - 1817	
7	No. 7 Tahun 2005 28 Maret 2005	Pembentukan panitia seleksi pemilihan calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1818 - 1820	
8	No. 8 Tahun 2005 1 April 2005	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1821 - 1822	
9	No. 9 Tahun 2005 1 April 2005	Perubahan atas Keppres No.47 Th.2004 ttg Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 & Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1823 - 1826	Diubah dg Perpres No.90 Th.2006
10	No.10 Tahun 2005 28 April 2005	Pembentukan panitia seleksi Pemilihan calon anggota komisi Pengawas Persaingan Usaha.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1827 - 1830	
11	No.11 Tahun 2005 2 Mei 2005	Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1831 - 1836	
12	No.12 Tahun 2005 3 Mei 2005	Perubahan atas Keppres No.111 Th.2004 ttg Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1837 - 1838	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
13	No.13 Tahun 2005 23 Mei 2005	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1839 - 1840	
14	No.14 Tahun 2005 23 Mei 2005	Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, dan Pengadilan Negeri Malinau.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1841 - 1845	
15	No.15 Tahun 2005 8 Juni 2005	Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia utk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia, dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia di Brussel.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1846 - 1848	
16	No.16 Tahun 2005 8 Juni 2005	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1849 - 1876	
17	No.17 Tahun 2005 20 Juni 2005	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1877 - 1879	
18	No.18 Tahun 2005 12 Juli 2005	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pem. Kota Padang, Kab. Tangerang, Kab.Indramayu & Kab. Bandung.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1571 - 1572	
19	No.19 Tahun 2005 26 Juli 2005	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1573 - 1574	
20	No.20 Tahun 2005 27 Juli 2005	Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1575 - 1578	
21	No.21 Tahun 2005 10 Agustus 2005	Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Prov NAD dan Kep. Nias Prov. Sumut.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1579 - 1581	
22	No.22 Tahun 2005 30 Agustus 2005	Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1582 - 1585	
23	No.23 Tahun 2005 5 September 2005	Pembentukan Panel 45.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1586 - 1589	
24	No.24 Tahun 2005 5 September 2005	Perubahan Keppres No.54 Th.2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1590 - 1593	
25	No.25 Tahun 2005 5 September 2005	Perubahan Kelima atas Keppres No.41 Th.1973 ttg Daerah Industri Pulau Batam.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1594 - 1597	
26	No.26 Tahun 2005 10 September 2005	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1598 - 1599	
27	No.27 Tahun 2005 12 Oktober 2005	Pembentukan Kejaksaan Negeri Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi & Kejaksaan Negeri Tubei.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1600 - 1604	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No.28 Tahun 2005 18 Oktober 2005	Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1605 - 1612	Diubah dg Keppres No.6 Th.2013
29	No.29 Tahun 2005 18 Oktober 2005	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1613 - 1614	
30	No.30 Tahun 2005 11 Desember 2005	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1615 - 1616	
<b>INPRES</b>				
1	No. 1 Tahun 2005 2 Maret 2005	Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi & Gelom- bang Tsunami di Prov. NAD dan Prov. Sumut.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1881 - 1887	
2	No. 2 Tahun 2005 2 Maret 2005	Kebijakan Perberasan.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1888 - 1891	Dicabut dg Inpres No.13 Th.2005
3	No. 3 Tahun 2005 2 Maret 2005	Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1892 - 1893	
4	No. 4 Tahun 2005 18 Maret 2005	Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1894 - 1900	
5	No. 5 Tahun 2005 18 Maret 2005	Perpanjangan Kedua kali masa tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1901 - 1906	
6	No. 6 Tahun 2005 15 April 2005	Dukungan Kelancaran Pelaksanan Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR RI.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1907	
7	No. 7 Tahun 2005 15 April 2005	Dukungan Pemerintah & Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1908 - 1910	
8	No. 8 Tahun 2005 3 Mei 2005	Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN..	HPPRI (2) 2005 Hal.: 1911 - 1912	Diubah dg Inpres No.9 Th.2005
9	No. 9 Tahun 2005 19 Mei 2005	Perubahan atas Inspres No.8 Th.2005 ttg Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.		
10	No.10 Tahun 2005 10 Juli 2005	Penghematan Energi	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1619 - 1620	
11	No.11 Tahun 2005 8 September 2005	Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1621 - 1622	
12	No.12 Tahun 2005 10 September 2005	Pelaksanaan Bantuan langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1623 - 1627	
13	No.13 Tahun 2005 10 Oktober 2005	Kebijakan Perberasan.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1628 - 1631	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No.14 Tahun 2005 12 Oktober 2005	Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1632 - 1636	
15	No.15 Tahun 2005 11 Nopember 2005	Pelaksanaan Kesepahaman Antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1637 - 1645	
16	No.16 Tahun 2005 29 Desember 2005	Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.	HPPRI (4) 2005 Hal.: 1646 - 1652	
<b>TAHUN 2006</b>				
<b>PERPRES</b>				
1	No. 1 Tahun 2006 11 Januari 2006	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No.11 Th.2003 ttg Perubahan atas PP No.7 Th.1977 ttg Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP No.26 Th.2001 ke Dalam Gaji Pokok PNS menurut PP No.66 Th.2005 ttg Perubahan Ketujuh atas PP No.7 Th.1977 ttg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 3 - 12	Dicabut dg Perpres No.4 Th.2007
2	No. 2 Tahun 2006 11 Januari 2006	Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No.12 Th.2003 ttg Perubahan atas PP No.8 Th.2000 ttg Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah Diubah dengan PP No.27 Th.2001 ke Dalam Gaji Pokok Hakim menurut PP No.70 Th.2005 ttg Perubahan Ketiga atas PP No.8 Th.2000 ttg Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan TUN, dan Peradilan Agama.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 13 - 18	Dicabut dg Perpres No.5 Th.2007
3	No. 3 Tahun 2006 11 Januari 2006	Tunjangan Jabatan Struktural.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 19 - 22	Dicabut dg Perpres No.26 Th.2007
4	No. 4 Tahun 2006 11 Januari 2006	Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 23 - 27	
5	No. 5 Tahun 2006 25 Januari 2006	Kebijakan Energi Nasional	HPPRI (2) 2006 Hal. : 28 - 33	
6	No. 6 Tahun 2006 1 Pebruari 2006	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. (LN No.9)	HPPRI (2) 2006 Hal. : 34 - 60	
7	No. 7 Tahun 2006 13 Maret 2006	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza)	HPPRI (2) 2006 Hal. : 61 - 66	
8	No. 8 Tahun 2006 20 Maret 2006	Perubahan Ke empat atas Keppres No.80 Th.2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 67 - 98	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
9	No. 9 Tahun 2006 11 April 2006	Perubahan atas Peraturan Presiden No.55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 99 - 105	Dicabut dg Perpres No.15 Th.2012
10	No.10 Tahun 2006 11 April 2006	Badan Pertanahan Nasional	HPPRI (2) 2006 Hal. : 106 - 120	Diubah dg Perpres No.85 Th.2012
11	No. 11 Th.2006 11 Mei 2006	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 121 - 123	
12	No.12 Tahun 2006 11 Mei 2006	Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 124 - 127	
13	No.13 Tahun 2006 11 Mei 2006	Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Lingk. Kepolisian Negara Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 128 - 130	
14	No.14 Tahun 2006 11 Mei 2006	Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan TNI.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 131 - 133	
15	No.15 Tahun 2006 11 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 134 - 138	Dicabut dg Perpres No.27 Th.2007
16	No.16 Tahun 2006 11 Mei 2006	Pengesahan Protocol to Amend The Basic Agreement on The Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean. (LN No.41)	HPPRI (2) 2006 Hal. : 139 - 154	
17	No.17 Tahun 2006 11 Mei 2006	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Ekuador mengenai kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Gov. of The .Rep. Of Indonesia and The Gov. of The Rep. Of Ecuador on Economic and Technical Cooperation). (LN No.42)	HPPRI (2) 2006 Hal. : 155 - 169	
18	No.18 Tahun 2006 11 Mei 2006	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia and The Gov.of The Islamic Rep.of Iran for Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income). (LN No.43)	HPPRI (2) 2006 Hal. : 170 - 247	
19	No.19 Tahun 2006 15 Mei 2006	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 248 - 1066	
20	No.20 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Panitera.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 1067 - 1071	Dicabut dg Perpres No.24 Th.2007
21	No.21 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 1072 - 1076	Dicabut dg Perpres No.72 Th.2007

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 1077 - 1081	Dicabut dg Perpres No.25 Th.2007
23	No.23 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 1082 - 1085	Dicabut dg Perpres No.29 Th.2007
24	No.24 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 1086 - 1090	Dicabut dg Perpres No.30 Th.2007
25	No.25 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 1091 - 1096	Dicabut dg Perpres No.31 Th.2007
26	No.26 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.	HPPRI (2) 2006 Hal. : 1097 - 1111	Dicabut dg Perpres No.32 Th.2007
27	No.27 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1112 - 1115	Dicabut dg Perpres No.33 Th.2007
28	No.28 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1116 - 1119	Dicabut dg Perpres No.34 Th.2007
29	No.29 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1120 - 1123	Dicabut dg Perpres No.35 Th.2007
30	No.30 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1124 - 1131	Dicabut dg Perpres No.36 Th.2007
31	No.31 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1132 - 1135	Dicabut dg Perpres No.37 Th.2007
32	No.32 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1136 - 1139	Dicabut dg Perpres No.38 Th.2007
33	No.33 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1140 - 1143	Dicabut dg Perpres No.39 Th.2007
34	No.34 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1144 - 1147	Dicabut dg Perpres No.41 Th.2007
35	No.35 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1148 - 1153	Dicabut dg Perpres No.40 Th.2007
36	No.36 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1154 - 1157	Dicabut dg Perpres No.42 Th.2007
37	No.37 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1158 - 1161	Dicabut dg Perpres No.43 Th.2007
38	No.38 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1162 - 1165	Dicabut dg Perpres No.44 Th.2007

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
39	No.39 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1166 - 1169	Dicabut dg Perpres No.45 Th.2007
40	No.40 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1170 - 1175	Dicabut dg Perpres No.46 & 47 Th.2007
41	No.41 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Agen.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1176 - 1179	Dicabut dg Perpres No.48 Th.2007
42	No.42 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1180 - 1183	Dicabut dg Perpres No.49 Th.2007
43	No.43 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1184 - 1187	Dicabut dg Perpres No.50 Th.2007
44	No.44 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1188 - 1191	Dicabut dg Perpres No.51 Th.2007
45	No.45 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan makanan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1192 - 1195	Dicabut dg Perpres No.52 Th.2007
46	No.46 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan bangunan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1196 - 1202	Dicabut dg Perpres No.53 Th.2007
47	No.47 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kese- hatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehat an Masy., Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, perekam medis, dan Teknisi Elektromedis.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1203 - 1226	Dicabut dg Perpres No.54 Th.2007
48	No.48 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1227 - 1230	Dicabut dg Perpres No.55 Th.2007
49	No.49 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1231 - 1234	Dicabut dg Perpres No.56 Th.2007
50	No.50 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1235 - 1238	Dicabut dg Perpres No.57 Th.2007
51	No.51 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1239 - 1242	Dicabut dg Perpres No.58 Th.2007
52	No.52 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1243 - 1246	Dicabut dg Perpres No.59 Th.2007
53	No.53 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1247 - 1250	Dicabut dg Perpres No.60 Th.2007
54	No.54 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1251 - 1254	Dicabut dg Perpres No.61 Th.2007
55	No.55 Th.2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1255	Dicabut dg Perpres No.62 Th.2007

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
56	No.56 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1256 - 1262	Dicabut dg Perpres No.63 Th.2007
57	No.57 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1263 - 1266	Dicabut dg Perpres No.64 Th.2007
58	No.58 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Tenaga Pendidikan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1267 - 1273	
59	No.59 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Dosen.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1274 - 1279	Dicabut dg Perpres No.65 Th.2007
60	No.60 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1280 - 1283	Dicabut dg Perpres No.66 Th.2007
61	No.61 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1284 - 1289	Dicabut dg Perpres No.67 Th.2007
62	No.62 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1290 - 1296	Dicabut dg Perpres No.68 Th.2007
63	No.63 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1297 - 1300	Dicabut dg Perpres No.69 Th.2007
64	No.64 Tahun 2006 26 Mei 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penerima.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1301 - 1306	Dicabut dg Perpres No.70 Th.2007
65	No.65 Tahun 2006 5 Juni 2006	Perubahan atas Perpres No.36 Th.2005 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan utk Kepentingan Umum.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1307 - 1312	Dicabut dg Perpres No.71 Th.2012
67	No.67 Tahun 2006 13 Juni 2006	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1313 - 1316	
68	No.68 Tahun 2006 23 Juni 2006	Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income beserta Protocol. (LN No.53)	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1317 - 1332	
69	No.69 Tahun 2006 26 Juni 2006	Pengesahan Agreement Between The Governments of Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The Russian Federation on Economic and Development Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah Negara2 Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia ttg Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. (LN No.54)	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1333 - 1358	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
70	No.70 Tahun 2006 1 Juli 2006	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/ 2006 M	HPPRI (4) 2006 Hal.: 453 - 456	Dicabut dg Perpres No.20Th.2007
71	No.71 Tahun 2006 5 Juli 2006	Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Perce- patan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 457 - 462	Diubah dg Perpres No.59 Th.2009 & 193 Th.2014
72	No.72 Tahun 2006 5 Juli 2006	Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 463 - 465	Diubah dg Perpres No.6 Th.2010
73	No.73 Tahun 2006 7 Juli 2006	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 466 - 470	Dicabut dg Perpres No.28 Th.2007
74	No.74 Tahun 2006 10 Juli 2006	Perubahan atas Perpres No.29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA. 2005.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 471 - 474	
75	No.75 Tahun 2006 13 Juli 2006	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 475 - 481	
76	No.76 Tahun 2006 19 Juli 2006	Perubahan atas Perpres No.34 Th.2005 ttg Susunan Organisasi dan tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD & Kep. Nias Provinsi Sumatera Utara.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 482 - 487	
77	No.77 Tahun 2006 20 Juli 2006	Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 488 - 489	
78	No.78 Tahun 2006 20 Juli 2006	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 490 - 491	
79	No.79 Tahun 2006 8 September 2006	Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 492 - 500	
80	No.80 Tahun 2006 8 Sept. 2006	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 501 - 502	
81	No.81 Tahun 2006 8 Sept. 2006	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 503 - 515	
82	No.82 Tahun 2006 28 Sept. 2006	Honorarium Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengurus, dan <i>Remunerasi</i> Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 516 - 521	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
83	No.83 Tahun 2006 4 Okt. 2006	Dewan Ketahanan Pangan	HPPRI (4) 2006 Hal.: 522 - 529	
84	No.84 Tahun 2006 4 Okt. 2006	Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 530 - 534	
85	No.85 Tahun 2006 6 Okt. 2006	Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 535 - 542	
86	No.86 Tahun 2006 18 Okt. 2006	Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 543 - 545	Diubah dg Perpres No.91 Th.2007
87	No.87 Tahun 2006 18 Okt. 2006	Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N dan Pasal 34 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 546 - 548	
88	No.88 Tahun 2006 26 Okt. 2006	Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 549 - 555	
89	No.89 Tahun 2006 26 Okt. 2006	Panitia Urusan Piutang Negara	HPPRI (4) 2006 Hal.: 556 - 559	
90	No.90 Tahun 2006 26 Okt. 2006	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Rep. Indonesia.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 560 - 561	
91	No.91 Tahun 2006 2 Nopember 2006	Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negar Republik Indonesia.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 562 - 565	
92	No.92 Tahun 2006 11 Nopember 2006	Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 566 - 568	Dicabut dg Perpres No.68 Th.2010
93	No.93 Tahun 2006 30 Nopember 2006	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 569 - 572	
94	No.94 Tahun 2006 7 Desember 2006	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Rep. Indonesia.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 573 - 575	Dicabut dg Perpres No.47 Th.2009

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
95	No.95 Tahun 2006 7 Desember 2006	Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 576 - 592	Diubah dg Perpres No.22 Th.2007
96	No.96 Tahun 2006 7 Desember 2006	Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 593 - 595	Diubah dg Perpres No.20 Th.2011 Dicabut dg Perpres No.5 Th.2013
97	No.97 Tahun 2006 9 Desember 2006	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Pembebasan Visa (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Ecuador on Visa Exemption). (LN No.99)	HPPRI (4) 2006 Hal.: 596 - 607	
98	No.98 Tahun 2006 9 Desember 2006	Pengesahan <i>Seventh Additional Protocol to The Constitution of the Universal Postal Union</i> (Protokol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia) (LN No.100)	HPPRI (4) 2006 Hal.: 608 - 616	
99	No.99 Tahun 2006 9 Desember 2006	Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Ekonomi Antara Pemerintah Rep. Indonesia dan Pemerintah Rep. Slovakia ( <i>Agreement on Economic Cooperation Between The Government of The Rep. Of Indonesia and The Government of Slovak Republic</i> ) (LN No.101)	HPPRI (4) 2006 Hal.: 617 - 631	
100	No.100 Tahun 2006 12 Desember 2006	Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Korban Konflik dan/atau Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 632 - 639	
101	No.101 Tahun 2006 12 Desember 2006	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Islam Iran tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Kepabeanan (Agreement Between The Government of The Rep. Indonesia and The Government of The IslamicRepublic of Iran on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters) (LN No.102)	HPPRI (4) 2006 Hal.: 640 - 682	
102	No.102 Tahun 2006 12 Desember 2006	Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep.Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership Between The Government of The Rep. Indonesia and The Government of The IslamicRepublic of Iran) (LN No.103)	HPPRI (4) 2006 Hal.: 683 - 711	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
103	No.103 Tahun 2006 13 Desember 2006	Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 712 - 714	
104	No.104 Tahun 2006 18 Desember 2006	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 715 - 733	
105	No.105 Tahun 2006 26 Desember 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 734 - 737	
106	No.106 Tahun 2006 28 Desember 2006	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 738 - 739	Diubah dg Perpres No.146 Th.2014
107	No.107 Tahun 2006 28 Desember 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 740 - 743	
108	No.108 Tahun 2006 28 Desember 2006	Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 744 - 748	
109	No.109 Tahun 2006 29 Desember 2007	Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 749 - 758	
110	No.110 Tahun 2006 29 Desember 2006	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 759 - 760	
111	No.111 Tahun 2006 29 Desember 2006	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 761 - 762	
112	No.112 Tahun 2006 29 Desember 2006	Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 763 - 770	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2006 14 Pebruari 2006	Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1393 - 1398	Diubah dg Keppres No.24 Th.2006
2	No. 2 Tahun 2006 27 Pebruari 2006	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1399	
3	No. 3 Tahun 2006 16 Maret 2006	Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1400 - 1403	Diubah dg Keppres No.8 Th.2008 dan No.28 Th.2010
4	No. 4 Tahun 2006 27 Maret 2006	Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1404 - 1409	
5	No. 5 Tahun 2006 24 April 2006	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1410 - 1411	
6	No. 6 Tahun 2006 11 Mei 2006	Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1412 - 1414	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
7	No. 7 Tahun 2006 11 Mei 2006	Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1415 - 1418	
8	No. 8 Tahun 2006 23 Juni 2006	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1419 - 1423	
9	No. 9 Tahun 2006 3 Juli 2006	Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 771 - 776	
10	No.10 Tahun 2006 24 Juli 2006	Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 777 - 782	
11	No.11 Tahun 2006 2 Agustus 2006	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 783 - 784	
12	No.12 Tahun 2006 29 Agustus 2006	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 785 - 788	
13	No.13 Tahun 2006 8 September 2006	Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 789 - 792	
14	No.14 Tahun 2006 9 September 2006	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 793 - 794	
15	No.15 Tahun 2006 9 September 2006	Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 795 - 797	
16	No.16 Tahun 2006 9 September 2006	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 798 - 894	Dicabut dg Keppres No.17 Th.2010
17	No.17 Tahun 2006 29 Sept. 2006	Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program Dan Reformasi.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 895 - 899	Diubah dg Keppres No.21 Th.2008
18	No.18 Tahun 2006 13 Oktober 2006	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)	HPPRI (4) 2006 Hal.: 900 - 904	Dicabut dg Keppres No.47 Th.2014
19	No.19 Tahun 2006 26 Oktober 2006	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 905 - 906	
20	No.20 Tahun 2006 11 Nopember 2006	Dewan Tehnologi Informasi dan Komunikasi Nasional.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 907 - 911	Diubah dg Keppres No.5/2009 & No.38/2009
21	No.21 Tahun 2006 11 Nopember 2006	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 912 - 913	
22	No.22 Tahun 2006 9 Desember 2006	Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 914 - 918	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23	No.23 Tahun 2006 12 Desember 2006	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Pekalongan, Kota Pare-Pare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 919 - 920	
24	No.24 Tahun 2006 12 Desember 2006	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.1 Th.2006 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 921 - 924	
25	No.25 Tahun 2006 12 Desember 2006	Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 925 - 927	
26	No.26 Tahun 2006 12 Desember 2006	Pembentukan Pengadilan Negeri Tamang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 928 - 931	
27	No.27 Tahun 2006 12 Desember 2006	Pembentukan Pengadilan Negeri Airwadidi.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 932 - 934	
28	No.28 Tahun 2006 18 Desember 2006	Hari Bela Negara.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 935 - 937	
	<b>INPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2006 25 Januari 2006	Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1425 - 1429	
2	No. 2 Tahun 2006 25 Januari 2006	Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan Sebagai bahan Bakar Lain.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1430 - 1433	
3	No. 3 Tahun 2006 27 Pebruari 2006	Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1434 - 1452	
4	No. 4 Tahun 2006 11 April 2006	Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2006.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1453 - 1455	
5	No. 5 Tahun 2006 9 Juni 2006	Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.	HPPRI (2) 2006 Hal.: 1456 - 1459	
6	No. 6 Tahun 2006 2 Agustus 2006	Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.	HPPRI (4) 2006 Hal.: 939 - 947	
	<b>TAHUN 2007</b>			
	<b>PERPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2007 Januari 2007	Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebar-luasan Peraturan Perundang-undangan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 3 - 16	Dicabut dg Perpres No.87 Th.2014

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No. 2 Tahun 2007 25 Januari 2007	Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Peristiwa Asean) (LN No.32)	HPPRI (3) 2007 Hal.: 17 - 37	
3	No. 3 Tahun 2007 30 Januari 2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 38 - 39	Dicabut dg Perpres No.7 Th.2008
4	No. 4 Tahun 2007 31 Januari 2007	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 40 - 46	
5	No. 5 Tahun 2007 31 Januari 2007	Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 47 - 51	
6	No. 6 Tahun 2007 31 Januari 2007	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 52 - 54	
7	No. 7 Tahun 2007 12 Pebruari 2007	Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden No.10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 55 - 59	
8	No. 8 Tahun 2007 20 Pebruari 2007	Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment (Knvensi tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Masters Specific to Aircraft Equipment (Protocol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara. (LN No.39)	HPPRI (3) 2007 Hal.: 60 - 179	
9	No. 9 Tahun 2007 5 Maret 2007	Pengesahan Agreement for the Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia) (LN No.41)	HPPRI (3) 2007 Hal.: 180 - 204	
10	No.10 Tahun 2007 9 Maret 2007	Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 205 - 210	
11	No.11 Tahun 2007 28 Maret 2007	Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea. (LN No.51)	HPPRI (3) 2007 Hal.: 211 - 271	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
12	No.12 Tahun 2007 28 Maret 2007	Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea. (LN No.52)	HPPRI (3) 2007 Hal.: 272 - 749	
13	No.13 Tahun 2007 31 Maret 2007	Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 750 - 753	
14	No.14 Tahun 2007 8 April 2007	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 754 - 762	Diubah dg Perpres No.48/2008, No.40/ 2009; 37/2012 & No.33/2013
15	No.15 Tahun 2007 10 April 2007	Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	HPPRI (3) 2007 Hal.: 763 - 765	
16	No.16 Tahun 2007 10 April 2007	Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua Dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 766 - 769	Diubah dg Perpres No.28 Th.2013
17	No.17 Tahun 2007 9 Mei 2007	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No.10 Th.2005 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Rep. Indonesia.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 770 - 772	
18	No.18 Tahun 2007 16 Mei 2007	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008	HPPRI (3) 2007 Hal.: 773 - 1711	
19	No.19 Tahun 2007 23 Mei 2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.31 Th.2005 ttg Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1712 - 1714	Dicabut dg Perpres No.58 Th.2010
20	No.20 Tahun 2007 23 Mei 2007	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1715 - 1718	Dicabut dg Perpres No.53 Th.2008
21	No.21 Tahun 2007 23 Mei 2007	Pengesahan Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Bosnia and Herzegovina	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1719 - 1724	
22	No.22 Tahun 2007 6 Juni 2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.95 Th.2006 ttg Organisasi & Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Dep. Keuangan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1725 - 1731	
23	No.23 Tahun 2007 11 Juni 2007	Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencairan dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan <i>Search And Rescue</i> Nasional.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1732 - 1738	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
24	No.24 Tahun 2007 11 Juni 2007	Tunjangan Panitera	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1739 - 1743	
25	No.25 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1744 - 1748	
26	No.26 Tahun 2007 19 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Struktural.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1749 - 1752	
27	No.27 Tahun 2007 19 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1753 - 1758	
28	No.28 Tahun 2007 19 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1759 - 1763	
29	No.29 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1764 - 1767	
30	No.30 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1768 - 1771	Dicabut dg Perpres No.100 Th.2012
31	No.31 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1772 - 1777	
32	No.32 Tahun 2007 28 Juni 2007	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1778 - 1791	Dicabut dg Perpres No.16 Th.2013
33	No.33 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1792 - 1795	Dicabut dg Perpres No.19 Th.2013
34	No.34 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1796 - 1799	Dicabut dg Perpres No.170 Th.2014
35	No.35 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1800 - 1803	
36	No.36 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1804 - 1811	
37	No.37 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1812 - 1815	
38	No.38 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1816 - 1819	
39	No.39 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1820 - 1823	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
40	No.40 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1824 - 1827	
41	No.41 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1828 - 1832	
42	No.42 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1833 - 1836	
43	No.43 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1837 - 1840	
44	No.44 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1841 - 1844	
45	No.45 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1845 - 1848	Dicabut dg Perpres No.17 Th.2013
46	No.46 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1849 - 1852	
47	No.47 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1853 - 1856	Dicabut dg Perpres No.71 Th.2013
48	No.48 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Agen.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1857 - 1860	
49	No.49 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1861 - 1864	Dicabut dg Perpres No.18 Th.2013
50	No.50 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1865 - 1868	
51	No.51 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1869 - 1872	
52	No.52 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1873 - 1876	
53	No.53 Tahun 2007 28 Juni 2007	Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1877 - 1883	
54	No.54 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1884 - 1907	Ketentuan mengenai Tunjangan Bidan dicabut dg Perpres No.9/2010
55	No.55 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1908 - 1911	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
56	No.56 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1912 - 1915	
57	No.57 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1916 - 1919	Dicabut dg Perpres No.168 Th.2014
58	No.58 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1920 - 1923	
59	No.59 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaaiswara.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1924 - 1927	
60	No.60 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1928 - 1931	
61	No.61 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1932 - 1935	
62	No.62 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1936 - 1939	
63	No.63 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1940 - 1943	
64	No.64 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1944 - 1947	Dicabut dg Perpres No.26 Th.2014
65	No.65 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Dosen.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1948 - 1953	
66	No.66 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1954 - 1957	Dicabut dg Perpres No.5 Th.2014
67	No.67 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1958 - 1963	
68	No.68 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1964 - 1970	
69	No.69 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1971 - 1974	
70	No.70 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penerima	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1975 - 1979	
71	No.71 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1980 - 1986	
72	No.72 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1987 - 1990	
73	No.73 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1991 - 1994	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
74	No.74 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1995 - 1998	
75	No.75 Tahun 2007 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 1999 - 2003	Dicabut dg Perpres No.16 Th.2013
76	No.76 Tahun 2007 3 Juli 2007	Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 3 - 12	
77	No.77 Tahun 2007 3 Juli 2007	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 13 - 60	Dicabut dg Perpres No.36 Th.2010
78	No.78 Tahun 2007 5 Juli 2007	Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)	HPPRI (6) 2007 Hal.: 61 - 94	
79	No.79 Tahun 2007 19 Juli 2007	Pengesahan Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).	HPPRI (6) 2007 Hal.: 95 - 129	
80	No.80 Tahun 2007 19 Juli 2007	Pengesahan Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures (Persetujuan tentang Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi).	HPPRI (6) 2007 Hal.: 130 - 152	
81	No.81 Tahun 2007 21 Juli 2007	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 153 - 154	
82	No.82 Tahun 2007 21 Juli 2007	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 155 - 172	
83	No.83 Tahun 2007 28 Juni 2007	Badan Narkotika Nasional.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 173 - 188	Dicabut dg Perpres No.23 Th.2010
84	No.84 Tahun 2007 2 Agustus 2007	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Peningkatan & Perlindungan atas Penanaman Modal (Agreement Between The Government of The Rep. Of Indonesia and The Gov. Of The State Of Qatar for The Promotion and Protection of Investments).	HPPRI (6) 2007 Hal.: 189 - 225	
85	No.85 Tahun 2007 3 Agustus 2007	Jaringan Data Spasial Nasional.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 226 - 231	Dicabut dg Perpres No.27 Th.2014



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
86	No.86 Tahun 2007 26 Agustus 2007	Badan Pusat Statistik	HPPRI (6) 2007 Hal.: 232 - 244	
87	No.87 Tahun 2007 3 Sept. 2007	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Rep. Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar ttg Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Qatar for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 245 - 309	
88	No.88 Tahun 2007 3 September 2007	Perubahan atas Keputusan Presiden No. 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 310 - 312	Dicabut dg Perpres No.52 Th.2014
89	No.89 Tahun 2007 3 Sept. 2007	Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 313 - 321	
90	No.90 Tahun 2007 3 Sept. 2007	Badan Koordinasi Penanaman Modal	HPPRI (6) 2007 Hal.: 322 - 336	Diubah dg Perpres No.86 Th.2012
91	No.91 Tahun 2007 19 Sept. 2007	Perubahan atas Peraturan Presiden No.86 Th. 2006 ttg Pemberian Jaminan Pemerintah Utk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yg Menggunakan Batubara.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 337 - 340	
92	No.92 Tahun 2007 21 Sept. 2007	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea mengenai Kerja Sama di Bidang Kebudayaan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation</i> ) (LN No.21)	HPPRI (6) 2007 Hal.: 341 - 357	
93	No.93 Tahun 2007 24 Sept. 2007	Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 358 - 360	
94	No.94 Tahun 2007 23 Oktober 2007	Pengendalian dan Pengawasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat	HPPRI (6) 2007 Hal.: 361 - 365	
95	No.95 Tahun 2007 23 Oktober 2007	Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 366 - 373	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
96	No.96 Tahun 2007 31 Oktober 2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.10 Th.2007 ttg Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 374 - 377	
97	No.97 Tahun 2007 31 Oktober 2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 378 - 380	Diubah dg Perpres No.9 Th.2008
98	No.98 Tahun 2007 15 Nopember 2007	Penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 381 - 383	Dicabut dg Perpres No.73 Th.2008
99	No.99 Tahun 2007 15 Nopember 2007	Badan SAR Nasional.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 384 - 396	
100	No.100 Tahun 2007 16 Nopember 2007	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile on Economic and Technical Cooperation). (LN No.138)	HPPRI (6) 2007 Hal.: 397 - 412	
101	No.101 Tahun 2007 16 Nopember 2007	Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga). (LN No.139)	HPPRI (6) 2007 Hal.: 413 - 819	
102	No.102 Tahun 2007 16 Nopember 2007	Pengesahan Convention on Technical and Vocational Education (Konvensi mengenai Pendidikan Teknik dan Kejuruan). (LN No.140)	HPPRI (6) 2007 Hal.: 820 - 832	
103	No.103 Tahun 2007 16 Nopember 2007	Pengesahan Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific (Konvensi Regional mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik). (LN No.141)	HPPRI (6) 2007 Hal.: 833 - 853	
104	No.104 Tahun 2007 28 Nopember 2007	Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 854 - 859	
105	No.105 Tahun 2007 28 Nopember 2007	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 860 - 863	
106	No.106 Tahun 2007 6 Desember 2007	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 864 - 875	
107	No.107 Tahun 2007 6 Desember 2007	Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Rep.Indonesia.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 876 - 877	Dicabut dg Perpres No.35 Th.2009

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
108	No.108 Tahun 2007 6 Desember 2007	Tunjangan Tenaga Kependidikan.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 878 - 884	Dicabut dg Perpres No.72 Th.2013
109	No.109 Tahun 2007 6 Desember 2007	Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan). (LN No.148)	HPPRI (6) 2007 Hal.: 885 - 908	
110	No.110 Tahun 2007 6 Desember 2007	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 909 - 932	
111	No.111 Tahun 2007 27 Desember 2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.77 Th.2007 ttg Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 933 - 992	Dicabut dg Perpres No.36 Th.2010
112	No.112 Tahun 2007 27 Desember 2007	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 993 - 1006	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2007 4 Januari 2007	Pembentukan Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Th.1427 Hijriah.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2005 - 2006	
2	No.2 Tahun 2007 7 Januari 2007	Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2007 - 2010	
3	No.3 Tahun 2007 11 Januari 2007	Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2011 - 2012	
4	No.4 Tahun 2007 12 Januari 2007	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2013 - 2014	
5	No.5 Tahun 2007 8 Maret 2007	Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2015 - 2017	
6	No.6 Tahun 2007 20 Maret 2007	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2018 - 2019	
7	No.7 Tahun 2007 31 Maret 2007	Pembentukan Panitia Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2020 - 2022	
8	No.8 Tahun 2007 12 April 2007	Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam NegeriTim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2023 - 2025	
9	No.9 Tahun 2007 16 Mei 2007	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2026 - 2028	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
10	No.10 Tahun 2007 23 Mei 2007	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2029 - 2030	
11	No.11 Tahun 2007 25 Mei 2007	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2031 - 2032	
12	No.12 Tahun 2007 25 Mei 2007	Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2033 - 2035	
13	No.13 Tahun 2007 8 Juni 2007	Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi RI dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2036 - 2040	
14	No.14 Tahun 2007 19 Juni 2007	Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2041 - 2083	
15	No.15 Tahun 2007 22 Juli 2007	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1009 - 1010	
16	No.16 Tahun 2007 3 Agustus 2007	Perperpanjangan Masa Tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1011 - 1012	
17	No.17 Tahun 2007 7 Agustus 2007	Tim Penertiban Barang Milik Negara.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1013 - 1016	Diubah dg Keppres No.13 Th.2009
18	No.18 Tahun 2007 7 September 2007	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1017 - 1018	
19	No.19 Tahun 2007 19 September 2007	Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1019 - 1024	Diubah dg Keppres No.12 Th.2009
20	No.20 Tahun 2007 21 September 2007	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1025 - 1026	
21	No.21 Tahun 2007 21 September 2007	Dewan Kelautan Indonesia.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1027 - 1033	
22	No.22 Tahun 2007 2 Oktober 2007	Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.54/2002 ttg Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1034 - 1038	
23	No.23 Tahun 2007 15 Nopember 2007	Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1039 - 1043	Diubah dg Keppres No.17 & No.30 Th.2008
24	No.24 Tahun 2007 15 Nopember 2007	Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.	HPPRI (6) 2007 Hal.: 1044 - 1046	
INPRES				
1	No.1 Tahun 2007 12 Pebruari 2007	Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2085 - 2087	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No.2 Tahun 2007 16 Maret 2007	Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2088 - 2112	
3	No.3 Tahun 2007 31 Maret 2007	Kebijakan Perberasan.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2113 - 2116	
4	No.4 Tahun 2007 24 April 2007	Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Ke Daerah.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2117 - 2118	
5	No.5 Tahun 2007 16 Mei 2007	Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2119 - 2137	
6	No.6 Tahun 2007 8 Juni 2007	Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	HPPRI (3) 2007 Hal.: 2138 - 2179	
<b>TAHUN 2008</b>				
<b>PERPRES</b>				
1	No.1 Tahun 2008 26 Januari 2008	Perubahan Atas Perpres No.19 Th.2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 3 - 16	
2	No.2 Tahun 2008 26 Januari 2008	Lembaga Penjaminan.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 17 - 23	
3	No.3 Tahun 2008 26 Januari 2008	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 24 - 25	
4	No.4 Tahun 2008 26 Januari 2008	Badan Pengelola Dana Abadi Umat.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 26 - 34	
5	No.5 Tahun 2008 26 Januari 2008	Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 35 - 36	
6	No.6 Tahun 2008 26 Januari 2008	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik & Dinas (Agreement Between The Government of The Rep. of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits of The Holders Diplomatic and Service Passports). (LN No.9)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 37 - 49	
7	No.7 Tahun 2008 26 Januari 2008	Kebijakan Umum Pertahanan Negara.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 50 - 61	Dicabut dg Perpres No.41 Th.2010

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
8	No.8 Tahun 2008 26 Januari 2008	Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 62 - 78	
9	No.9 Tahun 2008 26 Januari 2008	Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 40 Th.2005 ttg Staf Khusus Presiden.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 79 - 81	
10	No.10 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window	HPPRI (3) 2008 Hal.: 82 - 89	Diubah dg Perpres No.35 Th.2012
11	No.11 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 90 - 101	
12	No.12 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Dewan Sumber Daya Air.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 102 - 123	Diubah dg Perpres No.149 Th.2014
13	No.13 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, & Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 124 - 126	
14	No.14 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Th.2007 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No.10/2008.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 127 - 133	Dicabut dg Perpres No.5 Th.2009
15	No.15 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Penyesuaian Gaji pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah No.11 Th.2008	HPPRI (3) 2008 Hal.: 134 - 139	
16	No.16 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 140 - 142	
17	No.17 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Pengesahan Persetujuan Mengenai Lerka Sama Ekonomi & Teknik Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Kolombia (Agreement on Economic and Technical Cooperation Between The Gov. of The Rep. of Indonesia & The Government of The Rep. of Colombia). (LN.No.36)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 143 - 171	
18	No.18 Tahun 2008 26 Pebruari 2008	Pengesahan Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Compre- hensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China). (LN. No.37)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 172 - 264	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
19	No.19 Tahun 2008 10 Maret 2008	Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 265 - 272	Ketentuan Tunjangan Khusus dicabut dg PP No.94-2012 Dicabut dg PP No.53 Th.2014
20	No.20 Tahun 2008 10 Maret 2008	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 273 - 276	Dicabut dg Perpres No.47 Th.2009
21	No.21 Tahun 2008 10 Maret 2008	Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden No.10 Th.2005 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 277 - 280	
22	No.22 Tahun 2008 4 April 2008	Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat dengan Peraturan Presiden	HPPRI (3) 2008 Hal.: 281 - 284	
23	No.23 Tahun 2008 4 April 2008	Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 285 - 288	Diubah dg Perpres No.87 Th.2010 Dicabut dg Perpres No.5 Th.2013
24	No.24 Tahun 2008 4 April 2008	Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 289 - 291	
25	No.25 Tahun 2008 4 April 2008	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 292 - 353	
26	No.26 Tahun 2008 7 Mei 2008	Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 354 - 365	
27	No.27 Tahun 2008 7 Mei 2008	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 366 - 376	Diubah dg Perpres No.23 Th.2009
28	No.28 Tahun 2008 7 Mei 2008	Kebijakan Industri Nasional.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 377 - 422	
29	No.29 Tahun 2008 7 Mei 2008	Pengesahan Agreement between the Gov. of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic Finland on the Promotion and the Protection of Investment (Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Finlandia mengenai Peningkatan & Perlindungan Penanaman Modal). (LN No.71)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 423 - 437	
30	No.30 Tahun 2008 7 Mei 2008	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 438 - 441	
31	No.31 Tahun 2008 7 Mei 2008	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerja Sama Ekonomi).	HPPRI (3) 2008 Hal.: 442 - 473	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
32	No.32 Tahun 2008 15 Mei 2008	Pengesahan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 474 - 529	
33	No.33 Tahun 2008 15 Mei 2008	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 530 - 533	
34	No.34 Tahun 2008 15 Mei 2008	Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 534 - 544	
35	No.35 Tahun 2008 15 Mei 2008	Tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 545 - 552	
36	No.36 Tahun 2008 19 Mei 2008	Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi).	HPPRI (3) 2008 Hal.: 553 - 554	
37	No.37 Tahun 2008 19 Mei 2008	Pengesahan Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tgl 9 Desember 2005 beserta Protocol to establish and Implement the ASEAN Single Window (Protokol utk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window). (LN No.75)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 555 - 706	
38	No.38 Tahun 2008 28 Mei 2008	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 707 - 1600	
39	No.39 Tahun 2008 19 Juni 2008	Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia). (LN No.85)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1601 - 1717	
40	No.40 Tahun 2008 19 Juni 2008	Pengesahan General Regulations Of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia). (LN No.86)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1618 - 1800	
41	No.41 Tahun 2008 19 Juni 2008	Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos). (LN No.87)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1801 - 1835	
42	No.42 Tahun 2008 24 Juni 2008	Pembubaran Badan Pengelola dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1836 - 1839	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
43	No.43 Tahun 2008 24 Juni 2008	Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1840 - 1843	
44	No.44 Tahun 2008 24 Juni 2008	Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1844 - 1855	Dicabut dg Perpres No.46 Th.2014
45	No.45 Tahun 2008 24 Juni 2008	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1856 - 1858	Diubah dg Perpres No.64 Th.2010
46	No.46 Tahun 2008 4 Juli 2008	Dewan Nasional Perubahan Iklim.	LL : 4 hal.	Dicabut dg Perpres No.16 Th.2015
47	No.47 Tahun 2008 4 Juli 2008	Perubahan atas Peraturan Presiden No.30 Th.2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov.Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.	LL : 73 hal.	
48	No.48 Tahun 2008 17 Juli 2008	Perubahan atas Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.	LL : 3 hal.	
49	No.49 Tahun 2008 26 Juli 2008	Pola organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.	LL : 5 hal.	Dicabut dg Perpres No.80 Th.2012
50	No.50 Tahun 2008 31 Juli 2008	Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden No.10 Th.2005 ttg Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI.	LL : 2 hal.	
51	No.51 Tahun 2008 31 Juli 2008	Pengesahan Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketiga Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) (LN.113)	LL : 3 hal.	
52	No.52 Tahun 2008 31 Juli 2008	Pengesahan Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) (LN.114)	LL : 3 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
53	No.53 Tahun 2008 2 Agustus 2008	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M.	LL : 3 hal.	Dicabut dg Perpres No.31 Th.2009
54	No.54 Tahun 2008 12 Agustus 2008	Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.	LL : 31 hal.	
55	No.55 Tahun 2008 12 Agustus 2008	Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	LL : 5 hal.	
56	No.56 Tahun 2008 15 Agustus 2008	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden.	LL : 3 hal.	
57	No.57 Tahun 2008 28 Agustus 2008	Pengesahan Multilateral Agreement among D- 8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters (Persetujuan Multilateral antar Negara-negara Anggota D-8 mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan)	LL : 2 hal.	
58	No.58 Tahun 2008 28 Agustus 2008	Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership). (LN No.126)	LL : 2 hal.	
59	No.59 Tahun 2008 2 September 2008	Pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata). (LN No.128)	LL : 2 hal.	
60	No.60 Tahun 2008 2 September 2008	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Austrian Federal Government on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports (Persetujuan antara Pemerintah Rep. Indonesia dan Pemerintah Federal Austria mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik & Dinas). (LN No.129)	LL : 2 hal.	
61	No.61 Tahun 2008 2 September 2008	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	LL : 10 hal.	
62	No.62 Tahun 2008 12 September 2008	Penetapan pembayaran gaji Pegawai Negeri, Pensiun, dan Dana Alokasi Umum bulan Oktober 2008.	LL : 2 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
63	No.63 Tahun 2008 19 Oktober 2008	Pengesahan Interbational Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007) (LN No.152)	LL : 2 hal.	
64	No.64 Tahun 2008 19 Oktober 2008	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Brazil mengenai Pembebasan Visa untuk Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Gov. The RI and The Gov. Of The Federative Rep. Of Brazil On Visa Exemption for Diplomatic & Official Or Service Pasports) (LN No.153)	LL : 2 hal.	
65	No.65 Tahun 2008 21 Oktober 2008	Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The Asean-Korea Center Between The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian Asean-Korea Centre Antara Negara2 Anggota Asosiasi Bangsa2 Asia Tenggara dan Republik Korea). (LN No.154)	LL : 3 hal.	
66	No.66 Tahun 2008 21 Oktober 2008	Pengesahan Persetujuan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Islam Iran (Agreementon Promotion And Reciprocal Protection Of Investment Between The Gov. Of Republic Indonesia & The Gov. Of The Islamic Of Iran) (LN No.155)	LL : 2 hal.	
67	No.67 Tahun 2008 21 Oktober 2008	Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia and The Kingdom Of The Netherlands On Mutual Administrative Assistance For The Proper Application Of Customs Law and For The Prevention, Investigation and Combating Of Custom Offences (Persetujuan Antara RI dan Kerajaan Belanda ttg Bantuan Administratif Timbal Balik Utk Penerapan Undang2 Pabean yang Tepat & Untuk Pencegahan, Penyidikan dan Pemberantasan Pelanggaran Kepabeanan). (LN No.156)	LL : 2 hal.	
68	No.68 Tahun 2008 6 Nopember 2008	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Yunani ttg Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan (Agreement Between The Gov. Of Rep. Indonesia And The Gov. Of The Hellenic Republic On Cultural And Educational Cooperation) (LN No.157)		

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
69	No.69 Tahun 2008 6 Nopember 2008	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	LL: 6 hal.	
70	No.70 Tahun 2008 6 Nopember 2008	Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah.	LL: 2 hal.	
71	No.71 Tahun 2008 13 Nopember 2008	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat tentang Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States on Educational and Cultural Cooperation) (LN No.173)	LL: 2 hal.	
72	No.72 Tahun 2008 29 Nopember 2008	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.	LL: 2 hal.	
73	No.73 Tahun 2008 17 Desember 2009	Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia.	LL: 3 hal.	
74	No.74 Tahun 2008 24 Desember 2008	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten , dan Kota Tahun 2009.	LL: 29 hal.	
75	No.75 Tahun 2008 24 Desember 2008	Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang- Undang, dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung dg Pemerintahan Aceh.	LL: 5 hal.	
76	No.76 Tahun 2008 30 Desember 2008	Pengesahan Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) (LN No.207)	LL: 2 hal.	
77	No.77 Tahun 2008 30 Desember 2008	Pengesahan Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid (Memorandum Saling Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN). (LN No.208)	LL: 17 hal.	
78	No.78 Tahun 2008 30 Desember 2008	International Tropical Timber Agreement, 2006 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 2006) (LN No.209)	LL: 2 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
79	No.79 Tahun 2008 30 Desember 2008	Tunjangan Pengamanan Persandian	LL: 6 hal.	
80	No.80 Tahun 2008 30 Desember 2008	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.	LL: 2 hal.	
81	No.81 Tahun 2008 30 Desember 2008	Organisasi dan Tata Kerja Intensi Vertikal Departemen Agama.	LL: 8 hal.	
82	No.82 Tahun 2008 30 Desember 2008	Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	LL: 3 hal.	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2008 10 Januari 2008	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1861 - 1862	
2	No.2 Tahun 2008 26 Januari 2008	Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri Dobo.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1863 - 1870	
3	No.3 Tahun 2008 26 Januari 2008	Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1871 - 1880	
4	No.4 Tahun 2008 6 Pebruari 2008	Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam misi Pemeliharaan Perdamaian di Daftur, Sudan.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1881 - 1884	Dicabut dg Perpres No.50 Th.2010
5	No.5 Tahun 2008 25 Pebruari 2008	Pembentukan Panitia Nasional Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1885 - 1888	
6	No.6 Tahun 2008 10 Maret 2008	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1889 - 1890	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
7	No.7 Tahun 2008 16 April 2008	Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis TNI dengan Keputusan Presiden.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1891 - 1895	
8	No.8 Tahun 2008 7 Mei 2008	Perubahan atas Keputusan Presiden No.3 Th.2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1896 - 1899	
9	No.9 Tahun 2008 7 Mei 2008	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1900 - 1903	
10	No.10 Tahun 2008 7 Mei 2008	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1904 - 1907	
11	No.11 Tahun 2008 7 Mei 2008	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1908 - 1911	
12	No.12 Tahun 2008 19 Mei 2008	Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesiant Debt Restructuring Agency)	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1912 - 1914	
13	No.13 Tahun 2008 28 Mei 2008	Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia di Bali (Bali Asian Beach Games Organizing Committee) Tahun 2008.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1915 - 1919	
14	No.14 Tahun 2008 4 Juli 2008	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 hal.	
15	No.15 Tahun 2008 4 Juli 2008	Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, & Kejaksaan Negeri Singaparna.	LL : 3 hal.	
16	No.16 Tahun 2008 15 Agustus 2008	Pemberian Remisi	LL : 5 hal.	
17	No.17 Tahun 2008 28 Agustus 2008	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( <i>World Ocean Conference</i> ) Tahun 2009	LL : 5 hal.	
18	No.18 Tahun 2008 10 Sept. 2008	Hari Konstitusi.	LL : 2 hal.	
19	No.19 Tahun 2008 15 Sept. 2008	Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian <i>Liquid Natural Gas</i> Tangguh.	LL : 2 hal.	
20	No.20 Tahun 2008 23 Sept. 2008	Pembentukan Eminent Persons Group Indonesia.	LL : 2 hal.	
21	No.21 Tahun 2008 23 Sept. 2008	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi.	LL : 3 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 2008 27 Sept. 2008	Hari Jadi Pertambangan dan Energi.	LL : 1 hal.	
23	No.23 Tahun 2008 19 Oktober 2008	Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan.	LL : 2 hal.	Dicabut dg Perpres No.50 Th.2010
24	No.24 Tahun 2008 21 Oktober 2008	Hari Menanam Pohon Indonesia.	LL : 1 hal.	
25	No.25 Tahun 2008 22 Oktober 2008	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 hal.	
26	No.26 Tahun 2008 7 Nopember 2008	Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong; dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa.	LL : 4 hal.	
27	No.27 Tahun 2008 .. Nopember 2008	Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.	LL : 2 hal.	
28	No.28 Tahun 2008 13 Nopember 2008	Penugaskan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden	LL : 1 hal.	
29	No.29 Tahun 2008 18 Desember 2008	Ekstradisi yang diajukan Pemerintah Australia atas nama Charles Alfred Barnett, Warga Negara Australia.	LL : 2 hal.	
30	No.30 Tahun 2008 23 Desember 2008	Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009.	LL : 2 hal.	
31	No.31 Tahun 2008 24 Desember 2008	Remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada terpidana MICHAEL LOIC BLANC	LL : 2 hal.	
32	No.32 Tahun 2008 30 Desember 2008	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Tanjung Pinang, serta Pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.	LL : 2 hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
<b>INPRES</b>				
1	No.1 Tahun 2008 5 Mei 2008	Kebijakan Perberasan.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1923 - 1926	
2	No.2 Tahun 2008 5 Mei 2008	Penghematan Energi dan Air.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1927 - 1931	
3	No.3 Tahun 2008 14 Mei 2008	Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga sasaran.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1932 - 1936	
4	No.4 Tahun 2008 5 Mei 2008	Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2008.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1937 - 1939	
5	No.5 Tahun 2008 5 Mei 2008	Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.	HPPRI (3) 2008 Hal.: 1940 - 2001	
6	No.6 Tahun 2008 9 Agustus 2008	Penyelenggaraan Pameran.	LL : 2 Hal.	
7	No.7 Tahun 2008 23 Agustus 2008	Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.	LL : 5 Hal.	
8	No.8 Tahun 2008 24 Desember 2008	Kebijakan Perberasan.	LL : 4 Hal.	
<b>TAHUN 2009</b>				
<b>PERPRES</b>				
1	No. 1 Tahun 2009 12 Januari 2009	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
2	No. 2 Tahun 2009 12 Januari 2009	Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.	HPPRI 2009 LL : 6 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2009 12 Pebruari 2009	Pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov.Nanggroe Aceh Darussalam dan Kep. Nias Prov.Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi & Rekonstruksi di Wil. Prov.NAD dan Kep. Nias Prov. Sumut.	HPPRI 2009 LL : 6 Hal.	
4	No. 4 Tahun 2009 27 Pebruari 2009	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	
5.	No. 5 Tahun 2009 27 Pebruari 2009	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No.10 Th.2008 ke dalam gaji pokok PNS menurut PP No.8 Th.2009.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	Dicabut dg Perpres No.25 Th.2010



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
6	No. 6 Tahun 2009 5 Maret 2009	Pengesahan Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa). ( LN No.50)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
7	No. 7 Tahun 2009 5 Maret 2009	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement between the Gov. of the RI and the Gov.of the Russian Federation on the Promotion and the Protection of Investments). ( LN No.51)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
8	No. 8 Tahun 2009 5 Maret 2009	Pengesahan Protocol Amending the Agreement and the Protocol between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income (Protokol Perubahan Persetujuan & Protokol antara Rep.Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yg Berhubungan dg Pajak2 atas Penghasilan). ( LN No.52)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
9.	No. 9 Tahun 2009 18 Maret 2009	Lembaga Pembiayaan.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	
10	No.10 Tahun 2009 18 Maret 2009	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	Dicabut dg Perpres No.105 Th.2013
11	No.11 Tahun 2009 18 Maret 2009	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
12	No.12 Tahun 2009 24 Maret 2009	Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	Diubah dg Perpres No.32/2009 & No.101/2014
13	No.13 Tahun 2009 27 Maret 2009	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.	HPPRI 2009 LL : 10 Hal.	
14	No.14 Tahun 2009 13 April 2009	Sekolah Tinggi Intelijen Negara	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	
15	No.15 Tahun 2009 13 April 2009	Kedudukan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	Dicabut dg Perpres No.43 Th.2013
16	No.16 Tahun 2009 22 April 2009	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
17	No.17 Tahun 2009 28 April 2009	Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
18	No.18 Tahun 2009 22 Mei 2009	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspur Diplomatik & Dinas (Agreement between the Gov. of the Rep. of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports). (LN No.74)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
19	No.19 Tahun 2009 22 Mei 2009	Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembebasan Visa). (LN No.75)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
20	No.20 Tahun 2009 25 Mei 2009	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
21	No.21 Tahun 2009 31 Mei 2009	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010	HPPRI 2009 LL : 1143 Hal.	
22	No.22 Tahun 2009 6 Juni 2009	Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	HPPRI 2009 LL : 19 Hal.	
23	No.23 Tahun 2009 6 Juni 2009	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
24	No.24 Tahun 2009 8 Juni 2009	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
25	No.25 Tahun 2009 11 Juni 2009	ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas) (LN No.93)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
26	No.26 Tahun 2009 19 Juni 2009	Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	Diubah dg Perpres No.35/2010; 67/2011, 126/2012 & 112/2013
27	No.27 Tahun 2009 23 Juni 2009	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.	HPPRI 2009 LL : 15 Hal.	Dicabut dg Perpres No.97 Th.2014
28	No.28 Tahun 2009 23 Juni 2009	Persetujuan antara Pemerintah RI & Pem. Republik Azerbaijan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Rep. of Azerbaijan on Economic and Technical Cooperation</i> ) (LN No.97)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
29	No.29 Tahun 2009 23 Juni 2009	Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.	HPPRI 2009 LL : 7 hal	
30	No.30 Tahun 2009 23 Juni 2009	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
31	No.31 Tahun 2009 3 Juli 2009	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	Diubah dg Perpres No.41 Th.2009 Dicabut dg Perpres No.51 Th.2010
32	No.32 Tahun 2009 21 Juli 2009	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet.	HPPRI 2009 LL : .. Hal.	
33	No.33 Tahun 2009 23 Juli 2009	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Promotion and Protection of Investments (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal). (LN No.116)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
34	No.34 Tahun 2009 5 Agustus 2009	Pengesahan Amendments to the Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (Perubahan terhadap Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN di bid. Perdagangan, Penanaman Modal & Pariwisata). (LN No.117)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
35	No.35 Tahun 2009 5 Agustus 2009	Honorarium bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Rep.Indonesia.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
36	No.36 Tahun 2009 28 Agustus 2009	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep.Uzbekistan (Trade Agreement between the Gov.of the RI and the Gov. of the Rep. of Uzbekistan). (LN No.120)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
37	No.37 Tahun 2009 28 Agustus 2009	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Paraguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Gov. of The RI & The Gov.of The Rep. Of Paraguay On Visa Exemption For Diplomatic, Official and Service Passports)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
38	No.38 Tahun 2009 28 Agustus 2009	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Azerbaijan on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports). (LN No.122)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
39	No.39 Tahun 2009 28 Agustus 2009	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
40	No.40 Tahun 2009 23 Sept. 2009	Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
41	No.41 Tahun 2009 23 Sept. 2009	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.	HPPRI 2009 LL :2 Hal.	Dicabut dg Perpres No.51 Th.2010
42	No.42 Tahun 2009 23 Sept. 2009	Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis.	HPPRI 2009 LL : 5 Hal.	
43	No.43 Tahun 2009 11 Oktober 2009	Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	
43A	No.43A Th.2009 20 Oktober 2009	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden.	HPPRI 2009 LL : .. Hal.	Dicabut dg Perpres No.3 Th.2011
44	No.44 Tahun 2009 23 Oktober 2009	Tim Dokter Kepresidenan.	HPPRI 2009 LL : 6 Hal.	Dicabut dg Perpres No.36 Th.2014
45	No.45 Tahun 2009 23 Oktober 2009	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.71 Th.2005 ttg Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
46	No.46 Tahun 2009 29 Oktober 2009	Pengesahan Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir) (LN No.162)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
47	No.47 Tahun 2009 3 November 2009	Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.	HPPRI 2009 LL : 22 Hal.	Kettuan Wamen dicabut dg Perpres No.60/2012 diubah dg No.55/2013; No.13/2014: Dicabut dg Perpres No.7/2015
48	No.48 Tahun 2009 10 Nopember 2009	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
49	No.49 Tahun 2009 19 Nopember 2009	Pengesahan Agreement between the Government of the RI and the Government of the Democratic Socialist Republic of Srilanka on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports (Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Demokratik Sosialis Srilanka tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas) (LN No.173)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
50	No.50 Tahun 2009 19 Nopember 2009	Pengesahan Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi menyeluruh antar Negara2 Anggota Perhimpunan Bangsa2 Asia Tenggara dan Jepang). (LN No.174)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
51	No.51 Tahun 2009 27 Nopember 2009	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
52	No.52 Tahun 2009 1 Desember 2009	Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
53	No.53 Tahun 2009 7 Desember 2009	Dana Alokasi Umum Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010.	HPPRI 2009 LL : .. Hal.	
54	No.54 Tahun 2009 8 Desember 2009	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.	HPPRI 2009 LL : .. Hal.	Diubah dg Perpres No.84 Th.2014 Dicabut dg Perpres No.26 Th.2015
55	No.55 Tahun 2009 12 Desember 2009	Pengesahan Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-akta Akhir Konferensi yg Berkuasa Penuh,Antalya,2006) (LN No.177)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
56	No.56 Tahun 2009 23 Desember 2009	Pembukaan Peraturan Tetap Republik Indonesia Untuk Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Jakarta.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
57	No.57 Tahun 2009 23 Desember 2009	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia utk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	
58	No.58 Tahun 2009 23 Desember 2009	Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
59	No.59 Tahun 2009 23 Desember 2009	Perubahan atas Peraturan Presiden No.71 Th.2006 ttg Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
60	No.60 Tahun 2009 31 Desember 2009	Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2009 26 Pebruari 2009	Penugasan Wakil Presiden Dalam Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
2	No. 2 Tahun 2009 27 Pebruari 2009	Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009.	HPPRI 2009 LL : 5 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2009 2 Maret 2009	Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
4	No. 4 Tahun 2009 18 Maret 2009	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.	HPPRI 2009 LL : 7 Hal.	
5	No. 5 Tahun 2009 18 Maret 2009	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.	HPPRI 2009 LL : 7 Hal.	
6	No. 6 Tahun 2009 27 Maret 2009	Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	Dicabut dg Keppres No.43 Th.2014
7	No. 7 Tahun 2009 27 Maret 2009	Penetapan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
8	No. 8 Tahun 2009 29 Maret 2009	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
9	No. 9 Tahun 2009 10 April 2009	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
10	No.10 Tahun 2009 20 April 2009	(Ekstradisi atas nama Hadi Ahmadi alias Abu Hasan alias Abu Hassan alias Abu Hadi alias Sayyed Hassan alias Hadi Ali alias Hadi Putih alias Hadi Puti alias Hadi Abu Hassan alias Hadi Ahmadi Irani alias Hadi Ali Asghar El-Ahmadi, Warga Negara Iran dan Irak).	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
11	No.11 Tahun 2009 22 April 2009	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.	HPPRI 2009 LL : 5 Hal.	
12	No.12 Tahun 2009 22 April 2009	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.19 Th.2007 ttg Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yg Tenggelam.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
13	No.13 Tahun 2009 25 Mei 2009	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
14	No.14 Tahun 2009 31 Mei 2009	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
15	No.15 Tahun 2009 22 April 2009	Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
16	No.16 Tahun 2009 19 Juni 2009	(Permohonan Ekstradisi Christian Burger, Warga Negara Swiss dan Perancis)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
17	No.17 Tahun 2009 3 Juli 2009	Penetapan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
18	No.18 Tahun 2009 19 Juli 2009	(Permohonan Ekstradisi Paul Francis Callahan, Warga Negara Australia)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
19	No.19 Tahun 2009 21 Juli 2009	Pemberian Remisi Berupa Perubahan Dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara	HPPRI 2009 LL : Hal.	
20	No.20 Tahun 2009 21 Juli 2009	Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
21	No.21 Tahun 2009 21 Juli 2009	Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
22	No.22 Tahun 2009 10 Agustus 2009	Hari Konservasi Alam Nasional.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
23	No.23 Tahun 2009 29 Agustus 2009	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kabupaten Bogor.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
24	No.24 Tahun 2009 15 Sept. 2009	Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.	HPPRI 2009 LL : 9 Hal.	
25	No.25 Tahun 2009 16 Sept. 2009	(Ekstradisi Paik Bo hyun, Warga Negara Republik Korea)	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 2009 23 Sept. 2009	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
27	No.27 Tahun 2009 23 Sept. 2009	(Pembentukan Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2007-2011).	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
28	No.28 Tahun 2009 10 Oktober 2009	Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
29	No.29 Tahun 2009 14 Oktober 2009	Pembentukan Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri untuk Pemerintahan Th.2009- 2014	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
30	No.30 Tahun 2009 24 Oktober 2009	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
31	No.31 Tahun 2009 2 Nopember 2009	Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta & Proses Hukum Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah & Sdr. Bibit Samad Rianto.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
32	No.32 Tahun 2009 10 Nopember 2009	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
33	No.33 Tahun 2009 17 Nopember 2009	Hari Batik Nasional.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
34	No.34 Tahun 2009 9 Desember 2009	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	HPPRI 2009 LL : 1 Hal.	
35	No.35 Tahun 2009 14 Desember 2009	Panitia Nasional Penyelenggaran Sail Banda Tahun 2010.	HPPRI 2009 LL : 5 Hal.	
36	No.36 Tahun 2009 28 Desember 2009	Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
37	No.37 Tahun 2009 30 Desember 2009	Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
38	No.38 Tahun 2009 30 Desember 2009	Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.20 Th.2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
84/P	No.84/P Th.2009 21 Okt. 2009	Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.	HPPRI 2009 LL : 4 Hal.	
	<b>INPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2009 9 Pebruari 2009	Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No. 2 Tahun 2009 9 Pebruari 2009	Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2009 27 Maret 2009	pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
4	No. 4 Tahun 2009 3 Juli 2009	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
5	No. 5 Tahun 2009 21 Juli 2009	Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2009.	HPPRI 2009 LL : 2 Hal.	
6	No. 6 Tahun 2009 5 Agustus 2009	Pengembangan Ekonomi Kreatif.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
7	No. 7 Tahun 2009 29 Desember 2009	Kebijakan Perberasan.	HPPRI 2009 LL : 3 Hal.	
	<b>TAHUN 2010</b>			
	<b>PERPRES</b>			
1	No. 1 Tahun 2010 5 Januari 2010	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes).  (LN No.1)	HPPRI 2010 LL : 3 Hal.	
2	No. 2 Tahun 2010 5 Januari 2010	Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (LN No.2)	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
3	No. 3 Tahun 2010 5 Januari 2010	Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in Combating Terrorism). (LN No.3)	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No. 4 Tahun 2010 8 Januari 2010	Penugasan kpd PT. Perush. Listrik Negara (Persero) utk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas.	HPPRI 2010 LL : 4 Hal.	
5	No. 5 Tahun 2010 20 Januari 2010	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
6	No. 6 Tahun 2010 22 Januari 2010	Perubahan atas Peraturan Presiden No.72 Tahun 2006 ttg Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
7	No. 7 Tahun 2010 22 Januari 2010	Pengesahan Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network (Persetujuan antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia). (LN No.12)	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
8	No. 8 Tahun 2010 22 Januari 2010	Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol utk melaksanakan Paket Komitmen Kelima dlm Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa). (LN No.13)	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
9	No. 9 Tahun 2010 25 Januari 2010	Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan.	HPPRI 2010 LL : 3 Hal.	
10	No.10 Tahun 2010 28 Januari 2010	Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.	HPPRI 2010 LL : .. Hal.	
11	No.11 Tahun 2010 28 Januari 2010	Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri.	HPPRI 2010 LL : 5 Hal.	
12	No.12 Tahun 2010 28 Januari 2010	Badan Nasional Pengelola Perbatasan.	HPPRI 2010 LL : 9 Hal.	
13	No.13 Tahun 2010 28 Januari 2010	Perubahan Atas Perpres No.67 Th.2005 ttg Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.	HPPRI 2010 LL : 16 Hal.	
14	No.14 Tahun 2010 8 Pebruari 2010	Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Enhance Voice & Participation in the Intrnational Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal2 Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Meningkatkan Suara dan Keikutsertaan dalam Dana Moneter Internasional) dan Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal2 Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal dari Dana Moneter Internasional).  (LN No.41)	HPPRI 2010 LL : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No.15 Tahun 2010 25 Pebruari 2010	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.	HPPRI 2010 LL : 9 Hal.	
16	No.16 Tahun 2010 1 Maret 2010	Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya.	HPPRI 2010 LL : 5 Hal.	
17	No.17 Tahun 2010 18 Maret 2010	Pengesahan Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional,1997) (LN No.53)	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
18	No.18 Tahun 2010 18 Maret 2010	Pengesahan Agreement on Investment under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Diantara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea). (LN No.54)	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
19	No.19 Tahun 2010 18 Maret 2010	Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) (LN No.55)	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
20	No.20 Tahun 2010 18 Maret 2010	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Kuwait on Economic and Technical Co-operation) (LN No.56)	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
21	No.21 Tahun 2010 19 Maret 2010	Pengawasan Ketenagakerjaan.	HPPRI 2010 LL : 9 Hal.	
22	No.22 Tahun 2010 27 Maret 2010	Program Indonesia Emas.	HPPRI 2010 LL : 11 Hal.	
23	No.23 Tahun 2010 12 April 2010	Badan Narkotika Nasional.	HPPRI 2010 LL : 16 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
24	No.24 Tahun 2010 19 Maret 2010	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.	HPPRI 2010 LL : .. Hal.	Diubah dg Perpres No.38; 56/2013; 14/2014, 80/2014 dan 135/2014
25	No.25 Tahun 2010 16 April 2010	Penyesuaian Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No.8 Th.2009 ke Dalam Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No.25 Th.2010.	HPPRI 2010 LL : 2 Hal.	
26	No.26 Tahun 2010 23 April 2010	Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.	HPPRI 2010 LL : 6 Hal.	
27	No.27 Tahun 2010 5 Mei 2010	Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional.	HPPRI 2010 LL : .. Hal.	
28	No.28 Tahun 2010 11 Mei 2010	Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia.	LL : .. Hal.	
29	No.29 Tahun 2010 14 Mei 2010	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.	LL : 3 Hal.	
30	No.30 Tahun 2010 17 Mei 2010	Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah RI & Pemerintah Malaysia Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Tgl.12 September 1991 (protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Its Protocol Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991). (LN No.65)	LL : .. Hal.	
31	No.31 Tahun 2010 20 Mei 2010	Komite Ekonomi Nasional.	LL : 3 Hal.	Dicabut dg Perpres No.163 Th.2014
32	No.32 Tahun 2010 20 Mei 2010	Komite Inovasi Nasional.	LL : 4 Hal.	Dicabut dg Perpres No.164 Th.2014
33	No.33 Tahun 2010 21 Mei 2010	Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus	LL : 8 Hal.	Diubah dg Perpres No.124/2012 & No.150/2014
34	No.34 Tahun 2010 25 Mei 2010	Badan Intelijen Negara.	LL : 11 Hal.	Dicabut dg Perpres No.90 Th.2012
35	No.35 Tahun 2010 25 Mei 2010	Perubahan atas Peraturan Presiden No.26/ 2009 ttg Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.	LL : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
36	No.36 Tahun 2010 25 Mei 2010	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.	LL : 4 Hal.	Dicabut dg Perpres No.39 Th.2014
37	No.37 Tahun 2010 7 Juni 2010	Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten.	LL : 8 Hal.	
38	No.38 Tahun 2010 15 Juni 2010	Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.	LL : 15 Hal.	
39	No.39 Tahun 2010 15 Juni 2010	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.	LL : 6 Hal.	
40	No.40 Tahun 2010 15 Juni 2010	Pengesahan Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India). (LN No.77)	LL : 2 Hal.	
41	No.41 Tahun 2010 17 Juni 2010	Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.	LL : 10 Hal.	
42	No.42 Tahun 2010 17 Juni 2010	Komite Kebijakan Industri Pertahanan .	LL : 3 Hal.	
43	No.43 Tahun 2010 17 Juni 2010	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports and Service Passports). (LN No.78)	LL : 2 Hal.	
44	No.44 Tahun 2010 17 Juni 2010	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports). (LN No.79)	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
45	No.45 Tahun 2010 21 Juni 2010	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Economic Cooperation). (LN No.80)	LL : 2 Hal.	
46	No.46 Tahun 2010 16 Juli 2010	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.	LL : 10 Hal.	Diubah dg Perpres No.12 Th.2012
47	No.47 Tahun 2010 19 Juli 2010	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Peru on Technical and Economic Cooperation). (LN No.87)	LL : 2 Hal. Lamp.: 9 hal	
48	No.48 Tahun 2010 19 Juli 2010	Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America) beserta Pengaturan Pelaksanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Prosedur Notifikasi (Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Regarding Notification Procedures) (LN No.88)	LL : 2 Hal. Lamp.: 14 hal	
49	No.49 Tahun 2010 19 Juli 2010	Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan.	LL : 3 Hal.	
50	No.50 Tahun 2010 19 Juli 2010	Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan.	LL : 4 Hal.	
51	No.51 Tahun 2010 29 Juli 2010	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M.	LL : 3 Hal.	Dicabut dg Perpres No.51 Th.2011
52	No.52 Tahun 2010 4 Agustus 2010	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	LL : 15 Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
53	No.53 Tahun 2010 6 Agustus 2010	Perubahan Kedua Atas Kepres No.42/2002 ttg Pedoman Pelaksanaan APBN.	LL : 3 Hal.	Dicabut dg PP No.45 Th.2013
54	No.54 Tahun 2010 6 Agustus 2010	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	LL : 101 Hal.	Diubah dg Perpres No.35/2011 & No.70 /2012 & 4/2015
55	No.55 Tahun 2010 27 Agustus 2010	Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yg Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.	LL : 2 Hal.	
56	No.56 Tahun 2010 30 Agustus 2010	Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Rep. of Korea (Persetujuan Perdagangan Jasa dlm Persetujuan Kerangka Kerja menge- nai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara2 Anggota Perhimpunan Bangsa2 Asia Tenggara dan Rep. Korea). (LN No.104)	LL : 2 Hal.	
57	No.57 Tahun 2010 30 Agustus 2010	Pengesahan Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Asso- ciation of Southeast Asian Nations & the People's Rep.of China (Persetujuan mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekono- mi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa2 Asia Tenggara & Rep. Rakyat China). (LN No.105)	LL : 2 Hal.	
58	No.58 Tahun 2010 17 September 2010	Kementerian Sekretariat Negara.	LL : 22 Hal.	Diubah dg Perpres No.80 Th.2010; Dicabut dg Perpres No.24-2015
59	No.59 Tahun 2010 30 September 2010	Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Results Of The 24th Geneva Congress, Swiss 2008 (akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres Ke 24 Di Jenewa Swis 2008). (LN No.113)	LL : 4 Hal.	
60	No.60 Tahun 2010 30 September 2010	Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Air Transport Service Under The Asean Framework Agree- ment On Service (protokol Utk Melaksanakan Paket Ke 5 Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa). (LN No.114)	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
61	No.61 Tahun 2010 7 Oktober 2010	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.	LL : .. Hal.	Dicabut dg Perpres No.169 Th.2014
62	No.62 Tahun 2010 13 Oktober 2010	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.	LL : .. Hal.	
63	No.63 Tahun 2010 25 Oktober 2010	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik.	LL : .. Hal.	
64	No.64 Tahun 2010 10 Nopember 2010	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan.	LL : .. Hal.	
65	No.65 Tahun 2010 19 Nopember 2010	Pendirian Univeritas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, Dan Universitas Musamus.	LL : 3 Hal.	
66	No.66 Tahun 2010 2 Desember 2010	Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk Melaksanakan Paket Ke Enam Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa).	LL : .. Hal.	
67	No.67 Tahun 2010 2 Desember 2010	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.	LL : .. Hal.	
68	No.68 Tahun 2010 2 Desember 2010	Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	LL : 3 Hal.	
69	No.69 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.	LL : 4 Hal.	Dicabut dg Peprpres No.102 Th.2014
70	No.70 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan.	LL : 4 Hal.	
71	No.71 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.	LL : 4 Hal.	
72	No.72 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
73	No.73 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	LL : 4 Hal.	
74	No.74 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan.	LL : 4 Hal.	
75	No.75 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.	LL : 4 Hal.	Dicabut dg Peprpres No.104 Th.2014
76	No.76 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	LL : 4 Hal.	Dicabut dg Peprpres No.103 Th.2014
77	No.77 Tahun 2010 15 Desember 2010	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.	LL : 4 Hal.	Dicabut dg Peprpres No.106 Th.2014
78	No.78 Tahun 2010 21 Desember 2010	Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.	LL : 11 Hal.	
79	No.79 Tahun 2010 21 Desember 2010	Pengesahan Agreement On The Asean Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime (persetujuan Asean Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik & Elektronika). (LN No.145)	LL : 3 Hal.	
80	No.80 Tahun 2010 21 Desember 2010	Perubahan Atas Perpres No.58 Th.2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara.	LL : 6 Hal.	
81	No.81 Tahun 2010 15 Desember 2010	Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.	LL : 42 Hal.	
82	No.82 Tahun 2010 28 Desember 2010	Sekretariat Kabinet.	LL :12 Hal.	Dicabut dg Peprpres No.25 Th.2015
83	No.83 Tahun 2010 28 Desember 2010	Pemberian uang penghargaan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004.	LL :12 Hal.	
84	No.84 Tahun 2010 28 Desember 2010	Pengesahan Joint Convention On The Safety Of Spent Fuel Management And The Safety Of Radioactive Waste Management (konvensi Gabungan Tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas Dan Tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif). (LN No.154)	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
85	No.85 Tahun 2010 28 Desember 2010	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim AD HOC.	LL :3 Hal.	
86	No.86 Tahun 2010 30 Desember 2010	Perubahan atas Perpres No.49 Th.2005 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.	LL : 2 Hal.	Ketentuan Uang kehormatan dicabut dg PP No.94-2012 Dicabut dg Perpres No.5 Th.2013
87	No.87 Tahun 2010 30 Desember 2010	Perubahan atas Perpres No.23 Th.2008 tentang uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri.	LL : 2 Hal.	
88	No.88 Tahun 2010 31 Desember 2010	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung	LL : 2 Hal.	Dicabut dg Perpres No.106 Th.2013
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2010 4 Maret 2010	Ekstradisi Atas Nama Sdr. Robert James Mc. Noice.	LL : 2 Hal.	
2	No.2 Tahun 2010 6 Maret 2010	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 Hal.	
3	No.3 Tahun 2010 27 Maret 2010	Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011.	HPPRI 2010 LL : 4 Hal.	Diubah dg Keppres No.20 Th.2010
4	No.4 Tahun 2010 6 April 2010	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 Hal.	
5	No.5 Tahun 2010 23 April 2010	Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial.	LL : 3 Hal.	
6	No.6 Tahun 2010 8 Mei 2010	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	LL : 2 Hal.	
7	No.7 Tahun 2010 15 Mei 2010	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 Hal.	
8	No.8 Tahun 2010 21 Mei 2010	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.	LL : 2 Hal.	
9	No.9 Tahun 2010 25 Mei 2010	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
10	No.10 Tahun 2010 25 Mei 2010	Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.	LL : 3 Hal.	
11	No.11 Tahun 2010 7 Juni 2010	Ekstradisi atas nama Timothy Geoffrey Lee, Warga Negara Inggris dan Australia.	LL : 2 Hal.	
12	No.12 Tahun 2010 15 Juni 2010	Pencabutan Keputusan Presiden No.64 Th.1986 ttg Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta.	LL : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2010 17 Juni 2010	Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Th.2010-2014.	LL : .. Hal.	
14	No.14 Tahun 2010 17 Juni 2010	Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.	LL : 4 Hal.	Diubah dg Keppres No.23 Th.2010
15	No.15 Tahun 2010 17 Juni 2010	Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.	LL : 2 Hal.	
16	No.16 Tahun 2010 24 Juni 2010	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 Hal.	
17	No.17 Tahun 2010 23 Agustus 2010	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.	LL : 2 Hal.	
18	No.18 Tahun 2010 27 Agustus 2010	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Padang Pariaman, Kab. Karawang, dan Kab. Batu Bara	LL : 2 Hal.	
19	No.19 Tahun 2010 20 September 2010	Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+.	LL : 3 Hal.	
20	No.20 Tahun 2010 20 Oktober 2010	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.3 Th. 2010 Ttg Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (sea Games) Xxvi Th.2011 Dan Asean Para Games Vi Th.2011.	LL : 3 Hal.	
21	No.21 Tahun 2010 22 Oktober 2010	Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, Dan Kejaksaan Negeri Meurendu.	LL : 9 Hal.	
22	No.22 Tahun 2010 25 Oktober 2010	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL :1 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23	No.23 Tahun 2010 25 Oktober 2010	Perubahan atas Kepres No.14 Th.2010 ttg Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.	LL : 3 Hal.	
24	No.24 Tahun 2010 4 Nopember 2010	Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.	LL : 39 Hal.	
25	No.25 Tahun 2010 11 Nopember 2010	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL :1 Hal.	
26	No.26 Tahun 2010 30 Nopember 2010	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011.	LL : 3 Hal.	
27	No.27 Tahun 2010 1 Desember 2010	Tim Perundingan Proyek Asahan.	LL : 2 Hal.	
28	No.28 Tahun 2010 1 Desember 2010	Perubahan Kedua Kepres No.3 Th.2006 ttg Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.	LL : 3 Hal.	
29	No.29 Tahun 2010 16 Desember 2010	Pembentukan Panitia Nasional Penyeleng- gara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation Xxi Tahun 2013 Dan Penetapan Prov. Bali Sebagai Tempat Penye- lenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation Xxi Th.2013.	LL : .. Hal.	
	<b>INPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2010 19 Februari 2010	Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.	LL : 3 Hal.	
2	No.2 Tahun 2010 13 April 2010	Revitalisasi Industri Pupuk.	LL : 3 Hal.	
3	No.3 Tahun 2010 21 April 2010	Program Pembangunan Yang Berkeadilan.	LL : 3 Hal.	
4	No.4 Tahun 2010 6 Oktober 2010	Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2010.	LL : .. Hal.	
	<b>TAHUN 2011</b>			
	<b>PERPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2011 3 Januari 2011	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.	LL : 2 Hal.	
2	No.2 Tahun 2011 3 Januari 2011	Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	LL : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
3	No.3 Tahun 2011 5 Januari 2011	Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden.	LL : 7 Hal.	Dicabut dg Perpres No.17 Th.2012
4	No.4 Tahun 2011 24 Januari 2011	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Scientific and Technological Cooperation). (LN No.13)	LL : 2 Hal.	
5	No.5 Tahun 2011 7 Februari 2011	Penetapan Universitas Pertahanan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.	LL : 7 Hal.	
6	No.6 Tahun 2011 7 Februari 2011	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.	LL : 7 Hal.	
7	No.7 Tahun 2011 7 Februari 2011	Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014.	LL : 75 Hal.	
8	No.8 Tahun 2011 7 Februari 2011	Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.	LL : 4 Hal. Lamp.: 8 hal	
9	No.9 Tahun 2011 8 Februari 2011	Penugasan Pusat Investasi Pemerintah Untuk Memberikan Pinjaman dg Persyaratan Lunak Kepada PT. Perush. Listrik Negara (Persero).	LL : 2 Hal.	
10	No.10 Tahun 2011 17 Februari 2011	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian.	LL : 4 Hal.	
11	No.11 Tahun 2011 24 Februari 2011	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah.	LL : 2 Hal.	
12	No.12 Tahun 2011 24 Februari 2011	Perubahan Atas Perpres No.42 Th.2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.	LL : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2011 28 Februari 2011	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federal Swiss Mengenai Pembebasan Visa Bersama Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Swiss Federal Council On Mutual Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports). (LN. No.13)	LL : 2 Hal.	
14	No.14 Tahun 2011 2 Maret 2011	Bantuan Langsung Benih Ungul Dan Pupuk.	LL : 2 Hal.	
15	No.15 Tahun 2011 2 Maret 2011	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.77 Th.2005 Ttg Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
16	No.16 Tahun 2011 3 Maret 2011	Pengesahan Persetujuan Antara Pem. RI Dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerjasama Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia & The Cabinet of Ministers of Ukraina On Cooperation In The Exploration & Peaceful Uses Of Outer Space) (LN. No.35)	LL : 2 Hal.	
17	No.17 Tahun 2011 4 Maret 2011	Komisi Kepolisian Nasional.	LL : 10 Hal.	
18	No.18 Tahun 2011 4 Maret 2011	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	LL : 10 Hal.	
19	No.19 Tahun 2011 11 Maret 2011	Pengesahan International Sugar Agreement, 1992 (Persetujuan Gula Internasional, 1992). (LN. No.37)	LL : 2 Hal.	
20	No.20 Tahun 2011 22 Maret 2011	Perubahan atas Perpres No.96 Th.2006 ttg Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.	LL : 10 Hal.	
21	No.21 Tahun 2011 22 Maret 2011	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Informasi Pusat.	LL : 3 Hal.	
22	No.22 Tahun 2011 1 April 2011	Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Istambul, Turki.	LL : 4 Hal.	
23	No.23 Tahun 2011 11 April 2011	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.	LL : .. Hal.	
24	No.24 Tahun 2011 6 Mei 2011	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Pemuda (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic on Co-operation in the Fields of Science, Education, Culture, Sports and Youth), (LN. No.53)	LL : 2 Hal.	
25	No.25 Tahun 2011 6 Mei 2011	Pengesahan Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China). (LN. No.54)	LL : 2 Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 2011 6 Mei 2011	Agreement Establishing the ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – Selandia Baru) (LN No.55)	LL : 2 Hal.	
27	No.27 Tahun 2011 9 Mei 2011	Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011.	LL : 4 Hal.	
28	No.28 Tahun 2011 19 Mei 2011	Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah.	LL : 6 Hal.	
29	No.29 Tahun 2011 20 Mei 2011	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.	LL : .. Hal.	
30	No.30 Tahun 2011 20 Mei 2011	Pengendalian Zoonosis.	LL : .. Hal.	
31	No.31 Tahun 2011 20 Mei 2011	Pengesahan Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the Organization of the Islamic Conference (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Sistem Preferensi Perdagangan antar Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam).  (LN No.57)	LL : 3 Hal.	
32	No.32 Tahun 2011 20 Mei 2011	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.	LL : 4 Hal.	
33	No.33 Tahun 2011 20 Juni 2011	Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air	LL : 4 Hal.	
34	No.34 Tahun 2011 24 Juni 2011	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Economic and Technical Cooperation). (LN No.63)	LL : .3 Hal.	
35	No.35 Tahun 2011 30 Juni 2011	Perubahan atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	LL : 3 Hal.	Diubah dg Perpres No.70/2012
36	No.36 Tahun 2011 4 Juli 2011	Perubahan atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
37	No.37 Tahun 2011 7 Juli 2011	Pengesahan Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China). (LN No.67)	LL : 2 Hal.	
38	No.38 Tahun 2011 11 Juli 2011	Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) oleh Rafat Ali Rizvi.	LL : 4 Hal.	
39	No.39 Tahun 2011 21 Juni 2011	Penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia.	LL : 5 Hal.	
40	No.40 Tahun 2011 12 Juli 2011	Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	LL : 6 Hal.	Dicabut dg Perpres No.105 Th.2014
41	No.41 Tahun 2011 12 Juli 2011	Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.	LL : 6 Hal.	
42	No.42 Tahun 2011 14 Juli 2011	Persetujuan antara Pem. RI & Pemerintah Rep. Korea ttg Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir utk Maksud-maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy) (LN No.68)	LL : 2 Hal.	
43	No.43 Tahun 2011 18 Juli 2011	Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.	LL : 4 Hal.	
44	No.44 Tahun 2011 18 Juli 2011	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom untuk Maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy). (LN No.69)	LL : 2 Hal.	
45	No.45 Tahun 2011 27 Juli 2011	Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan	LL : .. Hal.	Diubah dg Perpres No.51 Th.2014

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
46	No.46 Tahun 2011 27 Juli 2011	Pembubaran Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.	LL : 4 Hal.	
47	No.47 Tahun 2011 27 Juli 2011	Perubahan Kedua Atas Perpres No.71/2006 ttg Penugasan kepada PT Perush. Listrik Negara (Persero) utk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.	LL : 4 Hal.	
48	No.48 Tahun 2011 27 Juli 2011	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.4 Th.2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yg Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas.	LL : 4 Hal.	
49	No.49 Tahun 2011 8 Austus 2011	Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) (LN No.80)	LL : 4 Hal.	
50	No.50 Tahun 2011 12 Agustus 2011	Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	LL : 43 Hal.	
51	No.51 Tahun 2011 12 Agustus 2011	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M	LL : 3 Hal.	Dicabut dg Perpres No.67 Th.2012
52	No.52 Tahun 2011 22 Agustus 2011	Penetapan tanggal pembayaran gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan pembayaran Pensiun bulan September 2011.	LL : 4 Hal.	
53	No.53 Tahun 2011 8 Sept. 2011	Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji.	LL : 5 Hal.	
54	No.54 Tahun 2011 9 Sept. 2011	Pengesahan Preferential Trade Agreement among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-negara Anggota D-8) (LN No.85)	LL : 3 Hal.	
55	No.55 Tahun 2011 9 Sept. 2011	Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, & Takalar.	LL : 116 Hal.	
56	No.56 Tahun 2011 9 Sept. 2011	Perubahan Kedua Atas Perpres No.67 Th.2005 ttg Kerjasama Pemerintah dg Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.	LL : 13 Hal.	
57	No.57 Tahun 2011 9 Sept. 2011	Pengesahan Letter Of Understanding For The Amendement of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 Of The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Gov. of The Member Countries Of The Association of Southeast Asian Nation & The Rep. Of Korea. (LN No.88)	LL : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
58	No.58 Tahun 2011 13 Sept. 2011	Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Shanghai Republik Rakyat Tiongkok.	LL : 4 Hal.	
59	No.59 Tahun 2011 15 Sept. 2011	Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penyelenggaraan South East Asian Games (sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011.	LL : 2 Hal.	
60	No.60 Tahun 2011 20 Sept. 2011	Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Hesham Al-warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam.	LL : 4 Hal.	
61	No.61 Tahun 2011 20 Sept. 2011	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	LL : 9 Hal.	
62	No.62 Tahun 2011 20 Sept. 2011	Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo	LL : 123 Hal.	
63	No.63 Tahun 2011 20 Sept. 2011	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.	LL : .. Hal.	
64	No.64 Tahun 2011 20 Sept. 2011	Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.	LL : 18 Hal.	
65	No.65 Tahun 2011 20 Sept. 2011	Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.	LL : 112 Hal.	
66	No.66 Tahun 2011 20 Sept. 2011	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.	LL : 15 Hal.	Diubah dg Perpres No.25 Th.2013
67	No.67 Tahun 2011 27 Sept. 2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.26 Th.2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.	LL : 5 Hal.	
68	No.68 Tahun 2011 27 Sept. 2011	Perubahan Ketiga Atas Perpres No.14-2007 Ttg Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. (LN. No.92)	LL : 8 Hal.	
69	No.69 Tahun 2011 3 Oktober 2011	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur.	LL : 5 Hal.	
70	No.70 Tahun 2011 5 Oktober 2011	Pengesahan Protocol 1 Designation of Transit Transport Router And Facilities (protocol 1 Penetapan Rute-rute Dan Fasilitas Angkutan Transit). (LN. No.97)	LL : 3 Hal.	
71	No.71 Tahun 2011 5 Oktober 2011	Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.	LL : 13 Hal.	
72	No.72 Tahun 2011 5 Oktober 2011	Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Rep. Indonesia dan Rep. Demokratik Timur Leste.	LL : 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
73	No.73 Tahun 2011 11 Oktober 2011	Pembangunan Bangunan Gedung Negara.	LL : 19 Hal.	
74	No.74 Tahun 2011 11 Oktober 2011	Pengesahan Asean Multilateral Agreement On Air Services (persetujuan Multilateral Asean Tentang Jasa Angkutan Udara. (LN. No.99)	LL : 4 Hal.	
75	No.75 Tahun 2011 11 Oktober 2011	Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The Asean - China Centre Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China. (LN. No.100)	LL : 4 Hal.	
76	No.76 Tahun 2011 13 Oktober 2011	Perubahan Atas Perpres No.47 Th.2009 Ttg Pembentukan & Org. Kementerian Negara.	LL : 4 Hal.	Ketentuan Wkl Menteri dicabut dg Perpres No.60/2012
77	No.77 Tahun 2011 18 Oktober 2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.47 Th.2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara. (LN. No.101A)	LL : 5 Hal.	
78	No.78 Tahun 2011 29 Oktober 2011 31 Oktober 2011	Pengesahan Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions (konvensi Tentang Proteksi Dan Promosi Keanekaragaman Dispersi Budaya). (LN. No.102)	LL : 9 Hal.	
79	No.79 Tahun 2011 31 Oktober 2011	Kunjungan Kapan Wisata (yacht) Asing Ke Indonesia.	LL : 12 Hal.	Diubah dg Perpres No.180 Th.2014
80	No.80 Tahun 2011 10 Nopember 2011	Dana Perwalian. (LN. No.109)	LL : 15 Hal.	
81	No.81 Tahun 2011 15 Nopember 2011	Pengesahan Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan & Kerja Sama di Asia Tenggara) (LN No.110)	LL : 3 Hal.	
82	No.82 Tahun 2011 24 Nopember 2011	Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The International Rice Research Institute (persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional Atas Lembaga Penelitian Padi Internasional). (LN No.112)	LL : 3 Hal.	
83	No.83 Tahun 2011 24 Nopember 2011	Penugasan Kepada Pt. Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana & Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta Dan Jalur Lingkar Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi.	LL : 300 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
84	No.84 Tahun 2011 25 Nopember 2011	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.66 Th.2011 ttg Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat.	LL : 11 Hal.	
85	No.85 Tahun 2011 29 Nopember 2011	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.	LL : 43 Hal.	
86	No.86 Tahun 2011 5 Desember 2011	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Majelis Antar Parlemen Asean (AIPA) Mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat Aipa Di Jakarta (agreement Between The Government Of The Rep. Of Indonesia And The Asean Interparliamentary Assembly (aipa) On The Privileges & Im- munities Of The Aipa Secretariat In Jakarta).	LL : 101 Hal.	
87	No.87 Tahun 2011 2 Desember 2011	Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun.	LL : 122 Hal.	
88	No.88 Tahun 2011 2 Desember 2011	Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi	LL : 21 Hal.	
89	No.89 Tahun 2011 5 Desember 2011	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Majelis Antar Parlemen Asean (aipa) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat Aipa Di Jakarta (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Interparliamentary Assembly (aipa) On The Privileges And Immunities Of The Aipa Secretariat In Jakarta) (LN. No.129)	LL : 22 Hal.	
90	No.90 Tahun 2011 6 Desember 2011	Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.	LL : .. Hal.	
91	No.91 Tahun 2011 22 Desember 2011	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (LN. No.141)	LL : 6 Hal.	Ketentuan Wkl Menteri dicabut dg Perpres No.60/2012
92	No.92 Tahun 2011 22 Desember 2011	Perubahan Kedua Atas Perpres tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (LN. No.142)	LL : 43 Hal.	
93	No.93 Tahun 2011 27 Desember 2011	Kebun Raya (LN. No.143)	LL :12 Hal.	
94	No.94 Tahun 2011 27 Desember 2011	Badan Informasi Geospasial. (LN. No.144)	LL : 17 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
95	No.95 Tahun 2011 28 Desember 2011	Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Islam Pakistan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports). (LN. No.145)	LL : 3 Hal.	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2011 23 Januari 2011	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 Hal.	
2	No.2 Tahun 2011 23 Februari 2011	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 Hal.	
3	No.3 Tahun 2011 24 Februari 2011	Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andaolo, Pengadilan Agama Pasar Wajo, Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, Dan Pengadilan Agama Arso.	LL : 3 Hal.	
4	No.4 Tahun 2011 4 Maret 2011	Panitia Nasional Penyelenggaraan Asean Regional Forum Disaster Relief Exercice (arf Dinex) Tahun 2011.	LL : .. Hal.	
5	No.5 Tahun 2011 10 Maret 2011	Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Food and Agriculture Organization (FAO) dalam rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian.	LL : 1 Hal.	
6	No.6 Tahun 2011 10 Maret 2011	Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.	LL : 1 Hal.	
7	No.7 Tahun 2011 10 Maret 2011	Panitia Nasional Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2011.	LL : 4 Hal.	
8	No.8 Tahun 2011 22 Maret 2011	Pengabulan Ekstradisi An. Sdr. Popa Nicolae Warga Negara Rumania.	LL : 1 Hal.	
9	No.9 Tahun 2011 15 April 2011	Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011.	LL : 1 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
10	No.10 Tahun 2011 15 April 2011	Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat.	LL : 3 Hal.	
11	No.11 Tahun 2011 10 Mei 2011	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kab. Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Dan Kabupaten Maros.	LL : .. Hal.	
12	No.12 Tahun 2011 10 Mei 2011	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.	LL : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2011 10 Mei 2011	Pengabulan Ekstradisi Atas Nama Sdr. Horvath Eva Alias Szucs Eva Alias Szucs Alias Eva Horvath, Warga Negara Hungaria.	LL : .. Hal.	
14	No.14 Tahun 2011 10 Juni 2011	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden	LL : 2 Hal.	
15	No.15 Tahun 2011 14 Juni 2011	Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.	LL : 5 Hal.	
16	No.16 Tahun 2011 5 Juli 2011	Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah.	LL : .. Hal.	
17	No.17 Tahun 2011 7 Juli 2011	Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati.	LL : 3 Hal.	
18	No.18 Tahun 2011 11 Juli 2011	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.	LL : 6 Hal.	
19	No.19 Tahun 2011 11 Juli 2011	Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional).	LL : 3 Hal.	
20	No.20 Tahun 2011 12 Juli 2011	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No.20 Th.2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.	LL : 7 Hal.	
21	No.21 Tahun 2011 14 Juli 2011	Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	LL : 4 Hal.	
22	No.22 Tahun 2011 1 Agustus 2011	Badan Promosi Pariwisata Indonesia.	LL : 6 Hal.	
23	No.23 Tahun 2011 1 Agustus 2011	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Group On Money Laundering.	LL : .. Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
24	No.24 Tahun 2011 1 Agustus 2011	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group.	LL : .. Hal.	
25	No.25 Tahun 2011 8 Sept. 2011	Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation.	LL : .. Hal.	Diubah dg Keppres No.5 Th.2013
26	No.26 Tahun 2011 13 Sept. 2011	Penetapan Cekungan Air Tanah.	LL : 3 Hal.	
27	No.27 Tahun 2011 15 Sept. 2011	Perubahan Kedua atas Keppres No.3 Th.2010 ttg Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (SEA GAMES) XXVI Th.2011 & Asean Para GAMES VI Th.2011.	LL : 2 Hal.	
28	No.28 Tahun 2011 21 Sept. 2011	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional.	LL : 5 Hal.	
29	No.29 Tahun 2011 28 Oktober 2011	Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik.	LL : 2 Hal.	
30	No.30 Tahun 2011 28 Oktober 2011	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden	LL : 1 Hal.	
31	No.31 Tahun 2011 10 Nopember 2011	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden	LL : 1 Hal.	
32	No.32 Tahun 2011 29 Nopember 2011	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.	LL : 2 Hal.	
33	No.33 Tahun 2011 2 Desember 2011	Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.	LL : 2 Hal.	
34	No.34 Tahun 2011 2 Desember 2011	Pengakhiran Masa Tugas Tenaga Yang Ditempatkan Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bid. Pajak & Bea Cukai.	LL : .. Hal.	
35	No.35 Tahun 2011 27 Desember 2011	Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010-2014.	LL : 7 Hal.	
	<b>INPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2011 17 Januari 2011	Percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak.	LL : 2 Hal.	
2	No.2 Tahun 2011 17 Januari 2011	Percepatan Penanganan Kasus Bank Century.	LL : 2 Hal.	
3	No.3 Tahun 2011 31 Januari 2011	Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir.	LL :2 Hal.	
4	No.4 Tahun 2011 17 Februari 2011	Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.	LL :.. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5	No.5 Tahun 2011 2 Maret 2011	Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim.	LL : .. Hal.	
6	No.6 Tahun 2011 2 Maret 2011	Penanganan Warga Negara Indonesia Di Libya.	LL : 2 Hal.	
7	No.7 Tahun 2011 15 April 2011	Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.	LL : 3 Hal.	
8	No.8 Tahun 2011 2 Maret 2011	Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola Oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim.	LL : 3 Hal.	
9	No.9 Tahun 2011 12 Mei 2011	Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011	LL : 77 Hal.	
10	No.10 Tahun 2011 20 Mei 2011	Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.	LL : 7 Hal.	
11	No.11 Tahun 2011 6 Juni 2011	Pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN Economic Community-AEC) Tahun 2011.	LL : 37 Hal.	
12	No.12 Tahun 2011 27 Juni 2011	Pelaksanaan Kebijakan & Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015	LL : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2011 11 Agustus 2011	Penghematan Energi dan Air.	LL : 2 Hal.	
14	No.14 Tahun 2011 27 Sept. 2011	Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011.	LL : 5 Hal.	
15	No.15 Tahun 2011 22 Nopember 2011	Perlindungan Nelayan.	LL : 9 Hal.	
16	No.16 Tahun 2011 30 Nopember 2011	Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.	LL : 9 Hal.	
17	No.17 Tahun 2011 19 Desember 2011	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.	LL : 60 Hal.	
	<b>TAHUN 2012</b>			
	<b>PERPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2012 5 Januari 2012	Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No.2 Tahun 2012 5 Januari 2012	Komite Nasional Keselamatan Transportasi.	LL : 9 Hal.	
3	No.3 Tahun 2012 5 Januari 2012	Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. (LN No.10)	LL : 181 Hal.	
4	No.4 Tahun 2012 5 Januari 2012	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.	LL : 5 Hal.	
5	No.5 Tahun 2012 11 Januari 2012	Pengesahan Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Guadalajara, 2010) (LN No.20)	LL : 11 Hal.	
6	No.6 Tahun 2012 11 Januari 2012	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (LN No.21)	LL : 8 Hal.	
7	No.7 Tahun 2012 .. Januari 2012	Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan Dan Taman Hutan.	LL : .. Hal.	
8	No.8 Tahun 2012 17 Januari 2012	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (LN No.24)	LL : 8 Hal.	
9	No.9 Tahun 2012 20 Januari 2012	Penugasan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung Untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Tindak Pidana Terkait Kasus PT Bank Century, Tbk., yang Berada di Luar Negeri. (LN No.25)	LL : 5 Hal.	
10	No.10 Tahun 2012 25 Januari 2012	Perubahan atas Perpres No.54 Th.2009 ttg Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. (LN No.26)	LL : 6 Hal.	
11	No.11 Tahun 2012 2 Februari 2012	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports). (LN No.29)	LL : 3 Hal.	
12	No.12 Tahun 2012 3 Februari 2012	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.46 Th.2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme. (LN No.30)	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
13	No.13 Tahun 2012 6 Februari 2012	Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. (LN No.31)	LL : 146 Hal.	
14	No.14 Tahun 2012 7 Februari 2012	Hak Keuangan bagi Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, & Anggota Komite Inovasi Nasional. (LN No.43)	LL : 3 Hal.	
15	No.15 Tahun 2012 7 Februari 2012	Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. (LN No.41)	LL : 13 Hal.	
16	No.16 Tahun 2012 7 Februari 2012	Rencana Umum Penanaman Modal. (LN No.42)	LL : 6 Hal.	
17	No.17 Tahun 2012 14 Februari 2012	Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. (LN No.44)	LL : 19 Hal.	
18	No.18 Tahun 2012 23 Februari 2012	Pengesahan Agreement between the Gov. of the Rep. of Indonesia & the Government of the Independent State of Papua New Guinea for the Avoidance of Double Taxation & the Prevention of Fiscal evasion with respect to Taxes on Income (Persetujuan antara Pem.RI & Pem. Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak yg Berkenaan dg Pajak atas Penghasilan). (LN No.49)	LL : 4 Hal.	
19	No.19 Tahun 2012 24 Februari 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Kroasia ttg Penghindaran Pajak Berganda yg Berkenaan dg Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Gov. Of The Rep. Of Indonesia & The Gov. Of The Rep. Of Croatia For Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income). (LN No.50)	LL : 4 Hal.	
20	No.20 Tahun 2012 24 Februari 2012	Pengesahan Agreement On The Privillages & Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (persetujuan ttg Keistimewaan & Kekebalan Perhimp.Bangsa Asia tenggara) (LN No.51)	LL : 3 Hal.	
21	No.21 Tahun 2012 24 Februari 2012	Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai kemitraan & kerjasama menyeluruh Antara RI Di Satu Pihak, & Komunitas Eropa peserta Negara2 Anggotanya di pihak lainnya (framework agreement on comprehensive Partnership & Cooperation Between The Rep. of Ina of The One Part, & The European Community & The Member States of The Other Part). (LN No.52)	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 2012 2 Maret 2012	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.31 Th.2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional. (LN No.63)	LL : 4 Hal.	
23	No.23 Tahun 2012 2 Maret 2012	Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Keuntungan Pemindah Tanganan Harta). (LN No.64)	LL : 4 Hal.	
24	No.24 Tahun 2012 2 Maret 2012	Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Rep. of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention of Fiscal Evasion With Respect To Taxes on Income (persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Rep. Rakyat Cina Utk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokolnya. (LN No.65)	LL : 5 Hal.	
25	No.25 Tahun 2012 2 Maret 2012	Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi. (LN No.66)	LL : 9 Hal.	
26	No.26 Tahun 2012 5 Maret 2012	Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. (LN No.69)	LL : 121 Hal.	
27	No.27 Tahun 2012 5 Maret 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Suriname ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (agreement Between The Government of The Rep. of Indonesia And The Government of The Republic of Suriname For The Avoidance of Double Taxation & The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect Of Taxes On Income). (LN No.70)	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No.28 Tahun 2012 2 Maret 2012	Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali. (LN No.75)	LL : 5 Hal.	
29	No.29 Tahun 2012 20 Maret 2012	Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as Modified by the Protocol of 1978 Relating Thereto (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, & Lampiran VI dari Konvensi Internasional Th.1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Sebagaimana Diubah dengan Protokol Th.1978 yang Terkait Daripadanya) (LN No.78)	LL : 4 Hal.	
30	No.30 Tahun 2012 20 Maret 2012	Pengesahan International Convention Maritime Search & Rescue, 1979 with Annex and 1998 Amendments to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi International ttg Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 beserta Lampiran dan Perubahan Th.1998 terhadap Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69)) (LN No.79)	LL : 5 Hal.	
31	No.31 Tahun 2012 20 Maret 2012	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yg Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Morocco for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income). (LN No.80)	LL : 4 Hal.	
32	No.32 Tahun 2012 20 Maret 2012	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Argentina mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports) (LN No.81)	LL : 3 Hal.	
33	No.33 Tahun 2012 20 Maret 2012	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. (LN No.82)	LL : 10 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
34	No.34 Tahun 2012 20 Maret 2012	Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. (LN No.83)	LL : 5 Hal.	
35	No.35 Tahun 2012 20 Maret 2012	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window. (LN No.84)	LL : 11 Hal.	
36	No.36 Tahun 2012 5 April 2012	Penugasan Kepada Pt.Pelabuhan Indonesia II (persero) Utk Membangun & Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok. (LN No.90)	LL : 7 Hal.	
37	No.37 Tahun 2012 5 April 2012	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.14 Th.2007 Ttg Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. (LN No.91)	LL : 11 Hal.	
38	No.38 Tahun 2012 5 April 2012	Penyesuaian Gaji Pokok PNS Menurut PP No.11 Th.2011 Ke Dalam Gaji Pokok PNS Menurut PP No.15 Th.2012. (LN No.92)	LL : 12 Hal.	Dicabut dg Perpres No.44 Th.2013
39	No.39 Tahun 2012 12 April 2012	Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. (LN No.96)	LL : 5 Hal.	
40	No.40 Tahun 2012 12 April 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Rep. Slovenia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic ff Slovenia On Visa Exemption For Holders of Diplomatic And Service Passports). (LN No.97)	LL : 3 Hal.	
41	No.41 Tahun 2012 12 April 2012	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor. (LN No.98)	LL : 4 Hal.	
42	No.42 Tahun 2012 12 April 2012	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis. (LN No.99)	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
43	No.43 Tahun 2012 12 April 2012	Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah. (LN No...)	LL : 5 Hal.	
44	No.44 Tahun 2012 12 April 2012	Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah.  (LN No...)	LL : 5 Hal.	Dicabut dg PP No.65 Th.2013
45	No.45 Tahun 2012 13 April 2012 16 April 2012	Perubahan Atas Kepres No 86 Th.2002 Ttg Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan & Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. (LN No.103)	LL : 6 Hal.	
46	No.46 Tahun 2012 24 April 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Ttg Kerja Sama Teknik Militer (agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Military Technical Cooperation). (LN No...)	LL : .. Hal.	
47	No.47 Tahun 2012 24 April 2012	Tim Pengamat Indonesia Dalam International Monitoring Team Di Filipina Selatan. (LN No...)	LL : 6 Hal.	
48	No.48 Tahun 2012 24 April 2012 25 April 2012	Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. (LN No.110)	LL : 18 Hal.	
49	No.49 Tahun 2012 24 April 2012	Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (LN No.111)	LL : 16 Hal.	Diubah dg Perpres No.73-2013
50	No.50 Tahun 2012 25 April 2012	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh. (LN No.112)	LL : 6 Hal.	
51	No.51 Tahun 2012 25 April 2012	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (LN No.113)	LL : 5 Hal.	
52	No.52 Tahun 2012 2 Mei 2012	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa. (LN No.114)	LL : 4 Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
53	No.53 Tahun 2012 14 Mei 2012	Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan & Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.	LL : 21 Hal.	
54	No.54 Tahun 2012 14 Mei 2012 15 Mei 2012	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 (LN No.119)	LL : 7 Hal.	
55	No.55 Tahun 2012 23 Mei 2012	Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (LN No.122)	LL : 7 Hal.	
56	No.56 Tahun 2012 24 Mei 2012	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports) (LN No.123)	LL : 4 Hal.	
57	No.57 Tahun 2012 24 Mei 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus ttg Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/Service Passports) (LN No.124)	LL : 4 Hal.	
58	No.58 Tahun 2012 24 Mei 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of he Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports) (LN No.125)	LL : 4 Hal.	
59	No.59 Tahun 2012 30 Mei 2012	Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. (LN No.127)	LL : 23 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
60	No.60 Tahun 2012 7 Juni 2012	Wakil Menteri. (LN No.129)	LL : 7 Hal.	Diubah dg Perpres No.134 Th.2014
61	No.61 Tahun 2012 7 Juni 2012	Pengesahan Second Protocol To Amend The Goverment On Trade The Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Gov. Of The Member Countries Of The Assosiation Of Southeast Asian Nations & Rep. Of Korea (protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerang- ka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea). (LN No.130)	LL : 7 Hal.	
62	No.62 Tahun 2012 13 Juni 2012	Pengesahan Asean Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga). (LN No.134)	LL : 3 Hal.	
63	No.63 Tahun 2012 13 Juni 2012	Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of Thailand (persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kerajaan Thailand). (LN No.135)	LL : 7 Hal.	
64	No.64 Tahun 2012 14 Juni 2012	Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan. (LN No.137)	LL : 7 Hal.	
65	No.65 Tahun 2012 13 Juli 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia And The Gov. of The United Arab Emirates On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service And Special Passports) (LN No.142)	LL : 17 Hal.	
66	No.66 Tahun 2012 13 Juli 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Makedonia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Gov. of The Rep. of Ina & The Gov. of The Rep. of Macedonia On Exemption of Visa Require-ments For Holders Of Diplomatic And Service Passports) (LN No.143)	LL : 15 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
67	No.67 Tahun 2012 20 Juli 2012	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433h/2012m (LN No.147)	LL : 5 Hal.	Diubah dg Perpres No.81 Th.2012
68	No.68 Tahun 2012 27 Juli 2012 30 Juli 2012	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. (LN No.151)	LL : 6 Hal.	
69	No.69 Tahun 2012 27 Juli 2012 30 Juli 2012	Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. (LN No.152)	LL : 3 Hal.	
70	No.70 Tahun 2012 31 Juli 2012 1 Agustus 2012	Perubahan Kedua Atas Perpres No.54 Th.2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (LN No.155)	LL : 195 Hal.	
71	No.71 Tahun 2012 7 Agustus 2012 8 Agustus 2012	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (LN No.156)	LL : 68 Hal.	Diubah dg Perpres No.40 Th.2014 & No.99 Th.2014
72	No.72 Tahun 2012 13 Agustus 2012 17 Agustus 2012	Sistem Kesehatan Nasional. (LN No.193)	LL : 7 Hal.	
73	No.73 Tahun 2012 16 Agustus 2012 27 Agustus 2012	Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. (LN No.166)	LL : 14 Hal.	
74	No.74 Tahun 2012 16 Agustus 2012 24 Agustus 2012	Pertanggung Jawaban Kerugian Nuklir (LN No.165)	LL : 9 Hal.	
75	No.75 Tahun 2012 3 September 2012	Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (persetujuan Kakao Internasional 2010). (LN No.172)	LL : 36 Hal.	
76	No.76 Tahun 2012 5 September 2012	Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Antiviral dan Antiretoviral. (LN No.173)	LL : 4 Hal.	
77	No.77 Tahun 2012 21 September 2012	Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between The ASEAN Sub-Region (Protokol 3 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Subkawasan ASEAN) Dan Protocol 4 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between The ASEAN Sub-Region (Protokol 4 Tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antar Subkawasan ASEAN). (LN No.177)	LL : 33 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
78	No.78 Tahun 2012 22 Sept. 2012	Penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Kuasa Hukum utk melakukan Penanganan gugatan Arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes terkait Gugatan Churchill Mining kepada Pemerintah RI. (LN No.179)	LL : 5 Hal.	
79	No.79 Tahun 2012 22 Sept. 2012 26 Sept. 2012	Penghasilan Dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman RI Di Daerah. (LN No.180)	LL : 3 Hal.	
80	No.80 Tahun 2012 26 Sept. 2012	Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, & Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (LN No.181)	LL : 10 Hal.	
81	No.81 Tahun 2012 12 Oktober 2012 15 Oktober 2012	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.67 Th.2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M. (LN No.185)	LL : 4 Hal.	
82	No.82 Tahun 2012 16 Oktober 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia & The Government Of The Kyrgyz Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports). (LN No.192)	LL : .. Hal.	
83	No.83 Tahun 2012 17 Oktober 2012	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (LN No.194)	LL : 6 Hal.	
84	No.84 Tahun 2012 18 Oktober 2012	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat. (LN No.198)	LL : .. Hal.	
85	No.85 Tahun 2012 25 Oktober 2012 29 Oktober 2012	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.10 Th.2006 Ttg Badan Pertanahan Nasional. (LN No.209)	LL : 3 Hal.	
86	No.86 Tahun 2012 25 Oktober 2012 29 Oktober 2012	Perubahan Atas Perpres No.90 Th.2007 ttg Badan Koordinasi Penanaman Modal. (LN No.210)	LL : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
87	No.87 Tahun 2012 29 Oktober 2012 30 Oktober 2012	TunjanganJabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (LN No.211)	LL : 6 Hal.	
88	No.88 Tahun 2012 30 Oktober 2012 31 Oktober 2012	Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional. (LN No.218)	LL : 10 Hal.	
89	No.89 Tahun 2012 30 Oktober 2012 31 Oktober 2012	Pengesahan Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board (Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan DanaMoneter Internasional mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif). (LN No.219)	LL : 4 Hal.	
90	No.90 Tahun 2012 30 Oktober 2012 31 Oktober 2012	Badan Intelijen Negara. (LN No.220)	LL : 23 Hal.	
91	No.91 Tahun 2012 30 Oktober 2012 31 Oktober 2012	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hungary on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports) (LN No.221)	LL : 4 Hal.	
92	No.92 Tahun 2012 30 Oktober 2012 31 Oktober 2012	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Kazakhstan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports) (LN No.222)	LL : 4 Hal.	
93	No.93 Tahun 2012 30 Oktober 2012 31 Oktober 2012	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports). (LN No.223)	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
94	No.94 Tahun 2012 30 Oktober 2012 31 Oktober 2012	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports) (LN No.224)	LL : 4 Hal.	
95	No.95 Tahun 2012 13 Nopember 2012	Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. (LN No.226)	LL : 4 Hal.	
96	No.96 Tahun 2012 14 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi Asean Utk Bantuan Kemanusiaan Bagi Penanggulangan Bencana). (LN No.234)	LL : 20 Hal.	
97	No.97 Tahun 2012 14 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (LN No.235)	LL : 4 Hal.	
98	No.98 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan) (LN No.236)	LL : 32 Hal.	
99	No.99 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengenai Ketuanrumahan & Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Sekretariat ASEAN (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ASEAN Secretariat) (LN No.237)	LL : 4 Hal.	
100	No.100 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti. (LN No.238)	LL : 7 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
101	No.101 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian. (LN No.239)	LL : 8 Hal.	
102	No.102 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. (LN No.240)	LL : 8 Hal.	
103	No.103 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. (LN No.241)	LL : 8 Hal.	
104	No.104 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (LN No.242)	LL : 8 Hal.	
105	No.105 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. (LN No.243)	LL : 8 Hal.	
106	No.106 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (LN No.244)	LL : 8 Hal.	
107	No.107 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (LN No.245)	LL : 8 Hal.	
108	No.108 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (LN No.246)	LL : 8 Hal.	
109	No.109 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. (LN No.247)	LL : 8 Hal.	
110	No.110 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik. (LN No.248)	LL : 8 Hal.	
111	No.111 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional. (LN No.249)	LL : 8 Hal.	
112	No.112 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. (LN No.250)	LL : 8 Hal.	
113	No.113 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional. (LN No.251)	LL : 8 Hal.	
114	No.114 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. (LN No.252)	LL : 8 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
115	No.115 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (LN No.253)	LL : 8 Hal.	
116	No.116 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara. (LN No.254)	LL : 8 Hal.	
117	No.117 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (LN No.255)	LL : 8 Hal.	
118	No.118 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. (LN No.256)	LL : 8 Hal.	
119	No.119 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (LN No.257)	LL : 8 Hal.	
120	No.120 Tahun 2012 17 Nopember 2012 19 Nopember 2012	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (LN No.258)	LL : 8 Hal.	
121	No.121 Tahun 2012 5 Desember 2012 6 Desember 2012	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (LN No.266)	LL :14 Hal.	
122	No.122 Tahun 2012 6 Desember 2012	Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. (LN No.267)	LL : 8 Hal.	
123	No.123 Tahun 2012 10 Desember 2012	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. (LN No.269)	LL : 8 Hal.	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2012 5 Januari 2012	Keanggotaan Pemerintah Indonesia pada Development Centre Organization for Economic Cooperation and Development/DC- DECD)	LL : .. Hal.	
2	No.2 Tahun 2012 5 Januari 2012	Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko.	LL : 5 Hal.	
3	No.3 Tahun 2012 10 Januari 2012	Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.	LL : 5 Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No. 4 Tahun 2012 24 Januari 2012	Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Morotai 2012.	LL :13 Hal.	
5	No. 5 Tahun 2012 2 Februari 2012	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Cirebon, serta Kota Bandar Lampung, dan Kota Tanjung Balai.	LL : 2 Hal.	
6	No. 6 Tahun 2012 9 Februari 2012	Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Menteri Ke-4 Tentang Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Di Negara-Negara OKI Tahun 2012.	LL :8 Hal.	
7	No. 7 Tahun 2012 24 Februari 2012	Perubahan Atas Keppres No.33 Th.2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.	LL : 3 Hal.	
8	No. 8 Tahun 2012 24 Februari 2012	Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati.	LL : 6 Hal.	
9	No. 9 Tahun 2012 5 Maret 2012	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Consumers International (konsumen Internasional).	LL : 3 Hal.	
10	No.10 Tahun 2012 15 Maret 2012	Pembentukan Tim Penilai Kesehatan Calon Menteri Dan Wakil Menteri Untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014.	LL : 4 Hal.	
11	No.11 Tahun 2012 21 Maret 2012	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
12	No.12 Tahun 2012 18 April 2012	Penetapan Wilayah Sungai.	LL : 2 Hal.	
13	No.13 Tahun 2012 24 April 2012	Hari Konsumen Nasional.	LL : 2 Hal.	
14	No.14 Tahun 2012 26 April 2012	Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Network Of Asia Pasific Schools And Institutes Of Public Administration Governance	LL : 3 Hal.	
15	No.15 Tahun 2012 14 Mei 2012	Panitia Nasional Penyelenggara ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013.	LL : 8 Hal.	
16	No.16 Tahun 2012 18 Mei 2012	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
17	No.17 Tahun 2012 30 Mei 2012	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
18	No.18 Tahun 2012 13 Juni 2012	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada European Telecommunication Standards Institute.	LL : .. Hal.	
19	No.19 Tahun 2012 14 Juni 2012	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
20	No.20 Tahun 2012 29 Juni 2012	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	LL : 2 Hal.	
21	No.21 Tahun 2012		LL : .. Hal.	
22	No.22 Tahun 2012 31 Juli 2012	Pembentukan Panitia Nasional penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2012.	LL : 15 Hal.	
23	No.23 Tahun 2012 13 Agustus 2012	Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional The Association Of Southeast Asian Nation (asean) - Indonesia.	LL : .. Hal.	
24	No.24 Tahun 2012 13 Agustus 2012	Pengabulan Remisi Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Selama 20 (Dua Puluah) Tahun Atas Nama Sdr. Tengku Ismuhadi Jafar, Dkk Sebanyak 3 (tiga) Orang.	LL : .. Hal.	
25	No.25 Tahun 2012 3 September 2012	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The Association Of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institutions.	LL : .. Hal.	
26	No.26 Tahun 2012 4 September 2012	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	LL : 2 Hal.	
27	No.27 Tahun 2012 17 September 2012	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kab. Mappi, Kab. Bantaeng, Kab. Muara Enim, Kab. Probolinggo, Kota Lubuk Linggau dan Kota Tasikmalaya.	LL : 3 Hal.	
28	No.28 Tahun 2012 4 September 2012	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden	LL :2 Hal.	
29	No.29 Tahun 2012 21 September 2012	Komite Nasional untuk merumuskan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Post-2015 Development Agenda)	LL : 8 Hal.	
30	No.30 Tahun 2012 22 September 2012	Penunjukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk Menjadi Pihak dalam Proses Arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes terkait Gugatan <i>Churchill Mining</i> .	LL : 5 Hal.	
31	No.31 Tahun 2012 22 September 2012	Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya pada Yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes.	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
32	No.32 Tahun 2012 16 Oktober 2012	Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional.	LL : .. Hal.	
33	No.33 Tahun 2012 29 Oktober 2012	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
34	No.34 Tahun 2012 13 Nopember 2012	Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Economic Research Institute For Asean and East Asia.	LL : 3 Hal.	
35	No.35 Tahun 2012 13 Nopember 2012		LL : 3 Hal.	
36	No.36 Tahun 2012 14 Nopember 2012	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
37	No.37 Tahun 2012 30 Nopember 2012	Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Pusat.	LL : 7 Hal.	
38	No.38 Tahun 2012 30 Nopember 2012	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pd Kab. Sragen, Kab. Boyolali, Kab. Grobogan, Kota Probolinggo, & Kota Tangerang Selatan.	LL : 3 Hal.	
39	No.39 Tahun 2012 17 Desember 2012	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
40	No.40 Tahun 2012 27 Desember 2012	Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara	LL : 4 Hal.	
41	No.41 Tahun 2012 27 Desember 2012	Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten.	LL : 4 Hal.	
	<b>INPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2012 10 Januari 2012	Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.	LL : 4 Hal.	
2	No.2 Tahun 2012 10 Januari 2012	Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.	LL : 9 Hal.	
3	No.3 Tahun 2012 27 Februari 2012	Kebijakan Pengadaan Gabah/beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.	LL : 5 Hal.	
4	No.4 Tahun 2012 5 April 2012	Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.	LL : 7 Hal.	
5	No.5 Tahun 2012 11 April 2012	percepatan penyelesaian rehabilitasi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.	LL : 7 Hal.	
6	No.6 Tahun 2012 8 Mei 2012	Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
7	No.7 Tahun 2012 31 Juli 2012	Langkah2 Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dlm Rangka Pelaks. APBN TA.2012.	LL : 4 Hal.	
<b>TAHUN 2013</b>				
<b>PERPRES</b>				
1	No.1 Tahun 2013 2 Januari 2013	Pengesahan Perjanjian antara RI & Republik Portugal tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on Short- Term Stay Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports). (LN No.9)	LL : 8 Hal.	
2	No.2 Tahun 2013 4 Januari 2013		LL : .. Hal.	
3	No.3 Tahun 2013 4 Januari 2013	Perubahan Ketujuh Atas Keppres No.103 Th.2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (LN No.10)	LL : 11 Hal.	
4	No.4 Tahun 2013 4 Januari 2013	Perubahan Kedelapan Atas Keppres No.110 Th.2001 ttg Unit Organisasi & Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (LN No.11)	LL : 12 Hal.	
5	No.5 Tahun 2013 10 Januari 2013 11 Januari 2013	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. (LN No.13)	LL : 9 Hal.	
6	No.6 Tahun 2013 10 Januari 2013 11 Januari 2013	Pengesahan The International Institute for Democracy and Electoral Assistance Statutes (Statuta Institut Internasional untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilihan Umum) (LN No.14)	LL : 17 Hal.	
7	No.7 Tahun 2013 10 Januari 2013	Pengesahan ASEAN Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN) (LN No.15)	LL : 10 Hal.	
8	No.8 Tahun 2013 10 Januari 2013	Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Ceko ttg Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Gov. of the Rep. of Indonesia and the Gov. of the Czech Rep. on Cooperation Activities in the Field of Defence) (LN No.16)	LL : 19 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
9	No.9 Tahun 2013 10 Januari 2013 14 Januari 2013	Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LN No.24)	LL : 9 Hal.	
10	No.10 Tahun 2013 16 Januari 2013	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013 (LN No.25)	LL : 33 Hal.	
11	No.11 Tahun 2013 17 Januari 2013 18 Januari 2013	Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (LN No.26)	LL : 4 Hal.	
12	No.12 Tahun 2013 18 Januari 2013 23 Januari 2013	Jaminan Kesehatan. (LN No.29)	LL : 39 Hal.	Diubah dg Perpres No.111 Th.2013
13	No.13 Tahun 2013 18 Januari 2013 22 Januari 2013	Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja-sama Teknik Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Argentina. (LN No.27)	LL : 6 Hal.	
14	No.14 Tahun 2013 21 Januari 2013 22 Januari 2013	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.31 Th.2010 ttg Komite Ekonomi Nasional. (LN No.28)	LL : 3 Hal.	Dicabut dg Perpres No.163 Th.2014
15	No.15 Tahun 2013 1 Maret 2013	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi). (LN No.37)	LL : 4 Hal.	
16	No.16 Tahun 2013 1 Maret 2013 6 Maret 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan. (LN No.42)	LL : 16 Hal.	
17	No.17 Tahun 2013 1 Maret 2013 6 Maret 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. (LN No.43)	LL : 8 Hal.	
18	No.18 Tahun 2013 1 Maret 2013 6 Maret 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. (LN No.44)	LL : 8 Hal.	
19	No.19 Tahun 2013 1 Maret 2013 6 Maret 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. (LN No.45)	LL : 8 Hal.	Dicabut dg Perpres No.171 Th.2014

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
20	No.20 Tahun 2013 1 Maret 2013 6 Maret 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang. (LN No.46)	LL : 7 Hal.	
21	No.21 Tahun 2013 1 Maret 2013 6 Maret 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan. (LN No.47)	LL : 6 Hal.	
22	No.22 Tahun 2013 1 Maret 2013 6 Maret 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. (LN No.48)	LL : 7 Hal.	
23	No.23 Tahun 2013 1 Maret 2013 6 Maret 2013	Pengesahan Agreement Between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea on Forest Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah Negara- Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea Mengenai Kerja Sama di Bidang Kehutanan). (LN No.49)	LL : 4 Hal.	
24	No.24 Tahun 2013 18 Maret 2013	Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan & Keamanan RI & Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik & Industri Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Department of Defence and Security of the Rep. of Indonesia and the Ministry of Defence of the Italian Rep. concerning Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistics and Industry) (LN No.52)	LL : 34 Hal.	
25	No.25 Tahun 2013 19 Maret 2013 20 Maret 2013	Perubahan Kedua Atas Perpres No.66 Th.2011 ttg Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (LN No.48)	LL : 6 Hal.	
26	No.26 Tahun 2013 20 Maret 2013 21 Maret 2013	Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Dewan Riset Nasional. (LN No.54)	LL : 3 Hal.	
27	No.27 Tahun 2013 11 April 2013	Pengembangan Inkubator Wirausaha. (LN No.66)	LL : 10 Hal.	
28	No.28 Tahun 2013 11 April 2013	Perubahan Atas Perpres No.16/2007 Tentang Gaji & Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi Ketua & Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. (LN No.67)	LL : 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
29	No.29 Tahun 2013 18 April 2013	Pengesahan Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of South-east Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self Certification System (Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa2 Asia Tenggara (ASEAN) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan) (LN No.69)	LL : 4 Hal.	
30	No.30 Tahun 2013 1 Mei 2013	Pengesahan Protocol to Implement the Second Package of Specific Commitments under the Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik di bawah Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara2 Anggota Asosiasi Bangsa2 Asia Tenggara dan Republik Rakyat China). (LN No.70)	LL : 4 Hal.	
31	No.31 Tahun 2013 8 Mei 2013	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M. (LN No.74)	LL : 6 Hal.	Dicabut dg Perpres No.49 Th.2014
32	No.32 Tahun 2013 8 Mei 2013	Penugasan Kepada Perusahaan Umum BULOG Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai. (LN No.81)	LL : 4 Hal.	
33	No.33 Tahun 2013 8 Mei 2013	Perubahan Kelima atas Perpres No.14 Th.2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. (LN No.82)	LL : 24 Hal.	
34	No.34 Tahun 2013 10 Mei 2013 15 Mei 2013	Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (LN No.86)	LL : 4 Hal.	
35	No.35 Tahun 2013 10 Mei 2013 15 Mei 2013	Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (LN No.87)	LL : 4 Hal.	
36	No.36 Tahun 2013 13 Mei 2013 15 Mei 2013	Pendirian Universitas Sulawesi Barat. (LN No.88)	LL :5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
37	No.37 Tahun 2013 10 Mei 2013 15 Mei 2013	Pendirian Universitas Samudra. (LN No.89)	LL : 5 Hal.	
38	No.38 Tahun 2013 15 Mei 2013	Perubahan Ketiga atas Perpres No.24/2010 ttg Kedudukan, Tugas & Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (LN No.90)	LL : 5 Hal.	
39	No.39 Tahun 2013 17 Mei 2013	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. (LN No.91)	LL : 5 Hal.	
40	No.40 Tahun 2013 17 Mei 2013	Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (LN No.92)	LL : 10 Hal.	
41	No.41 Tahun 2013 24 Mei 2013 27 Mei 2013	Tunjangan Jabatan bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. (LN No.99)	LL : 5 Hal.	
42	No.42 Tahun 2013 24 Mei 2013 29 Mei 2013	Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. (LN No.100)	LL : 16 Hal.	
43	No.43 Tahun 2013 13 Juni 2013	Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (LN No.104)	LL : 4 Hal.	
44	No.44 Tahun 2013 13 Juni 2013	Penyesuaian gaji pokok PNS menurut PP No.15 Th.2012 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP No.22 Th.2013 (LN No.105)	LL : 7 Hal.	
45	No.45 Tahun 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013	Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia. (LN No.110)	LL :12 Hal.	
46	No.46 Tahun 2013 10 Juli 2013 17 Juli 2013	Badan Tenaga Nuklir Nasional. (LN No.113)	LL : 22 Hal.	
47	No.47 Tahun 2013 22 Juli 2013	Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa). (LN No.114)	LL :3 Hal.	



---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
48	No.48 Tahun 2013 22 Juli 2013	Budi Daya Hewan Peliharaan. (LN No.115)	LL :3 Hal.	
49	No.49 Tahun 2013 30 Juli 2013	Pengesahan Agreement For The Establishment Of The International Anti- corruption Academy As An International Organization (persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional Sebagai Organisasi Internasional). (LN No.119)	LL : 9 Hal.	
50	No.50 Tahun 2013 30 Juli 2013	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. (LN No.120)	LL : 5 Hal.	
51	No.51 Tahun 2013 30 Juli 2013	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu. (LN No.121)	LL : 5 Hal.	
52	No.52 Tahun 2013 30 Juli 2013	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. (LN No.122)	LL : 5 Hal.	
53	No.53 Tahun 2013 30 Juli 2013	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak. (LN No.123)	LL : 5 Hal.	
54	No.54 Tahun 2013 30 Juli 2013	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate. (LN No.124)	LL : 5 Hal.	
55	No.55 Tahun 2013 30 Juli 2013	Perubahan Keempat Atas Perpres No.47 Th.2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara. (LN No.125)	LL : 25 Hal.	Dicabut dg Perpres No.7 Th.2015
56	No.56 Tahun 2013 30 Juli 2013	Perubahan Ke 4 Atas Perpres No.24 Th.2010 ttg Kedudukan, Tugas & Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (LN No.126)	LL : 7 Hal.	
57	No.57 Tahun 2013 30 Juli 2013	Lembaga Administrasi Negara. (LN No.127)	LL : 19 Hal.	
58	No.58 Tahun 2013 30 Juli 2013	Badan Kepegawaian Negara. (LN No.128)	LL : .. Hal.	
59	No.59 Tahun 2013 30 Juli 2013	Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan. (LN No.129)	LL : 11 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
60	No.60 Tahun 2013 28 Agustus 2013 29 Agustus 2013	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (LN No.146)	LL : 19 Hal.	
61	No.61 Tahun 2013 28 Agustus 2013 2 Sept. 2013	Pengesahan Convention On The Conservation And Management Of Highly Migratory Fish Stocks In The Western And Central Pacific Ocean (konvensi Tentang Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh Di Samudera Pasifik Barat Dan Tengah). (LN No.148)	LL : 6 Hal.	
62	No.62 Tahun 2013 31 Agustus 2013 2 Sept. 2013	Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut. (LN No.149)	LL : 16 Hal.	Dicabut dg Perpres No.16 Th.2015
63	No.63 Tahun 2013 30 Sept. 2013 2 Oktober 2013	Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (LN No.155)	LL : 24 Hal.	Dicabut dg Perpres No.20 Th.2015
64	No.64 Tahun 2013 1 Oktober 2013 2 Oktober 2013	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (LN No.159)	LL : 5 Hal.	
65	No.65 Tahun 2013 1 Oktober 2013 2 Oktober 2013	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (LN No.160)	LL : 6 Hal.	
66	No.66 Tahun 2013 1 Oktober 2013 2 Oktober 2013	Perubahan Ketiga Atas Perpres No.67 Th.2005 ttg Kerjasama Pemerintah dg Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. (LN No.161)	LL : 4 Hal.	
67	No.67 Tahun 2013 4 Nop. 2013 6 Nop. 2013	Koordinasi Intelejen Negara. (LN No.171)	LL : 9 Hal.	
68	No.68 Tahun 2013 11 Nop. 2013 12 Nop. 2013	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI & Pemerintah Negara Kuwait (trade Agreement Between The Gov. Of The Rep.of Ina & The Gov.of The State Of Kuwait). (LN No.175)	LL : 3 Hal.	
69	No.69 Tahun 2013 11 Nop. 2013 12 Nop. 2013	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Islam Afganistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspos Dinas. (LN No.176)	LL : 4 Hal.	
70	No.70 Tahun 2013 11 Nop. 2013 12 Nop. 2013	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS yg Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyeleng. Urusan Pemerintahan Di Daerah. (LN No.177)	LL : 5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
71	No.71 Tahun 2013 12 Nop. 2013 13 Nop. 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan. (LN No.178)	LL : 5 Hal.	
72	No.72 Tahun 2013 12 Nop. 2013 13 Nop. 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Penilik. (LN No.179)	LL : 6 Hal.	
73	No.73 Tahun 2013 15 Nop. 2013 18 Nop. 2013	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.49 Th.2012 ttg Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (LN No.183)	LL : 3 Hal.	
74	No.74 Tahun 2013 6 Des. 2013	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. (LN No.190)	LL : 7 Hal.	
75	No.75 Tahun 2013 6 Des. 2013	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.	LL : .. Hal.	
76	No.76 Tahun 2013 6 Des. 2013	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (LN No.191)	LL : 14 Hal.	
77	No.77 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri. (LN No.196)	LL : 8 Hal.	
78	No.78 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral. (LN No.197)	LL : 8 Hal.	
79	No.79 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kehutanan. (LN No.198)	LL : 8 Hal.	
80	No.80 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (LN No.199)	LL : 8 Hal.	
81	No.81 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. (LN No.200)	LL : 8 Hal.	
82	No.82 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika. (LN No.201)	LL : 8 Hal.	
83	No.83 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lingkungan Hidup. (LN No.202)	LL : 8 Hal.	
84	No.84 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. (LN No.203)	LL : 8 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
85	No.85 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif. (LN No.204)	LL : 8 Hal.	
86	No.86 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (LN No.205)	LL : 8 Hal.	
87	No.87 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (LN No.206)	LL : 8 Hal.	
88	No.88 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (LN No.207)	LL : 8 Hal.	
89	No.89 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan. (LN No.208)	LL : 8 Hal.	
90	No.90 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (LN No.209)	LL : 8 Hal.	
91	No.91 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial. (LN No.210)	LL : 8 Hal.	
92	No.92 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. (LN No.211)	LL : 8 Hal.	
93	No.93 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional. (LN No.212)	LL : 8 Hal.	
94	No.94 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelegen Negara. (LN No.213)	LL : 8 Hal.	
95	No.95 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut. (LN No.214)	LL : 8 Hal.	
96	No.96 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika.  (LN No.215)	LL : 8 Hal.	
97	No.97 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (LN No.216)	LL : 8 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
98	No.98 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (LN No.217)	LL : 8 Hal.	
99	No.99 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan SAR Nasional. (LN No.218)	LL : 8 Hal.	
100	No.100 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standarisasi Nasional. (LN No.219)	LL : 8 Hal.	
101	No.101 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (LN No.220)	LL : 8 Hal.	
102	No.102 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional. (LN No.221)	LL : 8 Hal.	
103	No.103 Tahun 2013 11 Des. 2013	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. (LN No.222)	LL : 8 Hal.	
104	No.104 Tahun 2013 11 Des. 2013	Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation (persetujuan Pembentukan Pusat Kerjasama sub Regional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand). (LN No...)	LL : .. Hal.	
105	No.105 Tahun 2013 16 Des. 2013	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu. (LN No.227)	LL : 4 Hal.	Dicabut dg Perpres No.16 Th.2014
106	No.106 Tahun 2013 16 Des. 2013	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Hakim Agung Mahkamah Agung. (LN No.228)	LL : 5 Hal.	Dicabut dg Perpres No.17 Th.2014
107	No.107 Tahun 2013 27 Des. 2013	Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (LN No.251)	LL : 24 Hal.	
108	No.108 Tahun 2013 27 Des. 2013	Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. (LN No.252)	LL : 11 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
109	No.109 Tahun 2013 27 Des. 2013	Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. (LN No.253)	LL : 12 Hal.	
110	No.110 Tahun 2013 27 Des. 2013	Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (LN No.254)	LL : 10 Hal.	
111	No.111 Tahun 2013 27 Des. 2013	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.12 Th.2013 Tentang Jaminan Kesehatan. (LN No.255)	LL : 34 Hal.	
112	No.112 Tahun 2013 27 Des. 2013	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.26 Th.2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. (LN No.257)	LL :7 Hal.	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2013 7 Januari 2013	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Institute For Applied System Analysis.	LL : 3 Hal.	
2	No.2 Tahun 2013 10 Januari 2013	Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Institute for Democracy and Electoral Assistance.	LL : 3 Hal.	
3	No.3 Tahun 2013 18 Januari 2013	Pembentukan badan penyelesaian sengketa Konsumen pd Kab. Sinjai, Kab. Takalar, Kab. Kepulauan Selayar, Dan Kab. Barito Utara.	LL : 4 Hal.	
4	No.4 Tahun 2013 18 Januari 2013	Pengabulan Permohonan Ekstradisi Republik Ceko Atas Nama Jomas Joman, Warga Negara Ceko, Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Wilayah Yurisdiksi Negara Republik Ceko.	LL : .. Hal.	
5	No.5 Tahun 2013 22 Januari 2013	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.25 Th.2011 Ttg Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation (redd+)	LL : 3 Hal.	
6	No.6 Tahun 2013 23 Januari 2013	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.28 Th.2005 Tentang Pembentukan Tim Nasional Unk Perundingan Perdagangan International.	LL : 3 Hal.	
7	No.7 Tahun 2013 29 Januari 2013	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
8	No.8 Tahun 2013 29 Januari 2013	Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013.	LL : 13 Hal.	
9	No.9 Tahun 2013 1 Maret 2013	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
10	No.10 Tahun 2013 9 Maret 2013	Hari Musik Nasional.	LL : 2 Hal.	
11	No.11 Tahun 2013 18 Maret 2013	Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Keemat Panel Tingkat Tinggi Para Tokoh Terkemuka Untuk Perumusan Visi & Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Meillenium Th.2015 (past 2015 Development Agenda).	LL : .. Hal.	
12	No.12 Tahun 2013 8 April 2013	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Salatiga.	LL : 3 Hal.	
13	No.13 Tahun 2013 19 April 2013	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
14	No.14 Tahun 2013 30 April 2013	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada World Conference On Constitutional Justice.	LL : .. Hal.	
15	No.15 Tahun 2013 8 Mei 2013	Pembentukan Panitia Nasional Penyeleng- garaan Konferensi Tingkat Menteri Negara- Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) IX Th.2013.	LL : 10 Hal.	
16	No.16 Tahun 2013 13 Mei 2013	Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquefied Natural Gas Tangguh.	LL : 4 Hal.	
17	No.17 Tahun 2013 24 Mei 2013	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : .. Hal.	
18	No.18 Tahun 2013 11 Juli 2013	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.	LL : .. Hal.	
19	No.19 Tahun 2013 11 Juli 2013	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.	LL : .. Hal.	
20	No.20 Tahun 2013 11 Juli 2013	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.	LL : .. Hal.	
21	No.21 Tahun 2013 12 Juli 2013	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No.84 Th.2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.	LL : .. Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 2013 11 Juli 2013	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sumedang, Kab. Kuningan, Kab. Wonosobo, Kab. Ngawi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Sarolangun, Kab. Donggala, Kab. Belitung Timur, Kab. Pontianak, Kab. Ogan Ilir, Kota Palu, Dan Kota Kotamobagu.	LL : .. Hal.	
23	No.23 Tahun 2013 29 Juli 2013	Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 15 Th.2012 Ttg Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games Iii Tahun 2013	LL : .. Hal.	
24	No.24 Tahun 2013 29 Juli 2013	Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur.	LL : .. Hal.	
17	No.17 Tahun 2013 30 Agustus 2013	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
18	No.18 Tahun 2013 11 Juli 2013	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.	LL : 5 Hal.	
19	No.18 Tahun 2013 11 Juli 2013	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.	LL : 4 Hal.	
20	No.20 Tahun 2013 11 Juli 2013	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.	LL : 5 Hal.	
21	No.21 Tahun 2013 12 Juli 2013	Perubahan Ketiga Atas Keppres No.84 Th.2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.	LL : 4 Hal.	
22	No.22 Tahun 2013 12 Juli 2013	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pd Kab.Sumedang, Kab.Kuningan, Kab. Wonosobo, Kab. Ngawi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Sarolangun, Kab. Donggala, Kab.Belitung Timur, Kab. Pontianak, Kab.Ogan Ilir, Kota Palu, dan Kota Kotamobagu.	LL : 3 Hal.	
23	No.23 Tahun 2013 29 Juli 2013	Perubahan atas Keputusan Presiden No.15 Th.2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Th.2013.	LL : 6 Hal.	
24	No.24 Tahun 2013 29 Juli 2013	Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur.	LL : 3 Hal.	
25	No.25 Tahun 2013 30 Agustus 2013	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
26	No.26 Tahun 2013 5 Oktober 2013	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
27	No.27 Tahun 2013 12 Nopember 2013	Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran RI.	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No.28 Tahun 2013 25 Nopember 2013	Hari Tata Ruang Nasional.	LL : 4 Hal.	
29	No.29 Tahun 2013 27 Nopember 2013	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA.2014.	LL : 7 Hal.	
30	No.30 Tahun 2013 27 Nopember 2013		LL : 7 Hal.	
31	No.31 Tahun 2013 6 Desember 2013	Tim Koordinasi Percepatan Pembangun Rumah Susun.	LL : 12 Hal.	
32	No.32 Tahun 2013 10 Desember 2013	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 1 Hal.	
<b>INPRES</b>				
1	No.1 Tahun 2013 25 Januari 2013	Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.	LL :103 Hal.	Dicabut dg Inpres No.2 Th.2014
2	No.2 Tahun 2013 28 Januari 2013	Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.	LL : 5 Hal.	
3	No.3 Tahun 2013 13 Februari 2013	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.	LL : 5 Hal.	
4	No.4 Tahun 2013 11 April 2013	Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.	LL : 7 Hal.	
5	No.5 Tahun 2013 8 Mei 2013	Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak.	LL : 6 Hal.	
6	No.6 Tahun 2013 13 Mei 2013	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.	LL : 5 Hal.	
7	No.7 Tahun 2013 17 Mei 2013	Langkah2 Penghematan dan Pengendalian BelanjaKementerian Negara/ Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA.2013	LL : 4 Hal.	
8	No.8 Tahun 2013 18 September 2013	Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi & Kabupaten/Kota.	LL : 5 Hal.	
9	No.9 Tahun 2013 27 September 2013	Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.	LL : 5 Hal.	
<b>TAHUN 2014</b>				
<b>PERPRES</b>				
1	No.1 Tahun 2014 2 Januari 2014 22 Januari 2014	Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional. (LN No.11)	LL : 22 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No.2 Tahun 2014 22 Januari 2014 27 Januari 2014	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA.2014. (LN No.13)	LL : 27 Hal.	
3	No.3 Tahun 2014 22 Januari 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan RI Dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Rep. Of Indonesia & The Government Of The Rep. Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official / Service Passports) (LN No.14)	LL : 3 Hal.	
4	No.4 Tahun 2014 22 Januari 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Rep. Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service (LN No.15)	LL : 3 Hal.	
5	No.5 Tahun 2014 6 Februari 2014 10 Februari 2014	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (LN No.26)	LL : 6 Hal.	
6	No.6 Tahun 2014 6 Februari 2014 10 Februari 2014	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian. (LN No.27)	LL : 7 Hal.	
7	No.7 Tahun 2014 6 Pebruari 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Gov. Of The Rep.Of Indonesia & The Government Of The Oriental Rep. Of Uruguay On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Official, Or Service Passports (LN No.18)	LL : 21 Hal.	
8	No.8 Tahun 2014 6 Pebruari 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Bolivarian Venezuela mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (agreement Between The Gov. Of The Bolivarian Rep. Of Venezuela On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports (LN No.19)	LL : 21 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
9	No.9 Tahun 2014 6 Pebruari 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Polandia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Gov. Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports. (LN No.20)	LL : 4 Hal.	
10	No.10 Tahun 2014 10 Pebruari 2014	Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang). (LN No.21)	LL : .. Hal.	
11	No.11 Tahun 2014 10 Pebruari 2014	Susunan, Kedudukan, Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.	LL : .. Hal.	
12	No.12 Tahun 2014 10 Pebruari 2014	Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga.	LL : .. Hal.	
13	No.13 Tahun 2014 10 Pebruari 2014	Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara. (LN No.24)	LL : 5 Hal.	
14	No.14 Tahun 2014 10 Pebruari 2014	Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden No.24 Th.2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselom I Kementerian Negara. (LN No.25)	LL : 13 Hal.	
15	No.15 Th.2014 12 Februari 2014 14 Februari 2014	Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia. (LN No.34)	LL: 9 Hal.	
16	No.16 Tahun 2014 18 Pebruari 2014 21 Pebruari 2014	Pencabutan Perpres No.105 Th.2013 Ttg Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu. (LN No.39)	LL : 3 Hal.	
17	No.17 Tahun 2014 18 Pebruari 2014 21 Pebruari 2014	Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung. (LN No.40)	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
18	No.18 Tahun 2014 7 Maret 2014 11 Maret 2014	Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial. (LN No.44)	LL : 18 Hal.	
19	No.19 Tahun 2014 11 Maret 2014 13 Maret 2014	.Pengesahan The Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat Of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs Fisheries And Food Security (persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan). (LN No.49)	LL : 4 Hal.	
20	No.20 Tahun 2014 11 Maret 2014 13 Maret 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Payment Of Dutch Social Insurance Benefits In Indonesia). (LN No.50)	LL : 4 Hal.	
21	No.21 Tahun 2014 13 Maret 2014 17 Maret 2014	Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia Dan Uni Eropa Tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, Dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa (voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The European Union On Forest Law Enforcement, Governance And Trade In Timber Product Into The European Union). (LN No.51)	LL : 4 Hal.	
22	No.22 Tahun 2014 1 April 2014	Pendirian Universitas Sembilan Belas November Koala. (LN No.62)	LL : 3 Hal.	
23	No.23 Tahun 2014 1 April 2014	Pendirian Universitas Tidar. (LN No.63)	LL : 3 Hal.	
24	No.24 Tahun 2014 1 April 2014	Pendirian Universitas Siliwangi. (LN No.64)	LL : 3 Hal.	
25	No.25 Tahun 2014 1 April 2014	Pendirian Universitas Teuku Umar. (LN No.65)	LL : 3 Hal.	
26	No.26 Tahun 2014 14 April 2014 16 April 2014	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. (LN No.77)	LL : 6 Hal.	
27	No.27 Tahun 2014 17 April 2014	Jaringan Informasi Geospasial Nasional. (LN No.78)	LL : 13 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No.28 Tahun 2014 21 April 2014	Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Rep. Of China (protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan Barang Sari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China). (LN No.79)	LL : 60 Hal.	
29	No.29 Tahun 2014 21 April 2014	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (LN No.80)	LL : 18 Hal.	
30	No.30 Tahun 2014 21 April 2014	Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Right Between Asean Capital Cities (protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara Asean) Dan Protocol 6 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Right Between Asean Capitol Cities (protokol 6 Menegenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatasantara Ibukota Negara Asean) (LN No.85)	LL : 26 Hal.	
31	No.31 Tahun 2014 21 April 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Demokratik Timor-leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-leste On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports). (LN No.86)	LL : 15 Hal.	
32	No.32 Tahun 2014 21 April 2014	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. (LN No.81)	LL : 13 Hal.	
33	No.33 Tahun 2014 21 April 2014	Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media. (LN No.82)	LL : 5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
34	No.34 Tahun 2014 23 April 2014 24 April 2014	Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health / Convention 187, 2006 (konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja / Konvensi 187, 2006). (LN No.89)	LL : 3 Hal.	
35	No.35 Tahun 2014 23 April 2014 24 April 2014	Perubahan Akademi Meteorologi Dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika. (LN No.90)	LL : 6 Hal.	
36	No.36 Tahun 2014 23 April 2014 24 April 2014	Dokter Kepresidenan. (LN No.91)	LL : 6 Hal.	
37	No.37 Tahun 2014 23 April 2014	Pengesahan Protocol To Implement The Sevent Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Utk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa). (LN No.87)	LL :106 Hal.	
38	No.38 Tahun 2014 21 April 2014	Pengesahan Final Acts Of The World Radiocommunication Conference, Geneva 2012 (akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012). (LN No.88)	LL : 4 Hal.	
39	No.39 Tahun 2014 23 April 2014 24 April 2014	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. (LN No.93)	LL : 114 Hal.	
40	No.40 Tahun 2014 24 April 2014	Perubahan Atas Perpres No.71 Th.2012 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (LN No.94)	LL : 4 Hal.	
41	No.41 Tahun 2014 21 April 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (LN No.95)	LL : 10 Hal.	
42	No.42 Tahun 2014 9 Mei 2014 14 Mei 2014	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.32 Th.2010 Tentang Komite Inovasi Nasional. (LN No.97)	LL : 3 Hal.	Dicabut dg Perpres No.164 Th.2014
43	No.43 Tahun 2014 16 Mei 2014 17 Mei 2014	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. (LN No.101)	LL : 1817 Hal.	Diubah dg Perpres No.3 Th.2015

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
44	No.44 Tahun 2014 19 Mei 2014	Pemberian Penghargaan Olahraga. (LN No.102)	LL : 14 Hal.	
45	No.45 Tahun 2014 19 Mei 2014 20 Mei 2014	Perubahan Ketiga Atas Perpres No.71/2006 ttg Penugasan Kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (persero) Utk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yg Menggunakan Batubara. (LN No.103)	LL : 7 Hal.	
46	No.46 Tahun 2014 20 Mei 2014	Susunan Organisasi & Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan,Penggantian & Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. (LN No.104)	LL : 29 Hal.	
47	No.47 Tahun 2014 26 Mei 2014 3 Juni 2014	Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral. (LN No.117)	LL : 5 Hal.	
48	No.48 Tahun 2014 26 Mei 2014 3 Juni 2014	Perubahan atas Perpres No.32 Th.2011 ttg Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. (LN No.118)	LL : 481 Hal.	
49	No.49 Tahun 2014 30 Mei 2014 3 Juni 2014	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M (LN No.119)	LL : 6 Hal.	
50	No.50 Tahun 2014 26 Mei 2014 3 Juni 2014	Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia. (LN No.120)	LL : 9 Hal.	
51	No.51 Tahun 2014 30 Mei 2014 3 Juni 2014	Perubahan atas Perpres No.45 Th.2011 ttg Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. (LN No.121)	LL : 14 Hal.	
52	No.52 Tahun 2014 2 Juni 2014 4 Juni 2014	Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. (LN No.122)	LL : 7 Hal.	
53	No.53 Tahun 2014 2 Juni 2014 4 Juni 2014	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.39 Th.2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. (LN No.127)	LL : 3 Hal.	
54	No.54 Tahun 2014 4 Juni 2014	Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of Southeast Asean Nations & The People's Rep. Of China (protokol Ketiga Utk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa2 Asia Tenggara & Rep.Rakyat China) (LN No.128)	LL : 19 Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
55	No.55 Tahun 2014 4 Juni 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Independent State Of Papua New Guenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service passports. (LN No.129)	LL : 16 Hal.	
56	No.56 Tahun 2014 11 Juni 2014 20 Juni 2014	Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara. (LN No.135)	LL : .. Hal.	
57	No.57 Tahun 2014 11 Juni 2014 20 Juni 2014	Rencana Tata Ruang Pulau Papua. (LN No.136)	LL : 605 Hal.	
58	No.58 Tahun 2014 11 Juni 2014 20 Juni 2014	Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya. (LN No.137)	LL : 82 Hal.	
59	No.59 Tahun 2014 11 Juni 2014 13 Juni 2014	Pengesahan Protocol To Implement The Eighth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa). (LN No.131)	LL : 4 Hal.	
60	No.60 Tahun 2014 11 Juni 2014 13 Juni 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Rep. Moldova ttg Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment of The Rep. of Indonesia And The Goverment of Rep. of Moldova On Visa Exemption For Holders of Diplomatic And Service Passport). (LN No.132)	LL : 4 Hal.	
61	No.61 Tahun 2014 11 Juni 2014 13 Juni 2014	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Perancis mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Accord entre Le Gouver-nement de La République d'Indonesié et Le Gouvernement de La République Française sur L'Exemption de Visas de Court Sejour pour Les Titulaires d'un Passeport Diplomatique ou de Service) (LN No.133)	LL : 4 Hal.	
62	No.62 Tahun 2014 11 Juni 2014	Pengesahan Statute Of The International Renewable Energy Agency (statuta Badan Energy Terbarukan Internasional). (LN No.138)	LL : 61 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
63	No.63 Tahun 2014 30 Juni 2014 1 Juli 2014	Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataaan. (LN No.140)	LL : 5 Hal.	
64	No.64 Tahun 2014 3 Juli 2014 4 Juli 2014	Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan. (LN No.147)	LL : 6 Hal.	
65	No.65 Tahun 2014 30 Juni 2014	Pengesahan International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (konvensi Internasional Mengenai Tanggung Jawab Sipil Thdp Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001) (LN No.148)	LL : 23 Hal.	
66	No.66 Tahun 2014 3 Juli 2014 4 Juli 2014	Pengesahan International Convention On The Control Of Harmful Anti-fouling System On Ship, 2001 (konvensi International Tentang Pengendalian Sistem - Sistem Anti Teritip Berbahaya Pada Kapal - Kapal, 2001). (LN No.149)	LL : 37 Hal.	
67	No.67 Tahun 2014 3 Juli 2014 4 Juli 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Costa Rica On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passport) (LN No.150)	LL : 13 Hal.	
68	No.68 Tahun 2014 3 Juli 2014 4 Juli 2014	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu; (LN No.151)	LL : 5 Hal.	
69	No.69 Tahun 2014 7 Juli 2014 8 Juli 2014	Pengesahan International Convention On The Simplification And Harmonization And Harmonization Of Customs Procedures, As Amended (konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan Dan Harmonisasi Prosedur Pabean, Sebagaimana Telah Diubah) Beserta Lampiran Umumnya. (LN No.155)	LL : 66 Hal.	
70	No.70 Tahun 2014 10 Juli 2014 11 Juli 2014	Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi. (LN No.162)	LL : 9 Hal.	
71	No.71 Tahun 2014 10 Juli 2014 11 Juli 2014	Pengesahan Protocol To The Asean Chapter On Dispute Settlement Mechanism (protokol Piagam Asean Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa) (LN No.161)	LL : 66 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
72	No.72 Tahun 2014 10 Juli 2014 11 Juli 2014	Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. (LN No.162)	LL : 9 Hal.	
73	No.73 Tahun 2014 10 Juli 2014	Penyesuaian gaji pokok PNS menurut PP No.22 Th.2013 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No.34 Th.2014. (LN No.158)	LL : 12 Hal.	
74	No.74 Tahun 2014 10 Juli 2014	Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan. (LN No.159)	LL : 12 Hal.	
75	No.75 Tahun 2014 17 Juli 2014 21 Juli 2014	Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (LN No.164)	LL : 18 Hal.	
76	No.76 Tahun 2014 17 Juli 2014 21 Juli 2014	Pengelola Portal Indonesia National Sibgle Window. (LN No.165)	LL : 9 Hal.	
77	No.77 Tahun 2014 23 Juli 2014 24 Juli 2014	Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku. (LN No.177)	LL : 124 Hal.	
78	No.78 Tahun 2014 24 Juli 2014	Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah RI dalam Penanganan Gugatan Arbitrase di International Center For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Nusa Tenggara Partnership B.v. Dan Pt.Newmont Nusa Tenggara Kpd Pem. RI & Pengajuan Gugatan Arbitrase Pem. RI Kepada Pt. Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law. (LN No.179)	LL : 7 Hal.	
79	No.79 Tahun 2014 7 Agustus 2014 8 Agustus 2014	Peraturan Pelaksanaan UU No.15 Th.2012 ttg Veteran Republik Indonesia. (LN No.187)	LL : 14 Hal.	
80	No.80 Tahun 2014 12 Agustus 2014 13 Agustus 2014	Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden No.24 Th.2010 ttg Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (LN No.189)	LL : 5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
81	No.81 Tahun 2014 13 Agustus 2014 22 Agustus 2014	Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya. (LN No.191)	LL : 455 Hal.	
82	No.82 Tahun 2014 21 Agustus 2014 22 Agustus 2014	Pengesahan Aggreement On The Establishment Of The Global Green Growth Institute (persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau). (LN No.192)	LL : 3 Hal.	
83	No.83 Tahun 2014 22 Agustus 2014 25 Agustus 2014	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir. (LN No.193)	LL : 10 Hal.	
84	No.84 Tahun 2014 25 Agustus 2014 26 Agustus 2014	Perubahan Kedua atas Perpres No.54/2009 ttg Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. (LN No.194)	LL : 3 Hal.	
85	No.85 Tahun 2014 25 Agustus 2014 26 Agustus 2014	Hak Keuangan bagi Deputi dan Tenaga Profesional pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan. (LN No.195)	LL : 2 Hal.	
86	No.86 Tahun 2014 25 Agustus 2014 26 Agustus 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung Menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. (LN No.196)	LL : 3 Hal.	
87	No.87 Tahun 2014 1 September 2014 3 September 2014	Peraturan Pelaksanaan UU No.12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Per-UU-an. (LN No.199)	LL : 95 Hal.	
88	No.88 Tahun 2014 1 September 2014 3 September 2014	Pencabutan Keputusan Presiden No.55 Th.1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata. (LN No.200)	LL : 4 Hal.	
89	No.89 Tahun 2014 1 September 2014 3 September 2014	Pengesahan Convention On Temporary Admission (konvensi Tentang Pemasukan Sementara). (LN No.201)	LL : 8 Hal.	
90	No.90 Tahun 2014 1 September 2014 3 September 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Kelompok Bank Pembangunan Islam Mengenai Pendirian Kantor Perwakilan Kelompok Bank Pembangunan Islam Di Indonesia (agreement Between The Gov. Of The Rep. Of Indonesia And The Islamic Development Bank Group Concerning The Establishment Of A Country Gateway Office Of The Islamic Development Bank Group In Indonesia) (LN No.202)	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
91	No.91 Tahun 2014 1 September 2014 3 September 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Jersey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (agreement Between The Government Of The Rep. Of Indonesia And The Government Of Jersey For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters) (LN No.203)	LL : 4 Hal.	
92	No.92 Tahun 2014 1 September 2014 3 September 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Guernsey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (agreement Between The Gov. Of The Republic Of Indonesia And The States Of Guernsey For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters) (LN No.204)	LL : 4 Hal.	
93	No.93 Tahun 2014 1 September 2014 3 September 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Isle Of Man Utk Pertukaran Informasi Berkenaan dgn Keperluan Perpajakan (agreement Between The Government Of The Rep. Of Indonesia & The Government Of Isle Of Man For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters. (LN No.205)	LL : 4 Hal.	
94	No.94 Tahun 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The United Mexican States On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/service Passports. (LN No.210)		
95	No.95 Tahun 2014 12 September 2014 16 September 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Bermuda (sebagaimana Telah Diizinkan Oleh Pemerintah Kerajaan Inggris Raya Dan Irlandia Utara) Untuk Pertukaraan Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan. (LN No.211)	LL : 4 Hal.	
96	No.96 Tahun 2014 15 September 2014 18 September 2014	Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019. (LN No.220)	LL : 43 Hal.	
97	No.97 Tahun 2014 15 September 2014 18 September 2014	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (LN No.221)	LL : 23 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
98	No.98 Tahun 2014 15 September 2014 18 September 2014	Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (LN No.222)	LL : 7 Hal.	
99	No.99 Tahun 2014 15 September 2014 18 September 2014	Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.71 Th.2012 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (LN No.223)	LL : 5 Hal.	
100	No.100 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. (LN No.224)	LL : 10 Hal.	
101	No.101 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.12 Th.2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. (LN No.225)	LL : 7 Hal.	
102	No.102 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bid. Perekonomian. (LN No.226)	LL : 7 Hal.	
103	No.103 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (LN No.227)	LL : 7 Hal.	
104	No.104 Tahun 2014 17 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (LN No.228)	LL : 7 Hal.	
105	No.105 Tahun 2014 17 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (LN No.229)	LL : 7 Hal.	
106	No.106 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (LN No.230)	LL : 7 Hal.	
107	No.107 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (LN No.231)	LL : 6 Hal.	
108	No.108 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. (LN No.232)	LL : 6 Hal.	
109	No.109 Tahun 2014 17 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (LN No.233)	LL : 6 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
110	No.110 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (LN No.234)	LL : 6 Hal.	
111	No.111 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial. (LN No.235)	LL : 6 Hal.	
112	No.112 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (LN No.236)	LL : 6 Hal.	
113	No.113 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Rep, Indonesia. (LN No.237)	LL : 6 Hal.	
114	No.114 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (LN No.238)	LL : 6 Hal.	
115	No.115 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. (LN No.239)	LL : 6 Hal.	
116	No.116 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.87 Th.1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (LN No.240)	LL : 3 Hal.	
117	No.117 Tahun 2014 17 September 2014 18 September 2014	Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa. (LN No.241)	LL : 5 Hal.	
118	No.118 Tahun 2014 18 September 2014 25 September 2014	Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara. (LN No.242)	LL : 11 Hal.	
119	No.119 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Universitas Timor. (LN No.248)	LL : 3 Hal.	
120	No.120 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. (LN No.249)	LL : 4 Hal.	
121	No.121 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. (LN No.250)	LL : 4 Hal.	
122	No.122 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. (LN No.251)	LL : 4 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
123	No.123 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang. (LN No.252)	LL : 4 Hal.	
124	No.124 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Institut Teknologi Sumatera. (LN No.253)	LL : 3 Hal.	
125	No.125 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Institut Teknologi Kalimantan. (LN No.254)	LL : 3 Hal.	
126	No.126 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.  (LN No.255)	LL : 3 Hal.	
127	No.127 Tahun 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014	Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. (LN No.256)	LL : 3 Hal.	
128	No.128 Tahun 2014 16 Oktober 2014	Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa - Bangsa Di Republik Afrika Tengah. (LN No.265)	LL : 6 Hal.	
129	No.129 Tahun 2014 16 Oktober 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. (LN No.268)	LL : 4 Hal.	
130	No.130 Tahun 2014 16 Oktober 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (LN No.269)	LL : 4 Hal.	
131	No.131 Tahun 2014 16 Oktober 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. (LN No.270)	LL : 6 Hal.	
132	No.132 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. (LN No.278)	LL : 6 Hal.	
133	No.133 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. (LN No.271)	LL : 6 Hal.	
134	No.134 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Atas Peraturan Presiden No.60 Th.2012 Tentang Wakil Menteri. (LN No.272)	LL : 3 Hal.	
135	No.135 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Ketuhuh Atas Perpres No.24/2010 ttg Kedudukan, Tugas & Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (LN No.273)	LL : 6 Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
136	No.136 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Program Pengembangan Pesawat Tempur IF- X. (LN No.274)	LL : 11 Hal.	
137	No.137 Tahun 2014 17 Oktober 2014	ASEAN Agreement on Customs (Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanan) (LN No.275)	LL : 6 Hal.	
138	No.138 Tahun 2014 17 Oktober 2014	 (LN No.231)	LL : 6 Hal.	
139	No.139 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. (LN No.280)	LL : 5 Hal.	
140	No.140 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda. (LN No.281)	LL : 6 Hal.	
141	No.141 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo. (LN No.282)	LL : 6 Hal.	
142	No.142 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember. (LN No.283)	LL : 5 Hal.	
143	No.143 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. (LN No.284)	LL : 5 Hal.	
144	No.144 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. (LN No.285)	LL : 5 Hal.	
145	No.145 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari. (LN No.286)	LL : 5 Hal.	
146	No.146 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa. (LN No.287)	LL : 5 Hal.	
147	No.147 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado. (LN No.288)	LL : 5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
148	No.148 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pelindungan, Penelitian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Situs Gunung Padang. (LN No.289)	LL : 6 Hal.	
149	No.149 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2008 ttg Dewan Sumber Daya Air. (LN No.276)	LL : 8 Hal.	
150	No.150 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.33 Th.2010 ttg Dewan Nasional & Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus. (LN No.277)	LL : 4 Hal.	
151	No.151 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia. (LN No.290)	LL : 3 Hal.	
152	No.152 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie. (LN No.291)	LL : 3 Hal.	
153	No.153 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Grand Design Pembangunan Kependudukan. (LN No.310)	LL : 15 Hal.	
154	No.154 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. (LN No.311)	LL : 10 Hal.	
155	No.155 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan Universitas Negeri Papua Menjadi Universitas Papua. (LN No.312)	LL : 6 Hal.	
156	No.156 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. (LN No.313)	LL : 11 Hal.	
157	No.157 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Perubahan atas Peraturan Presiden No.106 Th.2007 ttg Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (LN No.314)	LL : 10 Hal.	
158	No.158 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pengesahan Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 25th Doha Congress, Qatar 2012 (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 di Doha, Qatar 2012) (LN No.315)	LL : 594 Hal.	
159	No.159 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pengesahan mengesahkan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi ttg Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan). (LN No.316)	LL : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
160	No.160 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI & Pem. Georgia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Rep. of Indonesia & the Government of Georgia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports). (LN No.317)	LL : 20 Hal.	
161	No.161 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Persetujuan antara Pem. RI & Pemerintah Rep.Fiji Pengesahan mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement between the Gov. of the Rep. of Indonesia and the Gov. of the Rep. of Fiji on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah RI & Pemerintah Republik Fiji. (LN No.318)	LL : 15 Hal.	
162	No.162 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Rincian APBN TA.2015 (LN No.334)	LL : 18 Hal.	
163	No.163 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pembubaran Komite Ekonomi Nasional. (LN No.335)	LL : 3 Hal.	
164	No.164 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pembubaran Komite Inovasi Nasional. (LN No.336)	LL : 4 Hal.	
165	No.165 Tahun 2014 27 Oktober 2014	Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. (LN No.339)	LL : 19 Hal.	
166	No.166 Tahun 2014 27 Oktober 2014	 (LN No.313)	LL : 11 Hal.	
167	No.167 Tahun 2014 18 Nopember 2014	Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota. (LN No.346)	LL : 11 Hal.	
168	No.168 Tahun 2014 19 Nopember 2014	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. (LN No.354)	LL : 6 Hal.	
169	No.169 Tahun 2014 19 November 2014	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. (LN No.355)	LL : 6 Hal.	
170	No.170 Tahun 2014 19 November 2014	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. (LN No.356)	LL : 6 Hal.	
171	No.171 Tahun 2014 19 November 2014	Penyuluh Kehutanan. (LN No.357)	LL : 6 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
172	No.172 Tahun 2014 28 November 2014 1 Desember 2014	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No.54 Th.2010 ttg Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. (LN No.368 & TLN No.5642)	LL : 12 Hal.	
173	No.173 Tahun 2014 1 Desember 2014 3 Desember 2014	Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tentang Kerja Sama Ilmiah Dan Teknologi (memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Scientific And Technological Cooperation). (LN No.370)	LL : 26 Hal.	
174	No.174 Tahun 2014 1 Desember 2014 3 Desember 2014	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan (oecd) Tentang Pendirian Kantor Perwakilan Oecd Di Indonesia (agreement Between The Government Of The Economic Co-operation And Development (oecd) On The Establishment Of The Oecd Country Office In Indonesia). (LN No.371)	LL : 19 Hal.	
175	No.175 Tahun 2014 1 Desember 2014 3 Desember 2014	Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. (LN No.372)	LL : 6 Hal.	
176	No.176 Tahun 2014 4 Desember 2014 5 Desember 2014	Pembubaran Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional RI, Lembaga Koordinasi & Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Dan Dewan Gula Indonesia. (LN No.373)	LL : 10 Hal.	
177	No.177 Tahun 2014 27 Oktober 2014	(LN No.37..)	LL : .. Hal.	
178	No.178 Tahun 2014 8 Desember 2014 9 Desember 2014	Badan Keamanan Laut (LN No.380)	LL : 17 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
179	No.179 Tahun 2014 8 Desember 2014 10 Desember 2014	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (LN No.382)	LL : 998 Hal.	
180	No.180 Tahun 2014 18 Desember 2014	Perubahan atas Peraturan Presiden No.79 Th.2011 ttg Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia. (LN No.384)	LL : 9 Hal.	
181	No.181 Tahun 2014 18 Desember 2014	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. (LN No.385)	LL : 3 Hal.	
182	No.182 Tahun 2014 22 Desember 2014	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Belarus mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation). (LN No.386)	LL : 12 Hal.	
183	No.183 Tahun 2014 22 Desember 2014	Pengesahan Persetujuan Kerja Sama antara RI dan Rep. Portugal di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Media Massa (Cooperation Agreement Between the Rep. of Indonesia and the Portuguese Rep. in the Field of Education, Science & Technology , Culture, Tourism, Youth, Sports and Mass Media), sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi RI dan Republik Portugal. (LN No.387)	LL : 13 Hal.	
184	No.184 Tahun 2014 22 Desember 2014	Pengesahan Memorandum of Understanding Between The Government of The Member States of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and The Government of People's Republic of China on Health Cooperation (Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Republik Rakyat Tiongkok dalam Kerja Sama Kesehatan). (LN No.388)	LL : 11 Hal.	
185	No.185 Tahun 2014 22 Desember 2014	Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi. (LN No.389)	LL : 29 Hal.	
186	No.186 Tahun 2014 23 Desember 2014 24 Desember 2014	Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. (LN No.390)	LL : 14 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
187	No.187 Tahun 2014 23 Desember 2014 24 Desember 2014	Pengesahan Agreement on Cultural Cooperation between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation (Persetujuan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Federasi Rusia). (LN No.391)	LL : 14 Hal.	
188	No.188 Tahun 2014 24 Desember 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. (LN No.392)	LL : 9 Hal.	
189	No.189 Tahun 2014 24 Desember 2014	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. (LN No.393)	LL : 9 Hal.	
190	No.190 Tahun 2014 31 Desember 2014	Unit Staf Kepresidenan. (LN No.398)	LL : 8 Hal.	Dicabut dg Perpres No.26 Th.2015
191	No.191 Tahun 2014 31 Desember 2014	Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. (LN No.399)	LL : 22 Hal.	
192	No.192 Tahun 2014 31 Desember 2014	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (LN No.400)	LL : 29 Hal.	
193	No.193 Tahun 2014 31 Desember 2014	Perubahan Keempat Atas Perpres No.71-2006 ttg Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. (LN No.401)	LL : 6 Hal.	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2014 20 Januari 2014	DewanTeknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.	LL : 9 Hal.	
2	No.2 Tahun 2014 22 Januari 2014	Penambahan Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, & Wilayah Sungai Jratunseluna.	LL : 4 Hal.	
3	No.3 Tahun 2014 24 Januari 2014	Hari Ikan Nasional.	LL : 3 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No.4 Tahun 2014 24 Januari 2014	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kab.Mojokerto, Kab. Garut, Kab. Kuantan Singingi, Kab.Bojonegoro, dan Kota Tomohon.	LL : 3 Hal.	
5	No.5 Tahun 2014 24 Januari 2014	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kab.Bangka, Kab. Badung, Kab. Minahasa, Kab.Gowa, Kab. Tanjung Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, & Kota Sungai Penuh.	LL : 3 Hal.	
6	No.6 Tahun 2014 6 Pebruari 2014	Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke.	LL : 4 Hal.	
7	No.7 Tahun 2014 7 Februari 2014	Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku Utara Tahun 2014.	LL : 3 Hal.	
8	No.8 Tahun 2014 18 Februari 2014	Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia Di Kampus Universitas Al-azhar, Kairo, Mesir.	LL : 3 Hal.	
9	No.9 Tahun 2014 18 Februari 2014	Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembelian Dan Renovasi Masjid/indonesian Muslim Association In America (imaam) Center Di Maryland, Amerika Serikat.	LL : 3 Hal.	
10	No.10 Tahun 2014 28 Februari 2014	Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014.	LL : .. Hal.	
11	No.11 Tahun 2014 10 Maret 2014	Pembentukan Kejaksaan Negeri Bungku, Kejaksaan Negeri Pangururan, Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Kwandang, Kejaksaan Negeri Gunung Tua, Dan Kejaksaan Negeri Morotai Selatan.	LL : 8 Hal.	
12	No.12 Tahun 2014 12 Maret 2014	Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor Se-06/pres.kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967.	LL : 4 Hal.	
13	No.13 Tahun 2014 26 Maret 2014	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Open Goverment Partnership.	LL : 3 Hal.	
14	No.14 Tahun 2014 3 April 2014	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, & DPRD Th.2014 Sebagai Hari Libur Nasional.	LL : 3 Hal.	
15	No.15 Tahun 2014 11 April 2014	Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014.	LL : 5 Hal.	
16	No.16 Tahun 2014 16 April 2014	Pembentukan Kejaksaan Negeri Martapura dan Kejaksaan Negeri Selat Panjang.	LL : 5 Hal.	



NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
17	No.17 Tahun 2014 2 Mei 2014	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
18	No.18 Tahun 2014 20 Mei 2014	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.	LL : .. Hal.	
19	No.19 Tahun 2014 20 Mei 2014	Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014.	LL : 3 Hal.	
20	No.20 Tahun 2014 20 Mei 2014	Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014.	LL : 3 Hal.	
21	No.21 Tahun 2014 20 Mei 2014	Penugasan Wakil Presiden Malaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
22	No.22 Tahun 2014 2 Juni 2014	Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dalam Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia.	LL : 3 Hal.	
23	No.23 Tahun 2014 11 Juni 2014	Penugasan Wakil Presiden Malaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
24	No.24 Tahun 2014 30 Juni 2014	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden Th.2014 Sebagai Hari Libur Nasional.	LL : 3 Hal.	
25	No.25 Tahun 2014 2 Juni 2014	Perubahan Atas Keputusan Presiden No.25 Th.2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA.2014.	LL : .. Hal.	
26	No.26 Tahun 2014 2 Juni 2014	Panitia Nasional Penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Tahun 2014 Di Provinsi Sumatera Barat.	LL : 10 Hal.	
27	No.27 Tahun 2014 21 Juli 2014	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pesaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sibolga, Dan Kota Gorontalo.	LL : .. Hal.	
28	No.28 Tahun 2014 21 Juli 2014	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kab. Karangasem, Kab. Labuhanbatu, Kab. Kubu Raya, Kab. Jember, Kab. Bangkalan, Kab. Solok, Kab. Bungo, Kab. Mukomuko, Kab. Merangin, Kab. Tebo, Kab. Banyuwangi, Kota Gunungsitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, & Kota Pasuruan.	LL : 3 Hal.	
29	No.29 Tahun 2014 23 Juli 2014	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.	LL : 5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
30	No.30 Tahun 2014 10 Agustus 2014	Hari Veteran Nasional.	LL : 3 Hal.	
31	No.31 Tahun 2014 22 Agustus 2014	Penugasan Wakil Presiden Malaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
32	No.32 Tahun 2014 25 Agustus 2014	Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia.	LL : 5 Hal.	
33	No.33 Tahun 2014 25 Agustus 2014	Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah.	LL : 5 Hal.	
34	No.34 Tahun 2014 25 Agustus 2014	Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara.	LL : 5 Hal.	
35	No.35 Tahun 2014 25 Agustus 2014	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : .. Hal.	
36	No.36 Tahun 2014 1 September 2014	Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The International Committee Of Military Medicine.	LL : 40 Hal.	
37	No.37 Tahun 2014 1 September 2014	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations.	LL : 7 Hal.	
38	No.38 Tahun 2014 12 September 2014	Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Forum of Independent Audit Regulators.	LL : 87 Hal.	
39	No.39 Tahun 2014 15 September 2014	Hari Keluarga Nasional.	LL : .. Hal.	
40	No.40 Tahun 2014 17 September 2014	Penugasan Wakil Presiden Malaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
41	No.41 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Panitia Nasional Penyelenggaraan Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015.	LL : 13 Hal.	
42	No.42 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Sekretaris Jendral Kementerian Pertahanan.	LL : 4 Hal.	
43	No.43 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional.	LL : .. Hal.	
44	No.44 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Dewan Kawasan-kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara.	LL : .. Hal.	
45	No.45 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan.	LL : .. Hal.	
46	No.46 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Dewan Kawasan-kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat.	LL : .. Hal.	
47	No.47 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero).	LL : .. Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
48	No.48 Tahun 2014 17 Oktober 2014	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Tolitoli, Kab. Barito Selatan, Kab.Sukamara, Kab.Sidoarjo, Kab.Jepara, Kab.Agam, & Kota Pariaman.	LL : .. Hal.	
49	No.49 Tahun 2014 5 November 2014	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
50	No.50 Tahun 2014 2 Desember 2014	Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Masjid Di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afganistan.	LL : 3 Hal.	
51	No.51 Tahun 2014 9 Desember 2014	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden.	LL : 4 Hal.	
52	No.52 Tahun 2014 9 Desember 2014	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 2 Hal.	
	<b>INPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2014 28 Februari 2014	Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.	LL : 4 Hal.	
2	No.2 Tahun 2014 28 Februari 2014	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.	LL : 5 Hal.	
3	No.3 Tahun 2014 23 Maret 2014	Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.	LL : 3 Hal.	
4	No.4 Tahun 2014 28 Februari 2014	Langkah-langkah Penghematan & Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA.2014.	LL :5 Hal.	
5	No.5 Tahun 2014 11 Juni 2014	Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.	LL : 12 Hal.	
6	No.6 Tahun 2014 1 September 2014	Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations.	LL : 6 Hal.	
7	No.7 Tahun 2014 3 Nopember 2014	Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.	LL :5 Hal.	
8	No.8 Tahun 2014 2014		LL :.. Hal.	
9	No.9 Tahun 2014 31 Desember 2014	Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.	LL :5 Hal.	

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>TAHUN 2015</b>			
	<b>PERPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2015 2 Januari 2015 5 Januari 2015	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. (LN No.2)	LL : 7 Hal.	
2	No.2 Tahun 2015 8 Januari 2015	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019. (LN No.3)	LL : 22 Hal.	
3	No.3 Tahun 2015 8 Januari 2015	Perubahan atas Peraturan Presiden No.43 Th.2014 ttg Rencana Kerja Pemerintah Th.2015. (LN No.4)	LL : 37 Hal.	
4	No.4 Tahun 2015 16 Januari 2015	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. (LN No.5 & TLN No.5655)	LL : 54 Hal.	
5	No.5 Tahun 2015 19 Januari 2015 20 Januari 2015	Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. (LN No.6)	LL : 24 Hal.	
6	No.6 Tahun 2015 20 Januari 2015	Badan Ekonomi Kreatif. (LN No.7)	LL : 19 Hal.	
7	No.7 Tahun 2015 21 Januari 2015	Organisasi Kementerian Negara. (LN No.8)	LL : 47 Hal.	
8	No.8 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (LN No.11)	LL : 22 Hal.	
9	No.9 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan. (LN No.10)	LL : 25 Hal.	
10	No.10 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.  (LN No.11)	LL : 18 Hal.	
11	No.11 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Dalam Negeri. (LN No.12)	LL : 29 Hal.	
12	No.12 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (LN No.13)	LL : 25 Hal.	
13	No.13 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (LN No.14)	LL : 20 Hal.	

---

NO.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No.14 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (LN No.15)	LL : 20 Hal.	
15	No.15 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (LN No.16)	LL : 24 Hal.	
16	No.16 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (LN No.17)	LL : 38 Hal.	
17	No.17 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (LN No.18)	LL : 22 Hal.	
18	No.18 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Ketenagakerjaan. (LN No.19)	LL : 20 Hal.	
19	No.19 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Kementerian Pariwisata. (LN No.20)	LL : 19 Hal.	
20	No.20 Tahun 2015 21 Januari 2015 23 Januari 2015	Badan Pertanahan Nasional. (LN No.21)	LL : 10 Hal.	
21	No.21 Tahun 2015 2 Februari 2015 3 Februari 2015	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (LN No.26)	LL : 11 Hal.	
22	No.22 Tahun 2015 2 Februari 2015 3 Februari 2015	Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009. (LN No.27)	LL : 7 Hal.	
23	No.23 Tahun 2015 12 Februari 2015 13 Februari 2015	Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (LN No.29)	LL : 13 Hal.	
24	No.24 Tahun 2015 23 Februari 2015 24 Februari 2015	Kementerian Sekretariat Negara. (LN No.32)	LL : 48 Hal.	
25	No.25 Tahun 2015 23 Februari 2015 24 Februari 2015	Sekretariat Kabinet. (LN No.33)	LL : 26 Hal.	

26	No.26 Tahun 2015 23 Februari 2015 24 Februari 2015	Kantor Staf Presiden. (LN No.34)	LL : 15 Hal.	
	<b>KEPPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2015 29 Januari 2015	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Dan Kabupaten Kapas.	LL : 5 Hal.	
2	No.2 Tahun 2015 4 Februari 2015	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	LL : 9 Hal.	
3	No.3 Tahun 2015 4 Februari 2015		LL : 9 Hal.	
4	No.4 Tahun 2015 4 Februari 2015		LL : 9 Hal.	
5	No.5 Tahun 2015 11 Februari 2015	Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur.	LL : 5 Hal.	
6	No.6 Tahun 2015 23 Februari 2015	Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial.	LL : 5 Hal.	
	<b>INPRES</b>			
1	No.1 Tahun 2015 28 Februari 2015	Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	LL : 5 Hal.	
2	No.2 Tahun 2015 29 Januari 2015	Langkah-langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA.2015	LL : 5 Hal.	